LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2024

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LPPD Tahun 2024. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, memberikan tantangan serta peluang bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi salah satu dari 20 kota global terbaik di dunia (*Top 20 Global City*) pada 2045. Inovasi-inovasi diciptakan untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Bentang Harapan JakASA, gerakan kolaboratif yang mengundang semua pihak untuk bersama-sama menciptakan gambaran masa depan Jakarta yang lebih baik.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu laporan ini juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini, dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka menuju Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Februari 2025

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i
DAFTAR ISI…… ii
DAFTAR TABEL…… v
DAFTAR GAMBAR…… xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……..... I-1
1.1.1 Penjelasan Umum…….. I-1
A. Undang – Undang Pembentukan Daerah……..... I-1
B. Batas Geografis Wilayah……..... I-1
C. Jumlah Penduduk……..... I-8
D. Jumlah Kabupaten/Kota…… I-8
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan……..……. I-10
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah……..……. I-11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah……..…… I-15
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah……..…..... I-15
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah……..... I-25
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah……..... I-31
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan…….. I-39
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal……..…. I-41
BAB II CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Capaian Kinerja Makro……. II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia……..…….. II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan……..…… II-3
2.1.3 Angka Pengangguran……..…….. II-5
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi……..…… II-7
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita……..……... II-9
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan……..…….. II-10
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..…….. II-11
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)……..…… II-12
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan……..……. II-18
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah……..…. II-19
A. *Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja*……...…….. II-20
B. Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..…….. II-22
C. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya sesuai dengan dokumen RPD 2023-2026……..….. II-180
D. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja……..… II-184
E. Analisis efisiensi pengunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai……..……. II-191

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi……... III-1
3.1.1 Target Kinerja……. III-2
3.1.2 Realisasi..... III-5
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota……. III-13
3.3 Permasalahan dan Kendala……..... III-13
3.4 Saran dan Tindak Lanjut..... III-14
3.5 Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah…….. III-14
3.5.1 Target Kinerja……. III-15
3.5.2 Realisasi…….. III-20

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan……..……. IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar……. IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……. IV-2
4.1.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah……. IV-2
4.1.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-8
4.1.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-10
4.1.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-11
4.2 Urusan Kesehatan……..... IV-11
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar……..... IV-11
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……. IV-12
4.2.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Oleh Daerah…… IV-13
4.2.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-32
4.2.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-33
4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……. IV-40
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar……. IV-40
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……..... IV-42
4.3.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……. IV-43
4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-49
4.3.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-49
4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-50
4.4 Urusan Perumahan Rakyat…… IV-53
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar……. IV-53

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-54
4.4.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-55
4.4.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-62
4.4.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-64
4.4.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-65
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat…… IV-68
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar…… IV-68
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-69
4.5.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-69
4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-81
4.5.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-83
4.5.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-85
4.6 Urusan Sosial…… IV-88
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar…… IV-88
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-89
4.6.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……... IV-92
4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……...IV-108
4.6.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)……..IV-109
4.6.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-110
4.7 Program dan Kegiatan……IV-111
4.7.1 Urusan Pendidikan…… IV-111
4.7.2 Urusan Kesehatan……IV-143
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……..IV-146
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/ Kota……IV-160
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat…… IV-166
4.7.6 Urusan Sosial……IV-189

BAB V PENUTUP

Kesimpulan…….. V-1
Saran…….. V-1

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024……..…….	I-3
Tabel I-2	Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024…….	I-15
Tabel I-3	Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024……	I-16
Tabel I-4	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaha Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024…….	I-10
Tabel I-5	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..……...	I-10
Tabel I-6	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..….	I-12
Tabel I-7	Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan…….	I-27
Tabel I-8	Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan……..…	I-28
Tabel I-9	Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan…….	I-30
Tabel I-10	Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan…….	I-31
Tabel I-11	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..	I-40
Tabel II-1	Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta……..	II-1
Tabel II-2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Provinsi DKI Jakarta……..…	II-11
Tabel II-3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta……..…	II-17
Tabel II-4	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024…….	II-19
Tabel II-5	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja……..…….	II-21

Tabel II-6	Capaian IKU Indeks Kota Layak Huni…….……	II-25
Tabel II-7	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”……	II-25
Tabel II-8	Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan……..	II-28
Tabel II-9	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”…..…..……	II-29
Tabel II-10	Indikator Sasaran Tahun 2024.....	II-32
Tabel II-11	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024……..	II-33
Tabel II-12	Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2024……...	II-33
Tabel II-13	Target RPD.....	II-34
Tabel II-14	Faktor Keberhasilan.....	II-38
Tabel II-15	Faktor Penghambat.....	II-39
Tabel II-16	Rencana Aksi 2025.....	II-39
Tabel II-17	Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup……	II-42
Tabel II-18	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”…….....	II-42
Tabel II-19	Capaian IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca…….	II-46
Tabel II-20	Target RPD Indikator “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”……...	II-46
Tabel II-21	Capaian IKU Indeks Resiko Bencana……..	II-49
Tabel II-22	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten / Kota Tahun 2024……...	II-50
Tabel II-23	Indikator Kinerja Utama……..	II-56
Tabel II-24	Capaian IKU Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	II-57
Tabel II-25	Capaian RPD Tahun 2023-2026.....	II-61
Tabel II-26	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-61
Tabel II-27	Faktor Keberhasilan……	II-62
Tabel II-28	Faktor Penghambat.....	II-63
Tabel II-29	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-65
Tabel II-30	Komparasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional…….	II-68
Tabel II-31	Capaian Indikator Rasio Gini……	II-71

Tabel II-32 Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta…….. II-72
Tabel II-33 Data Capaian Realisasi 2024 Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026…… II-72
Tabel II-34 Gini Ratio menurut provinsi, Semester 2 September 2024……... II-73
Tabel II-35 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan……..…. II-74
Tabel II-36 Data capaian realisasi 2024 berdasarkan RPD Tahun 2023-2026…….…. II-75
Tabel II-37 Perbandingan secara nasional Indikator Tingkat Kemiskinan……..…… II-78
Tabel II-38 Capaian Indikator Tingkat Keemiskinan Ekstrem…….…..... II-82
Tabel II-39 Perbandingan realisasi dan target RPB 2023-2026……..... II-86
Tabel II-40 Dukungan Program terhadap IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..…… II-87
Tabel II-41 Indikator Kinerja Utama…….. II-90
Tabel II-42 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia…… II-91
Tabel II-43 10 Pemerintah Daerah nilai capaian IPM…… II-95
Tabel II-44 Capaian Indikator Indeks Dimensi Pendidikan……..…… II-98
Tabel II-45 Perbandingan realisasi dengan target RPD Tahun 2023-2026……..……. II-99
Tabel II-46 Capaian Indikator Angka Harapan Hidup…… II-100
Tabel II-47 Pembagian perkota di Provinsi DKI Jakarta…… II-101
Tabel II-48 Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada balita……..…. II-106
Tabel II-49 RPD Tahun 2023-2026 “Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita”…….. II-106
Tabel II-50 Perbandingan IPG antar Kabupaten/Kota……..…… II-112
Tabel II-51 Indeks Pembangunan Gender seluruh Pemda tahun 2023……... II-113
Tabel II-52 RB General……..… II-121
Tabel II-53 RB Tematik…….. II-121
Tabel II-54 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik……. II-140

Tabel II-55	Perbandingan Target dan Realisasi RPD Tahun 2023-2026……..	II-141
Tabel II-56	Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator……..	II-141
Tabel II-57	Target Indikator Kinerja Utama Predikat AKIP……	II-147
Tabel II-58	Rencana Aksi……..……	II-164
Tabel II-59	Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dengan 2026…….	II-173
Tabel II-60	Tabel Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran…….	II-176
Tabel III-1	Total Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Pemberi Anggaran Tahun Anggaran 2024……	III-3
Tabel III-2	Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……	III-3
Tabel III-3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tahun 2024…….....	III-6
Tabel III-4	Total Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Pemberi Anggaran Tahun Anggaran 2024……	III-15
Tabel III-5	Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..…	III-16
Tabel III-6	Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024…….	III-20
Tabel IV-1	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi……	IV-3
Tabel IV-2	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota…….	IV-5
Tabel IV-3	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan…..…	IV-9
Tabel IV-4	Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan…….….....	IV-10
Tabel IV-5	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan……..	IV-11
Tabel IV-6	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi……	IV-13

Tabel IV-7 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota……. IV-16
Tabel IV-8 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ……. IV-32
Tabel IV-9 Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan…….. IV-33
Tabel IV-10 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan…….. IV-33
Tabel IV-11 Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026……..... IV-42
Tabel IV-12 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi…… IV-43
Tabel IV-13 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota…….. IV-46
Tabel IV-14 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…… IV-49
Tabel IV-15 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…….. IV-50
Tabel IV-16 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……. IV-50
Tabel IV-17 Rekapitulasi Capaian Akses Air Limbah Domestik Tingkat Provinsi…….. IV-52
Tabel IV-18 Anggaran Bidang Sanitasi…….. IV-52
Tabel IV-19 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi…….. IV-55
Tabel IV-20 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota…… IV-58
Tabel IV-21 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat…… IV-62
Tabel IV-22 Dukungan Personil SPMBidang Perumahan Rakyat……. IV-64
Tabel IV-23 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat…… IV-65
Tabel IV-24 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi…….. IV-70
Tabel IV-25 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kabupaten/Kota……..….. IV-72

Tabel IV-26 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten/Kota……..… IV-74
Tabel IV-27 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran Tingkat Kabupaten/Kota……. IV-79
Tabel IV-28 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibum ……. IV-81
Tabel IV-29 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan…. IV-82
Tabel IV-30 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebakaran…….. IV-83
Tabel IV-31 Dukungan Personil SPM Bidang Trantibum……. IV-84
Tabel IV-32 Dukungan Personil SPM Bidang Kebencanaan……. IV-84
Tabel IV-33 Dukungan Personil SPM Bidang Kebakaran…….. IV-85
Tabel IV-34 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Trantibum…… IV-85
Tabel IV-35 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kebencanaan……. IV-87
Tabel IV-36 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kebakaran…..... IV-88
Tabel IV-37 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Tingkat Provinsi……..… IV-92
Tabel IV-38 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Tingkat Kabupaten/Kota……..…. IV-97
Tabel IV-39 Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Melalui KLJ, KPDJ Dan KAJ Tahun Anggaran 2024…… IV-107
Tabel IV-40 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial……..... IV-108
Tabel IV-41 Dukungan Personil SPM Bidang Sosial……..... IV-109
Tabel IV-42 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial…….. IV-110
Tabel IV-43 Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Provinsi…… IV-111
Tabel IV-44 Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota…… IV-126
Tabel IV-45 Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Provinsi…… IV-143
Tabel IV-46 Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten / Kota…… IV-144
Tabel IV-47 Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi…… IV-146
Tabel IV-48 Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…….. IV-151

Tabel IV-49 Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi…….. IV-160
Tabel IV-50 Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten/Kota…… IV-163
Tabel IV-51 Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi……. IV-166
Tabel IV-52 Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota…….. IV-172
Tabel IV-53 Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkaat Provinsi..... IV-189
Tabel IV-54 Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Kabupaten/Kota.. IV-194

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Sungai, Kanal dan *Flood Way* yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta.....	I-2
Gambar I-2	Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta……..	I-5
Gambar I-3	Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta…….	I-6
Gambar I-4	Topografi di Provinsi DKI Jakarta……	I-7
Gambar I-5	Peta Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta……	I-9
Gambar I-6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2024……	I-16
Gambar I-7	Tren Rasio Gini di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024……	I-17
Gambar I-8	Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2024…….	I-18
Gambar I-9	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2021/2022 - 2023/2024……	I-20
Gambar I-10	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2018-2024……	I-20
Gambar I-11	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019-2023……..	I-22
Gambar I-12	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Tahun 2018-2024……..	I-23
Gambar I-13	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2024……..	I-23
Gambar I-14	Jumlah Nilai Ekspor Produk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023……..	I-24
Gambar I-15	Arah kebijakan pembangunan tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta……	I-39
Gambar II-1	Tren Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024……	II-3

Gambar II-2 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024……. II-4
Gambar II-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024…… II-6
Gambar II-4 Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024……. II-7
Gambar II-5 PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah Provinsi DKI Jakarta Selama periode 2020-2024…….. II-9
Gambar II-6 Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024…….. II-10
Gambar II-7 Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) DKI Jakarta (tahun), 2020-2024…… II-101
Gambar II-8 Capaian Angka Harapan Hidup…….. II-104
Gambar II-9 IPM laki-laki dan IPM perempuan dan IPG DKI Jakarta, Tahun 2023……. II-112
Gambar II-10 Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)…… II-116
Gambar II-11 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun..... II-137

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i
DAFTAR ISI…… ii
DAFTAR TABEL…… v
DAFTAR GAMBAR…… xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……..... I-1
1.1.1 Penjelasan Umum…….. I-1
A. Undang – Undang Pembentukan Daerah……..... I-1
B. Batas Geografis Wilayah……..... I-1
C. Jumlah Penduduk……..... I-8
D. Jumlah Kabupaten/Kota…… I-8
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan……..……. I-10
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah……..……. I-11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah……..…… I-15
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah……..…..... I-15
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah……..... I-25
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah……..... I-31
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan…….. I-39
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal……..…. I-41
BAB II CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Capaian Kinerja Makro……. II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia……..…….. II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan……..…… II-3
2.1.3 Angka Pengangguran……..…….. II-5
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi……..…… II-7
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita……..……... II-9
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan……..…….. II-10
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..…….. II-11
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)……..…… II-12
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan……..……. II-18
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah……..…. II-19
A. *Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja*……...…….. II-20
B. Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..…….. II-22
C. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya sesuai dengan dokumen RPD 2023-2026……..….. II-180
D. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja……..… II-184
E. Analisis efisiensi pengunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai……..……. II-191

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi……... III-1
3.1.1 Target Kinerja……. III-2
3.1.2 Realisasi..... III-5
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota……. III-13
3.3 Permasalahan dan Kendala……..... III-13
3.4 Saran dan Tindak Lanjut..... III-14
3.5 Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah…….. III-14
3.5.1 Target Kinerja……. III-15
3.5.2 Realisasi…….. III-20

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan……..……. IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar……. IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……. IV-2
4.1.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah……. IV-2
4.1.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-8
4.1.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-10
4.1.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-11
4.2 Urusan Kesehatan……..... IV-11
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar……..... IV-11
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……. IV-12
4.2.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Oleh Daerah…… IV-13
4.2.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-32
4.2.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-33
4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……. IV-40
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar……. IV-40
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……..... IV-42
4.3.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……. IV-43
4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-49
4.3.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-49
4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-50
4.4 Urusan Perumahan Rakyat…… IV-53
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar……. IV-53

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-54
4.4.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-55
4.4.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-62
4.4.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-64
4.4.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-65
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat…… IV-68
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar…… IV-68
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-69
4.5.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-69
4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-81
4.5.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-83
4.5.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)……... IV-85
4.6 Urusan Sosial…… IV-88
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar…… IV-88
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah…… IV-89
4.6.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah……... IV-92
4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)……...IV-108
4.6.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)……..IV-109
4.6.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. IV-110
4.7 Program dan Kegiatan……IV-111
4.7.1 Urusan Pendidikan…… IV-111
4.7.2 Urusan Kesehatan……IV-143
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……..IV-146
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/ Kota……IV-160
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat…… IV-166
4.7.6 Urusan Sosial……IV-189

BAB V PENUTUP

Kesimpulan…….. V-1
Saran…….. V-1

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024……..…….	I-3
Tabel I-2	Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024…….	I-15
Tabel I-3	Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024……	I-16
Tabel I-4	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaha Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024…….	I-10
Tabel I-5	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..……...	I-10
Tabel I-6	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..….	I-12
Tabel I-7	Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan…….	I-27
Tabel I-8	Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan……..…	I-28
Tabel I-9	Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan…….	I-30
Tabel I-10	Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan…….	I-31
Tabel I-11	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..	I-40
Tabel II-1	Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta……..	II-1
Tabel II-2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Provinsi DKI Jakarta……..…	II-11
Tabel II-3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta……..…	II-17
Tabel II-4	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024…….	II-19
Tabel II-5	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja……..…….	II-21

Tabel II-6	Capaian IKU Indeks Kota Layak Huni…….……	II-25
Tabel II-7	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”……	II-25
Tabel II-8	Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan……..	II-28
Tabel II-9	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”…..…..……	II-29
Tabel II-10	Indikator Sasaran Tahun 2024.....	II-32
Tabel II-11	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024……..	II-33
Tabel II-12	Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2024……...	II-33
Tabel II-13	Target RPD.....	II-34
Tabel II-14	Faktor Keberhasilan.....	II-38
Tabel II-15	Faktor Penghambat.....	II-39
Tabel II-16	Rencana Aksi 2025.....	II-39
Tabel II-17	Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup……	II-42
Tabel II-18	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”…….....	II-42
Tabel II-19	Capaian IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca…….	II-46
Tabel II-20	Target RPD Indikator “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”……...	II-46
Tabel II-21	Capaian IKU Indeks Resiko Bencana……..	II-49
Tabel II-22	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten / Kota Tahun 2024……...	II-50
Tabel II-23	Indikator Kinerja Utama……..	II-56
Tabel II-24	Capaian IKU Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	II-57
Tabel II-25	Capaian RPD Tahun 2023-2026.....	II-61
Tabel II-26	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-61
Tabel II-27	Faktor Keberhasilan……	II-62
Tabel II-28	Faktor Penghambat.....	II-63
Tabel II-29	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-65
Tabel II-30	Komparasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional…….	II-68
Tabel II-31	Capaian Indikator Rasio Gini……	II-71

Tabel II-32 Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta…….. II-72
Tabel II-33 Data Capaian Realisasi 2024 Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026…… II-72
Tabel II-34 Gini Ratio menurut provinsi, Semester 2 September 2024……... II-73
Tabel II-35 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan……..…. II-74
Tabel II-36 Data capaian realisasi 2024 berdasarkan RPD Tahun 2023-2026…….…. II-75
Tabel II-37 Perbandingan secara nasional Indikator Tingkat Kemiskinan……..…… II-78
Tabel II-38 Capaian Indikator Tingkat Keemiskinan Ekstrem…….…..... II-82
Tabel II-39 Perbandingan realisasi dan target RPB 2023-2026……..... II-86
Tabel II-40 Dukungan Program terhadap IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..…… II-87
Tabel II-41 Indikator Kinerja Utama…….. II-90
Tabel II-42 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia…… II-91
Tabel II-43 10 Pemerintah Daerah nilai capaian IPM…… II-95
Tabel II-44 Capaian Indikator Indeks Dimensi Pendidikan……..…… II-98
Tabel II-45 Perbandingan realisasi dengan target RPD Tahun 2023-2026……..……. II-99
Tabel II-46 Capaian Indikator Angka Harapan Hidup…… II-100
Tabel II-47 Pembagian perkota di Provinsi DKI Jakarta…… II-101
Tabel II-48 Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada balita……..…. II-106
Tabel II-49 RPD Tahun 2023-2026 “Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita”…….. II-106
Tabel II-50 Perbandingan IPG antar Kabupaten/Kota……..…… II-112
Tabel II-51 Indeks Pembangunan Gender seluruh Pemda tahun 2023……... II-113
Tabel II-52 RB General……..… II-121
Tabel II-53 RB Tematik…….. II-121
Tabel II-54 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik……. II-140

Tabel II-55	Perbandingan Target dan Realisasi RPD Tahun 2023-2026……..	II-141
Tabel II-56	Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator……..	II-141
Tabel II-57	Target Indikator Kinerja Utama Predikat AKIP……	II-147
Tabel II-58	Rencana Aksi……..……	II-164
Tabel II-59	Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dengan 2026…….	II-173
Tabel II-60	Tabel Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran…….	II-176
Tabel III-1	Total Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Pemberi Anggaran Tahun Anggaran 2024……	III-3
Tabel III-2	Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……	III-3
Tabel III-3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tahun 2024…….....	III-6
Tabel III-4	Total Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Pemberi Anggaran Tahun Anggaran 2024……	III-15
Tabel III-5	Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024……..…	III-16
Tabel III-6	Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024…….	III-20
Tabel IV-1	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi……	IV-3
Tabel IV-2	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota…….	IV-5
Tabel IV-3	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan…..…	IV-9
Tabel IV-4	Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan…….….....	IV-10
Tabel IV-5	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan……..	IV-11
Tabel IV-6	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi……	IV-13

Tabel IV-7 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota……. IV-16
Tabel IV-8 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ……. IV-32
Tabel IV-9 Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan…….. IV-33
Tabel IV-10 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan…….. IV-33
Tabel IV-11 Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026……..... IV-42
Tabel IV-12 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi…… IV-43
Tabel IV-13 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota…….. IV-46
Tabel IV-14 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…… IV-49
Tabel IV-15 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…….. IV-50
Tabel IV-16 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……. IV-50
Tabel IV-17 Rekapitulasi Capaian Akses Air Limbah Domestik Tingkat Provinsi…….. IV-52
Tabel IV-18 Anggaran Bidang Sanitasi…….. IV-52
Tabel IV-19 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi…….. IV-55
Tabel IV-20 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota…… IV-58
Tabel IV-21 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat…… IV-62
Tabel IV-22 Dukungan Personil SPMBidang Perumahan Rakyat……. IV-64
Tabel IV-23 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat…… IV-65
Tabel IV-24 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi…….. IV-70
Tabel IV-25 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kabupaten/Kota……..….. IV-72

Tabel IV-26 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten/Kota……..… IV-74
Tabel IV-27 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran Tingkat Kabupaten/Kota……. IV-79
Tabel IV-28 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibum ……. IV-81
Tabel IV-29 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan…. IV-82
Tabel IV-30 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebakaran…….. IV-83
Tabel IV-31 Dukungan Personil SPM Bidang Trantibum……. IV-84
Tabel IV-32 Dukungan Personil SPM Bidang Kebencanaan……. IV-84
Tabel IV-33 Dukungan Personil SPM Bidang Kebakaran…….. IV-85
Tabel IV-34 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Trantibum…… IV-85
Tabel IV-35 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kebencanaan……. IV-87
Tabel IV-36 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kebakaran…..... IV-88
Tabel IV-37 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Tingkat Provinsi……..… IV-92
Tabel IV-38 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Tingkat Kabupaten/Kota……..…. IV-97
Tabel IV-39 Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Melalui KLJ, KPDJ Dan KAJ Tahun Anggaran 2024…… IV-107
Tabel IV-40 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial……..... IV-108
Tabel IV-41 Dukungan Personil SPM Bidang Sosial……..... IV-109
Tabel IV-42 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial…….. IV-110
Tabel IV-43 Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Provinsi…… IV-111
Tabel IV-44 Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota…… IV-126
Tabel IV-45 Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Provinsi…… IV-143
Tabel IV-46 Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten / Kota…… IV-144
Tabel IV-47 Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi…… IV-146
Tabel IV-48 Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…….. IV-151

Tabel IV-49 Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi…….. IV-160
Tabel IV-50 Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten/Kota…… IV-163
Tabel IV-51 Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi……. IV-166
Tabel IV-52 Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota…….. IV-172
Tabel IV-53 Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkaat Provinsi..... IV-189
Tabel IV-54 Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Kabupaten/Kota.. IV-194

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Sungai, Kanal dan *Flood Way* yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta.....	I-2
Gambar I-2	Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta……..	I-5
Gambar I-3	Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta…….	I-6
Gambar I-4	Topografi di Provinsi DKI Jakarta……	I-7
Gambar I-5	Peta Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta……	I-9
Gambar I-6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2024……	I-16
Gambar I-7	Tren Rasio Gini di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024……	I-17
Gambar I-8	Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2024…….	I-18
Gambar I-9	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2021/2022 - 2023/2024……	I-20
Gambar I-10	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2018-2024……	I-20
Gambar I-11	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019-2023……..	I-22
Gambar I-12	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Tahun 2018-2024……..	I-23
Gambar I-13	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2024……..	I-23
Gambar I-14	Jumlah Nilai Ekspor Produk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023……..	I-24
Gambar I-15	Arah kebijakan pembangunan tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta……	I-39
Gambar II-1	Tren Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024……	II-3

Gambar II-2 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024……. II-4
Gambar II-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024…… II-6
Gambar II-4 Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024……. II-7
Gambar II-5 PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah Provinsi DKI Jakarta Selama periode 2020-2024…….. II-9
Gambar II-6 Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024…….. II-10
Gambar II-7 Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) DKI Jakarta (tahun), 2020-2024…… II-101
Gambar II-8 Capaian Angka Harapan Hidup…….. II-104
Gambar II-9 IPM laki-laki dan IPM perempuan dan IPG DKI Jakarta, Tahun 2023……. II-112
Gambar II-10 Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)…… II-116
Gambar II-11 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun..... II-137

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 25 April 2024 telah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengatur tentang kekhususan Jakarta bukan lagi berdasarkan ibu kota negara namun sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia. Selanjutnya pada 30 November 2024 terbit revisi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun pada pelaksanaannya, Undang-Undang 2 Tahun 2024 dan Undang-Undang 151 Tahun 2024 mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dengan demikian dasar hukum pembentukan daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

1) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 5^{o} 19’ 12” Lintang Selatan - 6^{o} 23’ 54” Lintang Selatan dan 106^{o} 22’ 42” Bujur

Timur - 106^{O} 58’ 18” Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 7 meter di atas permukaan laut.

Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.660 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.998 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, dan 2 kanal yang berbatasan dengan Laut Jawa.

Gambar I-1
Sungai, Kanal dan *Flood Way*
yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Letak geografis di wilayah Utara sebagai muara 13 sungai yang melintas di Jakarta, menyebabkan Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).

Sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

2) Iklim

Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di Tahun 2024 tertinggi di bulan Mei (36,6˚C) dan terendah di bulan Juli & September (23,6˚C). Curah hujan tertinggi dibulan September (43,12mm) dan terendah di bulan Agustus (3,8mm^2). Sedangkan temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di Tahun 2024 tertinggi di bulan Oktober (36,8˚C) dan terendah di bulan September (22,8˚C). Curah hujan tertinggi di bulan Juli (34,13mm^2) dan terendah di bulan Agustus (1,15mm^2).

Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-1
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiuiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	24,00	27,78	35,40	24,20	28,67	35,20
Februari	24,40	28,54	27,00	28,80	28,85	33,60
Maret	24,00	28,65	35,40	23,80	28,96	35,60
April	25,20	29,63	35,00	25,00	29,92	34,40
Mei	26,00	30,36	36,60	26,20	30,57	33,80
Juni	24,20	29,50	35,60	25,50	29,50	31,80
Juli	23,60	28,46	34,60	23,40	28,63	33,60
Agustus	24,80	29,05	35,20	23,80	29,28	34,60
September	23,60	29,17	35,40	22,80	29,38	35,40
Oktober	25,00	30,09	36,40	24,60	30,16	36,80
November	25,00	29,23	35,20	26,60	29,59	35,40
Desember	24,40	28,45	35,40	23,80	28,40	35,40

Sumber : https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteoroli Kemayoran dan Tanjung Priok), 2024

Selengkapnya curah hujan di Jakarta selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-2
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiuiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
Januari	18,32	17	2,78	24,95	16	3,9
Februari	27,80	18	3,58	27,15	18	4,96
Maret	15,41	19	3,24	14,07	18	4,36

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiuiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
April	9,29	13	3,79	13,59	13	5,48
Mei	11,36	3	4,33	4,50	2	5,91
Juni	18,25	6	4,05	24,8	6	6,11
Juli	19,68	7	4,99	34,13	3	6,54
Agustus	3,80	2	5,92	1,15	1	7,31
September	43,12	4	6,25	25,93	3	7,10
Oktober	15,35	4	6,03	15,71	6	7,10
November	13,67	11	3,94	7,5	8	5,43
Desember	15,39	22	1,74	11,75	21	3,02

Sumber : https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteoroli Kemayoran dan Tanjung Priok), 2024

Dari data di atas diketahui bahwa rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2024 sebesar 29,2º C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar 34,7º C dan 24,69º C. Suhu terendah di Jakarta selama tahun 2024 terjadi di bulan September tidak rata-sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut, frekuensi hujan paling banyak di bulan Desember.

3) Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleitosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 meter, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai

sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.

Gambar I-2
Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta

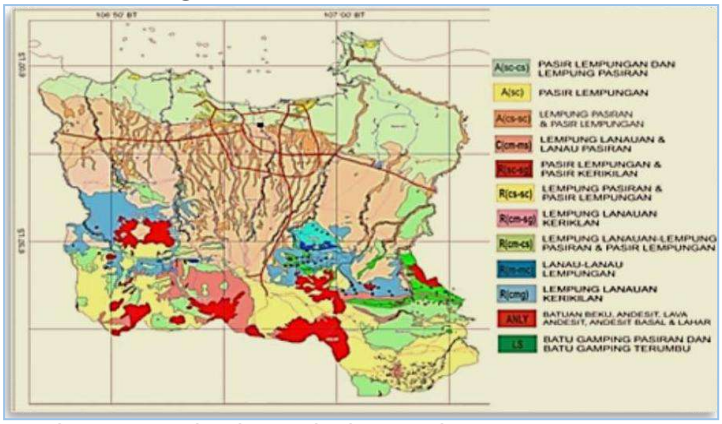

Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tanggul- tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut. Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut:

a) Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 meter dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirankan mencapai 300 meter.
b) Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter.
c) Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini

tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.

d) Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3-13, 5 meter.

e) Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 meter dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Gambar I-3
Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta

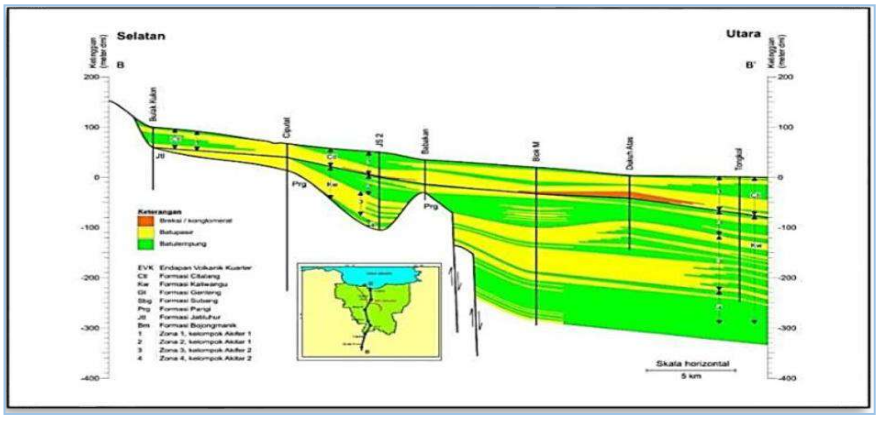

Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadane. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi

pengendapan yang lebih bayak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sendimennya tinggi lebih cepat dari pada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

Gambar I-4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta

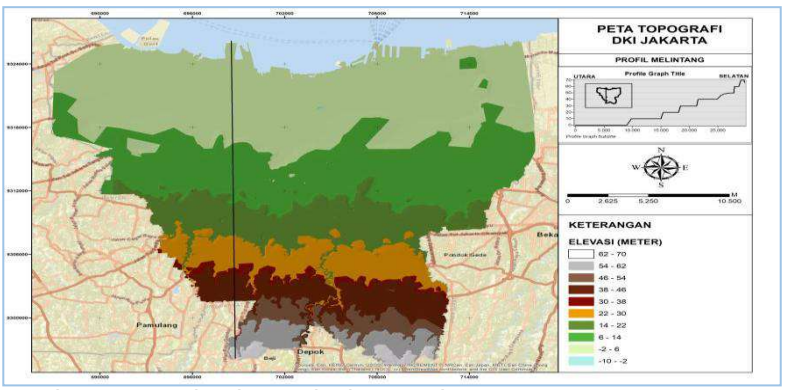

Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,2024

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir.

c. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2024 jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta mencapai 11.135.191 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah menduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebanyak 5.579.005 jiwa atau 50,10 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.556.186 jiwa atau 49,90 persen. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I-3
Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	5.334.781	5.362.748	5.375.869	5.371.646	5.579.005
Perempuan	5.227.307	5.282.028	5.304.082	5.300.454	5.556.186
Jumlah	10.562.088	10.644.776	10.679.951	10.672.100	11.135.191
Pertumbuhan	0,92	0,57	0,66	0,38	0,31
Densitas (Ribu jiwa/ km^2)	15.907	15.978	16.084	16.146	16.165
Sex Ratio	102,06	101,53	101,53	101,34	101,1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar 0,31 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan kepadatan penduduk sebesar 16.165 jiwa/km^2.

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, memiliki status khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan berada pada level Provinsi.

Gambar I-5
Peta Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 (lima) kotamadya menjadi 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (satu) kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi, yakni kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km^2, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km^2, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km^2, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km^2 dan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km^2, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km^2.

Pada pelayanan di kecamatan dan kelurahan, untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pada Tahun 2024, jumlah RW dan RT pun mengalami perubahan sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel I-4
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaha Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Kota/ Kabupaten Administrasi	Luas Area (km^2)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	386	4.531	385
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	460	5.315	449
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	587	6.529	583
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.056	569
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	712	7.953	708
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127	24
	Jumlah	**662,33**	**44**	**267**	**2.748**	**30.511**	**2,718**

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki kewenangan khusus kelembagaan Perangkat Daerah. Selain itu, Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan bersifat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 42 Perangkat Daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 63.857 orang ASN dan 80.529 orang non ASN, lebih jelasnya dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel I-5
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	27.090	36.767	63.857
2.	Non ASN	69.186	11.343	80.529
	Total	**96.276**	**48.110**	**144.386**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

APBD Provinsi DKI Jakarta untuk di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 81.716.573.026.059,- yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kemudian, pada fase Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan total APBD menjadi Rp. 85.202.328.591.676,-

APBD ini disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 periode sampai dengan 31 Desember 2024 (unreview):

Tabel I-6
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Akun	Nama Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 *(unreviewed)* (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2023 (audited)
PENDAPATAN DAERAH					
	Pendapatan Asli Daerah				
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.980.000.000.000	44.443.828.426.232	98,81	43.516.481.672.833
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	647.749.998.376	713.837.027.996	110,20	454.697.560.911
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	634.395.407.063	653.700.898.761	103,04	545.869.249.987
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.204.598.994.964	4.925.765.703.879	117,15	4.622.697.231.503
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**50.466.744.400.403**	**50.737.132.056.868**	**100,54**	**49.139.745.715.234**
	Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat				
5.1.1.2.1	Dana Perimbangan	23.732.336.589.863	21.576.815.024.381	90,92	20.124.459.645.034
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	20.089.713.629.863	18.032.588.917.639	89,76	17.049.968.580.672
5.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	368.377.412.000	368.173.270.201	~	22.179.718.000
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0,00	3.076.020.400
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.176.052.836.541	97,00	3.049.235.325.962
5.1.1.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0,00	0
5.1.1.2.3	Dana Insentif Fiskal	44.090.217.000	44.090.217.000	100,00	35.175.027.000
	Total Pendapatan Transfer	**23.776.426.806.863**	**21.620.905.241.381**	**90,93**	**20.159.634.672.034**
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
5.1.1.3	Pendapatan Hibah	703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	**703.654.652.623**	**589.167.782.024**	**83,73**	**1.766.153.820.454**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**74.946.825.859.889**	**72.947.205.080.273**	**97,33**	**71.065.534.207.722**

Akun	Nama Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 *(unreviewed)* (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2023 (audited)
BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasional				
5.1.2.1.1.1.a	Belanja Pegawai	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	95,80	17.977.776.327.870
5.1.2.1.1.1.b	Belanja Barang dan Jasa	27.835.321.117.883	26.572.378.066.555	95,46	25.824.444.605.296
5.1.2.1.1.1.c	Belanja Bunga	186.000.000.000	180.738.864.995	97,17	229.704.491.741
5.1.2.1.1.1.d	Belanja Subsidi	6.320.798.085.601	5.875.837.590.937	92,96	5.539.653.281.534
5.1.2.1.1.1.e	Belanja Hibah	3.358.144.887.494	3.307.808.095.906	98,50	3.621.682.896.507
5.1.2.1.1.1.f	Belanja Bantuan Sosial	3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	98,46	4.363.641.476.668
	Jumlah Belanja Operasional	**61.283.505.927.677**	**58.623.946.368.073**	**95,66**	**57.556.903.079.616**
	Belanja Modal				
5.1.2.1.1.2.a	Belanja Tanah	763.402.783.015	433.525.287.650	56,79	442.600.308.470
5.1.2.1.1.2.b	Belanja Peralatan dan Mesin	3.169.221.270.721	2.961.717.289.383	93,45	2.822.976.130.249
5.1.2.1.1.2.c	Belanja Gedung dan Bangunan	3.441.760.532.962	2.384.316.870.176	69,28	1.653.055.663.410
5.1.2.1.1.2.d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.352.974.561.800	4.974.322.344.363	92,93	3.799.027.573.476
5.1.2.1.1.2.e	Belanja Aset Tetap Lainnya	128.157.171.217	119.496.671.697	93,24	139.600.392.693
5.1.2.1.1.2.f	Belanja Aset Lainnya	133.539.507.754	129.085.346.240	96,66	0
	Jumlah Belanja Modal	**12.989.055.827.469**	**11.002.463.809.509**	**84,71**	**8.857.260.068.298**
	Belanja Tak Terduga				
5.1.2.1.1.3	Belanja Tak Terduga	1.365.518.170.267	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**1.365.518.170.267**	**0**	**0,00**	**0**
	Transfer Transfer / Bantuan Keuangan	**385.033.285.520**	**383.997.067.520**	**99,73**	**356.446.480.500**
5.1.2.1.1.4	Bantuan Keuangan ke Pemerintqah Daerah Lainnya	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
	Jumlah Transfer	**385.033.285.520**	**383.997.067.520**	**99,73**	**356.446.480.500**
	Jumlah Belanja dan Transfer	**76.023.113.210.933**	**70.010.407.245.102**	**92,09**	**66.770.609.628.414**
	Surplus / Defisit	(1.076.287.351.044)	2.936.797.835.171		4.294.924.579.308

Akun	Nama Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 *(unreviewed)* (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2023 (audited)
PEMBIAYAAN DAERAH					
	Penerimaan Pembiayaan				
5.1.3.1.1	Penggunaan SiLPA	6.542.421.120.069	6.542.421.120.069	100,00	8.600.096.664.254
5.1.3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.713.081.611.718	2.801.304.537.758	75,44	286.277.630.136
5.1.3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	71.846.300	~	190.589.666
	Jumlah Penerimaan	**10.255.502.731.787**	**9.343.797.504.127**	**91,11**	**8.886.564.884.056**
	Pengeluaran Pembiayaan				
5.1.3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.317.545.546.679	5.988.136.019.949	81,83	4.836.397.306.901
5.1.3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.185.106.399	99,97	1.802.671.036.394
5.1.3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0	0	~	0
	Jumlah Pengeluaran	**9.179.215.380.743**	**7.849.321.126.348**	**85,51**	**6.639.068.343.295**
	Pembiayaan Neto	**1.076.287.351.044**	**1.494.476.377.779**		**2.247.496.540.761**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		4.431.274.212.950		6.542.421.120.069

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi permasalahan strategis pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, serta kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan/ kesenjangan (*gap*) antara pencapaian kinerja pembangunan dan target yang direncanakan serta antara kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Permasalahan pembangunan dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/ Standar Nasional/ Target Tahunan Dalam RPJMD/ Capaian Tahun Sebelumnya/ Tren).

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang biasanya dihadapi oleh suatu negara atau daerah. Permasalahan tingkat pengangguran yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan juga social seperti kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta secara signifikan pada saat pandemi Covid-19, yaitu mencapai 8,98 persen per Agustus 2020 atau sebanyak ±572.000 orang menganggur. Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi, TPT di masa pandemi dapat terjadi akibat pemutusan hubungan kerja, pendidikan yang minim dan/atau keterampilan pencari kerja yang minim.

   Angka TPT DKI Jakarta pada Agustus 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 6,21 persen dengan TPT laki-laki sebesar 6,23 persen dan perempuan sebesar 6,17 persen. Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan SMA kejuruan

merupakan yang paling tinggi (8,47 persen) sedangkan TPT tamatan SMP menjadi yang paling rendah (4,15 persen). Capaian TPT DKI Jakarta per Agustus 2024 masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi pada 2019 yang telah mencapai 5,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu terus mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

Gambar I-6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Provinsi DKI Jakarta juga masih menghadapi masalah ketimpangan yang ditunjukkan oleh koefisien Rasio Gini dimana ketimpangan pendapatan masyarakat DKI Jakarta mengalami tren peningkatan sejak 2020 sampai 2024 yakni mencapai 0,399 di Maret 2020 menjadi 0,431 di September 2024. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program, di antaranya: Penjualan sembako murah, Penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu, Subsidi transportasi umum, Pemberdayaan masyarakat melalui

Jakarta Enterpreneur, dan Pelaksanaan program pengaman jaring sosial. Rasio Gini DKI Jakarta masih berada di atas angka nasional yaitu sebesar 0,381 pada September 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat kelas atas dan kelas bawah di DKI Jakarta lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Gambar I-7
Tren Rasio Gini
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan tren tahun 2017-2024, Rasio Gini DKI Jakarta terlihat semakin melebar sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di sisi lain, Rasio Gini nasional mengalami tren rata-rata yang relatif stabil. Pertumbuhan pusat ekonomi dan bisnis di Jakarta sangat berdampak pada ketidaksetaraan pendapatan masyarakat dimana di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, namun di sisi lain dapat memperlebar *gap* akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah masih perlu mengupayakan redistribusi pendapatan seperti melalui program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, salah satunya kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini terlihat pada Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2020 sebesar 4,53 persen

dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 dengan naik menjadi 4,72 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada Maret 2023 menjadi 4,44 persen, namun kondisi ini masih terpaut jauh dari pencapaian penurunan Tingkat Kemiskinan pada masa pra pandemi, yakni telah berhasil mencapai 3,47 persen pada Maret 2019.

Gambar I-8
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Garis kemiskinan Jakarta, yaitu jumlah pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan oleh penduduk Jakarta, sebesar Rp.792.515,- per kapita per bulan (2023) dan meningkat menjadi Rp.846.085,- per kapita per bulan (2024). Sementara itu, Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta sebagai acuan kebutuhan layak telah mencapai sekitar ±Rp.5.000.000,- per bulan. Jika garis kemiskinan dan UMR Jakarta dibandingkan, maka pengeluaran minimum penduduk Jakarta masih jauh di bawah standar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jakarta yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta keterbatasan dalam mencari lapangan pekerjaan. Jika dibiarkan berlanjut, maka hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Jakarta.

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan dan IPM saling berkaitan satu sama lain dimana semakin tinggi IPM suatu wilayah, maka

semakin rendah tingkat kemiskinannya karena IPM yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Sebaliknya, wilayah dengan IPM rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

IPM di wilayah kota administrasi di DKI Jakarta telah berstatus “sangat tinggi”, yakni Jakarta Selatan sebesar 87,57; Jakarta Timur sebesar 84,76; Jakarta Barat sebesar 84,40; Jakarta Pusat sebesar 83,75; dan Jakarta Utara sebesar 82,13. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu masih berada pada status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) dengan nilai sebesar 76,69. IPM merupakan angka rata-rata di setiap wilayah sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah kota/ kabupaten administratif yang belum tercermin dalam angka IPM yang tinggi.

2. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi permasalahan, antara lain di bidang layanan pendidikan dimana jumlah siswa putus sekolah masih cukup tinggi seiring dengan masih kurangnya partisipasi murni di jenjang SMP dan SMA. Gambar 4 menunjukkan bahwa tren putus sekolah tertinggi pada seluruh jenjang terjadi pada tahun ajaran 2021/2022 dengan jumlah siswa putus sekolah paling banyak pada jenjang SD/MI.

Peningkatan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tersebut membawa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023/2024, angka putus sekolah secara umum mengalami penurunan di semua jenjang Pendidikan, kecuali pada jenjang SD yang justru mengalami peningkatan sehingga masih menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan akses dan retensi Pendidikan.

Gambar I-9
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2021/2022 - 2023/2024

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,diolah2025

Tren Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD hingga SMA/SMK/MA tahun 2018-2024 menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Seperti pada 2024, APM jenjang SD, SMP, dan SMA secara berurutan sebesar 98,39; 88,67; dan 64,85 atau menunjukkan partisipasi yang terus menurun. Namun demikian, APM di setiap jenjang pendidikan memiliki tren yang membaik dari tahun 2018-2024. APM jenjang SMA tahun 2024 meningkat 4,04 poin yakni dari 60,81 di 2023 menjadi 64,85 di 2024. APM jenjang SMP tahun 2024 mencapai 88,67 dari 84,95 di tahun 2023 atau meningkat 3,72 poin. Sementara itu, APM jenjang SD tahun 2024 mengalami penurunan 0,05 poin dari 98,44 di 2023 menjadi 98,39.

Gambar I-10
Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2018-2024

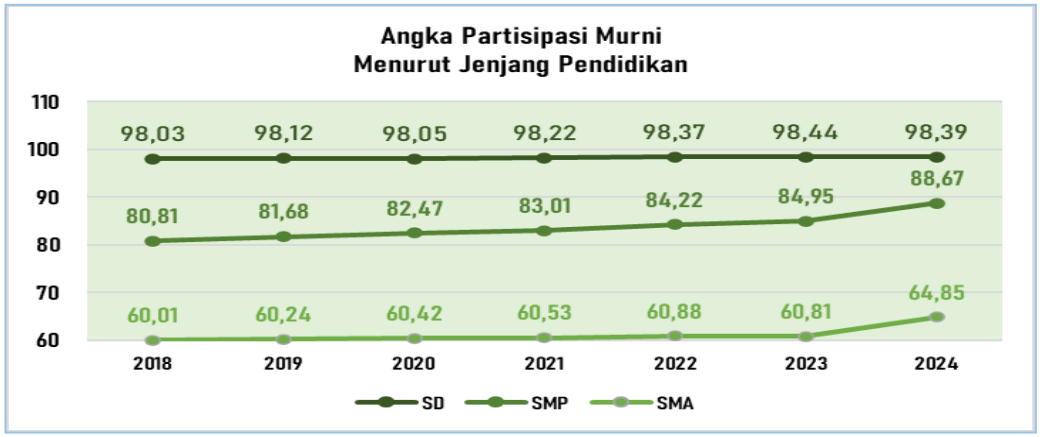

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Masalah pendidikan juga terjadi dari sisi penyediaan pendidikanseperti masih belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan. Tenaga pendidik juga masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas guru, serta masih rendahnya persentase guru bersertifikasi dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan pada suatu jenjang pendidikan. Selain itu, terdapat tantangan berupa belum optimal dan memadainya utilisasi serta modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh di setiap satuan pendidikan. Pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat serta mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan juga masih perlu ditingkatkan.

Masalah lain pada aspek pelayanan umum adalah masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar perkotaan. Persentase rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian yang layak huni dan terjangkau hanya sebesar 38,8 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Banjir juga masih menjadi persoalan karena tingginya alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, serta dampak dari perubahan iklim. Selain itu, cakupan layanan air limbah masih rendah dan pencemaran lingkungan yang tinggi, ditunjukkan melalui rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 58,69 dari nilai maksimal 100.

Pada urusan sosial, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah PMKS pada tahun 2022 sebanyak 3.856 orang, meningkat sebanyak 1.197 orang dibandingkan tahun 2021. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.985 orang.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan perhatian terhadap sarana sosial di antaranya panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, panti rehabilitasi, dan fasilitas sejenis lainnya. Pada tahun 2019 hingga 2023, jumlah sarana sosial mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan jumlah sarana sosial di tahun 2020, namun kembali berkurang sebanyak 12 sarana sosial di tahun 2023 sehingga menjadi 22 sarana. Namun demikian, kapasitas sarana sosial tersebut mengalami peningkatan dari 7.326 orang menjadi 7.751 orang.

Gambar I-11
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019-2023

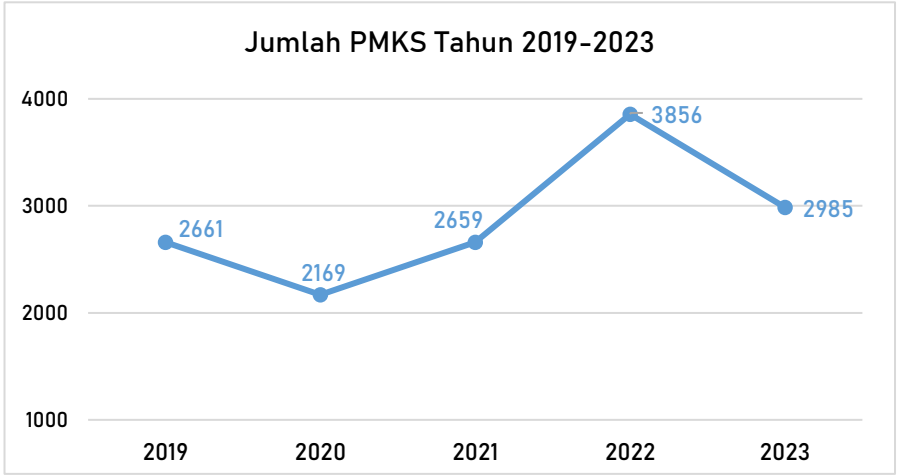

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024

3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi aspek penting dalam pengukuran tingkat produktivitas Provinsi DKI Jakarta. Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap realisasi investasi tahun 2020 dimana terjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.123,90 triliun jadi Rp.95,00 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi investasi meningkat perlahan hingga dapat mencapai Rp.241,8 triliun pada tahun 2024. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui realisasi investasi sebelum masa pandemi.

Gambar I-12
Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal
Tahun 2018-2024

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2025

Salah satu sektor unggulan Jakarta adalah pariwisata, namun sektor ini masih menghadapi persoalan berupa penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, kunjungan wisatawan mancanegara menurun signifikan sebesar 84,48 persen atau dari 2.713.403 kunjungan di 2018 menjadi hanya 421.247 kunjungan. Jumlah wisatawan mancanegara semakin berkurang pada 2021 dengan hanya sebesar 119.362 kunjungan. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mulai meningkat dan akhirnya dapat mencapai angka 1.882.413 kunjungan pada triwulan III 2024. Namun demikian, angka ini masih belum mencapai jumlah kunjungan seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19.

Gambar I-13
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2018-2024

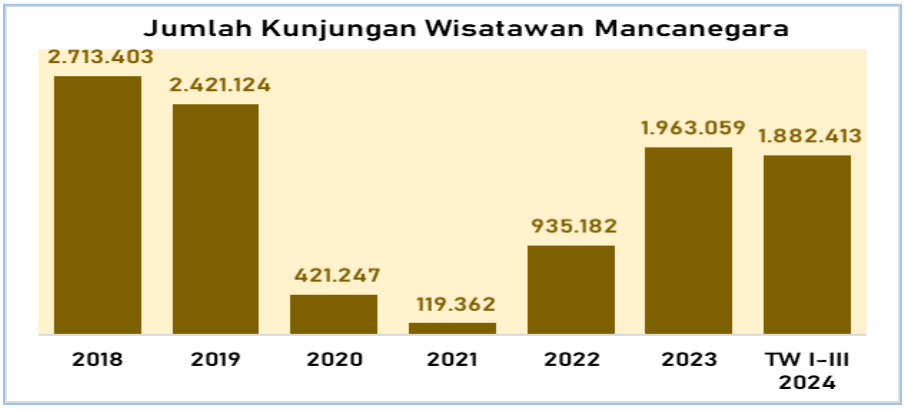

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada saat pandemi Covid-19, kekuatan ekonomi melalui UMKM menjadi alternatif potensial. Akan tetapi, fluktuasi produktivitas UMKM menjadi persoalan tersendiri dimana kondisi kapasitas produksi UMKM di Provinsi DKI Jakarta secara umum cenderung mengalami stagnasi. Pada 2022, nilai ekspor mencapai USD11.521 juta, mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD11.269 juta. Namun, nilai ekspor ini mengalami penurunan menjadi USD11.072 juta pada 2023.

Pada triwulan I hingga III 2024, nilai ekspor mencapai USD9.350 juta. Secara kumulatif, nilai ekspor tersebut tumbuh 14,82 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Gambar I-14
Jumlah Nilai Ekspor Produk
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023

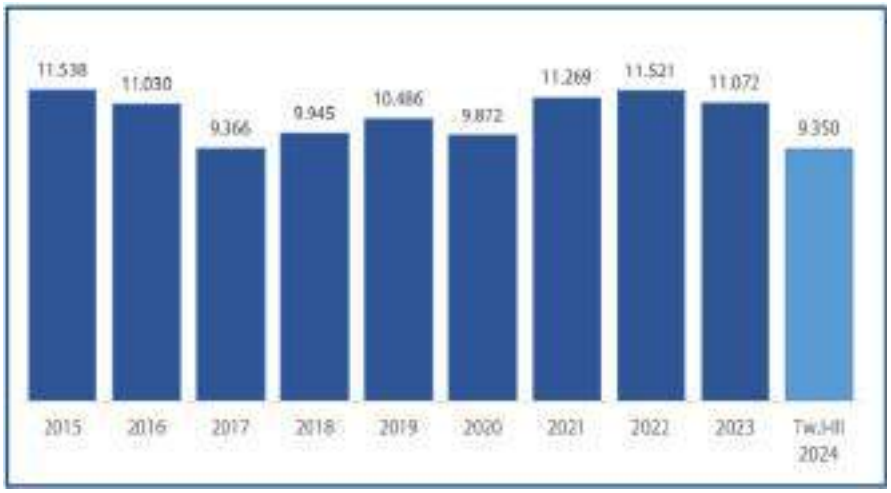

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perumusan isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selain itu, perumusan isu strategis turut mempertimbangkan prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025; kebijakan dalam RTRW 2030; Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Projects dalam RPJMN 2020-2024; kebijakan dalam RPJMD Prov/Kab/Kota penyangga; hasil evaluasi capaian SDGs; serta isu-isu aktual di antaranya pandemi

Covid-19 dan Undang-Undang Ibukota Negara. Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, dirumuskan 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 yaitu:

1) Ketahanan Terhadap Bencana;
2) Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
3) Ketahanan Ekonomi Inklusif;
4) Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas;
5) Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara; dan
6) Pemerataan Pembangunan.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode transisi hingga dilantiknya Kepala Daerah baru yang terpilih melalui Pilkada serentak 2024. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun periode 2023-2026 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, arahan Agenda pada Pembangunan RPJMN 2020-2024, kesinambungan pembangunan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, serta 6 (enam) isu strategis 2023-2026 yang telah dijabarkan sebelumnya, teridentifikasi 4 (empat) dimensi pembangunan yang selanjutnya dijadikan fokus perencanaan dalam RPD 2023-2026, yaitu: (1) dimensi lingkungan-bangun (*built environment*); (2)

dimensi perekonomian (*economic*); (3) dimensi manusia (*human*); dan (4) dimensi pemerintahan (*governance*). Keempat dimensi ini menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya sebagai berikut:

1. **Tujuan 1: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**

   Tujuan dari dimensi lingkungan-bangun (*built environment*) memiliki indikator Indeks Kota Layak Huni (*Most Livable City Index*) yang disurvey oleh IAP Indonesia. Adapun frase dan kata kunci dari tujuan pertama yaitu '*Regenerasi Kota'*, '*Ketahanan'*, dan '*Berkelanjutan'*. Regenerasi kota merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yaitu terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, dan tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Kedua sasaran tersebut dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai dengan infrastruktur terkait mobilitas mendapatkan *highlight* utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri.

   Kata kunci selanjutnya adalah ketahanan yang dimaksudkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip *resilient city*. Kata kunci berikutnya yaitu berkelanjutan yang mewakili

harapan bahwa seluruh pembangunan di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Untuk menjamin hal tersebut, maka dirumuskan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Sasaran-sasaran pembangunan daerah telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I-7
Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

2. Tujuan 2: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Tujuan dari dimensi perekonomian (*economic*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang diukur oleh Bappenas. Frase dan kata kunci dari tujuan kedua ini yaitu '*Perekonomian Inklusif*', '*Daya Saing*', '*Penghidupan Layak*' dan '*Pemerataan Kesejahteraan*'. Perekonomian Inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

Kata kunci selanjutnya yaitu Daya Saing, mengadopsi *Global Competitiveness Index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta yang bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi. Kata kunci berikutnya terkait Penghidupan Layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Kata kunci terakhir yaitu Pemerataan Kesejahteraan yang sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan sehingga dirumuskan sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial. Sasaran–sasaran tersebut telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I-8
Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

SASARAN	INDIKATOR
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
	Rasio Gini
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

3. Tujuan 3: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Tujuan dari dimensi manusia (*human*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia yang diukur oleh BPS. Frase dan kata kunci dari tujuan ketiga ini yaitu '*Pembangunan Manusia*', '*Madani*', dan '*Berkesetaraan*'. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu: Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

Adapun standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya, kata kunci Madani merupakan penerjemahan dari konsep *civil society* yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu, dirumuskan sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

Kata kunci terakhir yaitu Berkesetaraan merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender'. Secara lebih lengkap, sasaran–sasaran tersebut telah dirumuskan bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I-9
Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

SASARAN	INDIKATOR
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

4. Tujuan 4: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tujuan dari dimensi pemerintahan (*governance*) ini memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB. Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu '*Transformasi Pelayanan Publik*', '*Manajemen Pemerintahan*', dan '*Berintegritas*'. Kata kunci Transformasi Pelayanan Publik menggambarkan kondisi dimana praktik dan persepsi layanan publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat dan Ter-Akselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Kota Cerdas.

Selanjutnya, kata kunci Manajemen Pemerintahan memiliki makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan. Sejalan dengan kondisi yang ingin dicapai, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah dan

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Kata kunci terakhir yaitu Berintegritas dapat diaplikasikan dalam semua lini pemerintahan, namun terutama pada aparatur sipil negara. Konsep ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur. Rumusan sasaran-sasaran tersebut beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel I-10
Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berikut merupakan program prioritas yang dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. Program-program tersebut sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program-program prioritas dalam mendukung pencapaian 4 tujuan dan 17 sasaran dalam RPD 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
   a) Sasaran Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

      Program yang mendukung sasaran yaitu:

      1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
      2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
      3) Program Pengembangan Perumahan;
      4) Program Kawasan Permukiman;
      5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
      6) Program Penatagunaan Tanah;dan
      7) Program Pengelolaan Persampahan.

   b) Sasaran Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

      Program yang mendukung sasaran yaitu:

      1) Program Penyelenggaraan Jalan;
      2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
      3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
      4) Program Pengelolaan Pelayaran;dan
      5) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

   c) Sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

      Program yang mendukung sasaran yaitu:

      1) Program Penataan Bangunan Gedung;
      2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
      3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
      4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
9) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
13) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
14) Program Pengelolaan Hutan;
15) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
16) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
17) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
18) Program Pengelolaan Energi Terbarukan;dan
19) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

d) Sasaran Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4) Program Penanggulangan Bencana;
5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;dan
6) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

2. Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

a) Sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2) Program Pemasaran Pariwisata;
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9) Program Penyuluhan Pertanian;
10) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
12) Program Pengembangan Ekspor;
13) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
14) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
15) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;dan
16) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

b) Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
4) Program Hubungan Industrial;
5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
6) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
7) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
8) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
9) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);dan
10) Program Pengembangan UMKM.

c) Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pemberdayaan Sosial;
2) Program Rehabilitasi Sosial;
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4) Program Penanganan Bencana;
5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
6) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
7) Program Pengawasan Keamanan Pangan;dan
8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

d) Sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2) Program Promosi Penanaman Modal;
3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4) Program Pengembangan Kebudayaan;
5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
6) Program Pengelolaan Permuseuman;

7) Program Pembinaan Perpustakaan;
8) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
9) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;dan
10) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

a) Sasaran Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan

b) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6) Program Pengendalian Penduduk;
7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
9) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
10) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;dan
11) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

c) Sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2) Program Perlindungan Perempuan;
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);dan
6) Program Perlindungan Khusus Anak.

d) Sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

4. Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas

a) Sasaran Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pendaftaran Penduduk;
2) Program Pencatatan Sipil;
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
7) Program Pengelolaan Arsip;
8) Program Pengelolaan Kecamatan;
9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;dan
10) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b) Sasaran Terakselarasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;dan
4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

c) Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Penataan Organisasi;
2) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
3) Program Perekonomian dan Pembangunan;
4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
6) Program Penyelenggaraan Pengawasan;dan
7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

d) Sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;dan
4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

e) Sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Kepegawaian Daerah;dan
2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Gambar I-15
Arah kebijakan pembangunan tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, mengacu pada tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah "**Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar**". Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman penyusunan tema pembangunan yang dirumuskan berupa '**Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia**'.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD tahun 2022 dan fokus pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang tertera dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Keterkaitan antar unsur tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel I-11
Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1. Penanggulangan Banjir Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir • Upaya Pencegahan Banjir 2. Penanganan Kemacetan Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • *Transport Demand Management*; dan • Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur
Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	
Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu • Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan • Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan berusaha. 2. Penanggulangan Kemiskinan Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: • Penurunan beban pengeluaran masyarakat • Peningkatan pendapatan masyarakat • Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	
Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Percepatan Penurunan Stunting Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; • Intervensi pencegahan stunting
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	
Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Penguatan Nilai Demokrasi Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: • Perbaikan kualitas layanan publik; • Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; dan • Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ter Akselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	
Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	
Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pemerintahan bidang:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;dan
f. Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kekhususannya Otonomi Daerah berada pada level Provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan dasar pada tingkat Provinsi.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyempurnakan dan mencabut pedoman penerapan SPM sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun pedoman teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;dan
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	83,55	84,15	0,72
2	Angka Kemiskinan	4,44%	4,14%	-6,76
3	Angka Pengangguran	6,53%	6,21%	-4,90
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,96%	4,90%	-1,21
5	Pendapatan per Kapita	Rp322,62juta	Rp344,35juta	6,74
6	Ketimpangan Pendapatan	0,431	0,431	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan kesejahteraan dalam berbagai aspek, antara lain dengan menjelaskan aksesibilitas penduduk terhadap kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (BPS, 2024). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi/ indikator dasar yaitu:

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)

   UHH menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan yang baik sesuai kondisinya pada saat lahir akan terus berlanjut sepanjang hidupnya.

b. Dimensi Pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

   HLS menggambarkan perkiraan atas rata-rata lama pendidikan formal yang dapat diikuti oleh anak berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. Sedangkan RLS merupakan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal. Nilai RLS yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat telah mengikuti tingkat pendidikan dengan baik.

c. Dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan)

   Dimensi ini mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti makanan, pakaian, perumahan, sanitasi, air bersih, dan kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan yang layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 56/12/31/Th.XXVI yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 2 Desember 2024, IPM DKI Jakarta tahun 2024 mencapai 84,15 atau meningkat 0,60 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 83.55.

Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, dimana UHH meningkat sebesar 0,18 tahun yaitu menjadi 75,99 tahun dari 75,81 pada 2023; HLS meningkat 0,18 tahun dimana dari 13,33 tahun pada 2023 menjadi 13,51 tahun; RLS meningkat sebesar 0,04 tahun yaitu dari 11,45 tahun menjadi 11,49 tahun pada 2024; serta rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 19,95 juta rupiah per tahun atau meningkat 580 ribu rupiah (2,99 persen) dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Gambar II-1
Tren Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Capaian IPM DKI Jakarta tahun 2024 mengindikasikan status pembangunan manusia DKI Jakarta tercatat “sangat tinggi” (IPM≥80) selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini merepresentasikan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia dengan peningkatan IPM rata-rata sebesar 0,67 persen per tahun yakni dari 81,92 pada 2020 menjadi 84,15 pada 2024.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100 persen. Adapun Garis Kemiskinan (GK) diukur berdasarkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan (GKM) maupun kebutuhan bukan makanan (GKBM).

Berdasarkan rilis terakhir BPS Provinsi DKI Jakarta melalui Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/31/Th.XXVII tanggal 15 Januari 2025, angka kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,14 persen pada September 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 4,3 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 pada saat angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan September 2024 menurun sebesar 0,58 persen poin.

Gambar II-2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2018-2024 menunjukkan angka kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 dan Maret 2022 sebanyak 502 ribu orang. Angka kemiskinan tertinggi terukur sejak Maret 2021 sebesar 4,72 persen dan setelahnya bergerak fluktuatif dengan kondisi akhir 4,14 persen di September 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Pada periode waktu yang sama, penduduk Jakarta dari total populasi yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan yang sama mencapai 449,07 ribu orang atau menurun sebanyak 15,86 ribu orang terhadap kondisi Maret 2024 yang mencapai 464,93 ribu orang. Namun demikian, angka kemiskinan per September 2024 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19, yakni per September 2019 sebanyak 362,3 ribu orang. Tren penurunan angka kemiskinan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, yaitu dari 4,69 persen (Maret 2022) menjadi 4,44 persen (Maret 2023), dan 4,30 persen (Maret 2024). Angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir ini menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan program pengentasan kemiskinan secara konsisten. membaiknya capaian beberapa indikator makro ekonomi berkaitan erat dengan penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta.

Selain itu, konsistensi dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan termasuk pemberian bantuan sosial turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Masyarakat rentan miskin di DKI Jakarta selain menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat juga menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Program Bantuan Pangan. Program bantuan lain meliputi pemberian insentif untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sewa sederhana (Rusunawa), Pemberian Pelatihan Kerja secara gratis oleh Balai Latihan Kerja, dan lain sebagainya. Seluruh upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengendalikan angka kemiskinan di DKI Jakarta.

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT dihitung dari persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah penduduk usia kerja (penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih) yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu, angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 5 November 2024, TPT DKI Jakarta pada Agustus 2024 sebesar 6,21 persen atau mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur. Lebih detail lagi, pada periode yang sama, TPT laki-laki mencapai 6,23 persen, sedangkan TPT perempuan lebih tinggi dengan 6,17 persen. Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan SMA kejuruan merupakan yang paling tinggi (8,47 persen) sedangkan TPT tamatan SMP menjadi yang paling rendah (4,15 persen).

Gambar II-3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2024 menunjukkan tren yang semakin menurun, terakhir dengan penurunan sebesar 0,32 persen poin pada Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 di Jakarta, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor perdagangan sebesar 23,05 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,71 persen; serta sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 11,84 persen. Adapun status pekerjaan

utama penduduk Jakarta terbagi menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yaitu formal dan informal. Kegiatan formal mencakup penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/ karyawan/pegawai, sedangkan kegiatan informal mencakup penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pada Agustus 2024, jumlah penduduk Jakarta yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,25 juta orang (63,69 persen) dan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,85 juta orang (36,31 persen). Persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 10/02/31/Th.XXVII yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 5 Februari 2025, pengukuran pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menggunakan besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB Jakarta tahun 2024 mencapai Rp.3.679,36 triliun sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp.2.151,04 triliun.

Gambar II-4
Pertumbuhan PDRB (c-to-c)
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Pertumbuhan PDRB (*c-to-c*) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024 mengalami kontraksi pada tahun 2020 mencapai -2,39 persen. Pertumbuhan PDRB terus menerus mencapai angka positif sejak 2021 dan berlanjut hingga 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pemulihan setelah mengalami kontraksi sebesar -2,39 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19, yang berdampak besar pada sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Sejak 2021, perekonomian mulai bangkit dengan pertumbuhan positif yang terus berlanjut hingga 2024. Pada 2024, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 4,90 persen (*c-to-c*), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 (4,96 persen), namun tetap mencerminkan stabilitas pemulihan.

Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,31 persen), Konstruksi (6,99 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (6,96 persen). Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi (11,82 persen), disusul oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (9,64 persen), Komponen PK-P (8,72 persen), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) (5,23 persen).

Struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,01 persen), Industri Pengolahan (11,49 persen), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (11,09 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta PK-RT yang masing-masing berkontribusi sebesar 70,37 persen dan 62,03 persen.

2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu

daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan PDRB ADHB, yakni dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2024, PDRB per kapita DKI Jakarta tercatat sebesar Rp.344,35 juta atau meningkat 6,31 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp.322,62 juta. Tren PDRB per kapita DKI Jakarta dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan kenaikan bertahap dari Rp.262,7 juta pada 2020 menjadi Rp.299,67 juta pada 2022, hingga akhirnya mencapai Rp.344,35 juta pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Gambar II-5
PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Provinsi DKI Jakarta Selama periode 2020-2024

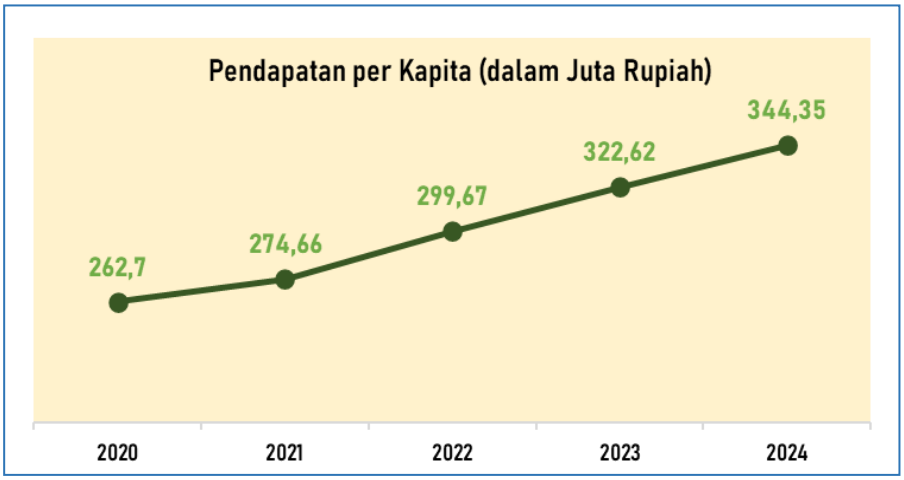

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk menggunakan indikator Rasio Gini yang diukur oleh BPS. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati 0 menunjukkan

distribusi pendapatan yang lebih merata. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan sempurna, dimana setiap individu memiliki pendapatan yang sama, sedangkan nilai 1 mencerminkan ketimpangan ekstrem, dimana satu individu menguasai seluruh pendapatan sementara yang lain tidak memiliki apa pun.

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2024 sebesar 0,431 atau mengalami peningkatan dibandingkan kondisi Maret 2024 yang mencapai 0,423 dengan selisih sebesar 0,008 poin. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin tinggi.

Gambar II-6
Tren Rasio Gini
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024

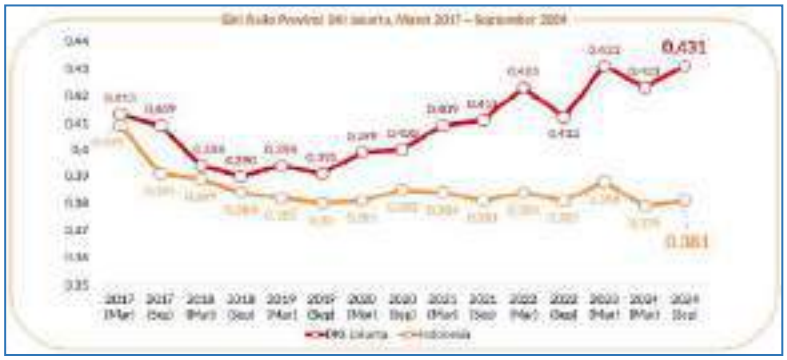

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Berdasarkan tren tahun 2017-2024, rasio gini DKI Jakarta lebih tinggi dari nasional dengan gap yang semakin besar pada tahun 2024. Kesenjangan ini terlihat semakin melebar sejak tahun 2020 pada saat rasio Gini DKI Jakarta mengalami tren kenaikan yang lebih tajam dibandingkan rasio Gini nasional yang relatif stabil. Kenaikan rasio Gini DKI Jakarta setelah 2020 menandakan ketimpangan pengeluaran yang terus meningkat, sementara tingkat ketimpangan nasional cenderung mengalami sedikit fluktuasi tanpa perubahan signifikan. Pada 2024, selisih rasio Gini DKI Jakarta dengan nasional mencapai titik tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas ekonomi di ibu kota semakin melebar dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota Administrasi.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel II-2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Provinsi DKI Jakarta

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
Urusan Pendidikan Provinsi	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	98,21	Dinas Pendidikan
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	98,58	Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan Provinsi	1.b.1	Rasio daya tamping rumah sakit rujukan	2,59	Dinas Kesehatan
	1.b.2	Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi	98,93	Dinas Kesehatan
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	Dinas Kesehatan
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100,00	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	102,31	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	65,86	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.3	Persentasae kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	94,33	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestic oleh SPAL regional	79,19	Dinas Sumber Daya Air

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi	1.c.5	Rasio kemantapan jalan	97,30	Dinas Bina Marga
	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	100,00	DSDA, DBM, Disnakertransgi, DCKTRP, BPPBJ
	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
	1.d.3	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	82,41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi	1.e.1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.e.2	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Sosial Provinsi	1.f.1	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.2	Tingkat persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.3	Tingkat persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.4	Tingkat persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	100,00	Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga Kerja Provinsi	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	94,45	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.2	Tingkat produktifitas tenaga kerja	39.499.281.093,39	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi
	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	96,04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	90,04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.5	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	96,04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,70	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,35	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.b.3	Pasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	23,20	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Urusan Pangan Provinsi	2.c.1	Persentase cadangan pangan	100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Urusan Pertanahan Provinsi	2.d.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00	DSDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, Distamhut, DPMPTSP
	2.d.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100,00	DSDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, Distamhut, DPMPTSP
	2.d.3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100,00	DSDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, Distamhut, DPMPTSP
Urusan Lingkungan Hidup Provinsi	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi	56,39	Dinas Lingkungan Hidup
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	84,22	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100,00	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi	2.h.1	TFR (angka kelahiran total)	1,82	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate/mCPR*)	41,29	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	15,61	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Urusan Perhubungan Provinsi	2.i.1	Rasio konektivitas	0,78	Dinas Perhubungan
	2.i.2	V/C rasio	0,61	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.j.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60,36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	99,40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi	2.k.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	21,89	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.k.2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	1,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Penanaman Modal Provinsi	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	45,08	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,61	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	770	Dinas Pemuda dan Olahraga
Urusan Statistik Provinsi	2.n.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.n.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Urusan Persandian Provinsi	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	99,22	Dinas Komunikasi, Informatika danStatistik
Urusan Kebudayaan Provinsi	2.p	Terlestarikannya cagar budaya	100,00	Dinas Kebudayaan
Urusan Perpustakaan Provinsi	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.q.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	94,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan Provinsi	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	70,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	97,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan				
Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi	3.a.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	157,20	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.a.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	90,31	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Urusan Pariwisata Provinsi	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah waisatawan mancanegara per kebangsaan	29,16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	10,66	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	51,87	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,85	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Pertanian Provinsi	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	546,21	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.c.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-12,50	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Urusan Kehutanan Provinsi	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan social	100,00	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	-	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	3.d.3	Persentase luas lahan kritis yang di rehabilitasi	-	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	3.e.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	3.e.2	Persentase desa yang teraliri listrik	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Urusan Perdagangan Provinsi	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	98,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	95,50	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.f.4	Tertib usaha	22,22	DPPKUKM, DPMPTSP
	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	51,98	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	50,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
Urusan Perindustrian Provinsi	3.g.1	Pertambahan jumlah industry besar di provinsi	6,14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	81,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	65,74	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Perindustrian Provinsi	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.6	Terserdianya informasi industri secara lengkap dan terkini	50,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Transmigrasi Provinsi	3.h	Tidak ada kewenangan provinsi	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2025

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II-3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Perencanaan dan Keuangan Provinsi	4.a.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,04	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.2	Rasio PAD	69,55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	65,36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.4	Opini laporan keuangan	7	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
	4.a.6	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
Pengadaan Provinsi	4.i.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	16,66	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.i.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	50,13	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	52,43	Badan Pelayanan Pngadaan Barang dan Jasa
	4.i.4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	26,63	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Kepegawaian Provinsi	4.j.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69,40	Badan Kepegawaian Daerah
	4.j.2	Rsio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	14,29	Badan Kepegawaian Daerah
	4.j.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
Manajemen Keuangan Provinsi	4.k.1	*Budget execution*: deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,94	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.k.2	*Revenue mobilization*: deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,53	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.k.3	*Assets management*	4	Badan Pengelolaan Aset Daerah
	4.k.4	*Cash management*: rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,96	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Transparansi dan Partisipasi Publik Provinsi	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*information on resources available to frontline service delivery units*)	91,84	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*public access to fiscal information*)	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Gubernur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur No/168/2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, sesuai pada tabel di bawah ini:

TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		71	Indeks
	1	Terbangunnya Infrasstruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	77.24	Persen
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi public	20.97	Persen
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	55.43	Indeks
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	25.4	Persen
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	1	Indeks Risiko Bencana	59.66	Indeks
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		7.81	Indeks
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	4.8 – 5.6	Persen
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	6.53	Persen
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Rasio Gini	0.410	Koefisien
			2	Tingkat Kemiskinan	3.79	Persen
			3	Tingkat Kemiskinan Ektrem	0.5	Persen
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	4.01	Indeks
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		83.55	Indeks
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi Pendidikan	12.16	Tahun

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan		Angka Harapan Hidup	75.81	Tahun
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	13.2	Persen
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	95.14	Indeks
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	82.13	Indeks
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		83	Indeks
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	91.08	Indeks
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.21	Indeks
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 (A)	Predikat
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	75	Indeks
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	350.5	Indeks

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Kepgub No 168 Th 2024)

B. Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berdasarkan Tabel di atas, dari 26 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024, sebanyak 15 (lima belas) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 4 (empat) indikator belum mencapai sesuai target yang ditetapkan serta terdapat 7 (tujuh) Indikator yang belum mempunyai data realisasi (N/A) dikarenaka belum rilisnya data realisasi di tahun 2024, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
	1	Terbangunnya Infrasstruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77,66	100.54%
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	20.97	22.19	105.82%
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25,9	101.97%
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Indeks	59.66	N/A (belum rilis)	-
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	7,81	N/A (belum rilis)	-
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.8 – 5.6	4.90	100%
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	6.53	6.21	105.15%
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	3.79	4.14	91.55%
			2	Rasio Gini	Koefisien	0.410	0,431	95,13%
			3	Tingkat Kemiskinan Ektrem	Persen	0.5	0,35	142.86%
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4.01	N/A (belum rilis)	-

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	83.55	84.15	100.72%
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,16	12,5	102.80%
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.81	75,99	100.24%
			2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) Balita	Persen	13.2	N/A (belum rilis)	-
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.14	N/A (belum rilis)	-
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	82.13	84.57	102.97%
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	83	N/A (belum rilis)	-
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.08	93.36	105.37%
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.21	4,46	105.94%
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	84 (A)	81,66	97.21%
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	75	72,34	96.45%
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	350.5	350.5	100%

Sumber : Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

1. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencapai tujuan pertama ini yaitu ‘Regenerasi Kota’, ‘Ketahanan’, dan ‘Berkelanjutan’. Regenerasi kota merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi dua sasaran yaitu ‘Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas’ dan ‘Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit’.

Kedua sasaran ini dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai, dengan infrastruktur terkait mobilitas mendapatkan highlight utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri. Kata kunci selanjutnya yaitu ketahanan, ketahanan dimaksud mengadopsi prinsip-prinsip resilient city yang kemudian diturunkan menjadi sasaran ‘Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota’.

Kata kunci terakhir yaitu berkelanjutan, mewakilkan V-323 harapan bahwa seluruh pembangunan di Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga untuk menjamin hal tersebut dirumuskan sasaran ‘Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon’. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya regenerisasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77,66	100.54%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	20.97	22.19	105.82%
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25,9	101.97%
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks resiko bencana	Indeks	59.66	N/A	-

Sumber : Biro Pembangungan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator sebagai berikut :

Indeks Kota Layak Huni

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dtargetkan untuk mencapai Indikator Kota Layak Huni sebesar 71. Penilaian atas capaian indikator ini adalah berdasarkan Studi Most Livable City Index melalui penilaian atas beberapa aspek prinsip-prinsip Kota Layak Huni atara lain aspek ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik), aspek ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan), aspek ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat, aspek Keamanan, aspek dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota, serta aspek sanitasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya dan sifatnya adalah potret atau snapshot terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia yang dipublikasikan scara rutin melalui laman http://iapindonesia.org.

Informasi penilaian atas indikator ini terakhir diterbitkan oleh IAP Indonesia adalah pada tahun 2022. Berdasarkan laporan akhr yang dipublikasikan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia melalui laman

resminya http://iapindonesia.org pada tahun 2023, *Most Livable City Index* (MLCI/Indeks Kota Layak Huni) dengan 28 kriteria penilaian yang menjadi tolok ukur tingkat kelayakan sebuah kota, Provinsi DKI Jakarta memperoleh skor 71,3. Dai 28 kriteria yang menjadi penilaian, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian tertinggi pada 5 kriteria yang menjadi tolok ukur antara lain pada kriteria fasilitas peribadatan, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan, Jaringan Telekomunikasi, Fasilitas Kesehatan dan Ketahanan Pangan.

Selain mendapat nilai tertinggi pada 5 kriteria yang telah disebutkan, Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan penilaian 5 indeks terendah pada Sektor-sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, Perekonomian Kota dan Fasilitas Kesenian dan Budaya. Sedangkan penilaian tahun 2024 atas indikator ini belum di publikasikan oleh IAP Indonesia, sehingga data capaian pada setiap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Paerah Provinsi DKI Jakarta masih tercatat sebagai data Not Available (N/A) sebagaiamana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel II-6
Capaian IKU Indeks Kota Layak Huni

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya regenerisasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	71	N/A	-

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan target Tahun RPD 2023-2026:.

Tabel II-7
Target RPD Indikator "Indeks Kota Layak Huni"

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Terwujudnya regenerisasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71.3	71	N/A	67	68

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka menunjang ketercapaian Indikator Kota Layak Huni pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

yang ditetapkan melalui tujuan/sasaran “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penetrasi keuangan melalui beberapa program dan kegiatan disetiap tahun anggarannya yang terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa tujuan dan sasaran sektor yang diakukan penetrasi antara lain:

a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
b. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
c. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
d. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kota Layak Huni adaah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.470	13.778.904.342.076	90,44%
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	452.524.707.988	437.392.871.999	96.66%
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	22.266.374.312	20.404.747.385	91.64%
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	659.333.715.040	483.737.685.134	73.37%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Tingkat keberhasilan dalam mencapai Indikator Kota Layak Huni bagi Pemerintah Provnsi DKI Jakara tidak hanya didasarkan pada faktor dukungan angaran saja namun juga terdapat beberapa faktor pendukung lainnya antara lain:

a. Perwujudan program, anggaran dan kebijakan Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan yang yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

b. Kajian atau masukan dari para ahli/pakar tata kota terkait pencapaian Kota Layak Huni.

Adapun kendala yang dihadapai oeh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dalam rangka mencapai target Indikator Indeks Kota Layak Huni kemungkinan masih sama dengan yang dihadapi pada tahun–tahun sebelaumnya yaitu masih kurang/rendahnya tingkat kemudahan memperoleh pekerjaan, tingkat kemudahan memiliki rumah, dan tingkat persepsi kondisi lalu lintas/kemacetan.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, kedepan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaannya akan berfokus kepada Sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, dan Perekonomian Kota.

1.1 Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dtargetkan untuk mencapai Indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan sebesar 77,24 persen. Penilaian atas capaian indikator ini adalah berdasarkan pemenuhan layanan dasar perkotaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu: 1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi; 2) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan

Sumber Air Minum Layak; serta 3) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.

Penilaian atas indikator ini terakhir diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik hasil pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu: 1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi; 2) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta 3) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada laman resminya yang dirilis pada tanggal 2, 3 dan 9 Desember 2024, disampaikan bahwa capaian untuk masing-masing sub indikato tersebut pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

a. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut provinsi, yaitu sebesar 39.00%;
b. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak, yaitu sebesar 99.96%; dan
c. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, yaitu sebesar 94.01%.

Sehingga rata-rata realisasi ketiga sub indikator dimaksud yaitu sebesar 77,66%.

Tabel II-8
Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77.66	100.54%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar 77.66%, dimana target pada dokumen Perjanjian kinerja disesuaikan dengan realisasi tahun 2023, dan untuk target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 70.1 yang kemungkinan akan dilakukan penyesuaian disetiap tahunnya..

Tabel II-9
Target RPD Indikator "Indeks Kota Layak Huni"

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69.06	77.24	77.24	77.66	69.84	70.1

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka menunjang ketercapaian Indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 yang ditetapkan melalui tujuan/sasaran "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan", Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penetrasi keuangan melalui beberapa program dan kegiatan disetiap tahun anggarannya yang terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa tujuan dan sasaran sektor yang diakukan penetrasi antara lain:

a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
b. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
c. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
d. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program mendukung terkait dengan capaian Indikator Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan yaitu :

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.47(	13.778.904.342.07(	90,44%
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	452.524.707.988	437.392.871.999	96.66%
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	22.266.374.312	20.404.747.385	91.64%
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	659.333.715.040	483.737.685.134	73.37%

Sumber : Biro Pembangungan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun jumlah anggaran diatas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kota Layak Huni adaah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan (Hunian Layak) sebesar 452.524.707.988 dengan realisasi sebesar 437.392.871.999 atau 96,66%, anggaran ini diperuntukkan untuk pembangunan unit rumah susun sewa dan penataan kawasan permukiman.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Minum) sebesar 22.266.374.312 dengan realisasi sebesar 20.404.747.385 atau 91,64%. Anggaran program kegiatan ini diperuntukkan bagi Pembangunan sistem distribusi IPA Setu Babakan (segmen 1 s.d 4), Subsidi Air Bersih dan Verifikasi Pemberian Subsidi Air Bersih untuk Daerah Krisis Air dan Kepulauan Seribu, Penerapan Zona Bebas Air Tanah dalam mendukung percepatan peningkatan layanan air bersih perpipaan, dan Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Air Limbah/Sanitasi) sebesar 659.333.715.040 dengan realisasi sebesar 483.737.685.134 atau 73,37%. Anggaran ini diperuntukkan bagi

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPALD, Pembangunan JSS Zona 1, Kolaborasi penyediaan layanan sanitasi dengan berbagai stakeholder, Revitalisasi Tangki Septik (Subsidi), dan Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencpaian target indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan antara lain:

a. Untuk pemenuhan sumber air minum :
   - Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumber air minum sehingga bergantung/membutuhkan pasokan air dari daerah lain
   - Masih belum sinkronnya data terkait jumlah penduduk/rumah tangga dengan akses sanitasi layak

b. Air Limbah/Sanitasi :
   - Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman
   - Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic
   - Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunaan SPALD Terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal
   - Pengelolaan setempat/tangki septik yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI
   - Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun

Rencana yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian indikator ini adalah :

a. Untuk pemenuhan Hunian Layak Provinsi DKI Jakarta akan selalu berupaya dan melanjutkan dalam menyediaan Hunian Layak Bagi Seluruh Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
b. Pemenuhan sarana air bersih layak minum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target cakupan air perpipaan di tahun 2030 100% dengan caa pembangunan dan pengembangan IPA komunal, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pendampingan pembangunan SPAM Jatiluhur-Hilir (4000 Lps), SPAM Karian Serpong-Hilir (3200 Lps).
c. Untuk Pemenuhan sarana air libah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan jaringan pipa air limbah JSDP (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 1 Paket 5 dan Paket 6, Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman (sistem perpipaan dan interceptor), dan Peningkatan kapasitas

Jumlah Sambungan Rumah (SR), Optimalisasi Jaringan Perpipaan, pembangunan SPALD-Setempat, dan penyiapan kebijakan terkait Revitalisasi Tangki Septik.

1.1. Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

Indikator Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik merupakan sasaran dari Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Indikator ini merupakan penggambaran besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam pergerakannya.

Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik sebesar 20,97% yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tabel II-10
Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	20,97

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Realisasi Capaian nilai Persentase Perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 22,19% berdasarkan hasil perolehan jumlah perjalanan dengan angkutan umum sebesar 4.485.930 perjalanan/hari dan hasil perhitungan data lalu lintas tahun 2024 sebesar 20.214.870 perjalanan/hari.

Tabel II-11

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	20,97	22,19	105,82

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Adapun realisasi jumlah perjalanan penumpang angkutan umum sebanyak 12 moda pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II-12

Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2024

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah	Satuan
1.	Transjakarta	1.230.545	Perjalanan/hari
2.	KRL	828.679	Perjalanan/hari
3.	MRT	110.381	Perjalanan/hari
4.	LRT Jakarta	3.310	Perjalanan/hari
5.	LRT Jabodetabek	6.096	Perjalanan/hari
6.	Railink	6.102	Perjalanan/hari
7.	Bus/Angkot reguler	254.684	Perjalanan/hari
8.	Ojek *(Online)*	1.202.049	Perjalanan/hari
9.	Taxi Bajaj	20.414	Perjalanan/hari
10.	ASK	601.048	Perjalanan/hari
11.	Kapal	3.418	Perjalanan/hari
12.	Bus Sekolah	39.242	Perjalanan/hari
Jumlah perjalanan dengan angkutan umum		**4.485.930**	**Perjalanan/hari**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data perbandingan antara jumlah perjalanan menggunakan 12 (dua belas) moda angkutan umum dengan jumlah perjalanan per hari pada tahun 2024, maka persentase jumlah perjalanan yang menggunakan angkutan umum di DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 22,19%.

Sasaran Indikator kinerja utama persentase jumlah perjalanan dengan angkutan umum di DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-13
Target RPD

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18.78	18.86	20,97	22,19	21.87	23.01

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan target pada tabel di atas, target akhir untuk persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sebesar 23,01%. Adapun capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum pada tahun 2024 sebesar 22,19%. Selisih capaian untuk mencapai target akhir sebesar 0,82% sehingga diperlukan peningkatan kinerja dalam implementasi strategi manajemen kebutuhan lalu lintas (*Transport Demand Management).*

Sehubungan dengan capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum Tahun 2024, ada beberapa program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan capaian tersebut terdiri dari :

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu:

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	1	Dinas Perhubungan	**Program Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**	6.269.558.691.719	5.705.198.220.669	91%
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.688.870.992.730	5.188.068.074.657	91,20%
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.861.812	273.816.060	95,45%
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	463.975.969.701	405.253.343.502	87,34%

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	18.899.312.333	16.857.472.442	89,20%
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	31.432.293.033	30.571.651.993	97,26%
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	15.125.098.221	15.046.076.403	99,48%
	2		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	39.767.739.396	35.829.816.457	90,10%
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	27.672.910.995	24.152.672.267	87,28%
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.043.167.626	10.711.571.236	97,00%
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.051.660.775	965.572.954	91,81%
	3		**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
			Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
	4		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	856.741.629.586	812.987.434.642	94,89%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.787.886.488	66.205.814.678	88,52%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.760.628.597	56.160.010.135	97,23%

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.744.295.549	98.469.306.537	94,01%
			TOTAL	**6.499.590.679.979**	**5.916.350.710.386**	**91,03%**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Realisasi anggaran dalam program penunjang persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2024 terlaksana sebesar Rp 5.916.350.710.386 dari total pagu anggaran sebesar Rp 6.499.590.679.979, atau capaian sebesar 91,03% dengan efisiensi sebesar 9,97% dari nilai total pagu anggaran.

Selain program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menunjang pencapaian indikator tersebut, seperti KSD nomor 2 Penanganan Kemacetan dan 8 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan, dengan renaksi sebagai berikut:

1) Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel;
   a. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1 B Velodrome-Manggarai
   b. Pembangunan MRT Fase 2 A (Bundaran HI-Kota)
   c. Perencanaan Pembangunan MRT East-West Phase 1 Stage 1
2) Pengembangan Transit Oriented Development (TOD);
   - Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait peningkatan dan pengembangan area stasiun Tanah Abang
3) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya.
   a. Penyelesaian Trotoar Complete Street di Provinsi DKI Jakarta
   b. Pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) di atas telah dilaksanakan dan hasilnya mencapai target yang ditetapkan dalam KSD guna mendorong pencapaian indikator persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik.

Secara nasional, penggunaan angkutan umum di Indonesia mengalami peningkatan pada masing-masing moda perjalanan. Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada periode Januari-Agustus 2024 sebesar 42,0 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebesar 12,3 juta orang, meningkat sebesar 1,50% dan 23,94% dari tahun 2023 (BPS, 2024). Adapun jumlah penumpang

angkutan laut mencapai 17,3 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 26,02% dari tahun sebelumnya dan jumlah penumpang angkutan kereta api sebesar 277,5 juta orang, atau naik 14,87% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh beberapa institusi, persentase penggunaan angkutan umum di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,25% sedangkan 71,65% dari responden menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda utama perjalanan (Statista, 2024).

Secara umum capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2023 telah tercapai karena koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholde*r yang baik serta adanya komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan penggunaan moda angkutan umum di DKI Jakarta. Selain itu, implementasi strategi integrasi antar moda, seperti integrasi layanan, integrasi tarif, dan fisik juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target penggunaan angkutan umum, yaitu adanya layanan *feeder* di beberapa titik simpul transportasi, penataan kawasan stasiun, integrasi tarif antar moda, dan peningkatan infrastruktur *skywalk*/jembatan penghubung antar titik simpul yang memudahkan perjalanan pengguna angkutan umum sehingga aspek kenyamanan dan kemudahan dapat terpenuhi yang dapat meningkatkan penggunaan moda angkutan umum.

Adapun penggunaan angkutan umum masih didominasi oleh angkutan *online*. Harapan mendatang transportasi publik dapat lebih berperan sebagai moda utama perjalanan dengan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Beberapa kendala, seperti aspek keandalan, contohnya *headway* yang tidak selalu sesuai pada moda angkutan massal berbasis jalan karena lajur masih bersinggungan dengan kendaraan lain, keterbatasan lahan sehingga kenyamanan pada titik simpul tidak dapat optimal. Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan persentase penggunaan angkutan publik Tahun 2024 antara lain:

Tabel II-14
Faktor Keberhasilan

No	Faktor	Kegiatan
1.	Koordinasi antar stakeholder yang intensif	– Rapat monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum massal (BRT, MRT, LRT) secara berkala; – Pembahasan Rencana pengembangan angkutan massal MRT East - West – Pembahasan LRT Velodrome - Manggarai – Penandatanganan perjanjian kerja sama *e-ticketing* angkutan perairan
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum layanan angkutan umum	Pengawasan pelaksanaan SPM pada Transjakarta, MRT, LRT
3.	Dukungan Pengoperasian angkutan umum massal	– Dukungan feeder dan prasarana lalu lintas pada pengoperasian layanan angkutan umum baru, seperti Kereta Cepat, LRT Jabodebek – Penyiapan kantong parkir atau park&ride pada area titik simpul angkutan umum
4.	Perluasan layanan angkutan umum	– Pelaksanaan layanan Transjakarta pada Bandara Soekarno Hatta – Penambahan jam operasional layanan angkutan umum pada acara-acara besar (event musik, tahun baru, dll)
5.	Integrasi	– Tarif Integrasi pada Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta – Integrasi LRT Jabodebek – Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Stasiun KRL – Pemasangan prasarana lalu lintas pada simpul transportasi terintegrasi – Aplikasi JaketBoat
6.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung angkutan umum	– Modernisasi Terminal Kampung Rambutan – Optimalisasi Dermaga Apung Pulau Tidung – Peningkatan fasilitas dermaga pelabuhan di Kepulauan Seribu – Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) pada Bus-Bus AKAP
7.	Inklusivitas dalam transportasi umum	– Keberpihakan pada disabilitas dengan pemberian kartu khusus disabilitas bagi penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan tarif gratis – Pemberian subsidi berupa tarif gratis untuk layanan Transjakarta bagi 15 (lima belas) golongan.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Dalam upaya mencapai target perjalanan menggunakan transportasi publik, terdapat tantangan yang dihadapi sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi tantangan optimalisasi penggunaan perjalanan menggunakan transportasi publik tersebut antara lain:

Tabel II-15
Faktor Penghambat

No	Kendala	Rekomendasi/ Mitigasi
1.	Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi	diperlukan kebijakan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi
2.	Keterbatasan lahan dalam pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan umum	koordinasi dan penyesuaian desain
3.	Aspek keandalan angkutan umum	agar angkutan umum lebih adaptif dalam penerapan teknologi untuk layanan angkutan publik, seperti peningkatan pengalaman pengguna dengan peningkatan Sistem Informasi Penumpang (informasi rute, jadwal, lokasi armada, tarif) yang dapat diakses melalui gawai.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Beberapa strategi praktek yang sesuai untuk keberhasilan penggunaan transportasi publik, adalah sosialisasi dan komunikasi publik secara konsisten. Selain itu, secara proaktif merencanakan layanan, dan fokus terhadap kelompok pengguna tertentu seperti pekerja, komunitas dan kesetaraan sosial serta memperkuat aspek keselamatan (APTA, 2023). Upaya lain adalah dengan memanfaatkan peluang untuk memperluas jumlah penumpang angkutan umum dan terus mengikuti perubahan. Guna meningkatkan persentase perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi sebagai berikut:

Tabel II-16
Rencana Aksi 2025

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025
1	Pemberian subsidi Transjakarta	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
2	Pemberian subsidi MRT	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
3	Pemberian subsidi LRT	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
4	Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	– Rencana pola operasi dan penambahan jumlah penumpang – Penambahan armada bus sekolah
5	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum Provinsi DKI Jakarta	– Pengemudi angkutan umum yang tersertifikasi – Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum
6	Peningkatan dan pengembangan Angkutan Perairan	– Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan – Pengadaan kapal angkutan perairan

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025
7	Peningkatan Terminal Bus Tipe A dan Tipe B	– Peningkatan Terminal Tipe A (Peningkatan SPP Terminal Bus Kalideres & Dokumen Kajian Pendukung Revitalisasi Terminal Bus Kampung Rambutan) – Peningkatan Terminal Tipe B (Peningkatan SPP/ Pemeliharaan Terminal Bus Cililitan, Pulogadung, Ragunan, Rawamangun, Muara Angke, TMB Pulogebang)
8	Peningkatan pelabuhan dan dermaga di wilayah DKI Jakarta	– Revitalisasi Pulau Pari
9	Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome – Manggarai	– Surat Penyampaian Dokumen Finalisasi gambar teknis LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai – Rekomendasi Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Persetujuan Andalalin Pembangunan Jalur (Pier 111B-198B) dan Stasiun LRT Fase 1B (Velodrome-Manggarai) – Perizinan dan pembangunan LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai
10	Pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota)	– Pelepasan Hak di Lokasi Grand Paragon Kecamatan Taman Sari ang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat – Musyawarah bentuk ganti kerugian di Lokasi Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat – Pelepasan Hak di Lokasi Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat – Pengadaan tanah di Lokasi Grand Paragon di lokasi Grand Paragon Kecamatan Taman Sari, Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari, dan Bidang Tanah Milik L Yudianto Kecamatan Taman Sari
11	Pembangunan MRT Fase 2B	– Penetapan Trasse MRT Fase 2B (Kota – Ancol)
12	Pembangunan MRT *East-West*	– Review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) (Lokasi terdiri dari 479 bidang) – Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) ke Gubernur (Lokasi terdiri dari 479 bidang)
13	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Transportasi 1.) Rancangan Peraturan Daerah terkait Rancangan Induk Transportasi 2.) Rancangan Peraturan Daerah terkait Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas)	– Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah – Dokumen hasil kordinasi dengan Biro Hukum terkait Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Transportasi
14	Penyediaan Prasarana Integrasi Antar Moda sebanyak 4 (empat) titik di lokasi Stasiun Angke, Stasiun Buaran, Stasiun Mangga Besar, dan Stasiun Pancasila	– Menyusun Laporan Konsep Perencanaan Titik Integrasi di lokasi Stasiun Angke, Stasiun Buaran, Stasiun Mangga Besar, dan Stasiun Pancasila – Pengadaan Prasarana Integrasi Antar Moda

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

1.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat

komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar.

Rumus yang digunakan untuk penghitungan IKLH adalah:

IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)

Keterangan:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut.

1) Perhitungan nilai IKA diperoleh dari data hasil pemantauan Kualitas Air Sungai dan hasil pemantauan Kualitas Air Waduk/Danau/Situ yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas air sungai yang dilakukan sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat. Sedangkan pengukuran kualitas air Waduk/Danau/Situ dilakukan sebanyak 10 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecalcoli, Total Fosfat, Kecerahan, klorofil-q, Total nitrogen.
2) Perhitungan nilai IKU diperoleh dari data pengukuran kualitas udara dengan menggunakan metode Passive Sampler dengan memasang alat di 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah. Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan sebanyak 2 parameter yaitu SOz dan NOz.
3) Perhitungan nilai IKAL diperoleh dari data hasil pemantauan Kualitas Air Laut dan Muara Teluk Jakarta yang dilakukan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran kualitas air laut sebanyak 5 parameter yaitu TSS, DO, N-NH3, Orthoposfat dan Minyak Lemak.

4) Perhitungan nilai IKTL diperoleh dari data spasial dan non-spasial. Data spasial yang digunakan antara lain dari berbagai peta resmi di jakartasatu.jakarta.go.id dan hasil pengolahan citra satelit resolusi tinggi wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data non-spasial diperoleh dari data kawasan hutan dan data kawasan hutan produksi yang tertuang dalam SK MenKLHK No.452lMenlhk-Setjen/2015 serta berbagai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta. Adapun capaian indikator kinerja utama Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel II-17
Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemulihan ekosistem kota implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar 56.39 dengan capaian 101.73%, dimana target pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 55.43 disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023. Sehingga target pada dokumen RPD Tahun 2023-2026 dilakukan penyesuaian, adapun target akhir pada tahun 2026 pada indikator yaitu 56.43.

Tabel II-18
Target RPD Indikator "Indeks Kota Layak Huni"

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54.93	54.97	55.43	56.39	55.93	56.43

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam mencapai capaian IKLH ada beberapa sumber daya yang mendukung diantaranya:

a. konsultasi teknis dengan KLHK RI Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan pelaksanaan penyusunan IKLH
b. koordinasi dengan SKPD terkait data hasil pemantauan
c. monitoring pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan
d. peningkatan kapasitas terkait pengambilan dan pengujian sampel air dan udara
e. expose hasil IKLH ke OPD dan stakeholder terkait

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2A21 tentang lndeks Kualitas Lingkungan Hidup, rumusan perhitungan IKLH dilakukan dengan agregasi terhadap 4 (empat) komponen pembentuk indeks yaitu lndeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 34%, lndeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot sebesar 42,8%, lndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) bobotnya sebesar 13,3% dan lndeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan bobot sebesar 9,9%.

Adapun beberapa kendala yang terjadi yaitu terdiri dari :

- Kebijakan penataan ruang khususnya area bantaran dan sempadan sungai.
- Beban pencemar dari limbah domestik rumah tangga.
- Minimnya upaya pengendalian pencemaran air baik program ataupun kebijakan pengendalian pencemaran sungai lintas sectoral.
- Rendahnya curah hujan akibat fenomena el nino.
- Rendahnya curah hujan akibat fenomena el nino.
- Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- Kebijakan penataan ruang yaitu minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan konservasi.
- Diperlukan OPD lain sebagai pengampu khususnya untuk IKA dikarenakan dominasi beban pencemar dari limbah domestik yang sebagian besar tugas dan fungsinya berada di DSDA, sedangkah DLH hanya melaksanakan pemantauan kualitas sungai dan pengawasan pada kegiatan/usaha.

- Tidak adanya kerjasama dengan provinsi Jawa Barat sebagai lokasi hulu sungai-sungai di Jakarta sedangkan pemulihan kualitas sungai memerlukan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir serta koordinasi yang kuat dengan Lembaga pengelola das yaitu BP DAS dan Lembaga pengelola koridor sungai BBWSCC. Berikut program pendukung terkait dengan pencapaian Indeks Kota Layak Huni:

Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024 (Rp)		Capaian (Rp)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni		Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.470	13.778.904.342.076	90,44%
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	106.726.954.624	104.951.201.514	98,34%
	2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (***anggaran pelaporannya/ perhitungan realisasinya***, *dari aktivitas Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)*	5.556.259.397	5.000.266.625	89.99%

Adapun Tindak lanjut untuk pencapaian Target IKLH pada Tahun 2024 yaitu akan dilakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait metodologi, pengambilan sampel dan rumusan perhitungan nilai.

1.3. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 guna guna tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon pada penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai baseline-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*).

1) Inventarisasi emisi GRK untuk direct emission merujuk Guidelines Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC 2006 GL), dimana penghitungan CO2 menggunakan pendekatan Tier-2 sedangkan CH4 dan N2O menggunakan pendekatan Tier-1. Pusdatin ESDM, dalam hal ini Lemigas dan Tekmira telah menetapkan faktor emisi lokal (Tier 2) untuk gas karbon dioksida pada beberapa jenis bahan bakar (BBM, batubara dan gas).
2) Perhitungan inventarisasi emisi GRK di sektor IPPU didapatkan dari adanya penggunaan bahan baku selama proses produksi di industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan produk (misalnya pelumas, paraffin, wax dan sebagainya) selama proses produksi di industri juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Terbentuknya gas di kedua kondisi tersebut dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor IPPU. Sedangkan penggunaan bahan bakar selama proses produksi di industri dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor energi. Pemisahan ini harus jelas agar penghitungan emisi GRK dilakukan agar tidak terjadi double counting.
3) Berdasarkan pedoman IPCC 2006, kategori peternakan (3A) dibagi ke dalam sub-kategori: fermentasi enterik (3A1) dan pengelolaan kotoran ternak (3A2). Data-data yang digunakan dalam proses kuantifikasi yang dilakukan yaitu bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Metodologi estimasi emisi dari sub-sektor peternakan.
4) Tingkat emisi GRK sektor limbah bergantung jumlah limbah yang dibuang/diolah, karakteristik limbah, dan proses pengolahan/ pembuangan limbah. Perhitungan GRK berdasarkan metodologi dalam panduan IPCC 2006 dengan menggunakan metode FOD (First Order Decay). Namun ada beberapa parameter yang menggunakan parameter lokal, diantaranya komposisi sampah dan kandungan bahan kering (dry matter content).

Pada tahun 2024 tingkat persentase penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan yaitu sebesar 25.9%, dimana target pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan penyesuaian target dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi 25.4%.

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-19
Capaian IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25.9	101.97%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023 tingkat persentase penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan yaitu sebesar 25.4%, dimana target pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu 19.3%.

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :.

Tabel II-20
Target RPD Indikator "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19.3	25.4	25.4	25.9	20.5	22.3

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun pada tahun 2022 belum dijadikan target, sehingga realisasi pada tahun 2023 sebesar 25.4 dengan capaian 131.61% tidak dapat diperbandingkan, indikator tersebut memiliki target pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 19.3 sesuai dengan target RPD Tahun 2023-2026, adapun target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 22.3.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mempunyai program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup, selain program tersebut ada beberapa rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.

Alokasi Anggaran untuk Perhitungan Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Rp. 1.982.121.782 Dengan Realisasi Rp. 1.975.469.477. dengan efisiensi anggaran sebesar 0,34 persen.adalah sebagai berikut:

Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024 (Rp)		Capaian (%)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
	Indeks Kota Layak Huni		Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.470	13.778.904.342.076	90,44%
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	106.726.954.624	104.951.201.514	98,34%
	2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (***anggaran pelaporannya/ perhitungan realisasinya***, *dari aktivitas Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)*	5.556.259.397	5.000.266.625	89.99%

Target NDC dipandang dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia, di mana target tanpa syarat secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak

17.2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0.32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.

Pada penurunan emisi gas rumah kaca terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih sulitnya mendapatkan data primer yang diampu oleh pengampu data Perangkat Daerah.

Kedepannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meng-arus-utama-kan target GRK 2030 dan 2050, DKI Jakarta berupaya memasukkan indikator penurunan GRK dalam perencanaan-perencanaan daerah jangka pendek, menengah maupun panjang. Melalui kegiatan inventarisasi dan pelaporan penurunan emisi GRK yang dilakukan tahun ini, telah dilakukan proyeksi tingkat emisi GRK dan penurunan emisi GRK periode 2023-2030 yang merupakan bagian dari hasil proyeksi target 2030 dan NZE 2050.

1.4. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah menghitung kemungkinan terjadinya bencana semakin kecil nilai IRB maka semakin kecil nilai terjadinya bencana. Tujuan dari IRB adalah untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia sehingga IRB merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan Risiko Bencana yang ada dan dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lainnya.

Terdapat 7 Prioritas pada pencapaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu :

a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Indeks Resiko Bencana diperoleh dengan menghitung beberapa komponen penilaian yaitu :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI
1	Bahaya (*Hazard*)
2	Kerentanan (*Vulnerability*)
3	Kapasitas (Capacity)

Rumus Indeks Risiko Bencana

$$\text{Risiko} = \frac{\textit{Hazard}\ (\text{Bahaya}) \times \textit{Vulnerability}\ (\text{Kerentanan})}{\textit{Capacity}\ (\text{Kapasitas})}$$

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) memiliki luas wilayah 1.671,83 km2. DKI Jakarta memiliki struktur geologi yang terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat di +50 m di bawah permukaan tanah, sementara kondisi topografinya terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8m dpl. Sekitar 40% wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada pada 1-1,5m di bawah muka laut pasang. Secara klimatologi cuaca di Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, dimana pada bulan Januari umumnya terjadi curah hujan tertinggi dan terendah pada bulan Juli dan Agustus.

Pada tahun 2022 Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 3 jenis bencana alam yang dominan terjadi di DKI Jakarta adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor. Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 adalah 62,58. berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, sedangkan pada tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 61,31 (sedang).

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-21
Capaian IKU Indeks Resiko Bencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Resiko Bencana	Indeks	59.66	N/A	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan Indeks IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 yaitu sebesar 1,27 dari tahun sebelumnya yaitu 61,31 (tetap dalam kategori sedang).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Resiko Bencana	Indeks	60.12	61.31	59.66	N/A	59.16	58.72

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tabel II-22
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	IRB 2024
Kepulauan Seribu	43,50
Jakarta Selatan	49,75
Jakarta Timur	71,59
Jakarta Pusat	54,25
Jakarta Barat	67,76
Jakarta Utara	68,,89
Provinsi DKI Jakarta	**57,29**

Sumber IRBI 2024

Sehubungan dengan capaian nilai IRBI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ada beberapa Instansi terkait yang terlibat dalam pengisian indikator Ketahanan Daerah yaitu :

No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	11	Dinas Kesehatan	21	DKPKP
2	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	12	Dinas Pendidikan	22	Biro PLH
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	NGO	23	Polda Metro
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	PMI	24	PDAM
5	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	15	Satuan Polisi PP	25	BBWSCC
6	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geografi (BMKG)	16	Dinas Pemuda dan Olahraga	26	Dinas Sosial
7	Dinas Cipta Karya	17	Bulog		
8	Sekretariat Dewan DPRD	18	Dinas Perhubungan		
9	Dinas Lingkungan Hidup	19	PLN		
10	Dinas Sumber Daya Air	20	BUMD		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Adapun program yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 di BPBD Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai IKD dan IRB	1	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	100.248.433.446	97.037.314.337	96,80%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai IRBI tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 97.037.314.337 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 100.248.433.446 atau capaian sebesar 96,80% dari nilai total anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

BPBD Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan sumber daya manusia dengan menempatkan personel sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan :

1) Rekrutmen tenaga ahli di bidang kebencanaan

a) BPBD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rekrutmen Tenaga Non ASN dengan Jumlah Petugas Penanganan Bencana Tahun 2024 sebanyak 267 orang

b) Petugas Penanganan Bencana tersebut bertugas di masing-masing kelurahan dengan posko di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Adapun tugas dari Petugas Penanganan Bencana ini adalah :

- Melaksanakan penyelenggaraan manajemen penangulangan bencana di Daerah;
- Melaksanakan pengurangan risiko bencana di Wilayah;
- Melaksanakan penanganan bencana di Wilayah;
- Melaksanakan pemulihan dini bencana di Wilayah.

Untuk meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana sebanyak 267 orang BPBD bekerjasama dengan BNPB dan Bazarnas memberikan Bimbingan Teknis kepada Petugas Penanganan Bencana berupa :

- Peningkatan Kapasitas Pertolongan di Permukaan Air Bagi Petugas Penanganan Bencana
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Personil Dalam Penanganan Korban dan Pengungsi Akibat Bencana

Petugas P2B tersebut diturunkan ke setiap kelurahan untuk memberikan laporan dan pertolongan awal pada saat kejadian bencana di wilayah dengan cepat.

Pada kegiatan KIE, BPBD melalui 18 Tenaga Ahli Literasi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat pengunjung ruang literasi kebencanaan baik yang berasal dari anak sekolah dan masyarakat umum. Semakin banyaknya permintaan dari instansi/lembaga terkait sosialisasi kebencanaan.

BPBD juga melaksanakan rekrutmen PJLP untuk ditempatkan di Pusdatin sebanyak 60 Orang, dengan rincian Petugas Call Center sebanyak 33 orang, SO sebanyak 10 orang, Customer Relation 2 orang, Community Manager 10 orang, GIS 2 orang, Tenaga Kebersihan 2 orang, dan 1 orang SPV untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kebencanaan serta 6 Orang Tenaga Ahli.

2) BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai 57 ASN yang terbagi dalam 3 bidang, 1 unit, dan 1 sekretariat. Selain melaksanakan tugas sesuai fungsinya, ASN BPBD juga ditugaskan sebagai narasumber untuk memberikan informasi, edukasi dan sosialisasi terkait Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung, Pembinaan dan pendampingan serta simulasi sekolah/madrasah aman bencana, dan kegiatan lain. Untuk meningkatkan kapasitas para ASN tersebut sesuai dengan tupoksinya, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh K/L lain.

3) BPBD juga melakukan Rotasi dan promosi pegawai untuk menjaga motivasi dan kinerja dari ASN BPBD.

b. Sumber Daya Teknologi

BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dengan andalannya Layanan Jakarta Siaga 112/ Call Center 112 dan command Center. Beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan teknologi dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas utama BPBD. Teknologi yang digunakan meliputi:

1) Sistem peringatan dini berbasis IoT (Internet of Things) untuk memantau potensi bencana.
2) Penggunaan drone untuk survei dan pemetaan area terdampak.
3) Integrasi data berbasis GIS untuk perencanaan dan analisis risiko bencana.
4) Aplikasi Siaga 112 dan Layanan Omnichanel Jakarta Siaga 112 merupakan inovasi layanan digital dari Jakarta Siaga 112 yang dapat diakses secara gratis melalui semua operator telepon, baik telepon seluler (dengan atau tanpa simcard), telepon rumah dan melalui Whatsapp di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5) Aplikasi Simba merupakan aplikasi utama yang digunakan di BPBD merupakan hasil pengolahan yang dilakukan oleh petugas yang bersumber dari informasi SKPD terkait, laporan masyarat, lurah dan lain-lain serta dari pemantauan petugas piket di lapangan.

Selain itu BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Ruang Literasi Kebencanaan yang menggunakan teknologi simulasi gambaran kejadian bencana (VR). Pemafaatan teknologi (media sosial website dan lain-lain terkait dengan teknologi informasi).

Berikut capaian Nilai/Predikat IRBI seluruh Pemda tahun 2023 oleh BNPB secara Nasional diumumkan pada Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2024 :

NO	PROVINSI	IRBI 2022	IRBI 2023	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	149.10	146.90	▼	TURUN
2	SUMATERA UTARA	142.51	140.65	▼	TURUN
3	SUMATERA BARAT	144.39	144.38	▼	TURUN
4	RIAU	141.26	137.75	▼	TURUN
5	JAMBI	133.49	135.69	▲	NAIK
6	SUMATERA SELATAN	132.99	131.24	▼	TURUN
7	BENGKULU	155.35	148.75	▼	TURUN
8	LAMPUNG	142.55	135.66	▼	TURUN
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	158.52	155.61	▼	TURUN
10	KEPULAUAN RIAU	110.93	107.79	▼	TURUN
11	DKI JAKARTA	62.58	61.31	▼	TURUN
12	JAWA BARAT	131.62	123.15	▼	TURUN
13	JAWA TENGAH	115.38	109.01	▼	TURUN
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	119.56	108.15	▼	TURUN
15	JAWA TIMUR	121.70	118.61	▼	TURUN
16	BANTEN	140.51	132.21	▼	TURUN
17	BALI	123.90	120.21	▼	TURUN
18	NUSA TENGGARA BARAT	119.83	115.37	▼	TURUN
19	NUSA TENGGARA TIMUR	139.23	132.81	▼	TURUN
20	KALIMANTAN BARAT	136.72	138.93	▲	NAIK
21	KALIMANTAN TENGAH	123.56	121.72	▼	TURUN
22	KALIMANTAN SELATAN	128.81	129.44	▲	NAIK
23	KALIMANTAN TIMUR	146.67	144.43	▼	TURUN
24	KALIMANTAN UTARA	157.47	148.16	▼	TURUN
25	SULAWESI UTARA	129.62	128.01	▼	TURUN
26	SULAWESI TENGAH	143.44	140.56	▼	TURUN
27	SULAWESI SELATAN	150.07	144.47	▼	TURUN
28	SULAWESI TENGGARA	155.29	153.08	▼	TURUN
29	GORONTALO	120.61	116.71	▼	TURUN
30	SULAWESI BARAT	165.23	160.08	▼	TURUN
31	MALUKU	162.47	160.03	▼	TURUN
32	MALUKU UTARA	149.22	148.71	▼	TURUN
33	PAPUA	138.27	138.59	▲	NAIK
34	PAPUA BARAT	143.92	145.76	▲	NAIK
35	PAPUA SELATAN	138.20	138.20	▬	TETAP
36	PAPUA TENGAH	116.30	116.49	▲	NAIK
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.05	102.05	▬	TETAP
38	PAPUA BARAT DAYA	150.31	148.44	▼	TURUN

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat Indeks Resiko Bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain:

No	Hambatan	Tindak Lanjut
1	Melibatkan SKPD terkait sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif dalam pemenuhan 71 indikator. Hal ini memperlambat terselesaikannya pemenuhan target	Mengadakan Focus Group Discussion, Rapat koordinasi antar SKPD
2	Proses pembuatan kebijakan yang membtuhkan waktu lama	Lebih proaktif dalam proses penyusunan kebijakan (Proses Perbal)

Guna memperbaiki nilai/predikat IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024	Target
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023 - 2027	Peraturan Gubernur Rencana Penanggulangan Bencana 2023 - 2027 sampai pengesahannnya
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana)
3	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pembentukan Peta Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD 2022	Peta kapasitas penanggulangan bencana tingkat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
4	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis JITUPASNA untuk Aparatur	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA)
5	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Penyusunan Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.2 Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tujuan kedua ini yaitu ‘Perekonomian Inklusif’, ‘Daya Saing’, ‘Penghidupan Layak’ dan ‘Pemerataan Kesejahteraan’. Perekonomian inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran ‘Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah’. Kata kunci selanjutnya yaitu terkait daya saing, mengadopsi global *competitiveness index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata

kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran V-327 ‘Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi’. Kata kunci berikutnya terkait penghidupan layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sasaran ‘Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja’. Kata kunci terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan, sehingga dirumuskan sasaran ‘Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial’. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel II-23
Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks pembangunan ekonomi inklusif	Indeks	7.81	8.20	104.99%
Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi	persen	4.80 – 5.6	4.90	100%
Meningkatnya kesempatan kerja dan adatabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6.53	6.21	105.15%
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan	Tingkat Kemiskinan	persen	3.79	4.14	91.55%
	Rasio gini	Koefisien	0.410	0.431	95.13%
	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	0.5	0.35	142.86%
Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks daya saing daerah	Persen	4.01	N/A	-

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan tujuan/sasaran dari Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 7,81 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir pada tahun 2023 oleh Bappenas mempunyai nilai Capaian sebesar 8,20 poin atau kategori sangat memuaskan, sehingga pada tahun 2024 nilai capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat dibandingkan dengan target.

Tabel II-24
Capaian IKU Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7.81	8.20 (Tahun 2023)	-

Sumber: Bappenas
Ket: Skala 1-3 = kurang memuaskan, 4-7 = memuaskan, 8-10 = sangat memuaskan
****menggunakan data terakhir tahun 2023, untuk data tahun 2024 belum dirilis Bappenas***

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terpenuhi namun masih menggunakan data terakhir Bappenas tahun 2023. Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7.69	7.93 (data 2021)	7.81	8.20 (data 2023)	7.93	8.04

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan target pada tabel di atas Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada target akhir mempunyai nilai/indeks sebesar 7,81 poin. Sehingga Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menurut data terakhir Tahun 2023 sebesar 8,20 sudah tercapai. Namun untuk data capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Bappenas. Berikut capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif peringkat 1 s.d. 3 tertinggi seluruh Indonesia serta capaian nasional tahun 2023 oleh Bappenas yang dirilis pada *website* Bappenas:

No	Pemda	Indeks 2023*
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	8,20
2	Pemerintah Provinsi Bali	7,04
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7,00
	Indonesia	6,17

Sumber : Bappenas (https://inklusif.bappenas.go.id/data)
Keterangan: * menggunakan data terakhir tahun 2023, untuk data tahun 2024 belum dirilis Bappenas

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Keberhasilan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, pilar 3. Perluasan Akses dan Kesempatan, dan sub-Pilar 3.1. Kapabilitas Manusia. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Salah satu indikator yang digunakan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 13,51 tahun.

<table>
<tr><th rowspan="2">Kota/Kabupaten</th><th colspan="3">Harapan Lama Sekolah (Tahun)</th></tr>
<tr><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr>
<tr><td>Kabupaten Kepulauan Seribu</td><td>12,65</td><td>12,66</td><td>12,67</td></tr>
<tr><td>Kota Jakarta Selatan</td><td>13,35</td><td>13,66</td><td>13,94</td></tr>
<tr><td>Kota Jakarta Timur</td><td>13,97</td><td>14,06</td><td>14,07</td></tr>
<tr><td>Kota Jakarta Pusat</td><td>13,28</td><td>13,29</td><td>13,31</td></tr>
<tr><td>Kota Jakarta Barat</td><td>12,82</td><td>12,87</td><td>13,14</td></tr>
<tr><td>Kota Jakarta Utara</td><td>12,66</td><td>12,67</td><td>12,70</td></tr>
<tr><td>DKI Jakarta</td><td>13,08</td><td>13,33</td><td>13,51</td></tr>
</table>

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024)</td><td>• Pada tahun 2024, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan di Kota Jakarta Timur diharapkan dapat bersekolah selama 14,07 tahun atau diperkirakan dapat masuk ke Diploma Dua, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 12,67 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu.
• Kelima kota memiliki HLS yang cukup merata. Pada tahun 2024, Disparitas HLS antara Kota Jakarta Timur dengan HLS tertinggi dan Kabupaten kepulauan Seribu dengan HLS terendah sekitar 1,40 tahun.
• Dilihat dari sisi pertumbuhan HLS, selama periode tahun 2022-2024 berturut-turut dari yang tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan sebesar 0,59 persen diikuti oleh Kota Jakarta Barat sebesar 0,32 persen, Kota Jakarta Timur sebesar 0,10 persen, Kota Jakarta Utara 0,04 persen, Kota Jakarta Pusat 0,03 persen, dan Kabupaten Kepulauan Seribu 0,02 persen.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Kendala</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="2">Data tidak tersedia untuk tahun 2024. Data terakhir dirilis oleh Bappenas untuk Indeks tahun 2023.</td><td>https://inklusif.bappenas.go.id/data</td></tr>
</table>

Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mempunyai beberapa prioritas pembangunan yang terdiri dari

<table>
<tr><th>No</th><th>Kegiatan</th><th>Prioritas Pembangunan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus utama transformasi ekonomi (green economy, blue economy, gig economy, digitalization), pengembangan riset dan inovasi, peningkatan daya tarik pariwisata, iklim investasi, serta penciptaan dan perluasan kesempatan kerja

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus utama percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan, optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan</td><td>
<table>
<tr><th>Dimensi/Tujuan Pembangunan</th><th>Sasaran Pembangunan</th><th>Prioritas Pembangunan Tahun 2025</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Economic
Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan</td><td>Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja</td><td rowspan="3">Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
dengan fokus utama, yaitu:
1. Transformasi Ekonomi (Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization)
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
3. Peningkatan Investasi Daerah
4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui Cultural Interaction
5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja</td></tr>
<tr><td>Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi</td></tr>
<tr><td>Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah</td></tr>
<tr><td>Pengurangan Ketimpangan</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Human
Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan</td><td>Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial</td><td rowspan="4">Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
dengan fokus utama, yaitu:
1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi
2. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting
3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan
4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial
5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
6. Penguatan Ketahanan Pangan</td></tr>
<tr><td>Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat</td></tr>
<tr><td>Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan</td></tr>
<tr><td>Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tujuan dari terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,8% – 5,6% yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir BPS sampai dengan triwulan IV-2024 mempunyai nilai capaian sebesar 4,90% (*cummulative-to-cummulative*).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,8 – 5,6	4,90

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Inflasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik, dengan rumus perhitungan:

$$r = \{Yit \times 100 / Yi(t-1)\} - 100.$$

Keterangan: r = Laju pertumbuhan ekonomi (%).

Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)

Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi triwulan I s.d. triwulan IV-2024 telah mencapai target. Sasaran Indikator kinerja utama pada Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu:

Tabel II-25
Capaian RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.40-6.20	4.96	4,8–5,6	4,90	5.60-6.40	5.60-6.40

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan target pada tabel di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi pada target akhir 2024 mempunyai Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40% – 6,20%. Sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data terakhir BPS triwulan I-2024 s.d. triwulan IV-2024 sebesar 4,90% belum tercapai.

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir BPS sampai dengan triwulan IV-2024 mempunyai nilai capaian sebesar 4,90% (*cummulative-to-cummulative*).

Berikut capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dirilis terakhir oleh BPS pada Februari 2024 adalah:

Tabel II-26
Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024	Jakarta	Indonesia
1	Q to Q (*Quarter-to-Quarter*)	2,68%	0,53%
2	YoY (*Year-on-Year*)	5,01%	5,02%
3	C to C (*Cummulative-to-Cummulative*)	4,90%	5,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

Tabel II-27
Faktor Keberhasilan

Indikator Keberhasilan	Keterangan
a. Konsumsi (C) Rumah Tangga: upaya pemberian berbagai bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta, KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi, dll, dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat konsumsi, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian. b. Investasi (I): Kondisi ekonomi yang stabil, kebijakan pro-investasi, dan kestabilan politik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis sehingga mendorong investasi perusahaan. c. Pengeluaran Pemerintah (G): Penggunaan APBD untuk belanja publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. d. Net Ekspor (X-M): upaya promosi produk-produk UMKM yang telah dikurasi dan difasilitasi berbagai izin dan sertifikasi, serta dukungan pemasaran di berbagai event internasional turut berdampak terhadap kegiatan ekspor barang produk UMKM	

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakart

Tabel II-28
Faktor Penghambat

Kendala	Keterangan
Perekonomian Jakarta menghadapi tantangan eksternal dan internal, karena hal-hal di luar kendali Pemerintah Daerah. Dari sisi eksternal seperti tingginya ketidakpastian dan melambatnya perekonomian global yang disebabkan kondisi geopolitik-ekonomi yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi global melambat. Faktor-faktor geopolitik-ekonomi diantaranya seperti berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Terpilihnya Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) juga berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan-IV 2024. Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral khususnya di negara maju, seperti AS, untuk mengatasi inflasi dengan meningkatkan suku bunga terutama pada 3 triwulan pertama, sehingga menarik aliran modal di negara berkembang. Faktor-faktor tersebut memengaruhi perekonomian nasional dan Jakarta. (Sumber: Laporan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024). Ketergantungan Jakarta pada perdagangan internasional dan investasi asing dapat terganggu oleh fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan proteksionisme negara-negara besar, yang bisa mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan ekonomi kota ini. Selain itu, globalisasi yang semakin cepat memperkenalkan tantangan baru dalam menghadapi teknologi dan ekonomi digital yang mendisrupsi sektor tradisional. Di sisi internal, tantangan pembangunan Jakarta fokus untuk mengurangi ketimpangan sosial dan infrastruktur yang belum merata. Pendanaan proyek infrastruktur yang terbatas juga menjadi hambatan utama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta untuk memfasilitasi urbanisasi yang terus berkembang.	-

Untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah masih adanya berbagai tantangan dan risiko, penguatan perekonomian Jakarta serta meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

a. Penguatan Peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional melalui:

1) Optimalisasi sektor ekonomi utama, termasuk mendorong hilirisasi dan mendorong iklim investasi;
2) Pengembangan sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru

b. Penguatan sinergi pengendalian inflasi:
1) Penguatan program TPID Jakarta dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); guna mendukung pencapaian target inflasi 2025 sebesar 2,5%±1%
2) Sinergi dengan TPID Jabodetabek melalui manajemen pengelolaan *supply-demand* untuk komoditas yang memiliki bobot besar terhadap inflasi

c. Penguatan ekosistem digital melalui penguatan sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk sektor Pemerintah dan sektor swasta, termasuk UMKM

Untuk optimalisasi sektor utama dan pengembangan sektor potensial, strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Peningkatan sinergi dan kerja sama

Peningkatan sinergi dan kerja sama perlu dilakukan dengan melibatkan penguatan kerja sama yang sudah ada dan pengembangan kerja sama dengan mitra baru. Kerja sama yang erat antara sektor-sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing.

2) Penguatan regulasi dan business environment

Regulasi yang jelas dan mendukung serta lingkungan bisnis yang kondusif akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang efisien dan perbaikan kebijakan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pelaku usaha.

3) Perluasan implementasi digital

Penerapan teknologi digital juga menjadi elemen kunci dalam strategi pengembangan ekonomi. Dengan memanfaatkan

teknologi digital dalam kegiatan produksi dan promosi, sektor ekonomi dapat meningkatkan daya saingnya.

4) Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar

Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar, terutama sebagai megapolitan Jabodetabek, dapat memperluas peluang kerja sama dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Kerja sama lintas daerah dapat meningkatkan konektivitas, pertukaran sumber daya, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 52/11/31/Th.XXVI, 05 November 2024 tentang Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (periode Agustus) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar 6,21%, penurunan TPT dipengaruhi oleh Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Meningkatnya TKK menunjukkan bahwa terjadi penyerapan atau penambahan tenaga kerja yang bekerja, dimana penduduk bekerja bertambah sebanyak 35 ribu orang dibandingkan dengan agustus 2023 dengan penambahan tenaga kerja terbesar pada penyediaan akomodasi dan makan minum (Penduduk bekerja di sektor ini meningkat 27 ribu orang).

Tabel II-29
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	6.53	6,21	105.15%

Sumber : Dinas Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Realisasi tahun 2024 terhadap Sasaran Indikator kinerja utama pada Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	6.53	6,21	7.61	7.31

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Apabila dibandingkan dengan target RPD pada Tahun 2024, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka telah melebih dari target yang diharapkan dengan nilai TPT Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,53 persen. Tentunya, kinerja ini perlu dipertahankan dan diharapkan upaya-upaya dalam penurunan Tingkat pengangguran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi kondisi pengangguran di DKI Jakarta dengan baik, dan serta menurunkan Tingkat pengangguran pada periode-periode berikutnya. Dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2024, terdapat beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Adapun untuk lingkup ketenagakerjaan, program-program tersebut antara lain:

Indikator	Program	Anggaran 2024	Realisasi s/d 31 Des 2024	Capaian Anggaran
Tingkat pengangguran terbuka (periode agustus) tahun 2024	Program perencanaan tenaga kerja	205.906.090	188.029.040	91,32%
	Program penempatan tenaga kerja	30.225.467.429	29.471.129.199	97,94%
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	105.760.383.117	103.442.917.581	97,00%
	Program hubungan industrial	2.089.165.000	2.087.310.000	99,84%
	Program pengawasan ketenagakerjaan	3.677.518.676	3.604.240.890	99,01%
	Total	141.958.440.312	138.793.626.710	97,35%

Terdapat beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024, antara lain:

a. Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri

   Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 3.501 orang.

b. Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan Bazar

   Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 15 kali kegiatan dan 1 kali kegiatan Job Fair tingkat Provinsi.

c. Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan MTU

   Kegiatan ini dilakukan di 7 Pusat Pelatihan Kerja Volume Total Peserta Pelatihan 8.072 Orang.

d. Pelatihan SIM A

   Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 2.690 Orang.

e. Pelatihan Satuan Pengamanan

   Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 330 Orang.

f. Pelatihan Kejuruan di Pulau Seribu

   Kegiatan ini dilakukan di Sudin TKTE Pulau Seribu dengan output pencari kerja yang dilatih kejuruan Bahasa Inggris, Operator Komputer, Teknik Pendingin, dan Kolaborasi Pelatihan Las Bawah Air dengan total volume 98 Orang.

g. Pelatihan Peningkatan Produktivitas

   Kegiatan ini dilakukan UPT Pusat Pembangan Produktivitas Daerah dengan volume 700 Orang.

Berikut capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (periode Agustus) Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Berita Resmi Statistik No. 52/11/31/Th.XXVI, 05 November 2024 tentang Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2024.

Tabel II-30
Komparasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03	5,75
Sumatera Utara	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,96	5,76
Riau	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23	3,70
Jambi	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,46
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86
Bengkulu	3,26	4,07	3,63	3,59	3,42	3,11
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Kepulauan Bangka Belitung	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
Kepulauan Riau	7,50	10,34	9,91	8,22	6,80	6,29
DKI Jakarta	6,54	10,95	8,50	7,18	6,53	6,21
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,76
D.I. Yogyakarta	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
Bali	1,57	5,63	5,37	4,80	2,69	1,79
Nusa Tenggara Barat	3,28	4,22	3,01	2,89	2,80	2,73
Nusa Tenggara Timur	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
Kalimantan Barat	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05	4,86
Kalimantan Tengah	4,04	4,58	4,53	4,26	4,10	4,01
Kalimantan Selatan	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31	4,20
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14
Kalimantan Utara	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01	3,90
Sulawesi Utara	6,01	7,37	7,06	6,61	6,10	5,85
Sulawesi Tengah	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95	2,94
Sulawesi Selatan	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
Sulawesi Tenggara	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15	3,09
Gorontalo	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
Sulawesi Barat	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Maluku	6,69	7,97	6,93	6,88	6,31	6,11
Maluku Utara	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03
Papua Barat	6,43[1]	6,80[1]	5,84[1]	5,37[1]	4,18	4,13
Papua Barat Daya					6,58	6,48
Papua					6,90	6,49
Papua Selatan	3,31[1]	4,28[1]	3,32[1]	2,03[1]	3,38	4,05
Papua Tengah					2,13	2,75
Papua Pegunungan					1,02	1,32
Indonesia	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Berdasarkan data Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dan nasional, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta (6,21%) masih diatas nilai rata-rata Tingkat Pengangguran Nasional (4,91%). Namun demikian, Perkembangan penurunan TPT Provinsi DKI Jakarta menunjukan tren positif dengan perubahan Tingkat pengangguran yang cukup besar dari tahun ke tahun. Adapun faktor keberhasilan/kendala yang ada terhadap indikator Penurunan TPT Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 hingga 6,21% merupakan refleksi positif bahwa perkembangan perekonomian DKI Jakarta disertai dengan berbagai kebijakan

pendukung pada berbagai sektor seperti investasi & lapangan usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan penurunan TPT adalah sinergi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan stakeholder lainnya dalam Pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif menjalin berbagai kolaborasi dengan berbagai lintas stakeholder seperti instansi pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan NGO melalui berbagai skema kerja sama atau MoU untuk menjamin program dan kebijakan ketenagakerjaan dapat berdampak positif kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut disertai dengan sinergi kebijakan pada sektor lainnya melalui pembangunan holistik oleh Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mewujudkan penanganan pengangguran secara efektif.

Di sisi lain, Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai kendala/hambatan dalam lingkup ketenagakerjaan yang diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	KENDALA/HAMBATAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	● Berkurangnya Pegawai Fungsional tertentu diantaranya Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Instruktur di Pusat Pelatihan Kerja yang berpotensi menghambat kinerja untuk mendukung Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka ● Laju pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja. ● Ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan; ● Informasi kesempatan kerja belum sepenuhnya diketahui oleh para pencari kerja. ● Masih relatif rendahnya tingkat produktivitas pencari kerja serta kurangnya pemahaman kewirausahaan.

Sebagai upaya untuk terus menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka merealisasikan target, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi dalam lingkup ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) yakni:

SASARAN STRATEGIS	RENCANA KE DEPAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	● Dari segi infrastruktur, telah dibangun Command Centre serta website yang akan digunakan untuk memonitor data pencari kerja dan peserta pelatihan agar dapat lebih efektif dalam proses penyaluran pencari kerja tersebut menjadi pekerja. Pembentukan website diharapkan mempermudah perluasan informasi pasar kerja (lowongan kerja) kepada pencari kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam mendukung infrastuktur serta pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat, akan dibangun system informasi dan layanan ketenagakerjaan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. ● Pemutakhiran sarana dan prasarana pelatihan kerja sehingga kualitas peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. ● Pelaksanaan pameran kesempatan kerja/job fair baik pada Tingkat Kabupaten/Kota ataupun Tingkat Provinsi. Selain itu, direncanakan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja yang dikhususkan untuk tenaga kerja tertentu dalam rangka mendukung penyerapan tenaga kerja antara lain: Job Fair khusus penyandang disabilitas, serta Job Fair pada Lembaga Pendidikan (SMK dan Perguruan Tinggi). ● Pelaksanaan dan peningkatan kolaborasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat SMK dan Perguruan Tinggi sebagai salah satu Lembaga penempatan di tingkat satuan Pendidikan dalam bentuk pemberian pembinaan kelembagaan, jejaring pasar kerja yang langsung mempertemukan dengan perusahaan, mendukung terselenggaranya job fair di BKK dengan memfasilitasi Perusahaan yang ikut serta. ● Peningkatan kolaborasi dengan pelaksana penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri dalam bentuk pemberian pembinaan terkait penempatan tenaga kerja, kerja sama rekrutmen bersama, walk in interview, penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan, hingga penempatan lulusan PPKD ke mitra LPTKS baik untuk tenaga kerja umum maupun tenaga kerja peyandang disabilitas.

SASARAN STRATEGIS	RENCANA KE DEPAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	● Pemberian pembinaan kepada calon pencari kerja untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja mulai dari penggalian potensi minat dan bakat, pembuatan CV, surat lamaran, tips interview, informasi ketenagakerjaan terkini, informasi jabatan dan sebagainya dengan mengajak langsung tim dari Kementerian Ketenagakerjaan RI serta dari sektor swasta. ● Peningkatan perluasan kesempatan kerja di sektor informal melalui program Tenaga Kerja Mandiri (Jakpreneur) yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas seperti pembinaan pembangunan merk produk, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. .

2.3 Rasio Gini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempunyai target koefisien 0,41. Adapun indikator gini ratio ini merupakan salah satu indikator dari sasaran "berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial".

Tabel II-31
Capaian Indikator Rasio Gini

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Rasio Gini	Persen	0.41	0.431	95.13%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Meskipun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2024 menurun, namun terjadi kenaikan ketimpangan pengeluaran (gini rasio), yang berarti gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin tinggi. Kenaikan ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di semua kelompok masyarakat.

Tabel II-32
Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Uraian	Maret 2024	September 2024	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gini Rasio	0,423	0,431	0,008
Distribusi Pengeluaran			
• 40% Bawah	16,71	16,15	-0,57
• 40% Tengah	32,63	32,71	0,08
• 20% Atas	50,66	51,14	0,48

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Distribusi pengeluaran penduduk September 2024 menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin menjadi sebesar 16,15 persen dibandingkan Maret 2024. Menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di DKI Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Gini Ratio pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Tabel II-33
Data Capaian Realisasi 2024 Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan, terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Gini Ratio	Koefisien	0,411	0.431	0,410	0.431	0,410	0,409

Sumber : Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Pada September 2024 berdasarkan data statistik demografi dan sosial BPS, yang diperbaharui pada tanggal 15 Januari 2025, provinsi dengan Gini Ratio tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,431. Sementara itu, provinsi dengan Gini Ratio terendah tercatat di Kep. Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,235. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang terbesar 0,431; terdapat empat provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,428), DI Yogyakarta (0,428) dan Papua Selatan (0,424). Berikut data Gini Rasio pada 38 Provinsi seluruh Indonesia.

Tabel II-34 Gini Ratio menurut provinsi, Semester 2 September 2024

38 Provinsi	Ratio Gini Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan+Perdesaan 2024		
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahunan
ACEH	0,294	0,294	-
SUMATERA UTARA	0,297	0,306	-
SUMATERA BARAT	0,283	0,287	-
RIAU	0,307	0,306	-
JAMBI	0,321	0,315	-
SUMATERA SELATAN	0,333	0,331	-
BENGKULU	0,342	0,343	-
LAMPUNG	0,302	0,301	-
KEP. BANGKA BELITUNG	0,244	0,235	-
KEP. RIAU	0,349	0,357	-
DKI JAKARTA	0,423	0,431	-
JAWA BARAT	0,421	0,428	-
JAWA TENGAH	0,367	0,364	-
DI YOGYAKARTA	0,435	0,428	-
JAWA TIMUR	0,372	0,373	-
BANTEN	0,353	0,359	-
BALI	0,361	0,348	-
NUSA TENGGARA BARAT	0,361	0,364	-
NUSA TENGGARA TIMUR	0,316	0,316	-
KALIMANTAN BARAT	0,31	0,314	-
KALIMANTAN TENGAH	0,301	0,304	-
KALIMANTAN SELATAN	0,302	0,298	-
KALIMANTAN TIMUR	0,321	0,31	-
KALIMANTAN UTARA	0,264	0,259	-
SULAWESI UTARA	0,36	0,347	-
SULAWESI TENGAH	0,301	0,309	-
SULAWESI SELATAN	0,363	0,36	-
SULAWESI TENGGARA	0,37	0,365	-
GORONTALO	0,414	0,413	-
SULAWESI BARAT	0,354	0,33	-
MALUKU	0,282	0,291	-
MALUKU UTARA	0,316	0,296	-
PAPUA BARAT	0,389	0,385	-
PAPUA BARAT DAYA	0,346	0,347	-
PAPUA	0,362	0,405	-
PAPUA SELATAN	0,404	0,424	-
PAPUA TENGAH	0,381	0,355	-
PAPUA PEGUNUNGAN	0,34	0,346	-
INDONESIA	**0,379**	**0,381**	**-**

Sumber : BPS.go.id

2.3.1 Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 06/01/31/Th.XXVII, 15 Januari 2025 mempunyai target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 3,79

Tabel II-35 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	3.79	4,14	91.55

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Angka kemiskinan September 2024 kembali turun setelah mengalami kenaikan akibat dampak pandemi COVID-19. Angka kemiskinan pada September 2024 sebesar 4,14 persen atau turun 0,16 persen poin dibandingkan Maret 2024 sebesar 4,3 persen. Apabila dibandingkan dengan Maret 2021 pada saat angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan September 2024 menurun sebesar 0,58 persen poin. Namun demikian angka kemiskinan September 2024 masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum pandemi COVID-19 yaitu September 2019 yang sebesar 3,42 persen. Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan.

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada tingkat kemiskinan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut

Tabel II-36 Data capaian realisasi 2024 berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	4.13	4.44	3.79	4.14		

Sumber : Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Pemerintah Provinsi dalam menurunkan tingkat kemiskinan memiliki beberapa program yang mendukung diantaranya adalah :

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	1	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	20.040.286.275	18.439.597.860	92,01%
			Program Rehabilitasi Sosial	31.114.090.824	30.111.620.414	96,78%
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	694.156.782.883	665.118.910.705	95,82%
	2	DPPAPP	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	3.776.944.196	3.454.313.864	91%
	3	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.269.756.738.589	2.235.010.097.084	98,47%
	TOTAL			**3.018.844.842.767**	**2.952.134.539.927**	**97,79%**

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Tingkat Kemiskinan tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp.2.952.134.539.927 dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.018.844.842.767 atau capaian sebesar 97,79% dengan capaian efisiensi sebesar 2,21% dari nilai total anggaran.

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, terdapat Sub Kegiatan **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa** yang berkaitan langsung dengan peningkatan indikator kinerja sesuai dengan Strategi Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 2.235.010.097.084,- atau 96,63% dari total anggaran Rp. 2.269.756.738.589,-

Dari total anggaran pada program tersebut, terdapat anggaran yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan yaitu terkait dengan kontribusi iuran bagi peserta JKN PBI JK yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah disebutkan bahwa kontribusi Pemerintah Daerah dalam Membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kontribusi Iuran Peserta PBI adalah pembayaran Pemerintah Provinsi kepada BPJS Kesehatan atas sebagian iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembayaran kontribusi iuran ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

Adapun anggaran pembayaran kontribusi iuran tersebut untuk 1.500.000 orang adalah sebesar Rp. 39.600.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.380.307.300 (84,29%) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.264.406 jiwa.

Selain didukung dengan program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penanggulangan Kemiskinan dengan renaksi berupa Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat. Kriteria keberhasilan dari renaksi tersebut yang diampu oleh Dinas Kesehatan adalah tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat dengan target berupa laporan progress pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat yang di dalamnya juga mencakup sasaran kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024, capaian untuk KSD tersebut adalah 100% dimana sudah ada laporan progress dari pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang yang dikirimkan secara rutin setiap triwulan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta.

Selain didukung dengan program-program yang ada diatas, terdapat beberapa rencana aksi yaitu :

1. Pedoman pendampingan dan pembinaan keluarga wirausaha
2. Pedoman penyediaan layanan aduan dan fasilitasi keluarga wirausaha
3. Panduan pembinaan, dan pembentukan karakter bagi pembangunan ketahanan keluarga melalui wirausaha berbasis keluarga

4. Pedoman pembinaan pendidikan dan campaign kesadaran akan ketahanan budaya sosial, tata tertib kehidupan bermasyarakat, kreativitas masyarakat dalam berekonomi, dan program-program sadar Kesehatan
5. Konsep penyaluran bantuan bagi pemenuhan kebutuhan layanan dasar keluarga miskin oleh lembaga pusat perubahan pada penduduk yang terdapat di lingkungan sekitarnya
6. Pembinaan dan Pengembangan UMKM
7. Peningkatan UMKM Naik Kelas
8. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan capaian Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Terkait dengan penggunaan sumber daya guna anggaran, teknologi, sarana dan SDM guna menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem yaitu selaras dengan renaksi yang telah dilakukan diatas.

Berdasarkan dengan data BPS pusat:

Tabel II-37
Perbandingan secara nasional Indikator Tingkat Kemiskinan

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24
ACEH	9.60	8.37	16.75	14.99	14.23	12.64
SUMATERA UTARA	7.93	7.01	8.08	7.44	7.99	7.19
SUMATERA BARAT	4.72	4.16	7.28	6.79	5.97	5.42
RIAU	6.76	6.11	6.61	6.52	6.67	6.36
JAMBI	9.50	9.60	5.90	6.08	7.10	7.26
SUMATERA SELATAN	10.04	9.02	11.53	11.43	10.97	10.51
BENGKULU	13.56	12.32	13.56	12.63	13.56	12.52
LAMPUNG	8.18	7.91	11.97	12.04	10.69	10.62
KEP. BANGKA BELITUNG	3.39	4.09	6.17	6.49	4.55	5.08
KEP. RIAU	4.85	4.36	9.94	8.55	5.37	4.78
DKI JAKARTA	4.30	4.14	-	-	4.30	4.14
JAWA BARAT	7.07	6.65	9.07	8.85	7.46	7.08
JAWA TENGAH	9.71	8.83	11.34	10.45	10.47	9.58

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24
DI YOGYAKARTA	10.29	10.11	12.49	11.31	10.83	10.40
JAWA TIMUR	7.12	6.83	13.30	13.19	9.79	9.56
BANTEN	5.69	5.57	6.44	6.20	5.84	5.70
BALI	3.55	3.32	5.20	5.11	4.00	3.80
NUSA TENGGARA BARAT	12.86	11.64	12.95	12.21	12.91	11.91
NUSA TENGGARA TIMUR	8.57	8.11	23.41	23.02	19.48	19.02
KALIMANTAN BARAT	4.25	4.62	7.58	7.26	6.32	6.25
KALIMANTAN TENGAH	4.89	5.22	5.38	5.29	5.17	5.26
KALIMANTAN SELATAN	3.62	3.59	4.61	4.46	4.11	4.02
KALIMANTAN TIMUR	4.47	4.41	8.76	8.00	5.78	5.51
KALIMANTAN UTARA	4.73	5.07	9.23	5.96	6.32	5.38
SULAWESI UTARA	4.75	4.07	10.35	10.14	7.25	6.70
SULAWESI TENGAH	8.61	7.34	13.33	12.90	11.77	11.04
SULAWESI SELATAN	5.08	5.21	10.74	10.11	8.06	7.77
SULAWESI TENGGARA	7.45	6.78	13.60	13.07	11.21	10.63
GORONTALO	4.57	4.99	22.97	21.62	14.57	13.87
SULAWESI BARAT	9.29	8.33	11.70	11.32	11.21	10.71
MALUKU	5.14	4.59	24.43	25.08	16.05	15.78
MALUKU UTARA	6.12	6.27	6.41	5.93	6.32	6.03
PAPUA BARAT	8.17	9.50	27.68	26.34	21.66	21.09
PAPUA BARAT DAYA	8.51	8.03	27.78	25.90	18.13	16.95
PAPUA	6.33	5.93	33.67	36.57	17.26	18.09
PAPUA SELATAN	3.10	3.65	25.64	28.47	17.44	19.35
PAPUA TENGAH	4.32	5.27	37.98	34.86	29.76	27.60
PAPUA PEGUNUNGAN	16.56	12.11	34.21	31.00	32.97	29.66
INDONESIA	**7.09**	**6.66**	**11.79**	**1.34**	**9.03**	**8.57**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat tingkat kemiskinan dan ketimpangan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dimana pada triwulan III 2024 tercatat 4,93% (y-on-y), sedikit meningkat dibandingkan triwulan II (4,9%). Stabilitas ini menjadi faktor penting dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan;
b. Tingkat inflasi pada September 2024 sebesar 1,70% (y-on-y), lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya (2,23% pada Juni 2024). Inflasi yang terkendali mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan;

c. IHK umum sedikit turun dari 105,08 (Agustus 2024) menjadi 104,97 (September 2024). Namun, penurunan ini tidak signifikan karena IHK makanan, minuman, dan tembakau tetap tinggi di 107,07. Hal ini menunjukkan kebutuhan pokok tetap menjadi tantangan bagi kelompok miskin;
d. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) triwulan III 2024 sebesar 538,67 (harga berlaku), menurun dibandingkan triwulan II 2024 (578,76);
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta, yang naik menjadi 6,21% pada Agustus 2024 dari 6,03% pada Maret 2024, turut berkontribusi pada kenaikan gini ratio;
f. Masyarakat rentan miskin di DKI Jakarta selain menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat juga menerima bantuan daeri Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
g. Program bantuan dari Pemerintah Pusat antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain sebagainya. Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Program Bantuan Pangan. Program bantuan lain meliputi pemberian insentif untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sewa sederhana (Rusunawa), dan Pemberian Pelatihan Kerja secara gratis oleh Balai Latihan Kerja, dan lain sebagainya. Seluruh upaya yang dilakuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan mengurangi bertambahnya penduduk miskin;
h. Pada September 2024, pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan pencairan Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) pada triwulan III 2024 kepada penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain:

No	Kendala	Tindak Lanjut
1	Belum adanya data registrasi sosial ekonomi yang mendata 100% penduduk DKI sebagai dasar pemberian bantuan sosial maupun program perlindungan sosial	1. Berkoordinasi dengan Pusdatinrenbang Bappeda terkait dengan data registrasi sosial ekonomi sebagai dasar data sasaran kemiskinan
2	Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, sulit untuk membedakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat miskin dan non miskin	2. Memberikan pelayanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat
3	Tingginya mobilitas penduduk, sehingga menyulitkan petugas untuk mendata dan menetapkan sasaran penduduk miskin	3. Berkoordinasi dengan Dukcapil dan biro pemerintahan terkait terkait data penduduk

Guna memperbaiki Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025	Target
1	Meningkatkan ketepatan sasaran PBI JK	Terlaksananya pemadanan data kepesertaan PBI JK	1 Laporan

2.3.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Tingkat kemiskinan ekstrem saat ini merupakan indikator yang mulai dicantumkan dalam Metadata Indikator TPB/SDGs edisi II (dirilis oleh Bappenas pada September 2020). Indikator tersebut mengukur proporsi penduduk dengan pendapatan (pengukuran di tanah air masih menggunakan proksi pengeluaran).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2024 sebesar 0,35%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,22 persen poin jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yang sebesar 0,57%.

Kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023—2026 dan Keputusan Gubernur Nomor 862 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023—2026 :

Tabel II-38 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan Ekstrem	Persen	0,50	0,35	142.86%

Sumber : TKPK Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada tingkat kemiskinan ekstrem pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	1.06	0.57	0.50	0.35	0.83	0.68

Sumber : Bappeda Provinsi Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI prioritas sasaran intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem perlu difokuskan pada penduduk miskin yang berada pada desil 1, khususnya yang berada di persentil 1—5. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor

580 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Sasaran dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, diperoleh Data Sasaran Prioritas Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebanyak 495.272 individu. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil integrasi DTKS yang dipertajam dengan berbagai basis data lainnya (termasuk Data P3KE).

Berdasarkan hasil pemantauan yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi sepanjang periode triwulan 1 dan 2 tahun 2024, diidentifikasi terdapat 37.302 jiwa penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berada pada desil 1 (tingkat kesejahteraan terendah) dan belum mendapatkan intervensi dari pemerintah. Dalam menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan intensif pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta triwulan 3 tahun 2024 yang dilaksanakan pada 21—22 Agustus 2024. Berdasarkan hasil rencana tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, penanggulangan kemiskinan pada triwulan berikutnya difokuskan pada perbaikan tata kelola intervensi dan penanganan penduduk miskin dan rentan desil 1 yang berstatus 0 intervensi program. Upaya tersebut diperkuat melalui Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0041 Tahun 2024 tentang Penanganan Penduduk pada Data Sasaran yang Belum Memperoleh Intervensi Program Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20.091.550.312.153,- (berdasarkan perubahan APBD TA 2024) untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Anggaran tersebut dialokasikan bagi empat kelompok strategi kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 32 Tahun 2022.

Strategi pertama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial (di antaranya KJP Plus, KJMU, KAJ, KPDJ, dan KLJ), jaminan sosial (melalui bantuan Jaminan Kesehatan Daerah), subsidi (Subsidi

Pangan Murah, Subsidi Transportasi, Subsidi Rusunawa, Subsidi Air Bersih dan Subsidi Tangki Septik), program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 11,25 triliun, realisasi per triwulan 4 sebesar Rp 10,49 triliun, atau sebesar 93,32% persen dari total anggaran strategi pertama tahun 2024.

Strategi kedua yaitu peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui program dan sub kegiatan yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi dan usaha masyarakat serta pelatihan kerja. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1,87 triliun, realisasi anggaran per triwulan 4 tahun 2024 senilai Rp 1,79 triliun (95,93%). Program pada strategi ketiga ditujukan untuk mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berkaitan erat dengan pemenuhan infrastruktur dasar termasuk hunian layak, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak. Total alokasi anggaran pelaksanaan strategi ketiga sebesar Rp 6,25 triliun dengan realisasi per triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 5,70 triliun atau sebesar 91,17% dari total alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan strategi tiga di tahun 2024.

Selain ketiga strategi tersebut, terdapat kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berkontribusi pada penghapusan kemiskinan ekstrem, namun berfungsi sebagai katalisator dari berbagai program yang terdapat di strategi lainnya. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 721,69 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 648,79 miliar atau sebesar 81,90 persen per triwulan 4 tahun 2024

2.4 Indeks Daya Saing Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menguatkan daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi mempunyai indikator Indeks Daya Saing Daerah menjadi Indikator sasaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Salah satu sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan "Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan" adalah

"Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi" dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks ini juga menjadi bagian dari Indikator Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang menggambarkan tingkat produktivitas daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengukuran IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setiap tahun dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang telah disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data yang ada. Hasil IDSD diarahkan menjadi data yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah.

Sampai dengan awal Februari 2025 ini, BRIN belum merilis IDSD Tahun 2024. Oleh karena itu, capaian yang disajikan dalam laporan ini mengacu pada IDSD Tahun 2023 yang dirilis di Februari 2024. Kerangka pengukuran IDSD 2023 berupa 4 (empat) komponen dasar, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar.

Perangkat komponen pembentuk IDSD 2023

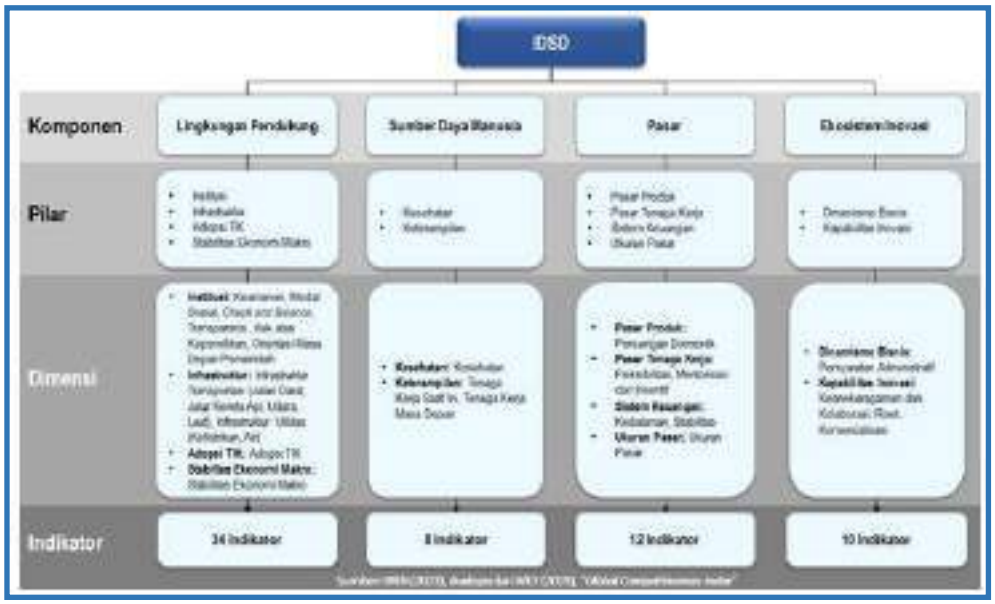

Sumber : BRIN 2024

Target IDSD pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4,01. Penentuan target ini berdasarkan pertimbangan atas capaian IDSD tahun 2023 sebesar 3,97. Pada saat penyusunan laporan ini, capaian IDSD tahun 2024 belum dapat ditentukan karena realisasi tahun 2024 belum diketahui. Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target IDSD tahun 2024, maka capaian 2023 sebesar 99%. Untuk memperkirakan pencapaian IDSD pada masa berakhirnya RPD nanti, realisasi tahun 2023 dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 4,03, dimana masih terdapat selisih 0,06 poin.

Tabel II-39 perbandingan realisasi dan target RPB 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.96	3.97	4.01	N/A	4.01	40.3

Sumber : BRIN diolah, 2024

Berdasarkan realisasi IDSD tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2, terdapat 14 provinsi yang mencapai IDSD di atas nilai rata-rata nasional (3,44) dimana skor Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi, disusul oleh Provinsi Bali sebesar 3,85, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,70

Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Tahun 2023

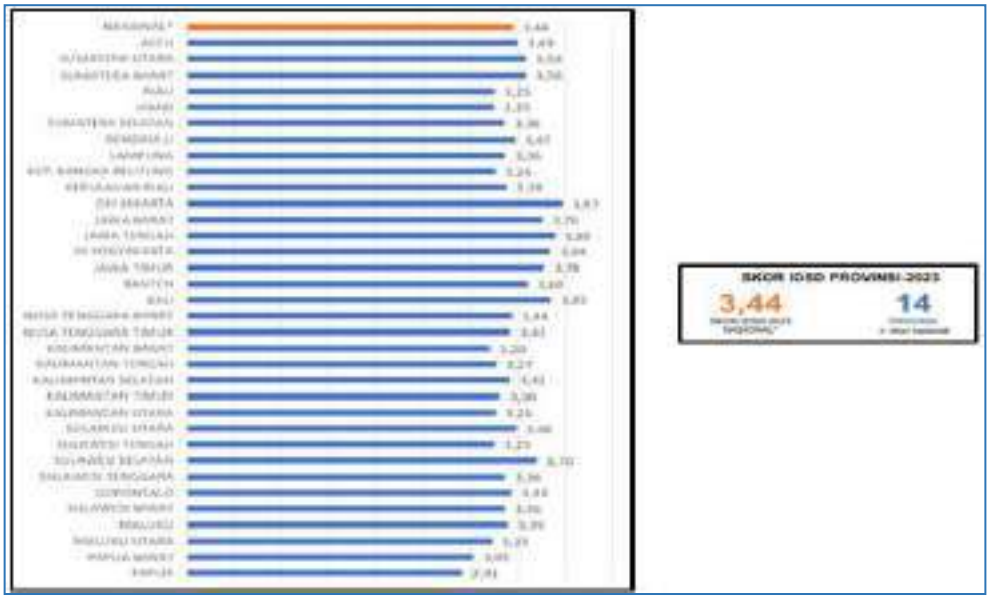

Sumber: BRIN 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program dan anggaran guna mendukung peningkatan indeks daya saing daerah tahun 2024 didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu :

Tabel II-40
Dukungan Program terhadap IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Indikator	Perangkat Daerah	Program*	Pagu (Rp)	Realisasi** (Rp)	Serapan (%)
Indeks Daya Saing Daerah	Bappeda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.616.950.454	7.284.922.100	95,64
	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	13.373.732.589	12.665.723.965	94,71
		Program Pengelolaan Permuseuman	61.189.878.800	58.459.851.019	95,54
		Program Pengembangan Kebudayaan	117.715.007.792	104.004.096.092	88,35
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.752.409.742	81.680.048.868	99,91
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	2.390.606.032	2.276.750.100	95,24
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.794.386.163	2.575.682.398	92,17
		Program Promosi Penanaman Modal	8.723.336.557	7.995.671.845	91,66
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	890.107.782	885.681.919	99,50
		Program Pembinaan Perpustakaan	101.982.713.647	99.355.089.311	97,42
	Kabupaten Administrasi Kep Seribu	Program Pembinaan Perpustakaan	1.479.336.296	1.423.620.845	96,23
		TOTAL	**399.908.465.854**	**378.607.138.462**	**94,67**

* : Program pendukung diperoleh dari Cascading Tree pada sistem e-Monev
** : Pagu dan Realisasi Anggaran diperoleh dari data tarikan e-Monev triwulan IV tahun 2024
Sumber : LKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa terdapat 11 (sebelas) program dari 6 (enam) Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian IDSD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, dengan total pagu anggaran lebih dari 399 Milyar Rupiah.

Perbandingan capaian IDSD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pilar pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Gambar 3. Skor IDSD DKI Jakarta mencapai 4,01 pada tahun 2022 atau sebanyak 0.75 poin di atas nilai rata-rata nasional. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, skor Jakarta menurun sebanyak 0,04 poin sedangkan nilai rata-rata nasional naik 0,18 poin. Salah satu faktor penurunan IDSD Jakarta tahun 2023 adalah adanya penyempurnaan beberapa indikator secara signifikan agar kompatibilitasnya dengan GCI semakin baik.

Selain faktor penyempurnaan indikator, penilaian tahun 2023 menggunakan skor min-max sebagai tolok ukur nilai terbaik dan terendah sehingga fluktuasi nilai nasional berdampak pada skor IDSD suatu daerah. Berdasarkan pengukuran oleh BRIN, nilai beberapa indikator dari daerah lain mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai yang diperoleh Jakarta tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga skor beberapa indikator di Jakarta menurun. Penurunan nilai IDSD Jakarta pada tahun 2023 terdapat pada 4 (empat) pilar, yaitu Pilar 3 Adopsi TIK, Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar 11 Dinamisme Bisnis, dan Pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Penurunan pada Pilar 3, Pilar 4, dan Pilar 11 dikarenakan adanya penyempurnaan indikator, namun penurunan pada pilar 12 bukan disebabkan oleh penyempurnaan indikator.

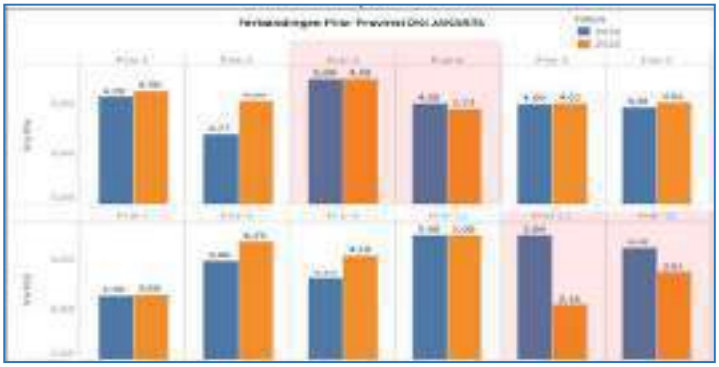

Sumber :Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan capaian IDSD pada tahun mendatang dengan melaksanakan rencana aksi pada pilar yang mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

a. Pengembangan Ekosistem dan Komunitas Riset dan Inovasi di Wilayah DKI Jakarta (Jakarta *Research and Innovation Ecosystem*)
b. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi melalui Kegiatan Jakarta *Innovation Days* dan *Innovative Government Awards*
c. Memperkuat kolaborasi pelaksanaan riset dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset pemerintah

3. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani Yang Berkesetaraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tujuan ketiga ini yaitu 'Pembangunan Manusia', 'Madani', dan 'Berkesetaraan'. Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan yang terpenting yang dapat menentukan kualitas hidup warga Jakarta. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu 'Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat' dan 'Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan'.

Adapun terkait standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya kata kunci madani merupakan penerjemahan dari konsep civil society yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern yang demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu dirumuskan sasaran 'Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat'. Kata kunci terakhir yaitu berkesetaraan merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran 'Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender'.

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu :

Tabel II-41
Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,55	84,15	100,72%
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,16	12,5	102.80%
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,81	75,99	100,24%
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	13,2	N/A (belum rilis)	-
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,14	N/A (Belum rilis)	-
Menguatnya nilai nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	82,13	84,57	102.97%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Predikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tujuan dari Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, pada Tahun 2024 mempunyai target nilai/predikat IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 83.55 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). IPM diterbitkan oleh BPS dengan rumus perhitungan: IPM= v (I kesehatan) x (I pendidikan) x (I pengeluaran) x 100. Capaian

IPM dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah (IPM < 60), Sedang (60 = IPM < 70), Tinggi (70 = IPM < 80), dan Sangat tinggi (IPM = 80).

Realisasi Capaian indeks IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 84.15 tumbuh sebesar 0,6 poin atau 0,72 persen berdasarkan Katalog: 4102002.31 ISSN : 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 6,2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tanggal 27 Desember 2024.

Tabel II-42
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,55	84,15	100,72%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Daya Saing Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,55	83.55	81,77 (RPD) 83,55 (Kep.Gub Perkin 2024)	84.15	81,99 (RPD) 84,15	82,11 (RPD) 84,15

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
(Katalog: 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 6,2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tanggal 27 Desember 2024)

Nilai Komponen Pembentukan IPM yaitu :

No	Komponen		
1	Umur Harapan Hidup	75,99	Tahun
2	Rata – rata Lama Sekolah	11,49	Tahun
3	Harapan Lama Sekolah	13,51	Tahun
4	Pengukuran per Kapita (PPP)	Rp. 19,95 juta	
	Nilai IPM	84,15	

Selama kurun waktu 2020–2024, IPM DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,92 dan meningkat 2,23 poin menjadi 84,15 pada tahun 2024 atau tumbuh 2,72 persen selama 5 tahun terakhir. Jika kita lihat, selama kurun waktu 2020–2024 pertumbuhan IPM DKI Jakarta mengalami peningkatan. Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 sebesar 0,72 persen. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pembentuknya yakni UHH, HLS RLS dan PPP:

a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 75,99 tahun,
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)13,51 tahun,
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 11,49 tahun
d. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Rp.19,95 juta,

Sehubungan dengan capaian nilai IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari : Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	9.679.779.777.502	8.851.223.826.167	91,44%
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.574.265.029.299	1.527.091.732.070	97,00%

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	275.968.307	258.483.000	93,66%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	528.938.455	514.743.000	97,32%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.422.070.204.223	6.120.613.478.921	95,31%
	TOTAL		**20.525.655.664.988**	**19.252.507.177.585**	**93,8 %**

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai IPM tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 19.252.507.177.585,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 20.525.655.664.988,- atau capaian sebesar 93.8 % dengan capaian efisiensi sebesar 6.2 % dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai berikut :

a. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan (SUB KSD : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang Satuan Pendidikan dengan beberapa renaksi yaitu:
   1) Pengembangan Potensi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   2) Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu
   3) Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana KJP Plus

4) Pemenuhan Kewajiban Pengembang untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan
5) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
6) Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK (BMW: Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha)
7) Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di Semua Jenjang
8) Pelaksanaan program Jakarta Sekolah Komunitas.

b. KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang memiliki 1 (satu) rencana aksi yaitu Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat. Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026.

c. KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:

1) Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

2) Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

d. KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting, yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:

1) Regulasi terkait penetapan data balita.

2) Mengusulkan, menyusun, mendistribusikan bahan renaksi penurunan stunting.

e. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi, yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:

1) Penyediaan Materi terkait SubKSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi.
2) Penyediaan Kantin Sehat Percontohan di Fasilitas Kesehatan.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Berikut capaian Nilai/Predikat IPM seluruh Pemda tahun 2024 oleh *(Katalog: 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 6,2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tanggal 27 Desember 2024).*

Tabel II-43
10 Pemerintah Daerah nilai capaian IPM

No	Pemda	Nilai
1	DKI Jakarta	84,15
2	D.I. Yogyakarta	81,62
3	Kepulauan Riau	79,89
4	Kalimantan Timur	78,79
5	Bali	78,63
6	Sumatera Barat	76,43
7	Banten	76,35
8	Sumatera Utara	75,76
9	Sulawesi Utara	75,68
10	Riau	75,67

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
1	Angka Harapan Hidup	
a.	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	a. Akreditasi pada 82 Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Pengembangan 5 (Lima) layanan unggulan dan jejaring layanan rujukan pada RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi kanker, jantung, stroke, uronefrologi (ginjal), dan Kesehatan ibu dan anak (KIA).
b.	Kemudahan akses penduduk untuk menjangkau layanan Kesehatan	Tersedianya 31 RSUD/RSKD (Rumah Sehat untuk Jakarta) di 28 kecamatan, 44 Puskesmas (setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas), 292 Puskesmas Pembantu yang tersebar pada 240 kelurahan, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah.

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
c.	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	a. Implementasi hospitality dalam pelayanan. b. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDMK dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan. c. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan.
d.	Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah	Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan status *universal health coverage* (UHC) dengan cakupan 98,34%. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan Daerah diantaranya: 1. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari program JKN: a. Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI. b. Iuran bagi peserta bukan PBI dengan kategori penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. c. Iuran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non PNS pada BLUD Bidang Kesehatan. d. Bantuan Iuran 2. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari luar program JKN a. Pelayanan ambulans gawat darurat. b. Pelayanan pemeriksaan *Nucleic Acid Test* (NAT) darah oleh Palang Merah Indonesia. c. Pemeriksaan kesehatan. d. Pelayanan pengobatan korban kekerasan. e. Pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. f. Pelayanan kesehatan pada kejadian luar biasa. Pelayanan kesehatan pada kejadian bencana.
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	a. kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program untuk memperluasan akses pendidikan dengan memberikan bantuan sosial biaya pendidikan kepada seluruh peserta didik yang tidak mampu baik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta melalui KJP Plus. Selain KJP Plus Pemprov DKI juga memberikan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) bagi peserta didik yang tidak mampu dan bersekolah di satuan pendidikan swasta. b. Untuk perluasan akses pendidikan dengan meningkatkan daya tampung melalui pelaksanaan PPDB Bersama yang melibatkan satuan pendidikan swasta pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. c. Bantuan sosial pendidikan diperluas dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar masyarakat dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kedua program tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anak untuk bersekolah, khususnya dari keluarga yang tidak mampu.

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
		d. Mendorong ketersediaan guru di semua satuan jenjang pendidikan negeri dan memberikan tambahan penghasilan bagi guru-guru di sekolah swata menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. e. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, rehabitiasi dan penambahan gedung sekolah terus dilakukan; selain itu untuk menjamin aksesibilitas ke sekolah telah disediakan moda transportasi dan bus sekolah sekolah gratis
3	Pengeluaran per Kapita (PPP)	Pemerintah untuk terus mendorong roda perekonomian dan memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat tidak mampu. Berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya Jakpreuneur yang merupakan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) untuk menjaga daya beli pekerja Jakarta. Namun demikian, secara nilai absolut, capaian PPP Provinsi DKI Jakarta jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian PPP nasional. PPP Indonesia pada tahun 2020 sebesar 11,01 juta rupiah, meningkat menjadi 12,34 juta rupiah pada tahun 2024. Selama periode tahun 2020-2024 terjadi pertumbuhan PPP Indonesia sebesar 12,06 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PPP Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,47 persen pada periode yang sama.

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Guna memperbaiki nilai/predikat IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024	Keterangan
1	- Pemberian bantuan KJP PLUS - Pemberian bantuan BPMS - Penyelenggaraan PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta	Membentuk tim penanganan anak putus sekolah (ATS) yang melibatkan lintas sektor	
2	Singkronisasi dan integrasi data dasar penduduk untuk sasaran pelaksanaan program kesehatan	Menyusun kegiatan strategis daerah terkait integrasi data dasar penduduk	

3.2 Indeks Dimensi Pendidikan

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun, Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu

a. Harapan Lama Sekolah dan

b. Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

Tabel II-44 Capaian Indikator Indeks Dimensi Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Real 2024	Capaian
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,16	12,50	102,80%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Indeks Indikator Kinerja (Tujuan) Harapan Lama Sekolah/HLS yang memiliki sasaran Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran serta Indikator Kinerja (Sasaran) Rata-rata Lama Sekolah/RLS dengan sasaran Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan.

Realisasi Capaian nilai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian atas Indikator Kinerja (Tujuan) Harapan Lama Sekolah/HLS yang memiliki sasaran Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran serta Indikator Kinerja (Sasaran) Rata-rata Lama Sekolah/RLS dengan sasaran Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,51	101,20%
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	100,09%

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Sasaran Indikator kinerja utama pada Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-45
Perbandingan realisasi dengan target RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12.14	12.39	12,16	12,50	12.18	12.20

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan target pada tabel diatas Harapan Lama Sekolah (HLS) target pada tahun 2026 sebesar 13,15. Capaian HLS Tahun 2024 sebesar 13,51 lebih tinggi dari target tahun 2026 yaitu selisih 0.36, sehingga perlu ditingkatkan kembali target untuk tahun 2025 s.d 2026. Sedangkan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) target pata tahun 2026 sebesar 11,25 dengan capaian tahun 2024 sebesar 11,49 lebih tinggi dari target tahun 2026 yaitu selisih 0.24, sehingga perlu ditingkatkan kembali target untuk tahun 2025 s.d 2026.

Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 Sebagai berikut :

No	Pemda	HLS	RLS
1.	Pemerintah Provinsi DIY	15,70	9,92
3.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,51	11,49
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	13,43	8,28
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12,86	8,02
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	12,80	8,87
6.	Nasional	13,21	8,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Guna meningkatkan capaian IKU indeks dimensi pendidikan terdapat beberapa program yang mendukung diantaranya adalah :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks dimensi pendidikan	Dinas Pendidikan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.101.051.975.865	7.878.055.605.789	97,25%
	Dinas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	9.679.779.777.502	8.851.223.167	91,44%
	Jumlah		**17.780.831.753.367**	**16.729.279.431.956**	**94,09%**

Adapun salah satu kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang perlu penanganan lintas sektor karena terdapat beberapa penyebab yang memang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan. Adapun upaya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 antara lain :

a. Pemberian bantuan KJP PLUS
b. Pemberian bantuan BPMS
c. Penyelenggaran PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta

Guna meningkatkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana aksi untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan membentuk Tim Penanganan Anak Putus Sekolah (ATS) yang melibatkan lintas sektor.

3.3 Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup merupakan sasaran dari Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Angka Harapan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 75,81 Tahun yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki indikator kinerja utama sasaran angka harapan hidup pada tahun 2023 dengan target sebesar 73,21. Dimana pada tahun 2024 ini Realisasi Capaian nilai Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 75,99 Tahun berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel II-46
Capaian Indikator Angka Harapan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,81	75,99	100,24%

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa target dari sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan” dengan indikator “Angka Harapan Hidup” telah tercapai. AHH DKI Jakarta Tahun 2024 yang telah mencapai 75,99 tahun mengartikan bahwa bayi yang dilahirkan tahun 2024 memilki peluang untuk hidup sampai berumur hampir 76 tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada 2020, UHH DKI Jakarta adalah 75,20 tahun dan pada 2024 mencapai 75,99 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,18 tahun atau 0,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 yang sebesar 0,27 persen per tahun.

Gambar II-7
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) DKI Jakarta (tahun), 2020-2024

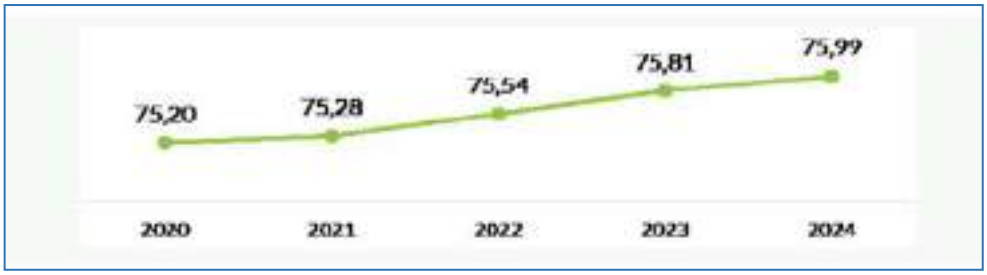

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Adapun pembagian angka harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta ke masing-masing wilayah:

Tabel II-47 Pembagian perkota di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir (tahun		
	2022	2023	2024
Kabupaten Kepulauan Seribu	75,54	74,89	75,03
Kota Jakarta Selatan	75,77	76,02	76,23
Kota Jakarta Timur	75,12	75,37	75,59
Kota Jakarta Pusat	76,07	76,34	76,57
Kota Jakarta Barat	75,62	75,81	75,98
Kota Jakarta Utara	74,96	75,07	75,17
DKI JAKARTA	**75,54**	**75,81**	**75,99**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada Angka Harapan Hidup pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.21	75.81	75,81	75,99	73.42	73.53

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, Indikator Angka Harapan Hidup pada target akhir di 2026 memiliki target 73,53 tahun. Capaian tahun 2024 sebesar 75,99 telah melampaui target tersebut. Sehubungan dengan capaian Angka Harapan Hidup ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup	**Dinas Kesehatan**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.422.070.204.223	6.120.613.478.921	95,31%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.574.265.029.299	1.527.091.732.070	97,00%
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.968.307	258.483.000	93,66%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	528.938.455	514.743.000	97,32%
		TOTAL	**10.845.875.887.486**	**10.401.283.351.418**	**95,90%**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Terkait realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Angka Harapan Hidup di Dinas Kesehatan secara keseluruhan mencapai realisasi sebesar Rp. 10.401.283.351.418 atau mencapai 95,90%.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung ketercapaian indikator tersebut diantaranya:

1. KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:
   a. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
   b. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
2. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi yang memiliki 2 rencana aksi yaitu:
   a. Penyediaan Materi terkait SubKSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi.
   b. Penyediaan Kantin Sehat Percontohan di Fasilitas Kesehatan.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target dengan capaian 100% guna meningkatkan Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Adapun beberapa renaksi diatas telah mencakup beberapa penggunaan sumber daya guna meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2024 sebesar 75,99 tahun, meningkat 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Berikut capaian Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta melalui *https://jakarta.bps.go.id*

Gambar II-8

Capaian Angka Harapan Hidup

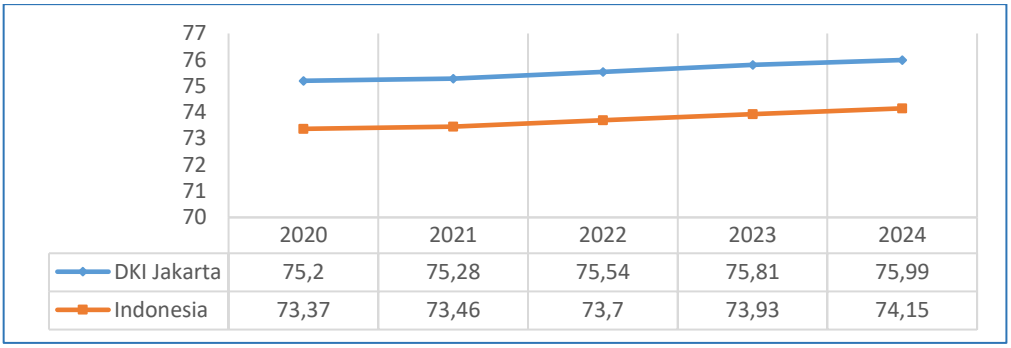

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Selama periode Tahun 2020-2024, AHH Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan total pertumbuhan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 sebesar 0,79 Tahun. AHH Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan total pertumbuhan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 sebesar 0,78 Tahun. Hal ini menunjukkan level capaian dan pertumbuhan AHH Provinsi DKI Jakarta masih berada di atas capaian nasional.

Adapun beberapa kendala yang ada dalam capaian Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

No	Faktor Keberhasilan	Tindak Lanjut
1	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	a. Akreditasi pada 82 Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Pengembangan 5 (Lima) layanan unggulan dan jejaring layanan rujukan pada RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi kanker, jantung, stroke, uronefrologi (ginjal), dan Kesehatan ibu dan anak (KIA).
2	Kemudahan akses penduduk untuk menjangkau layanan kesehatan	Tersedianya 31 RSUD/RSKD (Rumah Sehat untuk Jakarta) di 28 kecamatan, 44 Puskesmas (setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas), 292 Puskesmas Pembantu yang tersebar pada 240 kelurahan, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah.
3	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	1. Implementasi hospitality dalam pelayanan. 2. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDMK dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan.

No	Faktor Keberhasilan	Tindak Lanjut
4	Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah	Oleh Dinas Kesehatan 1. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari program JKN: a. Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI. b. Iuran bagi peserta bukan PBI dengan kategori penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. c. Iuran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non PNS pada BLUD Bidang Kesehatan. d. Bantuan Iuran 2. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari luar program JKN a. Pelayanan ambulans gawat darurat. b. Pelayanan pemeriksaan *Nucleic Acid Test* (NAT) darah oleh Palang Merah Indonesia. c. Pemeriksaan kesehatan. d. Pelayanan pengobatan korban kekerasan. e. Pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. f. Pelayanan kesehatan pada kejadian luar biasa. g. Pelayanan kesehatan pada kejadian bencana.

Rencana Kedepan terkait dengan Target kedepan

Guna memperbaiki Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

Kegiatan	Rencana Aksi 2025	Target
Peningkatan Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan yang Holistik, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Meningkatkan Keberhasilan Rujukan melalui Aplikasi Jakconnected	Tersedianya strategi rujukan berbasis kompetensi
		Terlaksananya JAKConnected

3.4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Gizi merupakan salah satu aspek kunci bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan bangsa. Salah satu masalah gizi yang signfikan dan menjadi fokus dunia adalah stunting pada balita. UNICEF/WHO/World Bank mengestimasikan prevalensi balita stunting di seluruh dunia sebesar 22,3% atau sebanyak 148,1 juta jiwa pada 2022. Lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia (76,6 juta) dan sekitar 30% (63,1 juta) berasal dari Afrika (UNICEF/WHO/World Bank Group – Joint Child Malnutrition Estimates 2023 edition).

Sasaran strategis peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki pada indikator sasaran prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Tahun 2024 dengan target sebesar 13,2%.

Data capaian prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan. Capaian prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Provinsi Jakarta Tahun 2024 baru akan dirilis pada tahun 2025. Sampai dengan saat ini data capaian yang sudah terpublikasi dalam website Kementerian Kesehatan adalah data capaian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, yaitu sebesar 17.6% yang dirilis pada tahun 2024.

Tabel II-48
Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada balita

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	persen	13,2	N/A (belum rilis)	-

Sumber : Kemenkes RI

Berdasarkan hasil SKI 2023 rata-rata nasional mencatat prevalensi stunting sebesar 21,5% dan telah terjadi penurunan prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir (2013-2023). Akan tetapi, progress ini belum dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Sasaran Indikator kinerja utama pada Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target sebagai berikut:

Tabel II-49
RPD Tahun 2023-2026 "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita"

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	persen	13.7	17.6	13.2	- belum rilis	12.7	12.2

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, terdapat peningkatan target capaian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu realisasi 2023 sebesar 17.6% dan pada 2024 ditetapkan target 13.2%.

Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi stunting di bawah angka nasional. Tiga provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%) dan Papua Pegunungan (37,3%).

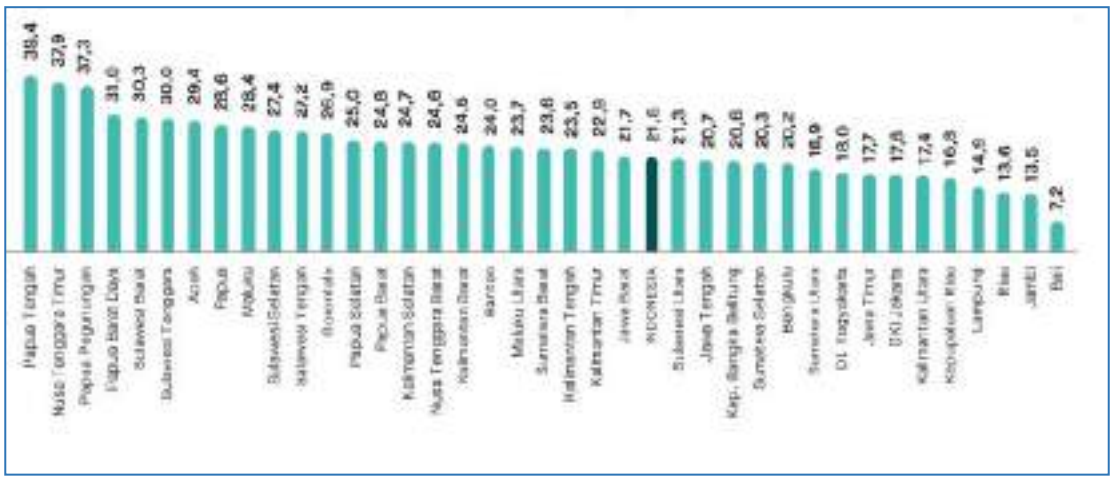

Sumber: Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan capaian Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	**Dinas Kesehatan**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63%
		TOTAL	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63%

Realisasi anggaran yang terserap pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp2.752.804.914.427,- dari total pagu anggaran sebesar Rp2.848.735.747.202,-. Capaian anggaran pada program tersebut adalah sebesar 96,63% dengan kategori kinerja anggaran sangat tinggi

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penurunan stunting dengan beberapa renaksi yaitu :

1) Pemadanan data sasaran balita
2) Regulasi terkait penetapan data balita
3) Mengoordinasikan penggerakan kunjungan balita ke Posyandu
4) Terbentuknya dashboard informasi digital sumber daya manusia (SDM) kader masyarakat
5) Optimalisasi dan dukungan kepada Ibu dan Bayi kurang dari usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
6) Penyebarluasan Informasi Stunting dan Optimalisasi dukungan kepada Ibu dan Bayi kurang dari usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
7) Optimalisasi Pemanfaatan Buku Rapor Kesehatanku dalam memantau Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
8) Pemantauan Minum Tablet Tambah Darah untuk Siswi SMP dan SMA
9) Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Stunting di Stasiun dan Jalur MRT, LRT, Serta Halte dan Bus Transjakarta
10) Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Stunting di Bus Sekolah
11) Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi stunting
12) Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting
13) Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting
14) Pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
15) Mengoordinasikan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting
16) Mengusulkan, menyusun, mendistribusikan bahan renaksi penurunan Stunting

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Prevalensi Stunting Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Kabupaten/ Kota	Prevalensi Provinsi DKI Jakarta	Prevalensi Nasional
1	Kepulauan Seribu	18.6	17.6	21.5
2	Jakarta Selatan	16.6		
3	Jakarta Timur	16.8		
4	Jakarta Pusat	19.1		
5	Jakarta Barat	17.1		
6	Jakarta Utara	19.8		

Sumber: Survey Kesehatan Indonesia

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan capaian Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Optimalisasi partisipasi masyarakat.	- Perlu adanya upaya penggerakan masyarakat.
2.	Belum seluruh balita yang dipantau pertumbuhannya.	- Perlu upaya promotif dan peningkatan PMBA.
3.	Optimalisasi cakupan kunjungan Posyandu.	- Perlu percepatan pada data cakupan layanan yang belum mencapai target.
4.	Optimalisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).	- Perlunya dukungan dan kerjasama lintas sektor terkait dan para kader dalam mengoptimalkan kegiatan pemantauan pertumbuhan utk deteksi dini, dan pengawasan kelompok berisiko.
5.	Dukungan lintas sektor dalam penggerakan Masyarakat untuk pemanfaatan Posyandu.	- Tindak lanjut temuan faktor determinan stunting untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.
6.	Dukungan lintas sektor dalam penyediaan data sasaran balita yang menyeluruh.	
	Dukungan intervensi terhadap kelompok balita bermasalah gizi dapat lebih ditingkatkan lagi.	

Guna memperbaiki capaian Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis layanan kesehatan berkelanjutan	Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) pada Balita bermasalah gizi	Revisi Petunjuk Teknis Tata Laksana Balita bermasalah Gizi
			Presentase balita bermasalah gizi yang dilakukan screning red flag sebelum diberikan PMT
		Tertatalaksananya Balita Stunting oleh dokter spesialis	Revisi Petunjuk Teknis Tata Laksana Balita bermasalah Gizi
			Presentase balita dengan stunting yang dilakukan tatalaksana oleh dokter spesialis
			Kampanye Penurunan balita stunting

3.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki. IPG juga dibentuk dari dimensi yang sama dengan IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH); pengetahuan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (PPP). Bedanya IPG mengukur untuk indikator tersebut untuk masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Data capaian IPG dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian IPG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 baru akan dirilis oleh BPS pada pertengahan Tahun 2025 (Bulan Juni). Sampai dengan saat ini data capaian yang sudah terpublikasi dalam website BPS adalah data capaian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, yaitu sebesar 96,40% yang dirilis pada bulan juni 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender	Indeks pembangunan gender	persen	95.14	N/A (belum rilis)	-

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin tinggi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPM laki-laki dan IPM perempuan terus meningkat. Perbedaan percepatan pencapaian IPM laki-laki dengan IPM Perempuan menjadi kunci bagaimana pola IPG terbentuk. Itulah sebabnya mengapa IPG tahun 2023 sebesar 96,40 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 96,03 padahal IPM laki-laki maupun IPM perempuan meningkat hanya saja percepatan kenaikan IPM perempuan masih lebih tinggi. Pada tahun 2023, IPM laki-laki DKI Jakarta sudah mencapai 85,61 sedangkan IPM perempuan sebesar 82,53 atau ada gap sebesar 3,08 poin. Diharapkan ke depannya pembangunan gender terus meningkat dengan gap semakin mengecil. DKI Jakarta mempunyai angka IPM baik laki-laki maupun perempuan yang sangat tinggi, dan IPG cukup dekat dengan nilai 100 menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kapabilitas perempuan untuk menuju kesetaraan gender.

Berikut realisasi Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan gender	Indeks pembangunan gender	Indeks	95.04	94,93 (data tahun 2022)	95.14	96,40 (data tahun 2023)	95.24	95.34

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, terdapat peningkatan target capaian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu realisasi 2023 adalah sebesar 96,40% dan pada 2024 ditetapkan target 95,14%.

Gambar II-9
IPM laki-laki dan IPM perempuan dan IPG DKI Jakarta, Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Selama periode 2020-2023 IPG semua kabupaten/kota meningkat. Pada tahun 2023 IPG semua wilayah naik disbanding tahun 2022,

Tabel II-50
Perbandingan IPG antar Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Kepulauan Seribu	93,95	93,94	94,29	94,48
Kota Jakarta Selatan	97,22	97,37	97,55	98,43
Kota Jakarta Timur	96,07	96,04	96,53	96,54
Kota Jakarta Pusat	97,19	97,31	97,56	97,60
Kota Jakarta Barat	96,29	96,53	96,55	96,58
Kota Jakarta Utara	94,47	94,53	94,78	95,04
DKI JAKARTA	95,70	95,93	96,03	96,40

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020 tercatat ada empat kota (Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat) yang memiliki nilai IPG di atas rata-rata atau di atas nilai IPG BPS DKI Jakarta.

Pada tahun 2023, kondisi tersebut belum berubah. Pada tahun 2023 nilai IPG tertinggi dicapai oleh Jakarta Selatan sebesar 98,43 diikuti oleh Jakarta Pusat sebesar 97,60; Jakarta Barat sebesar 96,58; Jakarta Timur sebesar 96,54; Jakarta Utara sebesar 95,04 dan Kepulauan Seribu sebesar 94,48. Dapat dikatakan bahwa pembangunan antara laki-laki dengan perempuan di Jakarta Selatan paling setara dibandingkan kabupaten/kota lainnya..

Jika dibandingkan dengan capaian IPG nasional, IPG Provinsi DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100, dapat dikatakan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan lebih setara di DKI Jakarta dibandingkan dengan nasional.

Tabel II-51
Indeks Pembangunan Gender seluruh Pemda tahun 2023

No	Pemda	Indeks
1.	ACEH	92,71
2.	SUMATERA UTARA	91,70
3.	SUMATERA BARAT	95,54
4.	RIAU	89,51
5.	JAMBI	89,71
6.	SUMATERA SELATAN	93,80
7.	BENGKULU	91,74
8.	LAMPUNG	91,33
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	90,30
10.	KEP. RIAU	94,83
11.	**DKI JAKARTA**	**96,40**
12.	JAWA BARAT	90,91
13.	JAWA TENGAH	93,31
14.	D. I. YOGYAKARTA	94,98
15.	JAWA TIMUR	92,96
16.	BANTEN	93,31
17.	BALI	95,37

No	Pemda	Indeks
18.	NUSA TENGGARA BARAT	91,47
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	93,43
20.	KALIMANTAN BARAT	88,43
21.	KALIMANTAN TENGAH	89,82
22.	KALIMANTAN SELATAN	90,17
23.	KALIMANTAN TIMUR	87,13
24.	KALIMANTAN UTARA	88,73
25.	SULAWESI UTARA	95,47
26.	SULAWESI TENGAH	92,63
27.	SULAWESI SELATAN	93,56
28.	SULAWESI TENGGARA	91,22
29.	GORONTALO	88,24
30.	SULAWESI BARAT	90,34
31.	MALUKU	93,55
32.	MALUKU UTARA	90,60
33.	PAPUA BARAT	84,24
34.	PAPUA	81,69
	INDONESIA	**92,29**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

sehubungan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan	Program Pengaru sutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.459.563.794	2.389.907.153	97,17%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.753.470.000	1.749.075.796	99,75%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	97.635.000	91.935.000	94,16%
		Total	4.310.668.794	4.230.917.949	98,15%

Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Indeks Pembangunan Gender tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 4.230.917.949 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.310.668.794 (capaian 98,15%).

3.6 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Tahun 2024 yang merupakan indikator dari sasaran strategis Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat. Target Indeks Demokrasi pada Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dengan target sebesar 82,13.

Dalam publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta berjudul “Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2023 Volume 5, 2024” yang diterbitkan pada bulan Desember 2024, dijelaskan bahwa pengumpulan data dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) antara lain bersumber dari: 1) Lembaga Negara Pengampu, 2) Surat Kabar, 3) Portal Berita *Online*), 4) *Focus Group Discussion* (FGD), dan 5) Dokumen terkait lainnya. Terkait Penghitungan Indeks, dijelaskan pula bahwa untuk tahun 2023 dilakukan penghitungan Angka IDI yang terdiri dari : 1) indeks demokrasi di tingkat provinsi, 2) indeks demokrasi di tingkat pusat, dan 3) indeks demokrasi di tingkat nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat, di mana aspek IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty. AHP dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman, pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa hasil perumusan nilai Indeks Demokrasi didapatkan dari suatu tahapan proses yang panjang, sehingga nilai Indeks Demokrasi pada tahun berjalan (N) baru dapat diperoleh di tahun berikutnya (N+1). Oleh karena itu,

terkait dengan target Indeks Demokrasi Tahun 2024 sebagai IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 didefinisikan dengan "indeks IDI Tahun 2023 yang dipublikasikan hasilnya pada Tahun 2024".

Berdasarkan publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta dalam "Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2023 Volume 5, 2024" capaian IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah sebesar 84,57 indeks, adapun persentase capaiannya adalah 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	82,13	84,57	100%

Sumber : Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2023 Volume 5, 2024 diterbitkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta

IDI terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Proporsi penilaian IDI untuk tiap aspeknya adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK	NILAI	BOBOT	INDEKS
1	Kebebasan	90,66	0,310	28,10
2	Kesetaraan	86,51	0,376	32,53
3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	76,24	0,314	23,94
	Indeks Demokrasi Indonesia			**84,57**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta diketahui terdapat peningkatan capaian IDI Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 2,44 indeks dari tahun sebelumnya.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Demokrasi pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76.82	82.13	77.07	84.57	77.37	77.57

Dari tabel di atas bahwa indikator indeks demokrasi pada capaian tahun 2024 sebesar 84,57 jika dibandingkan dengan target RPD tahun 2023-2026 telah mencapai target, dimana target pada tahun 2026 yaitu sebesar 77,57 atau selisih 7,00 indeks.

Adapun perbandingan 34 provinsi yang dihitung nilai IDI nya, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ke-2 setelah Bali. Nilai capaian IDI DKI Jakarta tersebut berada dalam kategori tinggi (>80).

Gambar II-10
Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Sumber : Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2023 Volume 5, 2024 diterbitkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

IKU		Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Indeks Demokrasi	1	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	17.174.288.192	16.584.414.681	96,57%
	2	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	10.099.039.624	9.029.807.493	89,41%
	3	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2.083.199.664	2.075.897.324	99,65%
	4	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	154.338.566.086	153.635.139.766	99,54%
	5	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	747.592.996.551	745.922.814.003	99,78%
			931.288.090.117	927.248.073.267	99,57%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Indeks Demokrasi tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 927.248.073.267 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 931.288.090.117 (capaian 99,57%) tingkat efisiensi 0,43%.

Dalam rangka terciptanya optimalisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disampaikan strategi-strategi yang telah dilakukan sebagai berikut :

a. Aspek Sumber Daya Manusia
   1) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan serta pengembangan kompetensi lainnya (bimtek, diskusi, rapat) terkait IDI
   2) Melakukan penugasan-penugasan teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi, khususnya yang mendukung capaian IDI
   3) Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas pegawai secara berkala

b. Aspek Teknologi
   1) Pemanfaatan aplikasi/sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait capaian dan peningkatan Indeks Demokrasi
   2) Optimalisasi penggunaan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi yang terkait tugas dan fungsi pendukung capaian Indeks Demokrasi.

Selain Program-program di atas capaian Indeks Demokrasi juga mempunyai rencana aksi yaitu Sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024.

Faktor keberhasilan capaian Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol misalnya melalui koordinasi pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (TNI/Polri/Kejaksaan), sosialisasi-sosialisasi dan koordinasi terkait nilai-nilai demokrasi yang melibatkan tokoh agama, perkumpulan penghayat kepercayaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi etnik, partai politik, generasi muda (pelajar dan mahasiswa), dan *stakeholder* strategis lainnya.

4. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu ‘Transformasi Pelayanan Publik’, ‘Manajemen Pemerintahan’, dan ‘Berintegritas’. Kata kunci transformasi pelayanan publik menggambarkan kondisi dimana praktik dan persepsi layanan publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu dirumuskan dua sasaran yaitu ‘Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat’ dan ‘Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan kota cerdas’. Selanjutnya kata kunci manajemen pemerintahan memiliki makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan. Sejalan dengan kondisi yang ingin dicapai dirumuskan dua sasaran yaitu ‘Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah’ dan ‘Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel’. Kata kunci terakhir yaitu berintegritas dapat diaplikasikan kepada semua lini pemerintahan, namun terutama pada aparatur sipil negara. Sehingga konsep integritas ini diturunkan menjadi sasaran ‘Berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur’. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83	N/A	-
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.08	93.36	102.50%
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.21	4.46	105.94%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Indeks	84 (A)	81,66 (A)	97.21%
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Predikat	75	72.34	96.45%
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur I	Indeks Sistem Merit	Indeks	350.5	350.5	100%

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Adapun capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Program ini sejalan dengan visi pembangunan Jakarta yang modern dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kementerian PANB telah melakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan target tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu nilai 83 adapun capaian pada tahun 2024 sampai dengan saat ini belum rilis dari Kementerian PAN dan RB sebagai Tim Penilai Evaluator External Reformasi Birokrasi sehingga capaian disampaikan N/A.

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	83	N/A	N/A

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan data capaian diatas yang belum dirilis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat membandingkan antara capaian tahun 2023 dengan tahun 2024. Namun target pada dokumen RPD Tahun 2023-2026 berdasarkan capaian tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakin masih sesuai dengan target nilai perencanaan.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	82	82.47	83	(belum rilis)	84	85

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi RB tahun 2024, Kementerian PANRB telah menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang berlaku bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Lebih lanjut, seluruh proses pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 dilakukan melalui Portal RB Nasional.

Dalam portal RB Nasional tersebut, disampaikan beberapa hal yaitu pengisian renaksi RB General dan Tematik tahun 2024, mengunggah bukti keabsahan rencana aksi melalui surat sekda, mengisi realisasi rencana aksi RB General dan RB Tematik sampai dengan triwulan II; dan mengunggah Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) *ex-ante* tahun 2024 dan LHEI *on-going* triwulan IV tahun 2023, serta triwulan I- IV tahun 2024.

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan 75 renaksi RB General dan 33 RB tematik pada portal RB Nasional, dengan rincian:

Tabel II-52 RB General:

Kegiatan Utama	Indikator	Jumlah Renaksi
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	1
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	4
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	8
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	6
Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	6
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	5
Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	7
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	6
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	1
Pelaksanaan data statistic sectoral	Indeks Pembangunan Statistik	1
Penguatan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2
Penguatan pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	4
Penguatan pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	1
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	10
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAhlak	4
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasaan Masyarakat	2
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	1
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	3

Tabel II-53 RB Tematik

Tema	Jumlah Renaksi
Pengentasan Kemiskinan	1
Realisasi Investasi	1
Digitalisasi Pemerintahan	1
Penggunaan Produk Dalam Negeri	4
Pengendalian Inflasi	8

Berikut capaian Indeks RB Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 -2024 yaitu:

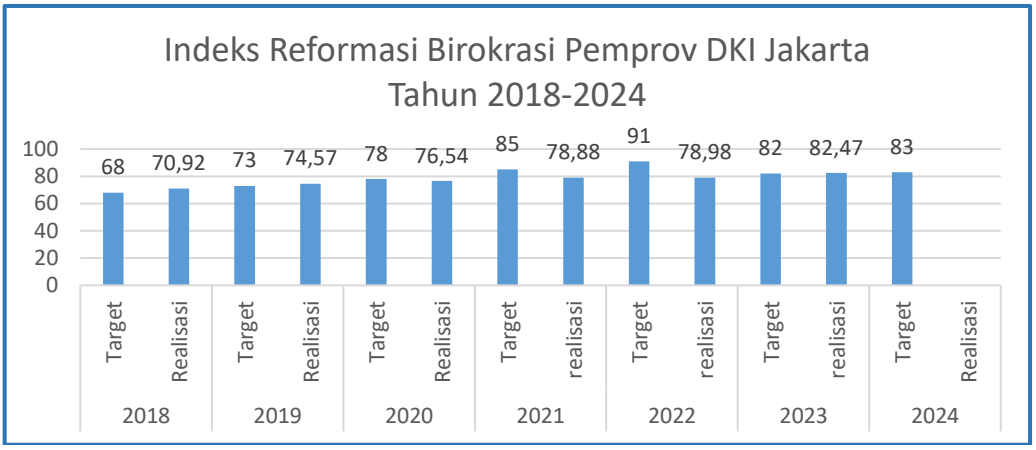

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024, sebagai berikut:

No	*Penilaian*	*Bobot*	*Nilai*
1	RB General	100	N/A
2	RB Tematik	20	N/A
3	Indeks RB	120	N/A
	Kategori		N/A

Adapun beberapa sumber daya anggaran yang ada guna meningkatkan nilai capaian dari Indek Reformasi Birokrasi yaitu :

a. Sumber Daya Anggaran

berikut program – program yang dilaksanakan terdiri dari :

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Penataan Analisis Jabatan	360.320.000	360.320.000	100%
2.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	70.500.000	69.000.000	97,87%
3.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	233.172.740	232.560.000	99.74%
4.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.400.000	99.28%
5.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	36.000.000	35.400.000	98.33%
6.	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	257.400.000	257.400.000	100%
7.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	93.000.000	93.000.000	100%
	TOTAL	1.077.992.740	1.075.080.000	99.73%

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Terdapat 7 sub kegiatan di Biro ORB yang terkait beberapa indikator penilaian RB dengan dengan total anggaran tersebut di realisasikan sebesar Rp. 1.075.808.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.077.992.740,- dengan capain anggaran sebesar 99,73%.

Terkait dengan perbandingan dengan nasional ataupun pemerintah daerah lainnya tidak dapat diperbandingkan dikarenakan nilai Indeks Reformasi Birokrasi tidak terinformasi pada publik, sehingga tidak dapat disajikan dalam capaian ini.

b. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan sumber daya pegawai dalam capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov DKI Jakarta perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi, penempatan pegawai sesuai keahlian, pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta pemberian insentif. Dengan strategi ini, implementasi reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa strategi pemanfaatan sumber daya terkait dengan pegawai:

1) Memberikan pelatihan berkala tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi layanan, dan manajemen perubahan
2) Mengadakan workshop terkait big data, AI, dan analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making).
3) Meningkatkan pemahaman pegawai dalam penggunaan sistem e-Government, e-Kinerja, dan e-Planning
4) Menjalin kerja sama dengan akademisi, lembaga riset, dan startup teknologi dalam pengembangan inovasi birokrasi
5) Mengoptimalkan kemitraan dengan sektor swasta untuk adopsi teknologi dalam layanan public

c. Sumber Daya Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup berbagai aspek yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

1) Digitalisasi Layanan Publik

- Jakarta Kini (JAKI):

  Aplikasi super (super app) yang menyediakan berbagai layanan digital bagi warga Jakarta, seperti pelaporan masalah kota, pemantauan cuaca, layanan kesehatan, dan informasi transportasi.

- Jakarta *Smart City*:

  Platform berbasis data yang mengintegrasikan berbagai informasi untuk membantu pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Open Data Jakarta

  Portal yang menyediakan data terbuka mengenai berbagai sektor di Jakarta, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran, proyek pembangunan, dan layanan publik.

- APBD *Online*:

  Sistem transparansi anggaran yang memungkinkan masyarakat melihat secara langsung pengalokasian dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- *e-Budgeting dan e-Planning*:

  Memastikan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.

3) Peningkatan Efisiensi Administrasi Pemerintahan

- *e-Office*:

  Sistem administrasi perkantoran elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses birokrasi

- Sistem Informasi Kinerja Pegawai (*e-TPP*):

  Memantau kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara digital untuk memastikan efektivitas kerja dan pemberian insentif berbasis kinerja
- Absensi *Online* dan e-Kinerja:

  Menerapkan sistem absensi berbasis teknologi dan sistem penilaian kinerja ASN secara transparan

4) Penguatan Keamanan dan Manajemen Kota

- CCTV dan *Command Center*

  Pemantauan keamanan kota dengan sistem CCTV yang terintegrasi ke Jakarta Smart City dan Command Center untuk koordinasi lebih cepat dalam penanganan insiden
- Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*):

  Digunakan dalam mitigasi bencana seperti banjir, dengan sensor air yang terhubung ke sistem informasi pemerintah daerah dana tau pusdatin BPBD
- Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Cerdas (*Intelligent Transport System*/ITS):

  Penggunaan teknologi untuk mengelola lalu lintas, termasuk penerapan tilang elektronik (ETLE)

5) Transformasi Digital dalam Layanan Kesehatan dan Pendidikan

- JakSehat:

  Layanan kesehatan digital yang membantu masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, memantau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan mendapatkan informasi vaksinasi.
- JakWiFi:

  Program internet gratis di berbagai titik untuk mendukung akses pendidikan dan pelayanan publik berbasis digital.

Faktor pendukung / atau faktor penghambat

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pencapaiannya. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:

Faktor Pendukung:

1) Dukungan Kebijakan dan Regulasi

- Komitmen Pemerintah Daerah:
  Gubernur dan jajaran pemerintahan DKI Jakarta memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
- Peraturan Daerah dan Kebijakan Nasional:
  Adanya regulasi dari pemerintah pusat, seperti Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mempercepat digitalisasi layanan.

2) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

- Adopsi Sistem Digital: Implementasi *e-Budgeting, e-Planning*, e-Kinerja, dan layanan berbasis aplikasi seperti JAKI mempermudah birokrasi dan meningkatkan transparansi.
- Jakarta *Smart City:* Pemanfaatan big data dan analitik dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3) Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Publik

- Open Data Jakarta: Masyarakat bisa mengakses informasi pemerintahan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Layanan Pengaduan Publik: Aplikasi seperti Cepat Respon Masyarakat (CRM) memungkinkan warga melaporkan masalah di lingkungan mereka secara real-time.

4) Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Pelatihan dan Pengembangan ASN: Pemerintah DKI Jakarta aktif menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam sistem pemerintahan digital.
- Sistem Meritokrasi: Penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja yang terukur.

Faktor Penghambat:

1) Resistensi terhadap Perubahan

- Budaya Kerja Konvensional: Beberapa ASN masih terbiasa dengan sistem manual dan kurang adaptif terhadap digitalisasi.

- Kurangnya Pemahaman Teknologi: Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi yang cukup untuk mengoperasikan sistem berbasis digital.

2) Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

- Akses Internet yang Tidak Merata: Meski program JakWiFi telah diperluas, masih ada area yang memiliki akses internet terbatas.
- Keamanan Data dan Cybersecurity: Risiko kebocoran data akibat sistem yang belum sepenuhnya matang dalam keamanan siber.

3) Kompleksitas Regulasi dan Birokrasi

- Tumpang Tindih Kebijakan: Beberapa regulasi masih belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, menghambat implementasi kebijakan yang lebih fleksibel.
- Prosedur Administratif yang Panjang: Meskipun sudah ada digitalisasi, beberapa proses perizinan dan layanan publik masih membutuhkan waktu yang lama.

4) Anggaran dan Keterbatasan Sumber Daya

- Keterbatasan Anggaran: Implementasi teknologi memerlukan investasi besar, sementara alokasi anggaran harus diprioritaskan pada berbagai sektor lain seperti infrastruktur dan sosial.
- Kurangnya Tenaga Ahli IT di Pemerintahan: Tidak semua instansi memiliki tenaga ahli yang cukup dalam pengelolaan sistem digital.

Adapun tindak lanjut hasil evaluasi implementasi RB tahun 2023 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 dapat terlihat dalam matrik di bawah ini:

No.	Indikator Penilaian	Rekomendasi KemenPANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2024	Target Output Tahun 2024
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Mendorong untuk mereviu rencana aksi dimiliki untuk mengawal semua kegiatan utama dan menetapkan target pada kegiatan utama untuk sesuai dengan prioritas nasional	ORB dan Inspektorat melakukan reviu bersama terkait renaksi RB General dan Tematik	Reviu Renaksi RB General dan Tematik yang berkualitas

No.	Indikator Penilaian	Rekomendasi KemenPANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2024	Target Output Tahun 2024
2	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Agar Perkada tentang SOTK mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB sesuai surat MenpanRB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tindaklanjut mekanisme penyederhanaan struktur organisasi saat ini agar berkoordinasi dengan KemenpanRB.	Penyusunan Kajian Kebijakan Arsitektur Kelembagaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Kajian Kebijakan Arsitektur Kelembagaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	- Koordinasi dengan pengampu tema dalam penyusunan renaksi - Menyusun Renaksi Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi aspek perencanaan, anggaran, probis dan monev - reviu atas renaksi	Renaksi penang gulangan kemiskinan yang berkualitas
4	Realisasi Investasi (Rencana Aksi	Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah	- Koordinasi dengan pengampu tema dalam penyusunan renaksi - Menyusun Renaksi realisasi inevstasi - reviu atas renaksi	Renaksi Realisasi Investasi yang logis

No.	Indikator Penilaian	Rekomendasi KemenPANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2024	Target Output Tahun 2024
5	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	Memastikan Rencana aksi yang disusun pada tema "digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan stunting" memuat unsur penanganan stunting	- Koordinasi dengan pengampu tema dalam penyusunan renaksi - Menyusun Renaksi Digitalisasi administrasi penanganan stunting - reviu atas renaksi	Renaksi Digitalisasi yang terdapat unsur penanganan stunting
6	Laju Inflasi (Rencana Aksi)	Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah	- Koordinasi dengan pengampu tema dalam penyusunan renaksi - Menyusun Renaksi laju inflasi - reviu atas renaksi	Renaksi laju inflasi yang logis
7	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	tidak melaporkan capaian rencana aksi	Dilakukan cek ulang atau pemeriksaan ulang terhadap capaian renaksi	Terisinya data capaian Renaksi pada portal RB
8	Realisasi Investasi (Capaian Output)	tidak melaporkan capaian rencana aksi	Dilakukan cek ulang atau pemeriksaan ulang terhadap capaian renaksi	Terisinya data capaian Renaksi pada portal RB
9	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (CapaianOutput)	tidak melaporkan capaian rencana aksi	Dilakukan cek ulang atau pemeriksaan ulang terhadap capaian renaksi	Terisinya data capaian Renaksi pada portal RB
10	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	tidak melaporkan capaian rencana aksi	Dilakukan cek ulang atau pemeriksaan ulang terhadap capaian renaksi	Terisinya data capaian Renaksi pada portal RB
11	Laju Inflasi (Capaian Output)	tidak melaporkan capaian rencana aksi	Dilakukan cek ulang atau pemeriksaan ulang terhadap capaian renaksi	Terisinya data capaian Renaksi pada portal RB

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun analisis terhadap implementasi RB di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu

a. Reformasi birokrasi di DKI Jakarta telah mengalami kemajuan pesat dengan digitalisasi dan penerapan teknologi. Namun, tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan infrastruktur, dan tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Solusi seperti peningkatan literasi digital ASN, perbaikan

sistem regulasi, serta peningkatan anggaran untuk pengembangan teknologi dapat mempercepat pencapaian reformasi birokrasi di DKI Jakarta

b. Reformasi birokrasi memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan pemerintahan. Kepemimpinan yang berkualitas dan komitmen yang tinggi diperlukan untuk memimpin perubahan, mengatasi resistensi, dan memastikan kelancaran implementasi

c. Melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan warga negara, penting dalam proses reformasi birokrasi. Partisipasi dan keterlibatan stakeholder dapat memperkuat legitimasi kebijakan, memastikan representasi kepentingan yang beragam, dan memperluas dukungan terhadap perubahan.

d. Setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta ditahbiskan sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global sehingga dalam konteks tata kelola pemerintahan, Tranformasi birokrasi berfokus pada birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan bersih dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

e. Dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif, integritas dan transparansi adalah fondasi utama reformasi birokrasi antikorupsi. Kedua nilai ini tidak hanya penting untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing Jakarta di mata dunia. Dengan memperkuat integritas dan transparansi, Jakarta dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia.

f. Tranformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan implementasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global memiliki keterkaitan erat karena

upaya memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas Pemerintah DKI Jakarta di panggung global.

g. Perubahan dan peralihan generasi dari X dan Milineal ke Generasi Z perlu diantisipasi secara tepat sehingga perubahan tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam implementasi reformasi birokrasi

Guna mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa rencana aksi ke depan dapat diterapkan, mencakup aspek kebijakan, teknologi, dan penguatan kapasitas SDM. Berikut adalah langkah-langkah strategisnya:

a. Mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur sipil negara (ASN) tentang pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan
b. Workshop tentang pentingnya reformasi birokrasi dan manfaat digitalisasi bagi pelayanan publik
c. Menerapkan sistem *reward & punishment* berbasis kinerja, sehingga ASN yang beradaptasi lebih cepat diberikan apresiasi
d. Pendampingan bagi ASN yang masih kesulitan dalam menggunakan sistem digital
e. Memperluas cakupan JakWiFi di area perkantoran dan layanan publik agar semua ASN dapat bekerja dengan sistem digital tanpa kendala
f. Memodernisasi perangkat keras dan perangkat lunak di gedung pemerintahan agar lebih kompatibel dengan sistem e-Government
g. Memperkuat Keamanan Siber dan Data
h. Mengharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan reformasi birokrasi lebih terintegrasi
i. Mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai arahan pemerintah pusat
j. Mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Digital agar proses perizinan lebih cepat dan transparan
k. Menerapkan tanda tangan digital untuk mengurangi birokrasi manual yang memperlambat pengambilan keputusan di semua lini

l. Menyederhanakan prosedur layanan publik agar lebih efisien dan menghilangkan proses administratif yang tidak perlu
m. Meningkatkan transparansi penggunaan anggaran melalui sistem e-Budgeting dan e-Monitoring
n. Optimalisasi anggaran untuk teknologi dengan memprioritaskan pengadaan infrastruktur digital
o. Mengadakan program rekrutmen tenaga IT profesional untuk mempercepat implementasi transformasi digital
p. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk pengembangan kapasitas ASN di bidang teknologi.
q. Mengoptimalkan aplikasi JAKI dan Open Data Jakarta agar warga bisa lebih aktif mengawasi kinerja pemerintah
r. Membangun sistem feedback yang lebih responsif agar keluhan masyarakat terhadap layanan publik bisa segera ditindaklanjuti
s. Mengembangkan solusi digital melalui kerja sama dengan startup teknologi dan universitas untuk mempercepat inovasi
t. Memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data Analytics dalam perencanaan kebijakan berbasis data.

4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan atau sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah mengukur sejauh mana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan atau kinerja pelayanan. IKM memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

a. Tingkat Kepuasan Masyarakat: Persentase responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap layanan atau kinerja lembaga tertentu
b. Tingkat Kepercayaan Masyarakat: Persentase masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga atau pelayanan yang disediakan
c. Responsif Terhadap Keluhan: Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan masyarakat dan tingkat kepuasan setelah penanganan keluhan

d. Ketersediaan Informasi: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan informasi mengenai kebijakan, program, atau layanan yang diberikan
e. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau evaluasi program

Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai capaian sebesar 102,50, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,08	93,36	102.50

Sasaran Indikator kinerja utama pada Kepuasan Masyarakat pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.5	91.76	88.6	93.36	87	90.5

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa IKM DKI Jakarta berada pada point **93,36** meningkat 1,6 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan terdapat upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan publik baik di tingkat dinas maupun wilayah kota/kabupaten guna mewujudkan mayarakat yang lebih sejahtera. Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator indeks kepuasan masyarakat sudah melampaui target dari akhir tahun RPD Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/207/AA.05/2024 Hal Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (APIP) bahwa target indikator pada Perjanjian Kinerja

harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga target SKM tahun 2024 mengalami perubahan dari target RPD yang semula **88,6** menjadi **91,08** pada Perjanjian Kinerja, namun walaupun adanya kenaikan target, IKM tahun 2024 tetap tercapai.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas diperoleh berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh 12 Dinas Daerah dan 6 Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

a. Setiap Semester untuk lingkup Kota/Kabupaten Administrasi, yaitu:
    1) Kota Administrasi Jakarta Barat
    2) Kota Administrasi Jakarta Timur
    3) Kota Administrasi Jakarta Utara
    4) Kota Administrasi Jakarta Selatan
    5) Kota Administrasi Jakarta Pusat
    6) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Setiap per Triwulan untuk lingkup 12 Dinas, yaitu:
    1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    3) Dinas Perumahahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    5) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
    6) Dinas Sosial
    7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    8) Dinas Perhubungan
    9) Dinas Pendidikan
    10) Dinas Kesehatan
    11) Dinas Kebudayaan
    12) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Adapun unsur-unsur pelayanan yang dilakukan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1) Persyaratan
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3) Waktu Penyelesaian
4) Biaya/Tarif

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6) Kompetensi Pelaksana
7) Perilaku Pelaksana
8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9) Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 menggunakan aplikasi Jak-Survey dan JAKI yang dikelola oleh Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta UP. Bidang Statistik dan Unit Pengelola Jakarta Smart City. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dengan nilai range dan kategori makna sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Interval	Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.59	25.00 - 64.99	**D**	Tidak Baik
2	2.60 - 3.06	65.00 - 76.60	**C**	Kurang Baik
3	3.07 - 3.53	76.61 - 88.30	**B**	Baik
4	3.54 - 4.00	88.31 - 100.00	**A**	Sangat Baik

1) Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup 12 Dinas dilakukan 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing Dinas, dengan hasil sebagai berikut:

Dinas Pelaksana SKM	TW I	TW II	TW III	TW IV	IKM	Mutu Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.61	95.47	99.88	99.88	**98.71**	**A**
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85.23	90.33	86.4	84.41	**86.59**	**B**
Dinas Perumahahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	84.95	85.48	87.07	86.87	**86.09**	**B**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.87	94.94	94.97	95.35	**95.87**	**A**
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	94.94	94.97	95.35	90.3	**93.89**	**A**
Dinas Sosial	92.27	91.22	91.85	90.54	**91.47**	**A**
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	91.26	89.67	90.89	87.66	**89.87**	**A**
Dinas Perhubungan	92.15	92.15	91.78	94.01	**92.52**	**A**
Dinas Pendidikan	87.11	85.9	86.5	84.32	**85.96**	**B**
Dinas Kesehatan	93.00	92.78	93.51	93.54	**93.21**	**A**
Dinas Kebudayaan	89.52	89.02	91.97	89.79	**90.08**	**A**
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	91.77	93.52	92.57	93.58	**92.86**	**A**

2) Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2024

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup wilayah dilakukan 6 (enam) bulan sekali pada masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Pelaksanaan (SKM) dilakukan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni PPSU, Ketertiban Umum, RPTRA, PKK, Posyandu, Jumantik dan RT/RW, LMK, dan FKDM, dengan hasil sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Semester I	Semester II	IKM	Mutu Pelayanan
Kota Administrasi Jakarta Barat	96.07	96.28	96.18	**A**
Kota Administrasi Jakarta Pusat	98.63	99.33	98.98	**A**
Kota Administrasi Jakarta Selatan	96.21	97.39	96.8	**A**
Kota Administrasi Jakarta Timur	98.13	97.68	97.91	**A**
Kota Administrasi Jakarta Utara	97.71	97.34	97.53	**A**
Kabupaten Kepulaun Seribu	95.89	95.97	95.9	**A**

Berdasarkan nilai IKM 12 Dinas dan Kota/Kabupaten Administasi maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 diperoleh dari rata-rata nilai IKM 12 Dinas dan 6 Kota/Kabupaten Administrasi:

Nilai IKM Provinsi = $\frac{\text{IKM 12 Dinas + IKM 6 Kota/Kabupaten Administrasi}}{\text{Jumlah pelaksana SKM}}$

$$=\frac{(98.71+86.59+86.09+95.87+93.89+91.47+89.87+92.52+85.96+93.21+90.08+92.86+96.18+98.98+96.8+97.91+97.53+95.9)}{18}$$

IKM Provinsi = 93,36 (A) Sangat Baik

Hasil Penilaian Unsur Layanan U1-U9 Tahun 2024 dapat diketahui pada tabel berikut:

Unsur Pelayanan DKI Jakarta	Nilai	Mutu Pelayanan
Persyaratan Pelayanan	93.72	A
Kemudahan Prosedur Pelayanan	93.22	A
Kecepatan Waktu Pelayanan	93.27	A
Biaya	94.17	A
Kesesuaian Produk Pelayanan	93.18	A
Kompetensi Petugas	93.40	A
Perilaku Petugas	93.64	A
Sarana dan Prasarana	92.76	A
Penanganan Pengaduan	92.91	A

Secara keseluruhan Nilai Unsur Pelayanan sudah mendapat nilai optimal dengan Mutu A (Sangat Baik), namun upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan tetap harus dilakukan. Tiga Unsur pelayanan prioritas yang dapat ditingkatkan adalah : **Kesesuaian Produk Pelayanan**, **Sarana dan Prasarana**, **Penanganan Pengaduan.**

Berikut data capaian IKM dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024:

Gambar II-11
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2024 di Provinsi DKI Jakarta. IKM DKI Jakarta berada pada point 93,36 meningkat 1,66 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan terdapat upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan publik baik di tingkat dinas maupun wilayah kota/kabupaten guna mewujudkan mayarakat yang lebih sejahtera.

Adapun program yang mendukung indikator tersebut yaitu:

Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat	3,600.000	3,600.000	100	Pemanfaatan *virtual meeting* dalam meningkatkan koordinasi
	Total	3,600.000	3,600.000	100	

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut masuk pada program penataan organisasi dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan SKM guna mendapatkan nilai IKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait SKM dengan pagu anggaran 3.600.000 dengan capaian sebesar 100 persen. Pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil menjadi kunci dalam penerapan IKU untuk memastikan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat berjalan efektif, akurat, dan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat maka IKM masuk dalam Perjanjian Kinerja para Kepala Perangkat Daerah 18 PD tersebut. Kemudian untuk memastikan kualitas dan keakuratan data , pelaksaan SKM sudah menggunakan sistem Jaksurvey dan JAKI.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat :

- Perlu ditingkatkannya pengetahuan SDM terkait dengan pelaksanaan SKM pada masing-masing unit pelayanan, agar pelayanan tidak kendala dengan ketidakpahaman pelayanan dalam melayani layanan.
- Kurangnya jangka waktu pengolahan data survei
- Pelaksanaan survei yang terlalu dekat, sehingga evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan SKM kurang maksimal
- Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna layanan.

Guna mengingkatkan IKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

a. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia kepada petugas yang melaksanakan pelayanan dan petugas survei
b. Mencari solusi terkait dengan batas waktu pengolahan data survei

c. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dengan waktu pelaksanaan survei
d. Memanfaatkan teknologi untuk otomisasi pembuatan laporan triwulan/semester

4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai target SPBE sebesar 4,21 dimana target tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Realisasi Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai capaian sebesar 105,94, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-54
Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,21	4,46	105,94%

Sumber : Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan data capaian diatas, berikut domain dan aspek penilaian terhadap capaian indeks SPBE:

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

* Target penilaian Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Berikut detail rincian terhadap capaian indeks SPBE :

Nama Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Nilai 2024
SPBE	4,46
Domain Kebijakan SPBE	4,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,40
Domain Tata Kelola SPBE	4,40

Nama Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Nilai 2024
Perencanaan Strategis SPBE	3,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,00
Penyelenggara SPBE	4,50
Domain Manajemen SPBE	3,09
Penerapan Manajemen SPBE	3,50
Audit TIK	2,00
Domain Layanan SPBE	5,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks SPBE pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-55
Perbandingan Target dan Realisasi RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terakselerasinya transformasi digital dan berkembangnya ekosistem kota cerdas	Indeks SPBE	Indeks	3,50	3,50	3,57	3,57
			Realisasi			
			2023	2024	2025	2026
			4,21	**4,46**	-	-

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Berdasarkan dengan data realisasi capaian pada tahun 2023-2024 dapat disimpulkan bahwa capaian indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melampaui target RPD Tahun 2023 yaitu 3,50 dengan hasil realisasi sebesar 4,21 dan Tahun 2024 yaitu 3,50 dengan hasil realisasi sebesar 4,46 dimana target pada akhir dokumen RPD tahun 2025-2026 sebesar 3,57.

Table II-56
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator :

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	5
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan capaian Indeks SPBE mempunyai beberapa program yaitu:

Indikator Sasaran	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	257.400.000	257.400.000	100%	-
	Dinas Kominfotik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	8.041.176.320	7.205.840.040	89,61%	10,39%
			8.298.576.320	7.463.240.040	89,93%	10,06%

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut masuk pada program Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dan kegiatan terkait dengan Indeks SPBE guna mendukung peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa program dengan anggaran 8.298.576.320,- dengan capaian sebesar 89,93 persen.

Berikut hasil Indeks SPBE seluruh provinsi secara nasional, sebagai berikut :

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,64	Sangat Baik
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
3	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,85	Sangat Baik
6	Pemerintah Provinsi Jambi	3,05	Baik
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00	Baik
8	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,46	Memuaskan
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
10	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
11	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2024 yaitu :

a. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta baik dari sisi kompetensi maupun jumlah

b. Belum adanya kesepahaman terkait regulasi kerahasiaan data sehingga masih terdapat Perangkat Daerah (PD) yang menolak memberikan data akibat regulasi kerahasiaan data; dan

c. Keterbatasan perangkat IT yang bersertifikat TKDN dan memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhan layanan (kebutuhan teknologi informasi dengan spesifikasi tinggi).

Berikut strategi mengatasi beberapa kendala tersebut diantaranya :

a. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan perlu didukung ASN serta mengusulkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sesuai bidangnya

b. Melaksanakan sosialisasi regulasi kerahasiaan data yang dijadikan sebagai target capaian isu strategis Provinsi DKI Jakarta; dan

c. Menyampaikan permasalahan tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan Business Matching/Sosialisasi.

Berikut disampaikan hasil evaluasi implementasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024:

a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim

Koordinasi SPBE Instansi NAMUN Tindak Lanjut dari review kebijakan sebagian besar masih bersifat terbatas internal Dinkominfo karena umumnya berupa penerbitan NOTA DINAS Kepala Dinas Kominfo

b. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah adalah Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keselarasan Perencanaan dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis namun masih sebatas kelengkapan Konten, Namun review dan tindaklanjut Arsitektur Arsitektur SPBE belum menghasilkan Arsitektur SPBE terkini, implementasi Peta Rencana SPBE dengan DPA belum tercapai periodik 3 tahun terakhir (2022, 2023, 2024), dan Inovasi Proses Bisnis belum diterapkan di sistem SIA.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi Aspek TIK telah berjalan optimal
d. Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan optimal
e. Audit belum dilaksanakan dengan perangkat dan pedoman nasional
f. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik di Pemprov DKI Jakarta telah optimal
g. Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemprov DKI Jakarta telah optimal

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2025 yaitu:

	KEGIATAN	
1	**Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis -dan Manajemen Perubahan**	
	a	***Transformasi* Proses Bisnis**
	-	Penyusunan Kebijakan Proses Bisnis
	-	Pemenuhan Data Domain Arsitektur Proses Bisnis Pada SIA-SPBE KemenPAN RB
	-	Pemenuhan Data Domain Arsitektur Layanan Pada SIA-SPBE KemenPAN RB

	KEGIATAN	
1	**Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis -dan Manajemen Perubahan**	
	a	***Transformasi* Proses Bisnis**
	-	Pemenuhan Bukti Dukung Indikator 14 (Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE) dalam Pelaksaaan Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE
	-	Review Kebijakan Lingkup Transformasi Proses Bisnis
	b	**Manajemen Perubahan**
	-	Penyusunan Kebijakan Manajemen Perubahan
	-	Keterpaduan Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE
	-	Pemenuhan Bukti Dukung Indikator 27 (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan) dalam Pelaksaaan Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi SPBE
2	**Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Kota/ Kabupaten Administrasi**	
	a	***Transformasi* Proses Bisnis *Digital* Kota/ Kabupaten Administrasi**
	-	Melaksanakan Pembahasan Penyusunan Proses Bisnis Terkait Layanan SPBE pada Kota/Kabupaten Administrasi dalam rangka penyusunan Proses Bisnis *Digital*
	-	Penyusunan Proses Bisnis Terkait Layanan SPBE pada Kota/Kabupaten Administrasi
3	**Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Audit TIK, Manajemen Data dan Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Risiko SPBE**	
	a	**Aplikasi**
	-	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE
	b	***Infrastruktur* SPBE**
	-	Asesmen fasilitas penyimpanan data pada semua Perangkat Daerah/Biro
	c	**Manajemen Keamanan Informasi**
	-	Review Kebijakan Penyelenggaraan Manjaemen Keamanan Informasi
	-	Pelaksanaan *Security Awareness*
	d	**Manajemen Risiko SPBE**
		Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE
4	**Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan**	
	-	Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan
	-	Penyusunan SK dan Pembentukan Tim Komite Manajemen Pengetahuan
	-	Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dalam Penyelenggaraan SPBE dan Bimtek *Portal Knowledge Management* SPBE
	-	Pelaksanaan *Community Of Practice* (*COP*) SPBE
	-	Evaluasi Manajemen Pengetahuan
5	**Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia**	
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jabatan SPBE pada Perangkat Daerah
	-	Sosialisasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan SPBE
	-	Penerapan Manjemen Sumber Daya Manusia SPBE
	-	Pemetaan Kebutuhan Kompetensi SDM dalam Pelaksnaan SPBE
	-	Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM dalam Pelaksanaan SPBE
	-	Penyusuanan Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM dalam Pelaksanaan SPBE

	KEGIATAN	
6	**Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran SPBE**	
	-	Fasilitasi Supervisi Kode Rekening pada Forum Perencanaan SPBE
7	**Kelompok Kerja Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Implementasi SPBE**	
	1	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2024
	2	Penyampaian Laporan Dari Masing-Masing Anggota Tim Koordinasi SPBE Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2025
	3	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2025
	4	Penyampaian Laporan Dari Masing-Masing Anggota Tim Koordinasi SPBE Usulan Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2026
	5	Pelaporan Hasil Penyusunan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2026
	6	**Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2025**
	7	**Pelaksanaan forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik TA-2026**
	8	**Pelaksanaan Review dan usulan Revisi kebijakan Penyelenggaraan SPBE**

4.3.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada capaian indikator kinerja mengenai Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah salah satu dari indikator dari sasaran pada dokumen yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Adapun pada tahun 2024 indikator tersebut mempunyai target nilai sebesar 84 dimana target tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel II-57
Target Indikator Kinerja Utama Predikat AKIP

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	84

Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini merupakan salah satu ukuran mengetahui tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Dalam implementasinya SAKIP itu sendiri terdapat mengenai beberapa informasi yaitu :

a. Tingkat implementasi SAKIP
b. Tingkat akuntabilitas kinerja
c. Memberikan saran perbaikan dalam peningkatan AKIP; dan
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Adapun beberapa rincian dari beberapa komponen yang dijadikan dasar penilaian yaitu :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
	Nilai Hasil Evaluasi	100
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	

Berdasarkan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Provinsi DKI Jakarta Nomor B/207/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,66 dengan predikat “A”. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “Memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan juga unti kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	84	81,66	97,21

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Sesuai dengan data capaian dari indikator tersebut sebesar 97,21 persen terdapat selisih poin sebesar 2.34 poin dari target tahun 2024. Berikut hasil capaian permasing-masing komponen capaian berdasarkan dengan LHE :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,76
2	Pengukuran Kinerja	30	24,62
3	Pelaporan Kinerja	15	12,67
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,61
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berikut capaian realisasi dari target Sasaran Indikator kinerja utama pada nilai/predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	82 (A)	81.06 (A)	84 (A)	81.66 (A)	87 (A)	90.5 (AA)

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 selaras dengan target dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Capaian realisasi pada tahun 2024 dengan nilai 81.66 masih jauh dari target di akhir tahun 2026 yaitu senilai 90.5. adapun selisih nilai tersebut sebesar 8.84 poin. Sehingga masih sangat butuh usaha dalam meningkatkan nilai capaian tersebut. Berikut capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2024 oleh Menpan RB secara Nasional diumumkan pada Link Youtube dan website KemenPANRB :

No	Pemda	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DIY	AA
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A
5	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A
7	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BB
8	Pemerintah Provinsi Bali	BB
9	Pemerintah Kota Surabaya	AA
10	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	AA

Sumber : channel youtube KementerianPANRBRI

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian prediat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejajar dengan capaian dari beberapa Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Berikut upaya –upaya yang telah dilakukan pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 atas rekomendasi berdasarkan LHE AKIP tahun 2023 dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perjanjian kinerja Perangkat Daerah agar lebih berorientasi hasil sesuai dengan tugas dan fungsi	Pengurangan dan perubahan indikator kinerja sasaran khusus pada dokumen/perkin Kepala Perangkat Daerah
2	Peningkatan/perbaikan target kinerja seluruh PD tiap tahunnya	Perubahan target indikator kinerja pada dokumen perjanjian kinerja minimal sama dengan realisasi tahun sebelumnya
3	Pohon kinerja berdasarkan CSF sehingga pengawalan kinerja antar level terkait antara satu dengan yang lain	Contoh CSF level tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Subkegiatan (aktifitas menjadi kondisi yang diharapkan)
4	Komitmen pimpinan memberikan feedback terhadap capaian kinerja sehingga pemanfaatan pengukuran kinerja untuk perbaikan maksimal	Umpan balik berkelanjutan melalui dialog kinerja di sistem etpp yang terintegrasi dengan aplikasi penginputan kinerja
5	Identifikasi keberhasilan crosscutting KSD pengawalannya sesuai dengan tupoksi PD sehingga menciptakan perkin yang kolaboratif	Kriteria keberhasilan pelaksanaan rencana aksi KSD Tahun 2024 tercantum dalam rencana aksi IKU sebagai lampiran perjanjian kinerja
6	Refocusing penganggaran berfokus menghapus program/kegiatan yang tidak terkait dengan capaian kinerja strategis sehingga efisien dan efektif	- Pelaksanaan evaluasi hasil renja PD tiap triwulan - Telah dikeluarkan SE Sekda setiap tahun tentang pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun N (tahun perencanaan)
7	Rumusan kinerja individu (SKP) berkaitan kinerja organisasi dengan memastikan matriks peran hasil yang disusun menggambarkan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi/PD	Rumusan kinerja individu (SKP) disusun dalam matriks pembagian peran dan hasil (MPPH) untuk menggambarkan keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi/PD

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
8	Laporan kinerja perangkat daerah dapat menyampaikan informasi analisa yang memadai (analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis upaya perbaikan kinerja)	LKIP Perangkat Daerah telah menyajikan seluruh aspek yang wajib dalam analisis capaian IKU, terutama pada aspek Analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya (anggaran, SDM dan TI), dimana capaian realisasi anggaran < 100% dengan capaian kinerja > 100% dan upaya perbaikan-perbaikan (rencana aksi kedepan)
9	Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal berisi temuan dan rekomendasi yang sesuai kriteria dan kesesuaian antara temuan dan rekomendasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan implementasi SAKIP Perangkat Daerah	- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah mengacu pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 - Melakukan pembekalan melalui FGD/bimtek tentang pembahasan evaluasi SAKIP yang diikuti evaluator inspektorat dan LO Perangkat Daerah
10	Pemanfaatan laporan kinerja dengan menetapkan target kinerja harus lebih baik nilainya dibandingkan realisasi target kinerja sebelumnya sehingga target kinerja lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja	Melakukan perubahan target indikator pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan realisasi pada laporan kinerja tahun sebelumnya

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Adapun pada tahun 2024 terdapat beberapa pemanfaatan sumber daya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 diantaranya :

a. Pemanfaatan Sumber Daya Anggaran

   Pada tahapan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas didukung beberapa program-program yaitu terdiri dari :

   a. Program penyelenggaraan pengawasan
   b. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
   c. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
   d. Program penataan organisasi

Adapun program-program tersebut yang dilaksanakan mempunyai besaran anggaran yang telah direalisasikan, berikut realisasi anggaran sebagai berikut :

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai / Predikat AKIP	1	Inspektorat	Program penyelenggaraan pengawasan	40,297,704,820	21,660,021,280	53.75%
	2	Bappeda	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	25.219.405.981	22.545.839.696	89.40%
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	3.537.072.562	3.452.591.500	97.61%
	3	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Program Penataan Organisasi	27.600.000	27.600.000	100%
				69,054,183,363	**47,658,452,476**	**69.09%**

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai AKIP tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 47,658,452,476,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 69,054,183,363,- Atau capaian sebesar 69.09% dengan capaian efisiensi sebesar 32.91% dari nilai total anggaran.

Adapun kegiatan-kegiatan masing-masing program dilaksanakan di beberapa perangkat daerah. Selain program-program tersebut juga terdapat beberapa Kegiatan Strategis Daerah yang juga dilaksanakan dalam mendorong nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu terdiri dari :

No	Rencana Aksi	Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Pemprov DKI Jakarta	Rancangan Dokumen Sasaran Khusus dan Operasional Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi dan Asisten Deputi Tahun 2024	100	100	100%

No	Rencana Aksi	Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2)	100	100	100%
		Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024	100	100	100%
		Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024	100	100	100%
		Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025	100	100	100%
4	Pembahasan Rancangan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025	Dokumen Final Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan Tahun 2024 yang siap dikirimkan ke BKD sebagai bahan penandatanganan perkin	100	100	100%
		Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan (Eselon 2, 3, dan 4 Tahun 2025)	100	100	100%
5	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023	100	100	100%
		Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024	100	100	100%
		Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024	100	100	100%

No	Rencana Aksi	Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6	Penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Nota Dinas yang berisi LKIP Provinsi sebagai bagian BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023	100	100	100%
		Konsep Instruksi Sekretaris Daerah tentang penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang memuat antara lain: 1. LPPD Provinsi 2. LKIP Provinsi 3. LKIP Perangkat Daerah	100	100	100%
7	Penyusunan bahan penilaian AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Nota Dinas hasil Kesepakatan Tim SAKIP terkait pembaruan Pergub Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP	100	100	100%
		Nota Dinas hasil Kesepakatan Tim SAKIP terkait pembaruan Pergub Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP	100	100	100%
		Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh KemenPANRB	100	100	100%

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan dengan data capaian dari kegiatan strategis daerah (KSD) penunjang capaian indikator predikat AKIP dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian dari seluruh renaksi sebesar 100 persen.

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kompetensi pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai dari target indikator yaitu terdiri dari :

1) Melaksanakan pendampingan ASN yang menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Manajemen Kinerja yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan pada tahun 2024 kepada seluruh ASN Perangkat Daerah.

3) Melakukan sosialisasi dan FGD serta pendampingan penyusunan laporan dengan menghadirkan narasumber dari BPKP dan professional penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Dalam hal pemanfaatan sumber daya teknologi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa sistem terkait dengan implementasi AKIP yaitu:

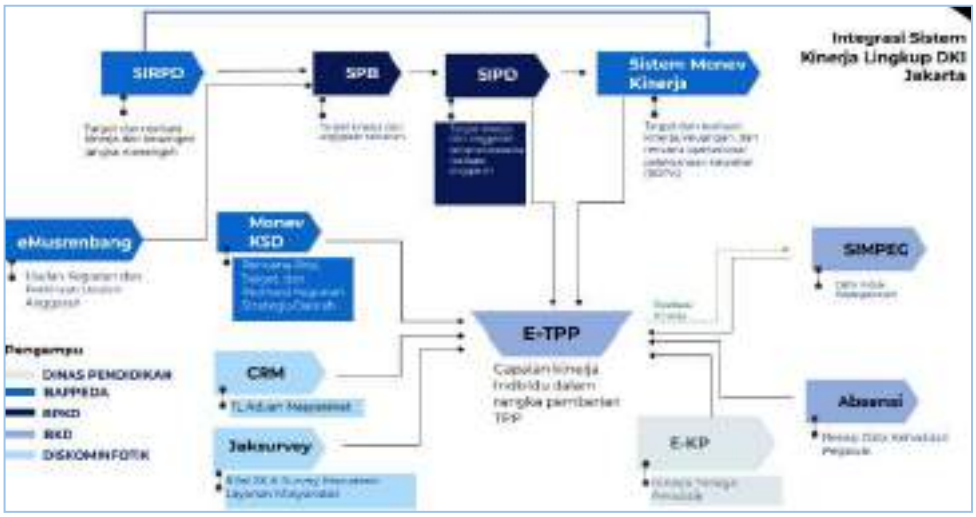

Adapun catatan rekomendasi tim evaluator KemenPANRB dalam peningkatan indikator Nilai/Predikat AKIP Tahun 2024 yaitu terdiri dari :

a. Mengotimalkan kembali penetapan sasaran khusus pada perjanjian kinerja kepala PD cara merumuskan kembali sasaran khusus tersebut agar lebih berorientasi outcome dan indikator kinerja yang dimiliki relevan dengan sasaran khusus tersebut.

b. Memperbaiki kualitas pohon kinerja pada level PD dengan cara memastikan agar level operasional menguraikan kondisi kinerja yang logis sesuai dengan CSF dari kinerja level diatasnya sehingga pada level operasional akan tergambar kondisi yang sesuai dan cukup untuk menunjang pencapaian kinerja

c. Mendorong perencanaan kinerja individu untuk benar-benar menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dengan cara memastikan rencana hasil kinerja individu merupakan

tindak lanjut dari penjenjangan kinerja yang ada pada pohon kinerja dan juga menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk mengukur pencapaian hasil dari rencana hasil kinerja individu yang ditetapkan

d. Perlu dilaksanakan monev pada aplikasi sakip.jakarta.go.id dengan cara memastikan penetapan target kinerja pada kinerja berjenjang dapat di breakdown secara triwulan dengan tepat sehingga dapat relevan dengan konteks kinerja yang harus diukur

e. Agar mendorong pemanfaatan hasil monev pencapaian kinerja bukan hanya memvalidasi namun juga memberikan feedback pada setiap pencapaian kinerja sehingga pencapaian kinerja organisasi dapat terjaga

f. Memastikan laporan kinerja pada seluruh PD untuk dapat menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki

g. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

h. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan memastikan bahwa laporan hasil evaluasi telah menyajikan temuan dan rekomendasi sesuai dengan pemberian nilai perkomponen evaluasi AKIP internal sehingga perbaikan implementasi SAKIP dapat lebih cepat.

i. Memastikan adanya pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada PD, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat PD dan akan berpengaruh juga pada level pemerintah daerah.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi LHE KemenPANRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna meningkatkan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdiri dari :

a. Perencanaan

- Bappeda mempunyai beberapa rencana aksi terkait dengan perencanaan kinerja diantaranya :
  - Melakukan perbaikan perencanaan kinerja pada setiap urusan pemerintah daerah, dengan beberapa kriteria keberhasilan yaitu : tersusunnya pohon kinerja pada setiap urusan Pemda dan tersusunnya cascading kinerja Perangkat Daerah
  - Mengoordinasikan perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan beberapa kriteria keberhasilan yaitu tersusunnya perencanaan kinerja pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja
  - Mengoordinasikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah dengan kriteria keberhasilan tersusunnya target kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja

b. Pengukuran

- Biro yang mengoordinasikan Perangkat Daerah dibawah masing-masing Asisten Sekda menyusun :
  - Meyusun Tim peningkatan nilai komponen pengukuran kinerja dengan beberapa kriteria keberhasilan yaitu penyusuna SK Tim peningkatan nilai komponen pengukuran kinerja dan penyusunan petunjuk teknis reviu LKIP Perangkat Daerah

- Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan kriteria keberhasilan yaitu pelaksanaan monev evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dan menyusun manual indikator yang jelas atas kinerja dan cara pengukurannya

c. Pelaporan

- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi membuat beberapa rencana aksi diantaranya :
  - Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
  - Menjadi Narasumber kegiata pendidikan dan pelatihan manajemen kinerja pada substansi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
  - Membuat pedoman sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah
  - Membuat pedomen reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah

d. Evaluasi (Inspektorat)

- Melakukan penyusunan rancangan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Melakukan FGD/Bimtek terkait evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Melakukan monitoring tindaklanjut seluruh rekomendasi atas hasil SAKIP PD tahun sebelumnya
- Melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah.

4.3.2 Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks Survei Penilaian Integritas merupakan indikator dari sasaran tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Indeks Survei Penilaian Integritas yaitu 75 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Realisasi Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas pada tahun 2024, memperoleh Capaian sebesar 72,34 berdasarkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2024 melalui Laporan Hasil SPI Tahun 2024 dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	75	72,34	96,45 %

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Adapun hasil skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Internal : 75,01

Eksternal : 83,65

Eksper : 72,48

Agregat : 72,34

(Untuk di grafik)

Adapun hasil skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. yaitu :

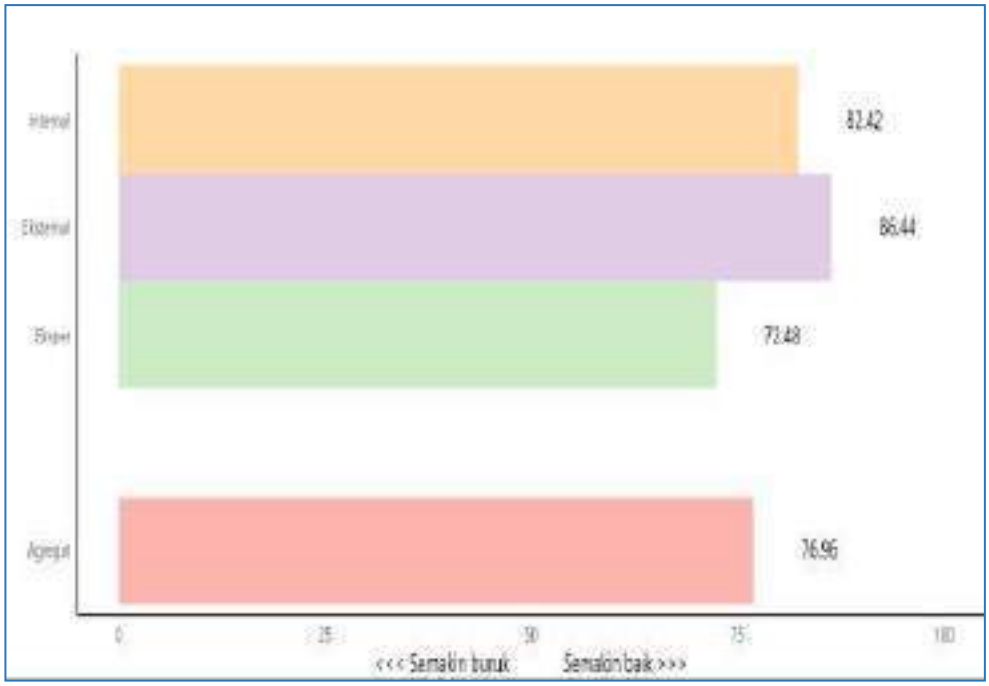

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan capaian Indeks Survei Penilaian Integritas di tahun 2024 yaitu sebesar 4,62 poin dari tahun sebelumnya yaitu 76,96

Adapun capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target Indikator kinerja utama Indeks Survei Penilaian Integritas pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	75	72.34	80	85

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Indeks Survei Penilaian Integritas ditargetkan sebesar 85 pada target akhir tahun 2026. Sehingga Indeks Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 sebesar 72,34 masih jauh dari target akhir yaitu selisih 12,66 poin yang akan dicapai, sehingga perlu ditingkatkan kembali mengenai beberapa program/kegiatan/renaksi kegiatan guna meningkatkan nilai tersebut.

Berikut capaian Indeks Survei Penilaian Integritas seluruh Pemerintah Daerah tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara Nasional:

No	Pemda	Indeks
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	72,34
2	Pemerintah Provinsi Banten	71,21
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	73,84
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	67,83
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	79,47
6	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	74,6

No	Pemda	Indeks
7	Pemerintah Provinsi Bali	77,97
8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	64,15
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	73,98
10	Pemerintah Provinsi Maluku	63,12
11	Pemerintah Provinsi Jambi	65,36

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas, berikut rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil SPI Tahun 2024 kepada seluruh lembaga publik, yaitu :

a. Peningkatan Efektivitas Program Pencegahan Korupsi

   Memperkuat pengawasan internal, menegakkan kode etik instansi dengan sosialisasi dan pelatihan berkala mengenai integritas dan antikorupsi serta mengembangkan program whistleblowing yang lebih efektif agar pegawai merasa aman dalam melaporkan praktik korupsi

b. Perbaikan dalam Kualitas Data Responden

   Memastikan kelengkapan, akurasi dan pemutakhiran data populasi responden (internal, eksternal, dan eksper).

c. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Survei dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan mengenai pentingnya survei dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara objektif, dengan melibatkan pimpinan dan pegawai dalam mendukung keterlibatan responden dalam survei.

d. Mengurangi Pengaruh Anomali dan Pengkondisian Responden untuk mengantisipasi pengurangan nilai SPI, dengan :

   1) Memastikan pelaksanaan survei dilakukan secara transparan dan objektif;
   2) Meminimalkan anomali data dengan verifikasi informasi yang akurat;
   3) Mencegah pengkondisian responden agar hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi integritas yang sebenarnya

e. Penyusunan Rencana Aksi terhadap hasil SPI 2024 dengan :

1) Mengidentifikasi nilai SPI instansi dan tren nilai dari tahun ke tahun;
2) Menganalisis komponen risiko dari berbagai dimensi integritas;
3) Menentukan Perangkat Daerah prioritas untuk peningkatan nilai dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut;
4) Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan indikator yang terukur untuk menilai efektivitas perbaikan yang telah dilakukan.

4.3.3 Opini Laporan Keuangan Daerah

Indikator Opini Laporan Keuangan Daerah merupakan sasaran dari Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 yaitu WTP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Realisasi Capaian Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 117/S/XVIII.JKT/7/2024.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Sasaran Indikator kinerja utama Opini Laporan Keuangan Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas Opini Laporan Keuangan Daerah mencapai yaitu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sesuai target tahunan RPD 2023-2026. Berikut beberapa data pemerintah daerah terkait opini laporan keuangan daerah :

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	WTP
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WTP
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	WTP
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	WTP
5	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

sehubungan dengan capaian Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 ada beberapa program yang dilaksanakan guna mempertahankan capaian tersebut. Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Opini Laporan Keuangan Daerah	BPKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.983.849.937.666	610.896.313.360	30.79%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.993.002.940	1.898.827.000	95.27%
	BPAD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,612,170,982	92,899,596,215	92.33%
	BAPENDA	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	367,732,343,565	339,366,640,267	92.29%
	BPPBJ	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	3,571,874,195	3,208,705,840	89.83%
			2.457.759.329.348	**1.048.270.082.682**	**42.65%**

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Realisasi anggaran Program pengelolaan keuangan daerah sebesar 30,79% dikarenakan adanya anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.365.518.170.267 yang tidak terserap dikarenakan tidak ada kegiatan yang memerlukan penggunaan BTT.

Berikut Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempertahankan Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:

a. Peningkatan akuntabilitas Pendapatan dan Piutang Daerah melalui optimalisasi penggunaan sistem informasi
b. Peningkatan akuntabilitas Belanja Daerah dengan didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai
c. Optimalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIERA dan e-Persediaan
d. Integrasi antara aplikasi penatausahaan Pendapatan, Belanja, dan BMD dengan aplikasi penyusunan laporan keuangan

Guna mempertahankan Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

Tabel II-58
Rencana Aksi

Kegiatan	Rencana Aksi 2024
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampian Laporan Keuangan BUMD secara tepat waktu
	Manajeman Kas Daerah, Kas BLUD, kas BOS/BOP melalui pengembangan lanjutan aplikasi
	Pendataan informasi SIPPT/ HPL oleh SKPD/UKPD secara berkala sebagai data dukung Laporan Keuangan
	Percepatan penyerahan dan pencatatan aset fasos fasum dari pengembang.
	Rekonsiliasi data oleh Bidang yang menangani Fasos Fasum dengan SKPD/UKPD terkait secara berkala
	Pendataan dan pemetaan penggunaan tanah HPL Optimalisasi sistem informasi dan aplikasi penyusunan laporan keuangan

Sumber : Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.4 Indeks Sistem Merit

Indikator Indeks Sistem Merit merupakan sasaran dari berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 350,5 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 488 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen

ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai capaian Indeks Sistem Merit sebesar 350.5 dengan Kategori IV (Sangat Baik).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	350,5	350,5	100%

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun beberapa rincian dari beberapa komponen penilaian yang dinilai yaitu :

No	Aspek Penilaian	Total Nilai
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40
2	Aspek Pengadaan	40
3	Aspek Pengembangan Karir	82,5
4	Aspek Promosi dan Mutasi	37,5
5	Aspek Manajemen Kinerja	75
6	Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	37,5
7	Aspek Perlindungan dan Pelayanan	16
8	Aspek Sistem Informasi	22
Total Nilai		**350,5**

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 yaitu sebesar 15 poin dari penilaian yang dilakukan oleh KASN pada Tahun 2022 yaitu 335.5.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Ssitem Merit	Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	48,369,697,659	27,536,923,392	56.93%
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	17.620.528.771	16.168.480.640	91.76%
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.423.830.751	30.307.512.030	90.68%
	Total		**99.414.057.181**	**74.012.916.062**	**79.79%**

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai AKIP tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 74.012.916.062 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 99.414.057.181 Atau capaian sebesar 79.79%.

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia :

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Sub Kegiatan Strategis Daerah yang dilaksanakan dengan beberapa renaksi yaitu :

BPSDM:

1) Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dengan renaksi berikut:
   - Laporan Perencanaan penyelengaraan pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh 51 PD/UKPD APBD TA 2024.
   - Dokumen Kajian Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN berbasis *Corporate University* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global

2) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan renakasi berikut:
   - Pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan penanggulangan kemiskinan, Diklat manajemen Penanggulangan Kemiskinan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Diklat Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bukti.

3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan renaksi berikut :
   - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sensitivitas disabilitas dalam menyelenggarakan pelayanan public bagi ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

BKD:

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang professional dengan beberapa renaksi terdiri :

1. Penyusunan standar kompetensi teknis jabatan dengan target Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas
2. Penerapan manajemen talenta dengan target :
   - Rancangan kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta
   - Laporan uji coba sistem informasi manajemen talenta yang selaras dengan petunjuk teknis pelaksanaan/implementasi manajemen talenta
   - Tersedianya kelompok rencana suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi
   - Tersedianya kelompok rencana suksesi Jabatan Administrator dan Pengawas
3. Optimalisasi layanan kepegawaian dan kinerja pegawai
   - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem Kepegawaian dan Kinerja Pegawai telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (helpdesk). contohnya : update, upgrade, versioning, patch, Surat Edaran/perubahan landasan hukum dari layanan SPBE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan aplikasi
   - Analisis komparasi atau penyempurnaan layanan Sistem Kepegawaian dan Kinerja Pegawai

Pemanfaatan Teknologi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta membuat aplikasi Si-Jule untuk membantu dalam kegiatan pelaksanaan pengembangan ASN di Pemprov DKI Jakarta. Dengan pemanfaatan teknologi aplikasi Si-Jule, ASN Pemprov DKI Jakarta dapat menambah pengetahuan untuk pengembangan kompetensinya dimanapun dan kapanpun.

Selain Si-jule, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga memiliki sistem SIMDIKLAT yang mempunyai fungsi untuk memonitoring pengembangan kompetensi yang sudah diikuti oleh ASN di Pemprov DKI Jakarta, selain untuk memonitoring pengembangan kompetensi ASN, SIMDIKLAT juga sebagai portal untuk mengikuti podcast-podcast yang diselenggarakan oleh beberapa perangkat daerah, salah satunya Podcast Rabu Belajar yang selalu dilaksanakan setiap Hari rabu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sebagai media pengembangan kompetensi ASN di Pemprov DKI Jakarta.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Sub Kegiatan Strategis Daerah Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa renaksi yaitu:

a. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

b. Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026)

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Berikut capaian Indeks Sistem Merit beberapa Pemerintah Daerah tahun 2024 hasil penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diumumkan dalam laporan tahunan BKN yang dipublikasikan melalui *website* https://www.bkn.go.id/hasil-pengawasan-penerapan-sistem-merit 2024/.

No	Instansi Pemerintah	Nilai Indeks	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	400	Sangat Baik
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	383	Sangat Baik
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	353.5	Sangat Baik
4	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	350.5	Sangat Baik

No	Instansi Pemerintah	Nilai Indeks	Kategori
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	343.5	Sangat Baik
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	336	Sangat Baik
7	Pemerintah Provinsi Riau	325.5	Sangat Baik
8	Pemerintah Provinsi Lampung	298.5	Baik
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	264	Baik
10	Pemerintah Provinsi Bengkulu	256.5	Baik

Berikut beberapa faktor keberhasilan/pendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

1. Penetapan kamus dan standar kompetensi teknis Jabatan Administrator;
2. Peningkatan jumlah pegawai yang dilakukan assessment kompetensi;
3. Pengembangan sistem informasi manajemen talenta;
4. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku ASN secara berkala;
5. Melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian dengan membangun sistem informasi cuti dan sistem informasi kenaikan pangkat.
6. Pada aspek perencanaan kebutuhan telah dilakukan penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun) serta penyediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
7. Pada aspek pengadaan telah ditetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetetif, transparan dan tidak diskriminatif serta pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS secara tepat waktu
8. Pada aspek manajemen kinerja telah ditetapkan kontrak kinerja yang terukur dan pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala
9. Pada aspek penggajian, penghargaan dan disiplin telah ditetapkan kebijakan internal tentang pembayaran kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kebijakan yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap pegawai berprestasi serta kebijakan yang terkait penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku.

10. Pada aspek sistem informasi telah dilakukan pembangunan SIMPEG yang terintegerasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai serta penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan.
11. Penyelenggaraan Diklat dengan Akreditasi A dari LAN RI
12. Gedung BPSDM yang belum dikelola secara mandiri dalam rangka integrasi dan percepatan konektivitas antar penyelenggara diklat dan narasumber, pengajar dan pihak ketiga lainnya
13. Merencanakan kegiatan pengembangan *JakCorpU* untuk dapat diimplementasikan secara penuh dan berdampak dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan tujuan strategis pimpinan tertinggi
14. Pendekatan dan pencarian data pendukung ke OPD secara terus menerus yang menaungi JFT tertentu serta membuka koordinasi dengan instansi pembina JFT untuk mendapatkan arahan terkait metode uji kompetensi dan penjadwalan kegiatan

Guna mengoptimalkan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

IKU	Renaksi 2025	Target
Badan Kepegawaian Daerah		
Indeks Sistem Merit	RA 1. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Sistem Informasi	T/01.1.1 Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Online yang terbangun (SIMPEG)
		T/01.1.2 Aplikasi pada Sistem Informasi Kepegawaianyang dikembangkan meliputi sistem informasi manajemen Talenta Pool & Sistem Informasi Peta Kompetensi
Indeks Sistem Merit	RA 2. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan	T/02.1.1 Daftar identifikasi permasalahan kepuasan layanan kepegawaian
		T/02.2.1 Laporan rencana tindak lanjut permasalahan kepuasan layanan kepegawaian
		T/02.3.1 Laporan hasil pemantauan tindak lanjut permasalahan kepuasan layanan kepegawaian
		T/02.1.1 Laporan hasil pengukuran indeks kepuasan layanan kepegawaian

IKU	Renaksi 2025	Target
	RA 3. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Pengembangan Karir	T/O3.1.1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pelaksana yang tersusun sejumlah 43 Nama Jabatan
		T/O3.2.1. Potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi sejumlah 300 data
		T/O3.2.2. Potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi sejumlah 650 data
		T/O3.2.3. Potret/profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi sejumlah 1.550 data
		T/O3.3.1. Data pemetaan talenta yang disusun berdasarkan hasil penilaian potensial dan hasil penilaian kinerja dalam sistem informasi manajemen talenta sejumlah 7.500 data
		T/O3.3.2. Data pemetaan talenta yang disusun berdasarkan hasil penilaian potensial dan hasil penilaian kinerja dalam sistem informasi manajemen talenta sejumlah 10.000 data
		T/O3.4.1. Data Rencana Suksesi pada setiap level jabatan yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan kebijakan pola karir instansi sejumlah 250 data
		T/O3.4.1. Data Rencana Suksesi pada setiap level jabatan yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan kebijakan pola karir instansi sejumlah 500 data
		T/O3.5.1. Laporan yang menyajikan data dan informasi tentang kesenjangan kinerja pada setiap level jabatan
	RA 4. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Manajemen Kinerja	T/O4.1.1.Jumlah laporan yang menyajikan data dan informasi tentang strategi dalam mengatasi permasalahan kinerja disetiap level jabatan

IKU	Renaksi 2025	Target
	RA 5. Meningkatkan Indeks Sistem Merit pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	T/O5.1.1.Rekapitulasi Pelaporan LHKPN Eksekutif dan Perluasan Wajib Lapor untuk staf khusus dan ajudan Kepala Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BPSDM	RA1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	T/O1. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Corporate University Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global
	RA2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawa	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai
Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja ASN	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	RA1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	T/O1.1. Surat Edaran akses materi e-learning terkait sensitivitas penyandang disabilitas kepada Perangkat Daerah
		T/O1.2. Tersedianya 40% pegawai pemprov DKI Jakarta yang mengakses materi elearning terkait sensitivitas penyandang disabilitas
	RA2.1. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi untuk mencapai IP ASN dengan Pengelola Kepegawaian
	RA2.2. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi	T/O2.2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi untuk mencapai IP ASN dengan Pengelola Kepegawaian

C. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya sesuai dengan dokumen RPD 2023-2026

Perbandingan data capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2023 dengan 2026 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-59
Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dengan 2026

No	Tujuan / Sasaran		No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	2023		2024		2025	2026	Target Akhir
							Target	Real	Target	Real	Target	Target	
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Indeks	62,6	65	71,3	71	N/A	67	68	68
	1	Terbangunnya Infrasstruktur dan Layanan Dasar kota yg berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	68,76	69,06	77,24	77.24	77.66	69,84	70,1	70,1
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,45	18,78	18,86	20.97	22.19	21,87	23,01	23,01
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,65	54,93	54,57	55.43	56.39	55,93	56,43	56,43
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	-	19,3	25,4	25.4	25.9	20,5	22,3	22,3
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Indeks	62,58	60,12	61,31 (2021)	59.66	N/A	59,16	58,72	58,72
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	-	7,69	7,93	7.81	N/A	7,93	8,04	8,04

No	Tujuan / Sasaran		No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	2023		2024		2025	2026	Target Akhir
							Target	Real	Target	Real	Target	Target	
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,25	5,6 - 6,2	4,96	4.8-5.6	4.90	5,60-6,40	5,60-6,40	5,60-6,40
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	7,18	8,21	6,53	6.53	6.21	7,61	7,31	7,31
	7	Berkurangnya ketimpangan terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,61	4,13	4,44	3.79	4.41	3,25	2,91	2,91
			2	Rasio Gini	Koefisien	0,412	0,411	0,431	0,410	0.431	0,410	0,409	0,409
			3	Tingkat Kemiskinan Ektrem	Persen	0,89	1,06	0,57	0,5	0.35	0,83	0,68	0,68
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	3,96	4,01	4.01	N/A	4,01	4,03	4,03
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	81,11	81,55	83,55	83.55	84.15	81,99	82,11	82,11
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,12	12,14	12,39	12,16	12.5	12,18	12,20	12,20
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,21	75,81	75.81	75.99	73,42	73,53	73,53
			2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	16,8	13,7	9,2	13,2	N/A	12,7	12,2	12,2

No	Tujuan / Sasaran		No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	2023		2024		2025	2026	Target Akhir
							Target	Real	Target	Real	Target	Target	
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84	95,04	94,93	95,14	N/A	95,24	95,34	95,34
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	76,07	76,82	82,13	82.13	84.57	77,32	77,57	77,57
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	76,54	82	82,47	83	N/A	84	85	85
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,5	91,76	91.08	93.36	88,7	90	90
	14	Terakselerasiny transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47	3,50	4,21	4.21	4.46	3,57	3,57	3,57
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	80,1 (A)	82 (A)	81,06 (A)	84 (A)	81.66	87 (A)	90,5 (A)	90,5 (A)
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,7	70	76,96	75	72.34	80	85	85

No	Tujuan / Sasaran		No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	2023		2024		2025	2026	Target Akhir
							Target	Real	Target	Real	Target	Target	
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	17	Berkembangny kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5	326	350,5	350.5	350.5	335,5	345,5	345,5

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan data tabel diatas terlihat beberapa data capaian ditahun 2024 telah melebihi target pada tahun 2025 dan 2026, sehingga besar kemungkinan akan terjadi penyesuaian target indikator RPD Tahun 2023-2026.

Dimana perubahan target tersebut nantinya akan ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun depan.

D. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-60
Tabel Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15,235,527,878,470	13,778,904,342,076	90.44
1	Terbangunnya Infrasstruktur dan Layanan Dasar Terbangunnya Infrasstruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	22,266,374,312	20,404,747,385	91.64
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	659,333,715,040	483,737,685,134	73.37
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	22,266,374,312	20,404,747,385	91.64
2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	6,269,558,691,719	5,705,198,220,669	91.00
				Program Pengelolaan Pelayaran	39,767,739,396	35,829,816,457	90.10
				Program pengelolaan perkeretaapian	3,939,602,119	3,615,327,522	91.77
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	856,741,629,586	812,987,434,642	94.89
3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	106,726,954,624	104,951,201,514	98.34
		2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	5,556,259,397	5,000,266,625	89.99

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Program penangulangan bencana	100,248,433,446	97,037,314,337	96.80
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		-	-	-	-
	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalamandan nilai tambah		Laju Pertumbuhan ekonomi	-	-	-	-
	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	program perencanaan tenaga kerja	205,906,090	188,029,040	91.32
				program penempatan tenaga kerja	30,225,467,429	29,471,129,199	97.50
				program pelatihan kerja produktifitas tenaga kerja	105,760,383,117	103,442,917,581	97.81
				program hubungan industrial	2,089,165,000	2,087,310,000	99.91
				program pengawasan ketenagakerjan	3,677,518,676	3,604,240,890	98.01
	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan social	1	Tingkat Kemiskinan	program pemberdayaan sosial	20,040,286,275	18,439,597,860	92.01
				program perlindungan jaminan sosial	694,156,782,883	665,118,910,705	95.82
				program rehabilitasi social	31,114,090,824	30,111,620,414	96.78
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3,776,944,196	3,454,313,864	91.46
				Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	2,269,756,738,589	2,235,010,097,084	98.47

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan social	2	Rasio Gini	-	-	-	-
		3	Tingkat Kemiskinan Ektrem	-	-	-	-
	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	program penelitian dan pengembangan daerah (Bappeda)	7,616,950,454	7,284,922,100	95.64
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Dinas Kebudayaan)	13,373,732,589	12,665,723,965	94.71
				Program Pengelolaan Permuseuman Dinas Kebudayaan	61,189,878,800	58,459,851,019	95.54
				Program Pengembangan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan)	117,715,007,792	104,004,096,092	88.35
				Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Sekretariat Daerah)	81,752,409,742	81,680,048,868	99.91
				Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal (DPMPTSP)	2,390,606,032	2,276,750,100	95.24
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2,794,386,163	2,575,682,398	92.17
				Program Promosi Penanaman Modal(DPMPTSP)	8,723,336,557	7,995,671,845	91.66

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (Dispusip)	890,107,782	885,681,919	99.50
				Program Pembinaan Perpustakaan (Dispusip)	101,982,713,647	99,355,089,311	97.42
				Program Pembinaan Perpustakaan (Kab. Adm. Kepulauan Seribu)	1,479,336,296	1,423,620,845	96.23
	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	program pengelolaan pendidikan	9,379,779,777,502	8,851,223,826,167	94.36
				program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	2,848,735,747,202	2,752,804,914,427	96.63
				program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1,574,265,029,299	1,527,091,732,070	97.00
				program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	275,968,307	258,483,000	93.66
				program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	528,938,455	514,743,000	97.32
				program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6,422,070,204,223	6,120,613,478,921	95.31
5	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8,101,051,975,865	7,878,055,605,789	97.25
				program pengelolaan pendidikan	9,679,779,777,502	8,851,223,167,000	91.44

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	*6,422,070,204,223*	*6,120,613,478,921*	95.31
				program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	*2,848,735,747,202*	*2,752,804,914,427*	96.63
				program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	*1,574,265,029,299*	*1,527,091,732,070*	97.00
				program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	*528,938,455*	*514,743,000*	97.32
				program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makananminuman	*275,968,307*	*258,483,000*	93.66
		2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2,848,735,747,202	2,752,804,914,427	96.63
	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2,459,563,794	2,389,907,153	97.17
				program peningkatan kualitas keluarga	1,753,470,000	1,749,075,796	99.75
				program pengelolaan sistem data gender dan anak	97,635,000	91,935,000	94.16
	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	program penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan	17,174,288,193	16,584,414,681	96.57
				program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	10,099,039,624	9,029,807,493	89.41

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2,083,199,664	2,075,897,324	99.65
				program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	154,338,566,086	153,635,139,766	99.54
				program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	747,592,996,551	745,922,814,003	99.78
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi	Penataan Organisasi	1,077,992,740	1,075,080,000	99.73
	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Penataan Organisasi (Program digabung dengan IRB)	-	-	-
	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	8,041,176,320	7,205,840,040	89.61
				Penataan Organisasi	-	-	-
	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	program penyelenggaraan pengawasan	40,297,704,820	21,660,021,280	53.75

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian
					Pagu	Realisasi	
	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	25,219,405,981	22,545,839,696	89.40
				program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	3,537,072,562	3,452,591,500	97.61
				Penataan Organisasi	-	-	-
		2	Indeks Survei Penilaian Integritas				
	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	1,983,849,937,666	610,896,313,360	30.79
				program pengelolaan barang milik daerah	1,993,002,940	1,898,827,000	95.27
				program pengelolaan barang milik daerah	100,612,170,982	92,899,596,215	92.33
				program pengelolaan pendapatan daerah	367,732,343,565	339,366,640,267	92.29
				program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	3,571,874,195	3,208,705,840	89.83
	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	program kepegawaian daerah	48,369,697,659	27,536,923,392	56.93
				program kepegawaian daerah (BPSDM)	17,620,528,771	16,168,480,640	91.76
				program pengembangan sumber daya manusia	33,423,830,751	30,307,512,030	90.68

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

E. Analisis efisiensi pengunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut.

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel dibawah:

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	**Indeks Kota Layak Huni**		15,235,527,878,470	13,778,904,342,076	9.56
2	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan		1,134,124,797,340	941,535,304,518	16.98
3	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	105.82	7,170,007,662,820	6,557,630,799,290	8.54
4	Indeks kualitas lingkungan hidup		106,726,954,624	104,951,201,514	1.66
5	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca		5,556,259,397	5,000,266,625	10.01
6	Indeks Resiko Bencana	N/A	100,248,433,446	97,037,314,337	3.20
7	**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	N/A	-	-	-
8	Laju pertumbuhan ekonomi				

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
9	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	105.15	141,958,440,312	138,793,626,710	2.23
10	Tingkat Kemiskinan	91.55	3,018,844,842,767	2,952,134,539,927	2.21
11	Rasio Gini	95.13	-	-	-
12	Tingkat Kemiskinan Ektrem	142.86	-	-	-
13	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	399,908,465,854	378,607,138,462	5.33
14	**Indeks Pembangunan Manusia**	100.72	20,225,655,664,988	19,252,507,177,585	4.81
15	Indeks dimensi pendidikan	102.80	17,780,831,753,367	16,729,278,772,789	5.91
16	Angka Harapan Hidup (menggunakan program yang sama dengan IPM)	100.24	10,845,875,887,486	10,401,283,351,418	4.10
17	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	N/A	2,848,735,747,202	2,752,804,914,427	3.37
18	Indeks Pembangunan Gender	N/A	4,310,668,794	4,230,917,949	1.85
19	Indeks Demokrasi	102.97	931,288,090,118	927,248,073,267	0.43
20	**Indeks Reformasi Birokrasi**	N/A	1,077,992,740	1,075,080,000	0.27
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	102.50	-	-	-
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	105.94	8,041,176,320	7,205,840,040	10.39

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	97.21	69,054,183,363	47,658,452,476	67.09
24	Indeks Survei Penilaian Integritas		-	-	-
25	Opini Laporan Keuangan Daerah	100	2,457,759,329,348	1,048,270,082,682	57.35
26	Indeks Sistem Merit	100	99,414,057,181	74,012,916,062	25.55

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas maka apabila dilakukan perhitugan secara komulatif capaian realisasi serapan anggaran mencapai Rp. **76,200,170,112,154**,- dari total pagu anggaran gabungan yang programnya mendukung capaian indikator sasaran yaitu Rp. **82,584,948,285,937,-** atau capaian 92.27 persen dengan efisiensi 7.73 persen, lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 19.83%, yang artinya secara umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisiensi (*cost-effective*).

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

3.1.1 Target Kinerja

Pada awal tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 4.720.269.000,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu terjadi adanya perubahan pada satuan kerja yang sebelumnya menerima dana dekonsentrasi beralih menjadi satuan kerja tugas pembantuan.

Pada bulan Maret 2024 alokasi anggaran tugas pembantuan berubah Rp. 5.859.042.000,- (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian, terjadi refocusing dan revisi anggaran dari Kementerian/Lembaga Teknis, sehingga alokasi angaran tugas pembantuan pada akhir tahun 2024 berubah menjadi Rp. 4.901.522.000,- (empat miliar sembilan ratus satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Berikut kami sampaikan tabel total anggaran tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menurut Kementerian/Lembaga pemberi anggaran antara lain:

Tabel III-1
Total Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Kementerian/Lembaga Pemberi Anggaran
Tahun Anggaran 2024

No.	Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.441.252.000	Blokir Anggaran sebesar Rp.308.446.000
2.	Kementerian Pertanian	592.213.000	Revisi DIPA (Pengurangan) Anggaran sebesar Rp.1.226.496.000 Blokir Anggaran sebesar Rp.209.026.000
3.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.520.000.000	-
4.	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	1.079.081.000	-
5.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	268.976.000	Revisi DIPA (Penambahan) Anggaran dari Dana Dekonsentrasi
	TOTAL	***4.901.522.000***	

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Provinsi DKI Jakarta menerima 7 (tujuh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; 1 (satu) DIPA tugas pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; serta 2 (dua) DIPA tugas pembantuan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-2
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA			
1.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.4.019062/2024	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
2.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-032.01.3.690925/2024	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya SP DIPA-032.04.3.019063/2024	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya
4.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.05.3.690970/2024	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.06.3.691008/2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut SP DIPA-032.07.3.691046/2024	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
		Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perencanaan Ruang Laut
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA			
7.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan SP DIPA-018.06.4.019057/2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
			Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
8.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SP DIPA-040.01.4.640001/2024	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
			Pengembangan Industri Kuliner Kriya, desain, dan fesyen
			Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
			Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
		Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA			
9.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka SP DIPA-019.05.4.690743/2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka
		Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA			
10.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri SP DIPA-090.02.4.019065/2024	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Daerah

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

3.2.1 Realisasi

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2024 total anggaran tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.901.522.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.170.265.379,- atau 85,08 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III-3
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA						
1.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	DKPKP	146.594.000	81.968.664	55,92
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		155.885.000	112.927.481	72,44
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			302.479.000	194.896.145	64,43
2.	Sekretariat Jenderal					
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	DKPKP	150.000.000	83.538.500	55,69
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Sekretariat Jenderal			150.000.000	83.538.500	55,69
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	DKPKP	43.256.000	43.236.000	99,95
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya		179.495.000	118.315.970	65,92
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			222.751.000	161.551.970	72,53
4.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	DKPKP	81.100.000	80.974.500	99,85
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		56.252.000	54.976.734	97,73

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			137.352.000	135.951.234	98,98
5.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	DKPKP	50.000.000	27.759.000	55,52
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		105.400.000	81.870.000	77,68
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		198.270.000	133.930.291	67,55
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			353.670.000	243.559.291	68,87
6.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut					
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keaneka-ragaman Hayati Laut	DKPKP	130.000.000	125.655.348	96,66
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perencanaan Ruang Laut		100.000.000	99.893.500	99,89
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut		45.000.000	44.545.310	98,99
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			275.000.000	270.094.158	98,22
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				**1.441.252.000**	**1.089.591.298**	**75,60**
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA						
7.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	DKPKP	385.000.000	288.018.460	74,81

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	DKPKP	37.500.000	37.500.000	100,00
		Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak		3.285.000	2.970.016	90,41
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		0	0	0,00
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan			592.213.000	379.426.784	64,07
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia				**592.213.000**	**379.426.784**	**64,07**
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
8.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	DISPAR EKRAF	200.000.000	193.315.000	96,66
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		200.000.000	199.208.130	99,60
		Pengembangan Industri Kuliner Kriya, desain, dan fesyen		190.000.000	186.484.060	98,15
		Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		300.000.000	292.460.514	97,49
		Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)		500.000.000	470.888.195	94,18
	Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan		130.000.000	97.580.998	75,06
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.520.000.000	1.439.936.897	94,73
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				**1.520.000.000**	**1.439.936.897**	**94,73**

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA						
9.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	DPPKUKM	1.009.241.000	985.093.000	97,61
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka		69.840.000	69.840.000	100,00
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka			1.079.081.000	1.054.933.000	97,76
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia				**1.079.081.000**	**1.054.933.000**	**97,76**
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA						
10.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri					
	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Daerah	DKPKP	268.976.000	206.377.400	76,73
	Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			268.976.000	206.377.400	76,73
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				**268.976.000**	**206.377.400**	**76,73**
TOTAL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DKI JAKARTA				**4.901.522.000**	**4.170.265.379**	**85,08**

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan and Pertanian Provinsi DKI Jakarta

   Pada awal tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 1.441.252.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; (4) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (5) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan; dan (6) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.089.591.298,- (satu miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) rupiah) atau 75,60 persen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Anggaran tugas pembantuan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 63.431.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 61.516.000,- (enam puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) atau 41,01 persen.
b. Anggaran tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 302.479.000,-(tiga ratus dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp.100.176.000 (seratus juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 194.896.145 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau 64,43 persen
c. Anggaran tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 222.751.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 60.895.000,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 161.551.970,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau 72,53 persen.

d. Anggaran tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 137.352.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 135.951.234,- (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) atau 98,98 persen.
e. Anggaran tugas pembantuan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 353.670.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 91.923.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 243.559.291,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 68,87 persen.
f. Anggaran tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 270.094.158,- (dua ratus tujuh puluh juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) atau 98,22 persen.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp.1.818.709.000,- (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 1.226.496.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat blokir anggaran sebesar

Rp.209.026.000,- (dua ratus sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah). Maka, alokasi anggaran tugas pembantuan mengalami perubahan berkurang menjadi Rp. 592.213.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Adapun, realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 379.426.784,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) atau 64,07 persen.

2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

   Pada awal tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.439.936.897,- (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 94,73 persen.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

   Pada awal tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebesar Rp. 1.079.081.000,- (satu miliar tujuh puluh sembilan juta delapa puluh satu ribu rupiah). Terdapat adanya blokir anggaran dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebesar Rp. 20.185.000,- (dua puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.054.933.000,- (satu miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 97,76 persen.

Selain itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Perdangangan yang mana sebelumnya adalah satuan kerja penerima dana dekonsentrasi dengan anggaran sebesar Rp. 268.976.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Terdapat adanya blokir anggaran dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebesar Rp. 61.334.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 206.377.400,- (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau 76,73 persen.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kabupaten/kota otonom dan desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian tugas pembantuan untuk kabupaten/kota dan desa.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarat ada beberapa kendala dan permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga dilakukan pada awal Triwulan 2 (dua) tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
2. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari Kementerian/Lembaga pemberi tugas pembantuan kepada satuan kerja penerima sehingga ada kendala-kendala teknis dari Perangkat Daerah yang tidak dapat termonitor dan tereksekusi secara langsung oleh Kementerian/Lembaga;dan

3. Adanya pergantian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran berjalan sehingga membutuhkan proses administrasi yang memperlambat realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dari permasalahan pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan satuan kerja terus berkoordinasi aktif dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
2. Biro Pemerintahan selaku sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagai unit kerja bidang pemerintahan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi. Diharapkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan kepada seluruh satuan kerja penerima tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta dapat membantu dalam mendapatkan solusi atas kendala teknis yang dihadapi oleh perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan;dan
3. Para satuan kerja untuk berkoordinasi aktif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait proses administratif pergantian pejabat agar efektif dan efisien.

3.5 Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Target Kinerja

Pada Januari 2024 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 20.619.888.000,- (dua puluh miliar enam ratus sembilas belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu terjadi adanya perubahan pada satuan kerja yang sebelumnya menerima dana dekonsentrasi beralih menjadi satuan kerja tugas pembantuan. Sehingga pada bulan Maret 2024 alokasi anggaran dana dekonsentrasi berubah menjadi sebesar Rp. 19.481.115.000,- (sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah). Kemudian, terdapat refocusing dan revisi anggaran dari Kementerian/Lembaga Teknis, maka alokasi anggaran dana dekonsentrasi pada akhir tahun 2024 berubah menjadi Rp. 18.593.238.000,- (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Berikut kami sampaikan tabel total anggaran dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 menurut Kementerian/ Lembaga pemberi Anggaran antara lain:

Tabel III-4
Total Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Kementerian/Lembaga Pemberi Anggaran
Tahun Anggaran 2024

No.	Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Kementerian Dalam Negeri	226.279.000	Revisi DIPA (Pengurangan) anggaran sebesar Rp.75.146.000
2.	Kementerian Kesehatan	6.150.107.000	Revisi DIPA (Pengurangan) anggaran sebesar Rp.221.321.000
3.	Kementerian Pertanian	826.342.000	Revisi DIPA (Pengurangan) Anggaran sebesar Rp.892.192.000 Blokir Anggaran sebesar Rp. 30.326.000
4.	Badan Pangan Nasional	2.440.325.000	Revisi DIPA (Pengurangan) Anggaran sebesar Rp.266.640.000 (Penambahan) Anggaran sebesar Rp.228.000.000

No.	Kementerian/ Lembaga	Total Anggaran (Rp.)	Ket.
5.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.670.298.000	Revisi DIPA (Pengurangan) Anggaran sebesar Rp.21.412.000 (Penambahan) Anggaran sebesar Rp.521.286.000 Blokir Anggaran sebesar Rp.526.621.000
6.	Kementerian Perdagangan	129.560.000	Revisi DIPA (Pengurangan) Anggaran sebesar Rp.268.976.000 menjadi TP dan (Pengurangan) anggaran sebesar Rp.91.740.000
7.	Kementerian Ketenagakerjaan	5.066.114.000	Revisi DIPA (Pengurangan) Anggaran sebesar Rp.240.000 Blokir Anggaran sebesar Rp.314.820.000
8.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.376.550.000	-
9.	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	449.137.000	Revisi DIPA (Penambahan) Anggaran sebesar Rp.200.504.000
10.	Perpustakaan Nasional	208.526.000	-
	TOTAL	***18.593.238.000***	

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Provinsi DKI Jakarta menerima 16 (enam belas) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dekonsentrasi dari Kementerian/Lembaga Teknis yang dikelola oleh 8 Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-5
Program dan Kegiatan Dekonsentrasi
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA			
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan SP DIPA-010.04.3.019080/2024	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA			
2.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-024.01.3.010024/2024	Program Kesehatan Masyarakat di Provinsi	Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
			Pengelolaan Krisis Kesehatan
		Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA			
3.	Direktorat Jenderal Hortikutura SP DIPA-018.04.3.019031/2024	~~Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas~~	~~Perlindungan Hortikultura~~
			~~Perbenihan Hortikultura~~
		Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan SP DIPA-018.03.3.019044/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	~~Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan~~
			Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
5.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian SP DIPA-018.10.3.019071/2024	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			
6.	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia SP DIPA 125.01.3.690699/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
6.	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia SP DIPA 125.01.3.690699/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA			
7.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia SP DIPA-044.01.3.010007/2024	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA			
8.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri SP DIPA-090.02.3.019043/2024	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
9.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri SP DIPA-090.03.3.019016/2024	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA			
10.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja SP DIPA-026.08.3.019013/2024	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3
			Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas SP DIPA-026.13.3.019015/2024	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
11.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas SP DIPA-026.13.3.019015/2024	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
12.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja SP DIPA-026.04.3.019041/2024	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
			Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
13.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja SP DIPA-026.05.3.019069/2024	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial
			Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA			
14.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia SP DIPA-092.01.3.010026/2024	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA			
15.	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia SP DIPA-065.01.3.650101/2024	Program Penanananaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			
16.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia SP DIPA-057.01.3.015112/2024	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

3.5.2 Realisasi

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2024 total anggaran dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebesar Rp. 18.593.238.000,- (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 16.937.810.557,- (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 91,10 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III-6
Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan					
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan	226.279.000	224.601.519	99,26
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan			226.279.000	224.601.519	99,26
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri				226.279.000	224.601.519	99,26
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA						
2.	Sekretariat Jenderal					
	Program Kesehatan Masyarakat di Provinsi	Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi	Dinas Kesehatan	1.900.741.000	1.821.824.952	95,85
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi		741.621.000	669.126.500	90,22
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi		436.345.000	413.661.024	94,80

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi		694.980.000	687.039.000	98,86
		Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		1.465.334.000	1.458.314.035	99,52
		Pengelolaan Krisis Kesehatan		70.993.000	0	0,00
	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Dinas Kesehatan	275.424.000	230.087.945	83,54
		Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		297.510.000	287.220.000	96,54
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		267.159.000	264.996.000	99,19
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal			6.150.107.000	5.832.269.456	94,83
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan				6.150.107.000	5.832.269.456	**94,83**
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA						
3.	Direktorat Jenderal Hortikutura					
	~~Program Ketersediaan , Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas~~	~~Perlindungan Hortikultura~~	DKPKP	0	0	0,00
		~~Perbenihan Hortikultura~~		0	0	0,00
	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		182.716.000	181.657.381	99,42
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikutura			182.716.000	181.657.381	99,42

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	~~Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan~~	DKPKP	0	0	0,00
		Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan		54.000.000	52.500.000	97,22
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		76.274.000	45.000.000	59,00
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan			130.274.000	97.500.000	74,84
5.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	DKPKP	513.352.000	504.112.968	98,20
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			513.352.000	504.112.968	98,20
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian				826.342.000	783.270.349	**94,79**
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA						
6.	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia					
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	DKPKP	775.745.000	764.368.292	98,53
		Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi		315.800.000	311.796.614	98,73
		Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		1.196.600.000	1.168.787.930	97,68

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		152.180.000	152.926.668	99,83
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional			2.440.325.000	2.396.879.504	98,22
Total Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional				2.440.325.000	2.396.879.504	98,22
KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA						
7.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia					
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	DPPKUKM	1.670.298.000	1.094.147.100	65,51
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1.670.298.000	1.094.147.100	65,51
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1.670.298.000	1.094.147.100	65,51
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA						
8.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri					
	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	DPPKUKM	54.650.000	54.045.360	98,89
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			54.650.000	54.045.360	98,89
9.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri					
	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	DPPKUKM	4.590.000	3.215.100	70,05
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		70.320.000	67.696.200	96,27
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			74.910.000	70.911.300	94,66
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan				129.560.000	124.956.660	**96,45**

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA						
10.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	Program Pembinaan Ketenaga-kerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	DISNAKER TRANSGI	673.128.000	650.443.800	96,63
		Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3		81.830.000	81.660.500	99,79
		Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		83.270.000	82.874.300	99,52
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen DitjenPembinaan Pengawasan Ketenaga-kerjaan dan Keselamatandan Kesehatan Kerja		90.120.000	57.446.000	63,74
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			928.348.000	872.424.600	93,98
11.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas					
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	DISNAKER TRANSGI	199.770.000	199.770.000	100,00
		Pengembanga n dan Peningkatan Produktivitas		367.840.000	363.819.000	98,91
		Peningkatan Penyelenggara an Pelatihan Vokasi dan Pemagangan		2.062.390.000	1.990.147.564	96,50
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			2.630.000.000	2.553.736.564	97,10

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
12.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja					
	Program Pembinaan Ketenaga-kerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	DISNAKER TRANSGI	141.455.000	137.876.200	97,47
		Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja		150.836.000	145.153.000	96,23
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		77.302.000	76.796.600	99,35
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			369.593.000	395.825.800	97,36
13.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
	Program Pembinaan Ketenaga-kerjaan	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	DISNAKER TRANSGI	61.823.000	0	0,00
		Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial		971.602.000	628.737.681	64,71
		Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan		11.650.000	11.420.000	98,03
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		93.098.000	59.342.923	63,74
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			1.138.173.000	699.500.604	61,46
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan				5.066.114.000	4.485.487.568	**88,54**

No.	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah	Anggaran hasil Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA						
14.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia					
	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi	DISPORA	1.376.550.000	1.375.642.600	99,93
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia			1.376.550.000	1.375.642.600	99,93
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.376.550.000	1.375.642.600	**99,93**
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA						
15.	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia					
	Program Penananaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	DPMPTSP	499.137.000	473.515.000	94,87
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia			499.137.000	473.515.000	94,87
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				499.137.000	473.515.000	**94,87**
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA						
16.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia					
	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus		208.526.000	147.040.801	70,51
	Jumlah Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia			208.526.000	147.040.801	70,51
Total Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				208.526.000	147.040.801	**70,51**
TOTAL ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI DKI JAKARTA				18.593.238.000	16.937.810.557	**91,10**

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

1. Biro Pemerintahan

Pada awal tahun 2024 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp. 301.425.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus dua puluh lima

ribu rupiah) pada Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp. 75.146.000.- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 226.279.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Realisasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 224.601.519,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) atau 99,26 persen

2. Dinas Kesehatan

Pada awal tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 6.371.428.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 221.321.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 6.150.107.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta seratus tujuh ribu rupiah).

Realisasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.832.269.456,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau 94,83 persen.

3. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 1.718.534.000 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan terdapat blokir sebesar Rp. 30.326.000,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari

Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 892.192.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 826.342.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Realisasi anggaran terhadap dana dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 783.270.349,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 94,79 persen, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Hortikutura Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 868.156.000 (delapan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam rupiah rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 685.440.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 182.716.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 181.657.381,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau 99,42 persen.
b. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 222.626.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan terdapat blokir sebesar Rp. 30.326.000,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 92.352.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.130.274.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 74,84 persen.

c. Anggaran dekonsentrasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 627.752.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp. 114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 513.352.000,- (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 504.112.968,- (lima ratus empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau 98,20 persen.

Kemudian, pada awal tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp. 2.478.965.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp. 266.640.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan penambahan anggaran sebesar Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 2.440.325.000,- (dua miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.396.879.504,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) atau 98,22 persen.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp. 1.170.424.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu

rupiah) dan terdapat blokir sebesar Rp. 526.621.000,- (lima ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp. 21.412.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan penambahan anggaran sebesar Rp. 521.286.000,- (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 1.670.298.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.094.147.100,- (satu miliar sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau 65,51 persen.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp. 490.276.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran dan perubahan peralihan anggaran satuan kerja dekonsentrasi menjadi tugas pembantuan sebesar Rp. 360.716.000,- (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), maka alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 129.560.000,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 124.956.660,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau 96,45 persen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Anggaran Dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp. 323.626.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa peralihan anggaran yang sebelumnya penerima dana dekonsentrasi menjadi tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp. 268.976.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), maka alokasi anggaran dekonsentrasi berubah

menjadi sebesar Rp.54.650.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 54.045.360,- (lima puluh empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau 98,89 persen.

b. Anggaran Dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp. 166.650.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp. 91.740.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), maka alokasi anggaran dekonsentrasi berubah menjadi sebesar Rp. 74.910.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 70.911.300,- (tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) atau 94,66 persen.

5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp.5.066.354.000,- (lima miliar enam puluh enam rupiah) dan terdapat blokir sebesar Rp. 314.820.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Karena adanya revisi pengurangan anggaran sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 5.066.114.000,- (lima miliar enam puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.485.487.568,- (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau 88,54 persen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp.928.348.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 872.424.600,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau 93,98 persen.

b. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp. 2.630.000.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.553.736.564,- (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau 97,10 persen.

c. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp.369.833.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka alokasi anggaran berkurang menjadi Rp. 369.593.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 395.825.800,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau 97,36 persen.

d. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp.1.138.173.000,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat blokir sebesar Rp. 314.820.000,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 699.500.604,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu enam ratus empat rupiah) atau 61,46 persen.

6. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebesar Rp. 1.376.550.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh riburupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.375.642.600,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau 99,93 persen.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebesar Rp. 298.633.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa penambahan sebesar Rp. 200.504.000,- (dua ratus juta lima ratus empat ribu rupiah) dari Kementerian Investasi / Badan Penanaman Modal Republik Indonesia, maka alokasi anggaran bertambah menjadi Rp. 499.137.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh juta rupiah. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 473.515.000.- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau 94,87 persen.

8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp. 208.526.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 147.040.801,- (seratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus satu rupiah) atau 70,51 persen.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi 2 (dua) lingkup penyelenggara baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, otonomi daerah terletak di provinsi oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan secara keseluruhan pelayanan dasar urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang terdiri atas:

1. Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Khusus;
3. Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Pendidikan Dasar;dan
5. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
3. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
4. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar;dan
5. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Lebih lanjut jenis layanan serta mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100% (seratus persen).

4.1.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah

Dalam rangka pemenuhan target SPM di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta untuk memastikan penduduk anak usia sekolah telah mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang tuntas dan berkualitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program untuk mencapai hal tersebut antara lain:

1. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
2. Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu yang tidak diterima pada satuan pendidikan negeri melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama, dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS);
3. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus;dan
4. Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Tabel IV-1
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan
Tingkat Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**100,00**
1.	**Pendidikan Menengah**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani		459.020	459.020	-	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	SMA					100,00
	1) Angka partisipasi kasar	%	100,00	101,95	-1,95	100,00
	2) Angka partisipasi sekolah	%	79,95	79,95	0	100,00
	3) Kemampuan literasi	Nilai	93,01	93,01	0	100,00
	4) Kemampuan numerasi	Nilai	88,34	88,34	0	100,00
	5) Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100,00
	6) Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100,00
	7) Indeks iklim keamanan	Nilai	75,87	75,87	0	100,00
	8) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	77,78	77,78	0	100,00
	9) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	65,20	65,20	0	100,00
	10) Kecukupan formasi guru ASN	%	6,21	6,21	0	100,00
	11) Indeks distribusi guru	%	0,43	0,43	0	100,00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	%	49,86	49,86	0	100,00
	13) Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00
	SMK					
	1) Angka partisipasi kasar	%	100,00	101,95	-1.95	100,00
	2) Angka partisipasi sekolah	%	79,95	79,95	0	100,00
	3) Kemampuan literasi	Nilai	81,34	81,34	0	100,00
	4) Kemampuan numerasi	Nilai	72,15	72,15	0	100,00
	5) Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	85,12	91,43	-6,31	100,00
	6) Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	78,00	86,22	-8,22	100,00
	7) Perbedaan skor literasi	Nilai	2,42	2,42	0	100,00
	8) Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,80	1,80	0	100,00
	9) Indeks iklim keamanan	Nilai	72,40	72,40	0	100,00
	10) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,29	73,29	0	100,00
	11) Indeks distribusi guru	%	100,00	100,00	0	100,00
	12) Indeks iklim inkusivitas	Nilai	60,78	60,78	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	13) Kecukupan formasi guru ASN	%	0,37	0,37	0	100,00
	14) Proporsi PTK bersertifikat	%	48,18	48,18	0	100,00
	15) Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00
2.	**Pendidikan Khusus**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani		20.107	20.107	0	100,00
	Persentase Mencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100,00
	2) Angka partisipasi sekolah	%	47,83	47,83	0	100,00
	3) Kemampuan literasi	Nilai	47,50	47,50	0	100,00
	4) Kemampuan numerasi	Nilai	62,50	62,50	0	100,00
	5) Perbedaan skor literasi	Nilai	4,01	4,01	0	100,00
	6) Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,89	1,89	0	100,00
	7) Indeks iklim keamanan	Nilai	70,70	70,70	0	100,00
	8) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	69,44	69,44	0	100,00
	9) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,82	65,82	0	100,00
	10) Kecukupan formasi guru ASN	%	0,72	0,72	0	100,00
	11) Indeks distribusi guru	%	0,46	0,46	0	100,00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	%	53,74	53,74	0	100,00
	13) Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mencapai target capaian SPM pendidikan menengah sebesar 100% pada tahun 2024. Sebanyak 459.020 peserta didik dari 459.020 penduduk usia 16-18 tahun yang harus dilayani telah terlayani dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam memberikan akses pendidikan menengah yang tuntas dan berkualitas.

Dalam bidang pendidikan khusus, capaian SPM juga mencapai 100% dengan seluruh 20.107 siswa yang membutuhkan layanan berhasil terlayani. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh siswa,

termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dinas Pendidikan telah memfasilitasi anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah, salah satunya pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta dengan menyediakan jalur khusus bagi anak penyandang disabilitas dengan kuota 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar di Satuan Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA, dan SMK), dengan demikian peserta didik anak disabilitas di DKI Jakarta sudah terfasilitasi bersekolah di Satuan Pendidikan Formal selain di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Program-program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama, dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) telah berperan signifikan dalam mendukung pencapaian target SPM ini. Selain itu, pendidikan inklusif dan akses bagi anak berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Dengan capaian-capaian tersebut, diharapkan masyarakat DKI Jakarta dapat terus meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan agar seluruh penduduk anak usia sekolah dapat merasakan manfaatnya secara merata.

Tabel IV-2
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan
Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**94,25**
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini**					**84,23**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**65,24**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	351.020	286.258	64.762	81,55
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**18,99**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	94,95
	1) Angka partisipasi sekolah	%	100,00	77,52	22,48	77,52
	2) Angka partisipasi murni	%	100,00	77,00	23,00	77,00
	3) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	59,04	59,04	0	100,00
	4) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S-1) / Diploma Empat (D-IV)	%	76,93	76,93	0	100,00
	5) Rasio pengawas sekolah untuk paud	%	0,56	0,56	0	100,00
	6) Kecukupan formasi guru ASN	%	4,38	4,38	0	100,00
	7) Indeks distribusi guru	%	0,35	0,35	0	100,00
	8) Proporsi PTK bersertifikat	%	38,62	38,62	0	100,00
	9) Proporsi PTK penggerak	%	0,74	0,74	0	100,00
2.	**Pendidikan Dasar**					**99,80**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,81**
A	Jumlah yang Harus Dilayani		1.672.636	1.668.762	3.874	99,77
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,98**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,91
	Sekolah Dasar					**99,94**
	1) Angka partisipasi kasar	%	100,00	101,55	-1,55	100,00
	2) Angka partisipasi sekolah	%	100,00	99,25	0,75	99,25
	3) Kemampuan literasi	Nilai	90,20	90,20	0	100,00
	4) Kemampuan numerasi	Nilai	79,79	79,79	0	100,00
	5) Perbedaan skor literasi	Nilai	2,64	2,64	0	100,00
	6) Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,84	0,84	0	100,00
	7) Indeks iklim keamanan	Nilai	75,68	75,68	0	100,00
	8) Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,01	76,01	0	100,00
	9) Indeks iklim inkusivitas	Nilai	59,11	59,11	0	100,00
	10) Kecukupan formasi guru ASN	%	4,38	4,38	0	100,00
	11) Indeks distribusi guru	%	0,40	0,40	0	100,00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	%	38,66	38,66	0	100,00
	13) Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00
	SMP					**99,87**
	1) Angka partisipasi kasar	%	100,00	105,81	-5,81	100,00
	2) Angka partisipasi sekolah	%	100,00	98,36	1,64	98,36

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	3) Kemampuan literasi	Nilai	88,76	88,76	0	100,00
	4) Kemampuan numerasi	Nilai	84,15	84,15	0	100,00
	5) Perbedaan skor literasi	Nilai	6,29	6,29	0	100,00
	6) Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,33	4,33	0	100,00
	7) Indeks iklim keamanan	Nilai	73,35	73,35	0	100,00
	8) Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,12	76,12	0	100,00
	9) Indeks iklim inkusivitas	Nilai	60,92	60,92	0	100,00
	10) Kecukupan formasi guru ASN	%	12,70	12,70	0	100,00
	11) Indeks distribusi guru	%	0,38	0,38	0	100,00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	%	45,63	45,63	0	100,00
	13) Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00
3.	**Pendidikan Kesetaraan**					**98,73**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	24.093	24.093	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**18,73**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	93,67
	1) Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100,00
	2) Angka partisipasi sekolah	%	100,00	17,74	82,26	17,74
	3) Kemampuan literasi	Nilai	58,64	58,64	0	100,00
	4) Kemampuan numerasi	Nilai	59,26	59,26	0	100,00
	5) Perbedaan skor literasi	Nilai	6,46	6,46	0	100,00
	6) Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,53	3,53	0	100,00
	7) Indeks iklim keamanan	Nilai	68,81	68,81	0	100,00
	8) Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64,47	64,47	0	100,00
	9) Indeks iklim inkusivitas	Nilai	58,01	58,01	0	100,00
	10) Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00
	11) Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100,00
	12) Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100,00
	13) Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar untuk PAUD mencapai 84,23% dari total pencapaian yang ditargetkan. Dari 351.020 anak usia 3-6 tahun yang harus dilayani, sebanyak 286.258 anak telah mendapatkan layanan. Untuk meningkatkan partisipasi anak usia dini serta menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya PAUD, Dinas Pendidikan terus melakukan kampanye pentingnya PAUD 1 tahun sebelum SD secara berjenjang yang merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan

melibatkan Kader PKK, RT, RW dan tokoh masyarakat. Orang tua memiliki peran yang besar dalam menyekolahkan anaknya ke PAUD. Latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan orang tua secara langsung berpengaruh terhadap paradigma terhadap PAUD. Kampanye pentingnya layanan PAUD 1 Tahun Sebelum SD sudah dilakukan secara masif.

Capaian layanan dasar pendidikan dasar mencapai 99,80% dari target. Dari 1.672.636 anak usia 7-15 tahun yang harus dilayani, sebanyak 1.668.762 anak telah mendapatkan layanan pendidikan dasar. Mutu layanan dasar juga tinggi, dengan indikator seperti angka partisipasi kasar, kemampuan literasi, dan kemampuan numerasi mencapai 100%. Indikator lainnya, seperti kecukupan formasi guru ASN dan distribusi guru, juga menunjukkan pencapaian yang baik.

Secara keseluruhan, Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota telah mencapai Indikator Tuntas Utama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan di semua jenjang melalui Program-program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan BPMS telah berperan signifikan dalam pencapaian ini. Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan capaian SPM di bidang pendidikan dapat terus ditingkatkan untuk mencakup seluruh anak usia sekolah di DKI Jakarta.

4.1.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Alokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar Rp. 85.202.328.591.676,- (delapan puluh lima triliun dua ratus dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dari besaran anggaran tersebut Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.014.321.719.186,- (tujuh belas triliun empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

atau sekitar 20,87 persen. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan operasional dan program peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pagu anggaran yang dialokasikan dalam rangka penerapan SPM sebesar Rp. 9.679.779.777.502,- (sembilan triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) atau sebesar 54,44 persen dari anggaran Dinas Pendidikan. Besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Anggaran ini mencakup berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai target SPM pendidikan di semua jenjang.

Adapun alokasi anggaran pemenuhan SPM pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-3
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	17.780.831.753.367
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	9.679.779.777.502
	APBD	9.679.779.777.502
	1) APBD Murni	9.679.779.777.502
	2) APBD DAU	-
	3) APBD DAK Fisik	-
	4) APBD DAK Non Fisik	-
	5) Dana Bagi Hasil	-
	6) Kerja Sama	-
	7) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	-
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	-
	APBN	-
	1) Dekonsentrasi	-
	2) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Secara keseluruhan, alokasi anggaran pemenuhan SPM Pendidikan di DKI Jakarta mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang. Dengan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai sumber, berbagai program dan inisiatif dapat berjalan dengan baik sehingga target SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta, terutama anak-anak usia sekolah.

4.1.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikan, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel demi mendukung pencapaian target layanan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel IV-4
Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas	4.327	3.278	15.024	22.629
2.	Pengelolaan pendidikan khusus	378	215	686	1.279
3.	Pendidikan dasar	14.842	12.694	27.659	55.195
4.	Pendidikan kesetaraan	14	0	1.727	1.741
5.	Pendidikan anak usia dini	55	155	12.892	13.102
	Jumlah	**19.616**	**16.342**	**57.988**	**93.946**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Jumlah dukungan personel yang terlibat dalam setiap jenis layanan pendidikan menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam mencapai target SPM. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, lingkungan belajar yang kondusif, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif bagi peserta didik mulai dari usia dini hingga lulus pada jenjang menengah termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-5
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	1)Data yang diperoleh dari Disdukcapil berupa data rekap, bukan data by name sehingga tidak bisa dipadankan dengan data Dapodik	1)Berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk padanan data Disdukcapil dengan Dapodik
		2)Data-data capaian SPM bergantung dari rilis Rapor Pendidikan Kemendikbud, sehingga ada beberapa data yang masih kosong karena tidak ada rilis angkanya	2)Data-data capaian PSM yang belum rilis di Rapor Pendidikan Kemendikbud diupayakan melakukan perhitungan mandiri terhadap capaian SPM tersebut.
3.	Penghitungan kebutuhan	-	-
4.	Perencanaan dan penganggaran	-	-
5.	Pelaksanaan	-	-
6.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta, SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
3. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
4. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
5. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
6. Pelayanan kesehatan balita;
7. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
8. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
9. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
10. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
11. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
13. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;dan
14. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun ketentuan terhadap mutu pelayanan dasar dan tata cara pemenuhannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, target capaian

pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100 persen.

4.2.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi pada Tahun 2024 terdapat 2 Indikator SPM dan mencapai target yang telah ditentukan. Indikator SPM Provinsi meliputi indikator Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Capaian dan mutu layanan dasar bidang kesehatan tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-6
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**100,00**
1.	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	14.000	14.000	-	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	14.000	14.000	0	100,00
	2) Tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan	Orang	4.576	4.576	0	100,00
	3) Sarana dan prasarana	Unit	44	44	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
2.	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	176	815	-639	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	27.887	27.887	0	100,00
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat / Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/ populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Unit	6.272	6.272	0	100,00
	3) Wadah pengiriman spesimen/specimen carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboraturium)	Unit	7.211	7.211	0	100,00
	4) Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	46.031	46.031	0	100,00
	5) Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	11.303	11.303	0	100,00
	6) Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	9.144	9.144	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	7) Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat,) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	3.712	3.712	0	100,00
	8) Tenaga medis : Dokter	Orang	6.585	6.585	0	100,00
	9) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	362	362	0	100,00
	10) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	1.474	1.474	0	100,00
	11) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	41	41	0	100,00
	12) Tenaga Laboratorium	Orang	1.799	1.799	0	100,00
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	466	466	0	100,00
	14) Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	44	44	0	100,00
	15) Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	152	152	0	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi pada Tahun 2024 terdapat. 2 Indikator SPM dan mencapai target yang telah ditentukan. Indikator SPM Provinsi meliputi indikator Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Terdapat beberapa faktor pendorong capaian, yaitu Regulasi seperti Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana UPT AGD bertransformasi menjadi UPT PK3D dan memiliki tupoksi sebagai

Pusat Penanggulangan Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 bahwa Penduduk terdampak KLB harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal serta tersedianya anggaran terkait penanganan KLB di DK Jakarta baik dari APBD maupun BLUD.

Capaian dan mutu layanan dasar bidang kesehatan tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-7
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**99,43**
1.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					**98,87**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	200.610	200.745	-135	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**18,87**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	94,35
	1) Vaksin Tetanus Difteri	Vaksin	15.412	17.149	-1.737	100,00
	2) Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	17.708.220	17.809.016	-100.796	100,00
	3) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Orang	98.379	100.957	-2.578	100,00
	4) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	98.379	102.708	-4.329	100,00
	5) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	98.379	100.833	-2.454	100,00
	6) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	98.379	161.332	-62.953	100,00
	7) Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	312.391	462.340	-149.949	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	8) Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	42.542	45.646	-3.104	100,00
	9) Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	98.379	108.546	-10.167	100,00
	10) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100,00
	11) Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	6.559	5.095	1.464	77,68
	12) Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	5.250	8.460	-.3.210	100,00
	13) Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	12.825	35.277	-22.452	100,00
	14) Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	11.350	6.771	4.579	59,66
	15) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	10.329	9.033	1.296	87,45
	16) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	1.498	1.290	208	86,11
	17) Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	200.610	186.811	13.799	93,12
2.	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**98,52**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus dilayani	Orang	191.496	195.943	-4.447	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**18,52**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	92,58
	1) Formulir partograph	Formulir	17.541	18.812	-1.271	100,00
	2) Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	42.542	47.830	-5.288	100,00
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	98.379	108.201	-9.822	100,00
	4) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100,00
	5) Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	5.250	8.460	-3.210	100,00
	6) Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	11.350	6.771	4.579	59,66
	7) Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	12.825	35.277	-22.452	100,00
	8) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	10.329	9.033	1.296	87,45
	9) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	1.498	1.290	208	86,11
3.	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**98,13**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,67**
A	Jumlah yang Harus dilayani	Orang	208.645	207.781	864	99,59
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**18,47**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	92,33
	1) Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	170.213	135.428	34.785	79,56
	2) Vitamin K1 injeksi	Ampul	208.645	194.567	14.078	93,25

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	3) Salep/tetes mata antibiotik	Orang	208.645	194.591	14.054	93,26
	4) Formulir bayi baru lahir	Formulir	28.589	43.978	-15.389	100,00
	5) Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	208.645	208.645	0	100,00
	6) Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	208.645	208.645	0	100,00
	7) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	98.379	115.903	-17.524	100,00
	8) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100,00
	9) Tenaga medis: Dokter/ Dokter Spesialis Anak	Orang	4.812	8.177	-3.365	100,00
	10) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	11.350	6.771	4.579	59,66
	11) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	12.825	35.277	-22.452	100,00
	12) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	10.329	9.033	1.296	87,45
	13) Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	75	70	5	93,33
	14) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	1.498	1.290	208	86,11
	15) Kader Kesehatan	Orang	29.422	29.422	0	100,00
4.	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**99,73**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	685.696	687.000	-1.304	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,73**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	98,66
	1) Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	157.592	163.402	-5.810	100,00
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	163.516	168.422	-.4.906	100,00
	3) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	98.379	105.990	-7.611	100,00
	4) Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	76.198	80.105	-3.907	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	5) Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	153.860	181.733	-27.873	100,00
	6) Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	56.738	73.251	-16.513	100,00
	7) Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	108.519	143.489	-34.970	100,00
	8) Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	77.320	78.065	-745	100,00
	9) Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	122.084	104.535	17.549	85,63
	10) Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	38.660	45.119	-6.459	100,00
	11) Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	Vaksin	41.397	43.477	-2.080	100,00
	12) Vaksin imunisasi lanjutan: Campak-Rubella	Vaksin	39.327	47.308	-7.981	100,00
	13) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai	Unit	225.010	883.124	-658.114	100,00
	14) Peralatan Anafilaktik	Paket	9.831	10.489	-658	100,00
	15) Formula Terapi Gizi Buru	Paket	1.514	2.417	-903	100,00
	16) Tenaga medis: Dokter	Orang	652	623	29	95,55
	17) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	774	790	-16	100,00
	18) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	591	569	22	96,28
	19) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	348	345	3	99,14
	20) Guru PAUD	Orang	16.332	15.835	497	96,96
	21) Kader Kesehatan	Orang	20.123	19.802	321	98,40
5.	**Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar**					99,66
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus dilayani	Orang	1.860.831	1.865.851	-5.020	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,66**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	98,29
	1) Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/pesantren)	Buku	1.309.247	1.536.681	-227.434	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	551.584	556.604	-5.020	100,00
	3) Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	1.860.831	1.865.851	-5.020	100,00
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/ pesantren)	Formulir	336	336	0	100,00
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	336	336	0	100,00
	6) Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	3.681.993	3.681.993	0	100,00
	7) Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	336	336	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	8) Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	66.482	66.482	0	100,00
	9) Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	336	336	0	100,00
	10) Tenaga medis: Dokter/ Dokter gigi	Orang	672	672	0	100,00
	11) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	336	336	0	100,00
	12) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	336	336	0	100,00
	13) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	336	336	0	100,00
	14) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100,00
	15) Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100,00
	16) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	4.042	5.002	-960	100,00
	17) Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehat	Orang	18.608	15.674	2.934	84,23
6.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**99,44**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	7.781.811	7.887.503	-105.692	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,44**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	97,20
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100,00
	2) Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	44	44	0	100,00
	3) Alat: Tensimeter	Unit	336	336	0	100,00
	4) Alat: Glukometer	Unit	1.344	1.344	0	100,00
	5) Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	336	336	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	6) Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	7.781.811	12.577.273	-4.795.462	100,00
	7) Alat: KIT IVA Tes	Unit	336	336	0	100,00
	8) Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	336	336	0	100,00
	9) Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	336	336	0	100,00
	10) Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Doku-men	336	336	0	100,00
	11) Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	100,00
	12) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokume n	336	336	0	100,00
	13) Vaksin Tetanus Difteri	Ampul	34.638	16.239	18.399	46,88
	14) Tenaga medis : Dokter	Orang	336	336	0	100,00
	15) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	672	672	0	100,00
	16) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	672	672	0	100,00
	17) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	336	336	0	100,00
	18) Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100,00
	19) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	8.010	8.820	-810	100,00
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.026.337	1.029.168	-2.831	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	336	336	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	336	336	0	100,00
	3) Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	336	336	0	100,00
	4) Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alcohol	Paket	1.026.337	1.029.168	-2.831	100,00
	5) Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	1.026.337	1.029.168	-2.831	100,00
	6) Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	463.170	463.170	0	100,00
	7) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100,00
	8) Tenaga medis: Dokter	Orang	336	336	0	100,00
	9) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	336	336	0	100,00
	10) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	336	336	0	100,00
	11) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	336	336	0	100,00
	12) Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	336	336	0	100,00
	13) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	9.158	11.566	-2.408	100,00
8.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	896.626	910.988	-14.362	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	1) Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	672	672	0	100,00
	2) Obat Hipertensi	Paket	896.626	912.094	-15.468	100,00
	3) Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	336	336	0	100,00
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	336	336	0	100,00
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	336	336	0	100,00
	6) Tenaga medis: Dokter	Orang	672	760	-88	100,00
	7) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	760	760	0	100,00
	8) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	760	760	0	100,00
	9) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	336	336	0	100,00
	10) Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	44	44	0	100,00
	11) Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang	336	336	0	100,00
	12) Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100,00
9.	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	301.202	307.521	-6.319	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	1) Obat Diabetes Melitus	Paket	301.202	307.431	-6.229	100,00
	2) Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	760	760	0	100,00
	3) BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	301.202	315.505	-14.303	100,00
	4) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	336	336	0	100,00
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	336	336	0	100,00
	6) Tenaga medis: Dokter	Orang	672	672	0	100,00
	7) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	760	760	0	100,00
	8) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	760	760	0	100,00
	9) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	336	336	0	100,00
	10) Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	88	88	0	100,00
	11) Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	336	336	0	100,00
	12) Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Orang	44	44	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
10.	**Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					**99,89**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus dilayani	Orang	18.615	19.070	-455	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,89**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,47
	1) Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	336	336	0	100,00
	2) Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	5	5	0	100,00
	3) Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	409.491	440.501	-31.010	100,00
	4) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	336	336	0	100,00
	5) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	336	336	0	100,00
	6) Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	336	336	0	100,00
	7) Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	380	362	18	95,26
	8) Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	44	44	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	9) Tenaga profesional lainnya	Orang	44	44	0	100,00
11.	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	107.974	351.038	-243.064	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45.623	46.142	-519	100,00
	2) Reagen Zn TB	Kit	107.974	108.334	-360	100,00
	3) Masker bedah dan Masker N95	Paket	107.974	108.887	-913	100,00
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	107.974	110.806	-2.832	100,00
	5) Katrid tes cepat molekuler	Test	90.850	164.446	-73.596	100,00
	6) Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	44	44	0	100,00
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	44	44	0	100,00
	8) Tuberkulin	Vial	1.690	6.367	-4.677	100,00
	9) Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	1.597	1.697	-100	100,00
	10) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.383	1.383	0	100,00
	11) Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	402	431	-29	100,00
	12) Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	72	-9	100,00
	13) Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik	Orang	620	644	-24	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	14) Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	250	251	-1	100,00
	15) Kader Kesehatan	Orang	1.100	1.146	-46	100,00
12.	**Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	447.842	447.842	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100,00
	2) Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	447.842	447.842	0	100,00
	3) Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	447.842	447.842	0	100,00
	4) Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	447.842	447.842	0	100,00
	5) Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	202	205	-3	100,00
	6) Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	202	202	0	100,00
	7) Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	142	199	-57	100,00
	8) Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	202	202	0	100,00
	9) Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23	111	-88	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	10) Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	213	213	0	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 terdapat 5 indikator yang mencapai IP SPM 100% meliputi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Terdapat 7 indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang capaian IP SPM di bawah 100% meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. Namun demikian pada capaian IP SPM Bidang kesehatan Kabupaten/Kota mencapai kriteria kategori tuntas utama dengan capaian IP SPM 99,43%.

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang tidak mencapai target disebabkan karena kurangnya kepatuhan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di Trimester awal sehingga terhitung sebagai K1 akses (bukan K1 murni) sehingga Ibu hamil K1 akses tidak dapat terhitung mencapai capaian K4 dan K6. Pada Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu hamil dan ibu bersalin, terdapat perhitungan rasio SDM berbanding jumlah penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024, dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta yang tinggi menyebabkan angka ideal pemenuhan SDM terlalu tinggi sehingga tenaga bidan, gizi dan farmasi tidak mencukupi. Hal ini dapat dihindari bila

perhitungan rasio SDM tidak berbasis jumlah penduduk melainkan disesuaikan dengan jumlah sasaran penduduk (Jumlah Ibu Hamil pada tahun berkenaan) yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu juga disebabkan belum optimalnya pendataan tenaga kesehatan, yang disebabkan kurang patuhnya tenaga kesehatan melakukan update data di sistem satu sehat SDMK.

Pada Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir disebabkan karena Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) salah satunya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Adanya penyulit persalinan/kondisi medis Ibu bersalin menyebabkan kondisi ibu yang tidak stabil sehingga bayi tidak mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini. Tidak dilakukannya IMD membuat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar tidak terpenuhi dan adanya kematian neonatal, bayi lahir mati, abortus, dan IUFD yang mempengaruhi jumlah bayi baru lahir.

Pada Pelayanan Kesehatan Balita disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya SDM seperti tenaga gizi yang diterima PNS atau P3K ditempat lain dan belum mengusulkan untuk tenaga pengganti, dan adanya guru PAUD yang mengundurkan diri, serta Jumlah kader yang terorientasi SDIDTK di tahun 2024 belum optimal karena di tahun 2024 peningkatan kompetensi kader difokuskan di peningkatan 25 kompetensi kader yang dipersiapkan untuk pelaksanaan posyandu terintegrasi.

Pada Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar disebabkan karena masih adanya perbedaan persepsi definisi operasional Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor pada petugas Puskesmas. Jumlah tenaga yang dihitung masih terbatas pada konselor sebaya dan dokter kecil. Seharusnya, Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor selain konselor sebaya dan dokter kecil, termasuk juga anggota PMR, Kader Pokja Gizi, Kader Pokja PHBS, Pramuka Saka Bakti Husada, Kader Pokja Tanaman, Kader Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa

NAPZA (KTN), Kawasan Tanpa Pornografi (KTP), Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK), Detektif Kantin, Duta Pencegahan Napza, Duta Lingkungan, Kader Pokja 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Juru Pemantau Jentik, dan lain-lain.

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif disebabkan karena Wanita usia produktif telah lengkap status imunisasi TD nya sehingga tidak mendapat vaksin TD pada tahun ini, sehingga jumlah vaksin program yang beredar untuk usia produktif berbeda dengan jumlah usia produktif. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat disebabkan karena keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa yaitu formasi tenaga kesehatan (psikologi klinis) untuk pelayanan kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama.

4.2.1 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adapun alokasi anggaran pemenuhan SPM kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-8
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	10.845.875.887.486
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	170.005.780.174
	APBD	170.005.780.174
	8) APBD Murni	170.005.780.174
	9) APBD DAU	-
	10) APBD DAK Fisik	-
	11) APBD DAK Non Fisik	-
	12) Dana Bagi Hasil	-
	13) Kerja Sama	-
	14) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	-
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	-
	APBN	-
	3) Dekonsentrasi	-
	4) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.2.4 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Kesehatan, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel demi mendukung pencapaian target layanan kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel IV-9
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1.144	-	3.432	4.576
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa	2.186	-	8.585	10.771
3.	Pelayanan ibu hamil	3.821	-	57.010	60.831
4.	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	3.821	-	57.010	60.831
5.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	3.821		86.219	90.040
6.	Pelayanan kesehatan Balita	237	68	37.659	37.964
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	610	113	21.721	22.444
8.	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif	552	59	10.269	10.880
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	324	83	12.839	14.046
10.	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	849	141	2.057	3.047
11.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	815	134	2.047	2.996
12.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	185	-	601	786
13.	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.222	-	4.402	5.624
14.	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	198	44	890	1.132
	Jumlah	**19.785**	**1.442**	**304.741**	**325.968**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.2.5 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-10
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	1) SPM krisis : Tidak terdapat penetapan bencana di level Provinsi 2) SPM ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir: a) Belum semua data pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (ANC) yang dilakukan di luar Puskesmas (rumah sakit, Praktik Mandiri Bidan, dan klinik) terlaporkan ke Puskesmas, jikapun sudah dilaporkan maka data terlaporkan dalam bentuk agregat, bukan data kohort sehingga kurang dapat memantau secara by name kunjungan ANC ibu hamil b) Adanya perbedaan pemahaman definisi operasional dari masing-masing indikator mutu	1) SPM krisis : Fokus terhadap kegiatan pra bencana 2) SPM ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir : a) Koordinasi dengan Kemenkes untuk pencatatan pelaporan ibu hamil menggunakan Satu Sehat integrasi dari Simpus b) Monitoring pencatatan pelaporan eKohort ibu hamil dengan kab kota di DKI Jakarta c) Sosialisasi terkait definisi operasional indikator mutu SPM ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		3) SPM Balita : Belum semua data pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang dilakukan di luar Puskesmas (Posyandu, PAUD dan fasilitas kesehatan kesehatan lain) terlaporkan ke Puskesmas	3) SPM Balita : a) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah di PAUD b) Mengoptimalkan koordinasi antar program, sudin dan Puskesmas sebagai pelaksana
		4) SPM Usia Pendidikan dasar : Data yang dilaporkan ke tingkat Dinas Kesehatan masih dalam bentuk agregat	4) SPM Usia Pendidikan dasar : Mengoptimalisasi integrasi sistem informasi dan mendorong penggunaan sistem rekam medis elektronik di setiap fasilitas kesehatan
		5) Indikator Kesehatan Usia Produktif: Aplikasi ASIK Kemenkes belum dapat memenuhi kebutuhan program untuk pencatatan dan pelaopran SIPTM.	5) Indikator Kesehatan Usia Produktif: Melakukan koordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk pengembangan aplikasi ASIK
		6) Indikator Usia Lanjut: a) Sistem pelaporan masih belum terintegrasi b) Data yang dilaporkan ke Dinkes masih agregat, belum BNBA	6) Indikator Usia Lanjut: Optimalisasi penginputan dan validasi data sesuai jadwal yang ditentukan pada Puskesmas dan Sudinkes serta optimalisasi sistem pelaporan yang terintegrasi dan tidak duplikasi penginputan.
		7) Indikator Hipertensi dan DM: a) 1.sistem pelaporan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan DM belum terintegrasi antar fasilitas kesehatan b) 2. Belum semua Fasyankes menggunakan obat sesuai dengan pedoman hipertensi dan DM	7) Indikator Hipertensi dan DM: a) Berkoordinasi dengan kementrian Kesehatan terkait integrasi system informasi pelaporan hipertensi dan DM b) Pemantauan secara berkala update data hipertensi dan hipertensi terkendali c) Koordinasi dengan Bidang Yankes dan Bidang SDK terkait kerjasama jejaring dan perhitungan kebutuhan obat
		8) Indikator ODGJ: Pencatatan data pada rekam medis elektronik tidak terintegrasi dengan SIMKESWA, sehingga banyak kasus tidak tercatat dengan baik dan Data ODGJ berat pada tingkat layanan primer, sekunder, dan tersier belum terintegrasi.	8) Indikator ODGJ: Melakukan sosialisasi berkala untuk petugas pencatatan pada layanan terkait pencatatan ODGJ berat serta menyamakan pemahaman mengenai definisi operasional sasaran dan capaian indikator ODGJ Berat.dan Mengupayakan integrasi sistem pencatatan dan pelaporan data ODGJ Berat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		9) Indikator TB: a) Masih ada permasalahan pengumpulan data dari Poli lain (selain dari Poli TB/DOTS/Paru) akibatnya terjadi potensi Under Reporting kasus terduga TBC pada faskes yang sistem jejaring internalnya belum berjalan maksimal, khususnya RS b) Pada penginputan masih adanya faskes yang belum *Realtime*, sehingga terjadi *Delay* Reporting pada pelaporan kasus terduga TB	9) Indikator TB: Melakukan Monev dan memberikan feedback (umpan balik) secara berkala
		10) SPM krisis : Tidak terdapat penetapan bencana di level Provinsi	10) SPM krisis : Fokus terhadap kegiatan pra bencana
		11) SPM ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir: a) Belum semua data pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (ANC) yang dilakukan di luar Puskesmas (rumah sakit, Praktik Mandiri Bidan, dan klinik) terlaporkan ke Puskesmas, jikapun sudah dilaporkan maka data terlaporkan dalam bentuk agregat, bukan data kohort sehingga kurang dapat memantau secara by name kunjungan ANC ibu hamil b) Adanya perbedaan pemahaman definisi operasional dari masing-masing indikator mutu	11) SPM ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir : a) Koordinasi dengan Kemenkes untuk pencatatan pelaporan ibu hamil menggunakan Satu Sehat integrasi dari Simpus b) Monitoring pencatatan pelaporan eKohort ibu hamil dengan kab kota di DKI Jakarta c) Sosialisasi terkait definisi operasional indikator mutu SPM ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir.
		12) SPM Balita : Belum semua data pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang dilakukan di luar Puskesmas (Posyandu, PAUD dan fasilitas kesehatan kesehatan lain) terlaporkan ke Puskesmas	12) SPM Balita : a) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah di PAUD b) Mengoptimalkan koordinasi antar program, sudin dan Puskesmas sebagai pelaksana

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		13) SPM Usia Pendidikan dasar : Data yang dilaporkan ke tingkat Dinas Kesehatan masih dalam bentuk agregat	13) SPM Usia Pendidikan dasar : Mengoptimalisasi integrasi sistem informasi dan mendorong penggunaan sistem rekam medis elektronik di setiap fasilitas kesehatan
		14) Indikator Kesehatan Usia Produktif: Aplikasi ASIK Kemenkes belum dapat memenuhi kebutuhan program untuk pencatatan dan pelaopran SIPTM.	14) Indikator Kesehatan Usia Produktif: Melakukan koordinasi dengan Kementrian Kesehatan untuk pengembangan aplikasi ASIK
		15) Indikator Usia Lanjut: a) Sistem pelaporan masih belum terintegrasi b) Data yang dilaporkan ke Dinkes masih agregat, belum BNBA	15) Indikator Usia Lanjut: Optimalisasi penginputan dan validasi data sesuai jadwal yang ditentukan pada Puskesmas dan Sudinkes serta optimalisasi sistem pelaporan yang terintegrasi dan tidak duplikasi penginputan.
		16) Indikator Hipertensi dan DM: a) sistem pelaporan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan DM belum terintegrasi antar fasilitas kesehatan b) Belum semua Fasyankes menggunakan obat sesuai dengan pedoman hipertensi	16) Indikator Hipertensi dan DM: 1) Berkoordinasi dengan kementrian Kesehatan terkait integrasi system informasi pelaporan hipertensi dan DM 2) Pemantauan secara berkala update data hipertensi dan hipertensi terkendali 3) Koordinasi dengan Bidang Yankes dan Bidang SDK terkait kerjasama jejaring dan perhitungan kebutuhan obat
		17) Indikator ODGJ: Pencatatan data pada rekam medis elektronik tidak terintegrasi dengan SIMKESWA, sehingga banyak kasus tidak tercatat dengan baik dan Data ODGJ berat pada tingkat layanan primer, sekunder, dan tersier belum terintegrasi.	17) Indikator ODGJ: Melakukan sosialisasi berkala untuk petugas pencatatan pada layanan terkait pencatatan ODGJ berat serta menyamakan pemahaman mengenai definisi operasional sasaran dan capaian indikator ODGJ Berat.dan Mengupayakan integrasi sistem pencatatan dan pelaporan data ODGJ Berat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		18) Indikator TB: a) Masih ada permasalahan pengumpulan data dari Poli lain (selain dari Poli TB/DOTS/Paru) akibatnya terjadi potensi Under Reporting kasus terduga TBC pada faskes yang sistem jejaring internalnya belum berjalan maksimal, khususnya RS b) Pada penginputan masih adanya faskes yang belum *Realtime*, sehingga terjadi *Delay* Reporting pada pelaporan kasus terduga TB	18) Indikator TB: Melakukan Monev dan memberikan feedback (umpan balik) secara berkala
2.	Penghitungan kebutuhan	1) SPM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita: Cara perhitungan kebutuhan rasio SDM berdasarkan Permenkes 6 tahun 2024 masih menggunakan jumlah penduduk, bukan jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Daerah, sehingga jumlah kebutuhan SDM meningkat drastis 2) SPM Usia Pendidikan dasar : Perhitungan kebutuhan dan capaian Tablet Tambah Darah belum dikhususkan untuk kelas 7-9 dan usia 9-12 tahun sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang untuk usia tersebut. 3) Indikator Kesehatan Usia Produktif: Seiring dengan perluasan skrining dibutuhkan peningkatan jumlah posbindu Kit. Posbindu Kit yang ada sebagian telah rusak dan membutuhkan pembaharuan. Dibutuhkan koordinasi dengan lintas sektor lainnya mengingat posbindu (Pos pembinaan terpadu) merupakan tanggung jawab Bersama antar lintas sektor.	1) SPM ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita: Berkoordinasi dengan kementrian Kesehatan terkait regulasi penerapan SPM 2) SPM Usia Pendidikan dasar : Melakukan perhitungan ulang terkait kebutuhan tablet tambah darah yang menginklusikan perhitungan untuk kelas 7-9 dan usia 9-12 tahun. 3) Indikator Kesehatan Usia Produktif: Melakukan pencatatan hasil monitoring terkait kebutuhan baik karena tidak tersedianya alat ataupun karena rusak. Data yang sudah di catat dan didata segera dilapokan sampai dengan tingkat puskemas dan dibuatkan akumulasi kebutuhan untuk pengajuan kebutuhan di tahun berikutnya.
3.	Perencanaan dan penganggaran	1) SPM krisis: Higiene kit dan family kit belum masuk ke perencanaan dan penganggaran tahun 2024, masih mengandalkan stok dari Kemenkes RI	1) SPM krisis: Melakukan perencanaan alokasi anggaran hygiene Kit dan family kit.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		2) Indikator ODGJ: Terdapat Puskesmas yang belum mengalokasikan anggaran atau memenuhi kebutuhan tenaga psikolog klinis (Permenkes 19 tahun 2024 yang mewajibkan tenaga Psikolog di Puskesmas baru di sahkan), dan tidak semua RSUD menyediakan layanan spesialis kedokteran jiwa (Sp.KJ). 3) Indikator HIV: Belum semua fasilitas kesehatan menganggarkan kebutuhan program	2) Indikator ODGJ: Mengadvokasi terkait alokasi anggaran untuk SDM dan layanan kesehatan jiwa kepada pemangku kebijakan. 3) Indikator HIV: Butuh penguatan kebijakan dari Kementerian Kesehatan terutama untuk pengadaan logistik skrining HIV
4.	Pelaksanaan	1) SPM krisis : Peran masing-masing subklaster pada penanggulangan krisis kesehatan belum optimal 2) SPM ibu hamil: Persentase ibu hamil melaksanakan ANC sebanyak 6 kali sesuai standar telah tercapai sesuai target namun masih banyaknya capaian K1 akses dikarenakan ibu hamil datang pemeriksaan ANC pertama kali tidak pada TM 1 3) SPM ibu bersalin: Tingginya mobilisasi penduduk DKI sehingga banyak ibu bersalin yang bersalin kembali ke kampungnya	1) SPM krisis : Penguatan peran masing-masing subklaster penanggulangan krisis kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pencatatan dan pelaporan 2) SPM ibu hamil: a) Meningkatkan capaian K1 murni (datang pemeriksaan ANC pertama kali pada TM 1) dengan mengoptimalkan peran kader untuk tracing Pasangan Usia Subur (PUS) yang dropout menggunakan KB. b) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Pencatatan Pelaporan KIA pada TW 1 Tahun 2025 c) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kelas Ibu Hamil pada TW 1 Tahun 2025 3) SPM ibu bersalin: a) Mengoptimalkan peran kader untuk mendata ibu bersalin di wilayah agar melaporkan ke Puskesmas sehingga Puskesmas dapat melakukan pemantauan ibu bersalin b) Memastikan ibu mengikuti kelas ibu hamil agar meningkatkan kesadaran ibu untuk melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
			c) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kelas Ibu Hamil pada TW 1 Tahun 2025
		4) SPM bayi baru lahir: a) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) salah satunya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Adanya penyulit persalinan/kondisi medis Ibu bersalin menyebabkan kondisi ibu yang tidak stabil sehingga bayi tidak mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini. Tidak dilakukannya IMD membuat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar tidak terpenuhi b) Adanya kematian neonatal, bayi lahir mati, abortus, dan IUFD yang mempengaruhi jumlah bayi baru lahir.	4) SPM bayi baru lahir: a) Melakukan upaya pencegahan bayi lahir dengan BBLR, prematur dan asfiksia dengan meningkatkan kualitas ANC dan pemantauan pada Ibu hamil risiko tinggi melalui pelibatan kader dalam pemantauan b) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar pada TW 1 Tahun 2025
		5) SPM balita: Sistem pencatatan pelayanan kesehatan balita belum terintegrasi dari faskes maupun non faskes	5) SPM balita: Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan balita
		6) SPM Usia Pendidikan dasar : Masih adanya sekolah maupun orang tua yang menolak dilaksanakan skrining kesehatan serta tindaklanjutnya	6) SPM Usia Pendidikan dasar : Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait sekolah yang menolak skrining kesehatan. Melakukan sosialisasi terkait skrining Kesehatan pada usia sekolah dasar.
		7) Indikator Kesehatan Usia lanjut: Kondisi Lansia yang keterbatasan mengakses Layanan Puskesmas dan Posyandu, memerlukan kunjungan Rumah	7) Indikator Kesehatan Usia lanjut: Mengaktifkan Darbin dan program Perkesmas melalui KPLDH ataupun PISPK

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		8) Indikator ODGJ: a) Keterbatasan petugas kesehatan yang mampu menangani ODGJ berat sesuai standar, terutama psikolog dan perawat jiwa di tingkat layanan primer. b) Petugas kesehatan mencatat dan melaporkan kasus ODGJ berat secara berulang melalui rekam medis elektronik, SIMKESWA, dan format pelaporan manual, yang mengakibatkan proses menjadi kurang efisien. c) Pelayanan rujukan pada kasus kegawatdaruratan psikiatri belum memadai 9) Indikator TB: masih sering terjadi gangguan sistem SITB yang bermasalah (Under Maintenance) disaat jam pelayanan, sehingga mengganggu penginputan secara real time	8) Indikator ODGJ: a) Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di layanan primer. b) Melakukan koordinasi dengan bidang pelayanan kesehatan terkait layanan rujukan darurat psikiatri di RSUD. 9) Indikator TB: a) kolaborasi dengan kementrian Kesehatan terkait aplikasi SITB b) Sudinkes melakukan Bimtek dan Supervis ke fasyankes secara rutin
6.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 4 ayat (3), terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. Setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM; dan

Mutu pelayanan dasar:

1. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
2. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan
3. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana Sub Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

SPM yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari SPM Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah. Target pemenuhan SPM kedua urusan tersebut tercantum sebagai target pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air 2023-2026 yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel IV-11
Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2023-2026
Peningkatan terhadap akses layanan dasar	Persentase akses layanan air minum dan sanitasi layak	2023 : 97,74% 1) Air minum : 99,86% 2) Sanitasi : 95,62% 2024 : 98,51% 1) Air minum : 99,86% 2) Sanitasi : 97,16% 2025 : 98,84% 1) Air minum : 99,89% 2) Sanitasi : 97,82% 2026 : 99,19% 1) Air minum : 99,86% 2) Sanitasi : 98,53%
Peningkatan akses air minum yang layak, aman dan berkelanjutan	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	1. 2023 : 64.24 % 2. 2024 : 70.03 % 3. 2025 : 81.95 % 4. 2026 : 89.02 %
Peningkatan akses pengolahan air limbah yang layak, aman dan berkelanjutan	Persentase akses layanan air limbah aman	1. 2023 : 18.636 % 2. 2024 : 20.182 % 3. 2025 : 20,839 % 4. 2026 : 21,546 %

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.3.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Capaian dan mutu layanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-12
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		**TUNTAS UTAMA**			**97.05%**
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota					98.82%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.09%
A	Jumlah Yang Harus dilayani	Orang	7.568.150	7.482.670	85.480	98.87%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.73%
B	Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	1) SPAM Lintas Regional		44.408	43.192	1.216	97.26%
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	liter/ detik	22.204	21.596	608	97.26%
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmenyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	liter/ detik	22.204	21.596	608	97.26%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					95.59%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.90%
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota						
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	10.684.950	10.137.881	547.069	94.86%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					19.69%
	B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	98.43%
	1) SPALD Lintas Regional	-				96.86%
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	2.671.238	2.534.470	136.767	94.88%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	Rumah Tangga	539.109	551.906	-12.798	100
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.986.012	1.982.564	3.448	98.83%
	2) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah tahun 2024 sebesar 97.05% dengan rincian capaian SPM Urusan Air Minum sebesar 98.82% dan capaian SPM Urusan Air limbah sebesar 95.59%.

Capaian dan mutu layanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-13
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**97,70**
1.	**Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**					**99,84**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79,97**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.684.950	10.680.676	4.274	99,96
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,87**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,37
	Jaringan Perpipaan					
	1) Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat-kan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan ter-lindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1.892.038	1.870.668	21.370	98,87

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapat-kan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan ter-lindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1.892.038	1.870.668	21.370	98,87
	Bukan Jaringan Perpipaan					
	3) Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	800.570	799.502	1.068	99,87
	4) Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak	Rumah Tangga	800.570	799.502	1.068	99,87
2.	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**					**95,55**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75,90**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.684.950	10.137.881	547.069	94,88
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,65**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	98,24
	1) Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	2.671.238	2.534.470	136.768	94,88
	2) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	539.109	551.906	-12.797	100,00
	3) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.986.012	1.982.564	3.448	99,83

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

Tabel di atas menjelaskan Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan capaian 97.70% dengan rincian capaian SPM Air Minum sebesar 99.84% dan SPM Air Limbah sebesar 95.55%.

4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adapun alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-14
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	4.364.691.520.135
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	1.071.657.948.256
	APBD	681.600.089.352
	1) APBD Murni	681.600.089.352
	2) APBD DAU	-
	3) APBD DAK Fisik	-
	4) APBD DAK Non Fisik	-
	5) Dana Bagi Hasil	-
	6) Kerja Sama	-
	7) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	-
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	-
	APBN	-
	1) Dekonsentrasi	-
	2) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	390.057.858.904

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.3.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sumber Daya Air, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel demi mendukung pencapaian target layanan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel IV-15
Dukungan Personil SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	18	0	50	68
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	19	0	263	282
	Jumlah	**37**	**0**	**313**	350

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, terkait dengan pemenuhan SPM Pekerjaan Umum sub urusan Air minum dan Air Limbah, Dinas Sumber Daya Air didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 350 orang dengan rincian 37 orang PNS yang bertugas dan 313 orang pegawai Non PNS yang bertugas sebagai Petugas sumber daya air di instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan petugas sumber daya air *Reverse Osmosis (RO).*

4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-16
Permasalahan dan Solusi SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Masih sulitnya mengumpulkan data terhadap jumlah warga negara by name by address	Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait lain
2.	Perhitungan Kebutuhan	Sulitnya menghitung kebutuhan terhadap warga negara yang akan dilayani, karena data yang lengkap belum dimiliki	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan terhadap SPAM lintas regional tidak bisa dihitung dengan baik, karena jumlah warga negara yang terus bertambah	

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
4.	Pelaksanaan	Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunaan SPALD Terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal	
		Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun	
		Pengelolaan setempat/tangki septik yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI	
		Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman	
		Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	
		Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumber air minum sehingga bergantung/membutuhkan pasokan air dari daerah lain	
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

Pada laporan SPM ini juga dilaporkan capaian air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV-17
Rekapitulasi Capaian Akses Air Limbah Domestik
Tingkat Provinsi

Provinsi	Air Limbah Domestik							
	Akses Layak (%)				Akses Aman (%)			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Provinsi DKI Jakarta	93,22	95,55	98,53	-2,98	21,188	21,776	23,690	-1,914

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

Catatan :
Kolom 1: diisi dengan capaian tahun sebelumnya (N-1)
Kolom 2: diisi dengan capaian tahun berjalan (N)
Kolom 3: diisi dengan target pada akhir tahun periode Dokumen RSP
Kolom 4: diisi dengan gap/selisih kolom 2 dan kolom 3

Tabel IV-18
Anggaran Bidang Sanitasi

Provinsi	Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun (N-1) (Rp.)			Anggaran Tahun ini Tahun (N) (Rp.)			Realisasi Penyerapan (Rp.)			Rencana Anggaran Tahun Selanjutnya Tahun (N+1) (Rp.)			Perangkat Daerah Pelaksana
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Provinsi DKI Jakarta		482.749.732.073			659.333.715.040			483.737.685.134			897.518.258.743		Dinas Sumber Daya Air

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

Catatan :
Kolom 1: diisi dengan anggaran yang bersumber dari APBN
Kolom 2: diisi dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi
Kolom 3: diisi dengan anggaran yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya

Target sanitasi nasional dalam sesuai RPJMN 2020-2024 dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 adalah terpenuhinya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi untuk Air Limbah Domestik 90% layak dan termasuk 15% aman. Berdasarkan Tabel IV-16 diatas, capaian air limbah layak dan aman di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 berturut-turut terhitung sebesar 95,55% dan 21,776%, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target sanitasi nasional sesuai RPJMN 2020-2024 telah dapat dipenuhi dan dilampaui.

Namun demikian terkait peningkatan akses sanitasi layak dan aman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan air limbah di Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan SPALD-T Skala Perkotaan *Jakarta Sewerage Development Project* (JSDP), Pembangunan SPALD-T Skala Komunal/Permukiman, Pembangunan dan revitalisasi MCK Komunal, dan Revitalisasi/rehabilitasi tangki septik.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 8 ayat (2) terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;dan
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas mutu barang dan jasa.

1. Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:
   a. rehabilitasi rumah;
   b. pembangunan kembali rumah; dan
   c. pemukiman kembali.
2. Mutu jasa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni dengan kriteria pemenuhan meliputi:
   a. besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
   b. jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah.

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100 persen.

4.4.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Capaian dan mutu layanan dasar bidang perumahan rakyat tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-19
Capaian dan Mutu Layanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100%**
1	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**		**Tidak Terjadi Bencana**			**100%**
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1. 4B6. 4B7. 4C3)					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	0	0	0	80.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	20.00 %
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**					**100%**
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	C. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	1.365	1.365	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20%
	D. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	51	51	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	17	17	0	100%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	17	17	0	100%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	17	17	0	100%
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	473	473	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

Pada Tahun 2024, tidak terdapat Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan bencana daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana Bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda yang di yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, serta tanah longsor, dan non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Namun, sepanjang Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta hanya terjadi genangan dan kebakaran (Faktor Manusia). Sehingga, dalam hal pencapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat dengan Jenis Layanan “Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi” diisi dengan tagging “Tidak Terjadi Bencana” dengan total capaian 100%. Namun, bukan berarti Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan fungsi SPM urusan Perumahan Rakyat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dilampirkan Form 4A, 4B, 4C, dan 4D sebagai bentuk pendataan dalam rangka antisipasi dan pencegahan apabila terjadi bencana di kemudian hari.

Pada Tahun 2024, terdapat beberapa Program Relokasi Program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Program Relokasi Program Pemerintah Pusat. Sesuai dengan amanat SPM urusan Perumahan Rakyat ini Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk menyediakan Rumah Layak Huni untuk warga-warga yang terdampak relokasi tersebut. Capaian jenis layanan “Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi” ini mencapai 100% dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil melayani sebanyak 1.365 Warga dari Target 1.365 Warga yang harus dilayani. adapun rincian dari realisasi ini dapat dijabarkan pada setiap Triwulan pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Pada Triwulan I (TW 1) Tahun 2024, tidak terdapat warga yang harus dilayani untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya Surat dari Walikota/Bupati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menyediakan Unit pada Rumah Susun untuk keperluan warga Relokasi.

Pada Triwulan II (TW 2) Tahun 2024, Terdapat Relokasi warga yang dihunikan ke Rumah Susun pada Unit Pengelola Rumah Susun V sebanyak 16 Unit (Rumah) atau sebanyak 59 Jiwa.

Pada Triwulan III (TW 3) Tahun 2024, Terdapat Relokasi warga yang dihunikan ke Rumah Susun pada Unit Pengelola Rumah Susun III sebanyak 14 Unit (Rumah) atau sebanyak 46 Jiwa.

Pada Triwulan IV (TW 4) Tahun 2024, Terdapat beberapa kegiatan Relokasi Program Pemerintah Pusat dimana warga yang terdampak dihunikan ke Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1) Relokasi warga kolong tol/jembatan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 1 Unit (Rumah) atau sebanyak 3 Jiwa;
2) Relokasi warga kolong tol/jembatan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 277 Unit (Rumah) atau sebanyak 831 Jiwa;dan
3) Relokasi warga kolong tol/jembatan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 144 Unit (Rumah) atau sebanyak 342 Jiwa.

Pada Triwulan IV juga terdapat Kegiatan Relokasi Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan program Konsolidasi Tanah Vertikal

(KTV) dan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1) Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di Palmerah sebanyak 9 Unit (Rumah) atau sebanyak 29 Jiwa;
2) Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di Tanah Tinggi sebanyak 12 Unit (Rumah) atau sebanyak 40 Jiwa;
3) Pembebasan Lahan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 Unit (Rumah) dengan perkiraan 8 Jiwa;dan
4) Pembebasan Lahan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9 Unit (Rumah) dengan perkiraan 15 Jiwa.

Sehingga secara total dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Rumah Layak Huni sebanyak 473 Unit Rumah Susun dan Ganti Rugi Lahan sebanyak 17 Unit (Rumah)

Tabel IV-20
Capaian dan Mutu Layanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100%**
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		**Tidak Terjadi Bencana**			**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	0	0	0	
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100%**
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlaya-ni/ Terpenuhi	80%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	1.365	1.365	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	51	51	0	100%
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	17	17	0	100%
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	17	17	0	100%
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	17	17	0	100%
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	473	473	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pelaksanaan SPM di tingkat Kabupaten/Kota untuk urusan Perumahan Rakyat sejalan dengan Pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi. Pada Tahun 2024, tidak terdapat Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan bencana daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana Bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda yang di yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, serta tanah longsor, dan non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Namun, sepanjang Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta hanya terjadi genangan dan kebakaran (Faktor Manusia). Sehingga, dalam hal pencapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat dengan Jenis Layanan “Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi” diisi dengan tagging “Tidak Terjadi Bencana” dengan total capaian 100%. Namun, bukan berarti Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan fungsi SPM urusan Perumahan Rakyat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dilampirkan Form 4A, 4B, 4C, dan 4D sebagai bentuk pendataan dalam rangka antisipasi dan pencegahan apabila terjadi bencana di kemudian hari.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan SPM ditingkat Kabupaten/Kota untuk urusan Perumahan Rakyat sejalan dengan Pelaksanaan SPM ditingkat Provinsi. Pada Tahun 2024, terdapat beberapa Program Relokasi Program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Program Relokasi Program Pemerintah Pusat. Sesuai dengan amanat SPM urusan Perumahan Rakyat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk menyediakan Rumah Layak Huni untuk warga-warga yang terdampak relokasi tersebut. Capaian jenis layanan “Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi” ini mencapai 100% dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil melayani sebanyak 1.365 Warga dari Target 1.365 Warga yang harus dilayani. adapun rincian dari realisasi ini dapat dijabarkan pada setiap Triwulan pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Pada Triwulan I (TW 1) Tahun 2024, tidak terdapat warga yang harus dilayani untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi. hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya Surat dari Walikota/Bupati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menyediakan Unit pada Rumah Susun untuk keperluan warga Relokasi.

Pada Triwulan II (TW 2) Tahun 2024, Terdapat Relokasi warga yang dihunikan ke Rumah Susun pada Unit Pengelola Rumah Susun V sebanyak 16 Unit (Rumah) atau sebanyak 59 Jiwa.

Pada Triwulan III (TW 3) Tahun 2024, Terdapat Relokasi warga yang dihunikan ke Rumah Susun pada Unit Pengelola Rumah Susun V sebanyak 14 Unit (Rumah) atau sebanyak 46 Jiwa.

Pada Triwulan IV (TW 4) Tahun 2024, Terdapat beberapa kegiatan Relokasi Program Pemerintah Pusat dimana warga yang terdampak dihunikan ke Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1) Relokasi warga kolong tol/jembatan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 1 Unit (Rumah) atau sebanyak 3 Jiwa;
2) Relokasi warga kolong tol/jembatan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 277 Unit (Rumah) atau sebanyak 831 Jiwa;dan
3) Relokasi warga kolong tol/jembatan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 144 Unit (Rumah) atau sebanyak 342 Jiwa.

Pada Triwulan ini juga terdapat Kegiatan Relokasi Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) dan Pembebasan Lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1) Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di Palmerah sebanyak 9 Unit (Rumah) atau sebanyak 29 Jiwa;
2) Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di Tanah Tinggi sebanyak 12 Unit (Rumah) atau sebanyak 40 Jiwa;
3) Pembebasan Lahan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 Unit (Rumah) dengan perkiraan 8 Jiwa;dan

4) Pembebasan Lahan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9 Unit (Rumah) dengan perkiraan 15 Jiwa.

Sehingga secara total dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Rumah Layak Huni sebanyak 473 Unit Rumah Susun dan Ganti Rugi Lahan sebanyak 17 Unit (Rumah).

4.4.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adapun alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-21
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Perumahan Rakyat

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	1.443.311.962.091
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	451.118.442.195
	APBD	447.510.942.195
	8) APBD Murni	447.510.942.195
	9) APBD DAU	-
	10) APBD DAK Fisik	-
	11) APBD DAK Non Fisik	-
	12) Dana Bagi Hasil	-
	13) Kerja Sama	-
	14) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	-
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	3.607.500.000
	APBN	-
	3) Dekonsentrasi	-
	4) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	390.057.858.904

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

Provinsi DKI Jakarta memiliki APBD Perubahan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 85.202.328.591.676,- (delapan puluh lima triliun dua ratus dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dari total anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp. 1.443.311.962.091,-

(satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka pemenuhan SPM, Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sebesar Rp. 451.118.442.195,- (empat ratus lima puluh satu miliar seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari sumber pembiayaan APBD dan Non-APBD. Adapun rincian dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) (APBD) Pada Sub Kegiatan Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi teralokasikan anggaran sebesar Rp. 337.290.709.543,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). Anggaran tersebut diperuntukan untuk Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (3 Tower) dengan total jumlah unit hunian sebanyak 723 unit (720 unit hunian umum dan 3 unit hunian difabel). Realisasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 325.226.617.422,- (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

2) (APBD) Pada Sub Kegiatan Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi teralokasikan anggaran sebesar Rp. 110.220.232.652,- (seratus sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan untuk pemeliharaan Rumah Susun di 13 Lokasi (Pengadegan, Semper Barat, Flamboyan, Daan Mogot, Pulo Gebang, Cipinang Muara, Muara Angke, Tambora, Pulo Jahe, Jatinegara Barat, Pondok Bambu, Sukapura, dan Nagrak) dan pemeliharaan kawasan Rumah Susun di 2 Lokasi (Pulo Gebang dan BLK Pasar Rebo).

Pemeliharaan ini dimaksudkan agar unit hunian di Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dalam keadaan layak huni. Realisasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 107.904.397.779,- (seratus tujuh miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(Non-APBD) Pada Tahun 2024, Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Yayasan Budha Tsu Chi yang diperuntukan untuk pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) di 2 lokasi (Palmerah dan Tanah Tinggi). pada KTV Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.887.000.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 9 Unit Hunian Layak dan KTV Tanah Tinggi, Kota Administrasi Jakarta Pusat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.720.500.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 12 Unit Hunian Layak.

4.4.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel demi mendukung pencapaian target layanan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel IV-22
Dukungan Personil SPM
Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	276	6	3.238	3.520
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi				
	Jumlah	**276**	**6**	**3.238**	**3.520**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di dukung oleh 282 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari 276 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 6 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Serta didukung oleh tenaga non-ASN sebanyak 3.238 yang bukan hanya terbatas pada tenaga administrasi, mekanikal/elektrikal, keamanan, dan kebersihan saja namun juga didukung oleh tenaga teknis dan tenaga CRO agar target dan kinerja organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Semua ASN yang terdapat di Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan penempatan masing-masing individu.

Namun, tugas dan fungsi ASN tersebut sangat bersesuaian dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagai contoh, terdapat ASN dan tenaga Non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Rumah Susun yang diperuntukan untuk Warga Korban Bencana dan/atau Warga Relokasi Program Pemerintah Provinsi/Pusat. Dengan segala sumber daya manusia yang ada, Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta memastikan agar SPM urusan Perumahan Rakyat dapat terselesaikan secara tuntas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-23
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	1) Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta terkendala dalam pengumpulan data warga yang mengalami Pembebasan Lahan/Aset karena data BNBA tersebar pada beberapa Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan/Instansi Pusat/Swasta	1) Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta telah diikutsertakan sebagai tim Pembebasan Lahan Provinsi DKI Jakarta agar memudahkan pendataan lahan-lahan yang dibebaskan

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		2) Data Rumah Layak Huni saat ini sedang dilakukan update sehingga data Real dilapangan dapat dipetakan secara Real namun membutuhkan Sumber Daya yang sangat besar baik dari sisi Waktu, Uang, dan Manusia	2) Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta tetap melaksanakan pendataan secara real di lapangan untuk data Rumah Layak Huni di Provinsi DKI Jakarta
		3) Belum tersedianya dan terintegrasinya data yang akurat dari berbagai SKPD. Sehingga Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta terkendala dalam pengumpulan Data Rawan Bencana, Data Relokasi Warga, Data Rumah Layak Huni, dan Data Kependudukan yang mendukung SPM urusan Perumahan Rakyat	
2.	Penghitungan kebutuhan	Belum terpetakannya secara Real di lapangan Kebutuhan Perumahan di Provinsi DKI Jakarta	Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta secara aktif terus melakukan pendataan Rumah Layak Huni di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memetakan kebutuhan perumahan di Provinsi DKI Jakarta
3.	Perencanaan dan penganggaran	1) Terdapat Prosedur perizinan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga mengakibatkan keterlambatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang diperuntukan untuk SPM urusan Perumahan Rakyat	1) Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta selalu aktif berkolaborasi pada Dinas/Instansi lainnya agar dapat mempercepat proses Perencanaan sehingga tidak terdapat permalasalahan yang berarti dikemudian harinya
		2) Proses Pembangunan Rumah Susun yang membutuhkan dokumen AMDAL dan LALIN yang dimana untuk dokumen ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diterbitkan	2) Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian terkait Mix Used Housing di Provinsi DKI Jakarta serta mengembangkan pembangunan perumahan tanpa menggunakan pendanaan APBD.

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
3.	Perencanaan dan penganggaran	3) Terlalu tingginya beban Backlog dan RTLH di Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu APBD yang besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut	
4.	Pelaksanaan	Proses pembayaran kepada penyedia tidak sejalan dengan progres di lapangan sehingga menghambat pekerjaan dilapangan dan cashflow penyedia	Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan BPKD Provinsi DKI Jakarta agar penyediaan dana fisik pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditentukan. sehingga, tidak terdapat kendala yang berarti di kemudian hari
5.	Lain-lain	1) Sangat minimnya ketersediaan lahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harganya yang sangat tinggi sehingga menyulitkan Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembangunan Rumah layak Huni untuk mendukung SPM urusan Perumahan Rakyat 2) Adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan program Pembangunan Perumahan untuk SPM menjadi tertunda pada Tahun berikutnya	1) Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian untuk dapat menggunakan Lahan-lahan idle Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan Rumah Layak Huni baik untuk lahan kosong maupun lahan dengan sistem *Mix-Used* 2) untuk pemenuhan Pembangunan Rumah layak Huni yang mendukung SPM Selain menggunakan pendanaan APBD, Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk bersinergi dengan Instansi Pusat/Daerah/Swasta dengan menggunakan penganggaran lainnya seperti APBN, SP3L, SIPPT, CSR, dll.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tediri atas :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi (Provinsi);dan
2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten/Kota).

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga

pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Pelaksana Sub Urusan Kebakaran Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Bencana Daerah.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Target Capaian Pencapaian SPM adalah 100 persen.

4.5.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Capaian dan mutu layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-24
Capaian dan Mutu Layanan Dasar
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00**
1.	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.521	2.521	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	2.807	2.807	0	100,00
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Dokumen	74	74	0	100,00
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	2.702	2.702	0	100,00
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1	0	1	100,00
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	0	1	100,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024

Sesuai dengan Rencana Strategis 2023 – 2026 bahwa Indikator Sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 100% di Tahun 2024. Adapun Metadata Indikator Sasaran adalah Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur , di mana tidak ada masyarakat atau warga Negara yang mengalami kerugian materiil maupun kerugian secara fisik akibat dari kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada

Adapun perhitungan capaian sebagai berikut:

1) Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa sebanyak 2807 unit
2) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) sebanyak 74 dokumen dapat diakses melalui : https://bit.ly/SOP_Perda_Perkada_Satpol
3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan jumlah ASN Satpol PP sebanyak 2.706 Pegawai dan kualitas personil/SDM yang telah mengikuti Diklat Satpol PP, PPNS dan anggota Perlindungan masyarakat sebanyak 3.043 pegawai, telah terinput dalam jumlah yang sama namun nilai berubah menjadi 2.702 Pegawai dan sedang dikoordinasikan lebih lanjut untuk penyesuaiannya.

Capaian dan mutu layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-25
Capaian dan Mutu Layanan Dasar
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00**
1.	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten/kota**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.521	2.521	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada(jumlah dan kualitas barang dan jasa: perleng-kapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep,kendaraanoperasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perleng-kapan operasional)	Unit	6.042	6.042	0	100,00
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas,pelaksa-an penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	74	74	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	Orang	3.043	3.043	0	100,00
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kepen-dudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayan-an pengobatan (berkoor-dinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100,00
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1	0	1	100,00
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1	0	1	100,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024

Sesuai dengan Rencana Strategis 2023 – 2026 bahwa Indikator Sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum dengan target 100% di Tahun 2024. Metadata Indikator Sasaran adalah Persentase capaian penegakan Perda/Perkada ditambah persentase layanan ganti rugi dibagi dua sesuai Permendagri yang mengatur , di mana tidak ada masyarakat atau warga Negara yang mengalami kerugian materiil maupun kerugian secara fisik akibat dari kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada

Adapun perhitungan capaian sebagai berikut:

1) Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa sebanyak 6042 unit
2) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) sebanyak 74 dokumen dapat diakses \melalui : https://bit.ly/SOP_Perda_Perkada_Satpol
3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan jumlah ASN Satpol PP sebanyak 2.706 Pegawai dan kualitas personil/SDM yang telah mengikuti Diklat Satpol PP, PPNS dan anggota Perlindungan masyarakat sebanyak 3043 pegawai

Capaian dan mutu layanan dasar bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-26
Capaian dan Mutu Layanan Dasar
Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00**
1.	**Pelayanan informasi rawan bencana**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	250.604	250.604	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen sah, legal)	Dokumen	1	1	0	100,00
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	250.604	250.604	0	100,00
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	250.604	250.604	0	100,00
	4) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	200	200	0	100,00
2.	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	267	267	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda poskokesehatan, air sanitasi, …. dll)	Unit	4.266	4.266	0	100,00
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	267	267	0	100,00
3.	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus dilayani	Orang	6.880	6.880	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)					100,00
	1) Pendataan					100,00
	a) Form 5.A.1 Daftar warga negara yang berada di kawasan rawan bencana					100,00
	b) Form 5.A.2 Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga negara					100,00
	c) Form 5.A.3 Rekapitulasi kelompok warga negara berdasarkan kelompok kerawanan desa					100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	d) Form 5.A.4 Rekapitulasi aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana					100,00
	e) Form 5.A.5 Daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan					100,00
	f) Form 5.A.6 Rekapitulasi warga negara wajib latih					100,00
	g) Form 5.A.7 Daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana					100,00
	h) Form 5.A.8 Daftar ketersediaan stok logistik pengungsian					100,00
	i) Form 5.A.9 Daftar warga negara yang menjadi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)					100,00
	j) Form 5.A.10 Daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)					100,00
	k) Form 5.A.11 Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)					100,00
	l) Form 5.A.12 Daftar kejadian bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)					100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Perhitungan					
	a) Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	b) Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui untuk setiap bencana yang ditetapkan status keadaan darurat)					
	3) Perencanaan					
	a) Form 5.C.1 Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	b) Form 5.C.2 Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Jumlah penerima layanan dasar pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) dan nilai layanan dasar pada Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana; Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana;

Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana; Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana miliki nilai capaian yang sama pada total yang terlayani dan yang harus dilayani.

Begitu juga untuk Jumlah penerima layanan dasar pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan) serta nilai layanan dasar pada Sarana prasarana penanggulangan bencana; Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) miliki nilai capaian yang sama pada total yang terlayani dan yang harus dilayani. Capaian dan mutu layanan dasar bidang kebakaran tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-27
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**99,99**
1.	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**					**99,99**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.573.719	2.573.719	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**19,99**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,95
	1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh dinas damkar dan penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	1.969	1.963	6	99,70

	2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti sop mkkg, pemadaman di pemukiman, dst.)	Doku-men	39	39	0	100,00
	3) Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.),penyelamatan dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	5.099	5.099	0	100,00
	4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /sumber daya manusia (jumlah aparatur sdm damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadami)	Orang	2.254	2.254	0	100,00
	5) pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	162	162	0	100,00
	6) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	12.764	12.764	0	100,00

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 9 sd Pasal 26), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengemban Urusan Wajib Pelayanan Dasar berdasarkan urusan pemerintahan yang masuk kedalam Pelayanan Trantibum dan Limas yang tertuang kedalam Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Adapun turunan pencapaian urusan wajib melalui Jenis Pelayanan Dasar tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian

Adapun Indikator Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar adalah Jumlah yang Harus Dilayani sebanyak 1966 kejadian dengan capaian 100%. Pada Permendagri 114 tahun 2018 juga terdapat 4 indikator mutu pelayanan dasar yang diukur dengan capaian sebagai berikut:

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dengan capaian 99,7%.
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dengan capaian 100%.
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dengan capaian 100%.
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia dengan capaian 100%.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi

Waktu Tanggap (*response time*):

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *Respons time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman. Menurut, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012, bahwa waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi Indonesia tidak lebih dari 15 menit.

4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adapun alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-28
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibum

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	1,216,115,276,348

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	280,006,679,170
	APBD	280,006,679,170
	1) APBD Murni	280,006,679,170
	2) APBD DAU	-
	3) APBD DAK Fisik	-
	4) APBD DAK Non Fisik	-
	5) Dana Bagi Hasil	-
	6) Kerja Sama	-
	7) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	-
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	-
	APBN	-
	5) Dekonsentrasi	-
	6) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	

Sumber : SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024

Pada Tahun 2024 Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1,216,115,276,348 , dioptimalkan untuk penerapan SPM sebesar Rp. 280,006,679,170 antara lain di tingkat Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 270,559,296,208 dan wilayah kota senilai Rp. 9,447,382,962

Tabel IV-29
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	125,060,550,592
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	50,701,697,443
	APBD	
	1) APBD Murni	50,701,697,443
	2) APBD DAU	-
	3) APBD DAK Fisik	-
	4) APBD DAK Non Fisik	-
	5) Dana Bagi Hasil	-
	6) Kerja Sama	-
	7) Otonomi Khusus	-

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
	NON APBD	-
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	-
	APBN	-
	7) Dekonsentrasi	-
	8) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebesar Rp 125,060,550,592 dengan Alokasi anggaran penerapan SPM pada Satuan kerja perangkat daerah sepenuhnya termasuk dalam ABPD Murni

Tabel IV-30
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebakaran

No	Pendanaan	Pagu
1.	APBD DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan)	1.281.431.325.233
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	356.985.910.018
	APBD	356.985.910.018
	1) APBD Murni	-
	2) APBD DAU	-
	3) APBD DAK Fisik	-
	4) APBD DAK Non Fisik	-
	5) Dana Bagi Hasi	-
	6) Kerjasama	-
	7) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	-
	a) APBD DAK Fisik	-
	APBN	-
	b) APBN - Dekonsentrasi	-
	c) APBN - Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	-

4.5.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personil demi mendukung pencapaian target layanan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel IV-31
Dukungan Personil SPM Bidang Trantibum

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	264	63	46	373
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kota Administrasi Jakarta Barat	423	292	150	865
3.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kota Administrasi Jakarta Timur	561	379	152	1.092
4.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kota Administrasi Jakarta Pusat	442	254	151	847
5.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kota Administrasi Jakarta Selatan	561	367	160	1.080
6.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kota Administrasi Jakarta Utara	355	172	119	646
7.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100	20	24	144
	Jumlah	**2.706**	**1.547**	**802**	**5.055**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024

Tabel IV-32
Dukungan Personil SPM Bidang Kebencanaan

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	10	-	58	18
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10	-	26	36
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16	-	252	268
4.	Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	10	-	7	17
	Jumlah	**46**	**-**	**343**	**339**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Dukungan personil pemenuhan SPM dengan 4 jenis layanan dasar terdiri dari pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana memiliki total sebanyak 46 personil PNS dan 343 Non ASN.

Tabel IV-33
Dukungan Personil SPM
Bidang Kebakaran

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Pelayanan penyelamatan dan efakuasi korban kebakaran	2.211	0	1.743	3.954
	Jumlah	**2.211**	**0**	**1.743**	

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-34
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Trantibum

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	1) Pengumpulan Data By Name By Address membutuhkan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan persetujuan Kemendagri serta Standarisasi dalam pengelolaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi 2) Penghimpunan data yang dilakukan oleh personil Satpol PP di lokasi penertiban terkendala dengan penolakan dan gangguan kepada anggota Satpol PP	Satpol PP akan menyusun MoU dengan terlebih dahulu untuk memenuhi ISO pada anggaran 2026 sambil tetap dilakukan pendataan manual tahun 2025
2.	Penghitungan kebutuhan	Sulitnya menghitung penganggaran kebutuhan layanan dasar warga yang terdampak dikarenakan sifatnya "belum terjadi" sehingga belum diketahui kebutuhan rekeningnya apa	1) Penganggaran di Pemprov DKI Jakarta menggunakan Prinsip Money Follow Function, penganggaran layanan kerugian materi (Semen, Batubata , Pasir, dsb) dan pengobatan (plester, betadine, alkohol, dsb) tidak sejalan dengan output kegiatan penertiban

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
2.	Penghitungan kebutuhan	Sulitnya menghitung penganggaran kebutuhan layanan dasar warga yang terdampak dikarenakan sifatnya "belum terjadi" sehingga belum diketahui kebutuhan rekeningnya apa	2) Untuk meminimalisir terjadinya dampak penegakkan perda perkada Satpol PP senantiasa melibatkan SKPD terkait (Dinas Kesehatan dan Unsur kewilayahan) dalam kegiatan penegakan dan penindakan
3.	Perencanaan dan penganggaran	Untuk menghindari konsekuensi dari kelebihan anggaran yang lebih besar dari alokasi 2,5% atau sebaliknya, anggaran dimaksud tidak terserap yang disebabkan warga negara yang tidak terkena dampak	Pelaksanaan terhadap layanan Tramtibumlinmas, penganggaran terhadap kerugian materi dan layanan pengobatan dibiayai/dianggarkan melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT)
4.	Pelaksanaan	Masih tinggi nya pelanggaran di DKI Jakarta dan keterbatasan Sumber Daya untuk Penanggannya	1) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tingkat Kelurahan dan merekrut sebanyak 787 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih responsive 2) Satpol PP Menggunakan transformasi Digital dalam penyelenggaraan Tramtibum melalui pemanfaatan CCTV dan Patroli Hybrid
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024

Tabel IV-35
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kebencanaan

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	1) Keterbatasan Sumber Daya 2) Kualitas Data yang Rendah 3) Kurangnya Koordinasi Antar Pihak Terkait 4) Partisipasi Masyarakat yang Rendah	Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, serta koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat.
2.	Perhitungan kebutuhan	1) Ketidakakuratan Data Permintaan 2) Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan 3) Keterbatasan Teknologi dan Digitalisasi 4) Ketidaksesuaian dengan Anggaran yang Tersedia 5) Kurangnya Koordinasi Antar Pihak Terkait	1) Memperkuat koordinasi antar bagian dengan sistem informasi terintegrasi. 2) Mengoptimalkan penyimpanan dan distribusi dengan strategi logistik berbasis permintaan real-time.
3.	Perencanaan dan penganggaran	1) Anggaran yang Dialokasikan untuk Mitigasi belum maksimal 2) Perencanaan yang belum Berbasis Data dan Risiko	1) Mengalokasikan Anggaran Lebih Besar untuk Mitigasi dan Kesiapsiagaan 2) Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi
4.	Pelaksanaan	1) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya 2) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga	1) Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 2) Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan membentuk tim terpadu untuk memastikan implementasi SPM berjalan efektif. Serta 3) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah daerah dalam penerapan SPM.
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Tabel IV-36
Permasalahan dan Solusi SPM
Bidang Kebakaran

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	Sulitnya mendapatkan data korban luka dan jiwa, terutama pada saat kejadian, selain karena kondisi yang tidak memungkinkan, ditambah lagi jika korban bukan warga setempat	Adanya sumber data satu pintu dan kolaborasi dengan RT/RW setempat
2.	Perhitungan kebutuhan	Sulitnya menentukan harga satuan barang yang diminta, karena komponen yang ada pada system sangat minim	Penambahan komponen yang dihitung
3.	Perencanaan dan penganggaran	Sulitnya menyediakan data tepat waktu karena dibutuhkan proses sinkronisasi data sub command center dengan command center (kebakaran yang bisa diatasi oleh petugas dan oleh masyarakat)	Data ditagih sesuai akhir waktu input
4.	Pelaksanaan	Sulitnya penyediaan Data kebakaran dan penyelamatan tepat waktu, karena dibutuhkan waktu validasi data oleh petugas command center	Data ditagih sesuai akhir waktu input
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi; dan
6. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta Standar Pelayanan Minimal secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Adapun ketentuan terhadap kriteria penerima, mutu pelayanan dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Pada indikator kinerja utama Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, sasaran strategis “Membangun Layanan

Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial" dengan indikator kinerja "Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial" memiliki target sebesar 100 persen yang dihitung capaiannya pada Triwulan IV. Target tersebut didasari oleh definisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang kemudian disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 Jenis PPKS pada Permensos Nomor 12 tahun 2006, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yaitu antara lain:

1) Anak Terlantar;
2) Penyandang Disabilitas;
3) Lanjut Usia Terlantar;
4) Gelandangan;
5) Wanita Tuna Susila;
6) Korban Tindak Kekerasan;
7) Fakir Miskin;
8) Korban Bencana Alam;
9) Korban Bencana Sosial; dan
10) Pengemis

Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu:

1) Terpenuhi kebutuhan dan hak dasar; dan
2) Dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya; dan/atau
3) Masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai PPKS.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, PPKS diberikan layanan kebutuhan dan hak dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasari oleh Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi: data dan pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS meliputi:

1) Permakanan;
2) Sandang;
3) Alat bantu;
4) Perbekalan kesehatan;
5) Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
6) Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat;
7) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak;
8) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9) Penelusuran Keluarga;
10) Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11) Rujukan.

Kemudian, kebutuhan dasar yang harus diterima oleh korban bencana daerah Provinsi pada saat tanggap darurat, antara lain:

1) Permakanan
2) Sandang
3) Tempat Penampungan Pengungsi
4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
5) Dukungan Psikososial

Dalam penanganan korban bencana di Provinsi DKI Jakarta, jumlah dan kualitas barang/jasa yang diberikan telah melalui *asessment* oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial yang turut berkontribusi pada saat tanggap dan pasca darurat bencana.

4.6.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Capaian dan mutu layanan dasar bidang sosial tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-37
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Tingkat Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00**
1.	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	6.100	6.100	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Penyediaan permakanan	Orang	6.100	6.100	0	100,00
	2) Penyediaan sandang	Orang	6.100	6.100	0	100,00
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	6.100	6.100	0	100,00
	4) Penyediaan alat bantu	Orang	105	105	0	100,00
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	6.100	6.100	0	100,00
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6.100	6.100	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	6.100	6.100	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1.115	1.115	0	100,00
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4.649	4.649	0	100,00
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	535	535	0	100,00
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	983	983	0	100,00
2.	**Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Pengasuhan	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	2) Penyediaan permakanan	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	3) Penyediaan sandang	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	4) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1.533	1.533	0	100,00
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	1.533	1.533	0	100,00
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	296	296	0	100,00
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	851	851	0	100,00
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	242	242	0	100,00
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	480	480	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	11	11	0	100,00
3.	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.132	2.132	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Penyediaan permakanan	Orang	2.132	2.132	0	100,00
	2) Penyediaan sandang	Orang	2.132	2.132	0	100,00
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2.132	2.132	0	100,00
	4) Penyediaan alat bantu	Orang	62	62	0	100,00
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	2.132	2.132	0	100,00
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.132	2.132	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2.132	2.132	0	100,00
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	695	695	0	100,00
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	1.703	1.703	0	100,00
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	220	220	0	100,00
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	310	310	0	100,00
	12) Pemulasaraan	Orang	163	163	0	100,00
4.	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Penyediaan permakanan	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	2) Penyediaan sandang	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2.157	2.157	0	100,00
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	6) Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2.157	2.157	0	100,00
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	581	581	0	100,00
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	547	547	0	100,00
	10) Pemulangan ke daerah asal	Orang	1.125	1.125	0	100,00
5.	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	79.059	79.059	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	1) Penyediaan permakanan	Orang	28.339	28.339	0	100,00
	2) Penyediaan sandang	Orang	79.059	79.059	0	100,00
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	45	45	0	100,00
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10.445	10.445	0	100,00
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.331	1.331	0	100,00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

Dalam *form* Format Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2024, pada tabel IKK 1.F.5 Dapat kami laporkan bahwa data yang tercantum merupakan gabungan antara level Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sehingga jika dijumlahkan adalah sebagai berikut:

No	Layanan	Satuan	Provinsi	Kota	Total
1.	Penyediaan permakanan	Orang	28,339	168,528	196,867
2.	Penyediaan sandang	Orang	79,059	26,019	105,078
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	45	20	65
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10,445	9,692	20,137
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	1,331	848	2,179

Dalam proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat korban bencana yang mendapatkan beberapa pelayanan sekaligus, contohnya korban bencana mendapatkan pelayanan permakanan, sandang dan LDP. Dan terdapat pula korban bencana yang hanya mendapatkan satu layanan sesuai dengan kebutuhan seperti sandang saja tanpa mendapatkan layanan lainnya karena disesuaikan dengan kebutuhan korban bencana.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan bencana dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara maksimal. Sebagai garda terdepan dalam perlindungan sosial bagi warga terdampak bencana, kami memastikan bahwa setiap tahapan respons dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) ini, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam setiap kejadian bencana.

Capaian dan mutu layanan dasar bidang sosial tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-38
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Tingkat Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100,00**
1.	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	4.286	4.286	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejah-teraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	116	116	0	100,00
	2) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	222	222	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	3) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	30	30	0	100,00
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	440	440	0	100,00
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	2.597	2.597	0	100,00
	6) Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1.036	1.036	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1.036	1.036	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitas melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	1.036	1.036	0	100,00
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1.036	1.036	0	100,00
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)keberadaan keluarga	Orang	1.036	1.036	0	100,00
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1.036	1.036	0	100,00
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	67	67	0	100,00
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut)	Orang	188	188	0	100,00
2.	**Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	4.286	4.286	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	72	72	0	100,00
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	11	11	0	100,00
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	9	9	0	100,00
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	750	750	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	9	9	0	100,00
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	655	655	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	655	655	0	100,00
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	655	655	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	655	655	0	100,00
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	655	655	0	100,00
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	655	655	0	100,00
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	9	9	0	100,00
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	655	655	0	100,00
4.	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	4.762	4.762	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadukesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	867	867	0	100,00
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	56	56	0	100,00
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	72	72	0	100,00
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	3.507	3.507	0	100,00
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3.250	3.250	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	3.250	3.250	0	100,00
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis sertamasyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	3.250	3.250	0	100,00
	8) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak / bukti dokumen kependudukan	Orang	3.250	3.250	0	100,00
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar klinik/ rumah sakit/puskesmas)	Orang	3.250	3.250	0	100,00
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	3.250	3.250	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	332	332	0	100,00
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3.250	3.250	0	100,00
5.	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**					**100,00**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		**Jumlah Total yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	168.528	168.528	0	100,00
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					**20,00**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM)		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	168.528	168.528	0	100,00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	26.019	26.019	0	100,00
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	20	20	0	100,00
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas)	Orang	9.692	9.692	0	100,00
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	848	848	0	100,00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

Tabel IV-39
Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD)
Melalui KLJ, KPDJ Dan KAJ Tahun Anggaran 2024

No	Program	Target APBD-P	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1.	KLJ	144.908	52.135	143.824	142.236	135.140
2.	KPDJ	17.633	6.475	17.485	17.342	16.884
3.	KAJ	26.205	4.800	25.972	22.499	20.272

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

Penyaluran bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Tahun Anggaran 2024 diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 391 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024, penyaluran bantuan sosial PKD terbagi menjadi 4 (empat) tahap penyaluran yakni tahap 1 (bulan Februari-Maret) bagi penerima manfaat eksisting tahun 2023, tahap 2 (bulan Januri, April, Mei dan Juni) bagi penerima manfaat eksisting dan (bulan Januari s.d Juni) bagi penerima manfaat eksisting tahun 2023 dan penerima manfaat baru, tahap 3 (bulan Juli-September) bagi penerima eksisting dan penerima baru, dan tahap 4 (Oktober-Desember) bagi penerima eksisting dan penerima baru, dengan nominal bantuan sosial sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan yang disalurkan melalui kartu ATM. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan per tahap dikarenakan menyesuaikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur, dan juga pendistribusian kartu ATM bagi penerima manfaat baru yang membutuhkan waktu cukup lama.

Setelah dilakukan penyaluran bansos pada setiap tahapannya, dilakukan rekonsiliasi data dan evaluasi data berupa pemadanan data agar pemberian bansos dapat diberikan tepat sasaran. Sehingga, penerima manfaat yang sudah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial dan Keputusan Gubernur nomor 1250 tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan *take out* dari penerima manfaat. Hal tersebutlah yang membuat realisasi pada setiap tahap mengalami penurunan. Adapun dana yang tidak terealisasi telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2024.

4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Adapun alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-40
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	85.202.328.591.676
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	1.460.713.417.027
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	320.833.483.158
	APBD	314.243.042.127
	1) APBD Murni	314.243.042.127
	2) APBD DAU	-
	3) APBD DAK Fisik	-
	4) APBD DAK Non Fisik	-
	5) Dana Bagi Hasil	-
	6) Kerja Sama	-
	7) Otonomi Khusus	-
	NON APBD	6.590.441.031
	– *Corporate Social Responsibility* (CSR)	6.590.441.031
	APBN	-
	1) Dekonsentrasi	-
	2) Tugas Pembantuan	-
	DANA LAINNYA	-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

Anggaran SPM Bidang Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Provinsi dan Kabupaten Kota) sesuai dengan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Perubahan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024. Anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan prakiraan harga yang diberikan oleh CSR *Officer* Badan Usaha dan perseorangan.

4.6.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sosial, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel demi mendukung pencapaian target layanan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel IV-41
Dukungan Personil SPM Bidang Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM			Total
		ASN		Non ASN	
		PNS	PPPK		
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	19	-	322	19
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	17	-	158	17
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	9	-	150	9
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis didalam panti	8	-	105	8
5.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti	17	-	417	17
6.	Pendamping sosial	-	-	780	-
7.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	106	-	89	106
	Jumlah	**176**	**-**	**2021**	**176**

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-42
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan data	1) Dalam SPM Sosial - Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi. Sulit mengumpulkan data yang valid dan reliabel dalam kondisi darurat. 2) Keterbatasan jumlah SDM tenaga kesejahteraan sosial berbanding dengan korban bencana dalam proses pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan 3) Perlu adanya rekonsiliasi data di antara perangkat daerah pengampu terkait penanganan bencana. 4) Jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang semakin hari semakin bervariasi tidak hanya terbatas pada anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis	-
2.	Perhitungan kebutuhan	Perhitungan kebutuhan yang menjadi target ditetapkan berdasarkan pengumpulan data, namun terkendala oleh penentuan jumlah WBS yang akan dilayani	-
3.	Perencanaan dan penganggaran	Perencananaan dan Penganggaran disesuaikan kemampuan anggaran daerah dan menyesuaikan dengan target pada Dokumen Renstra PD	-
4.	Pelaksanaan	Pelaksanaan reunifikasi mengalami hambatan apabila WBS beralamat di Luar DKI Jakarta	Melakukan koordinasi dengan TKSK dan Dinas Sosial di luar DKI Jakarta
5.	Lain-lain		

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

4.7.1.1 Urusan Pendidikan Provinsi

Table IV-43
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARANSPM BIDANG PENDIDIKAN				9.679.779.777.502	8.985.794.414.537	92.83 %
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				3.329.158.827.182	3.255.118.593.519	97.78 %
	1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah			1.540.808.361.061	1.500.009.738.641	97.35 %
		1)	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	-	-	-
		2)	Pembangunan Ruang Guru/ KepalaSekolah/ TU	Ruang	-	-	-
		3)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		4)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		5)	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		6)	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		7)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		8)	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		9)	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		10)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	-	-	-
		11)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		12)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	-	-	-
		13)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	-	-	-
		14)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	-	-	-
		15)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	-	-	-
		16)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Ruang	-	-	-
		17)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		18)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		19)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		20)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.306.914.184	1.184.803.230	90.66%
		21)	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	-
		22)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.009.755.315	888.216.800	87.96%
		23)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-
		24)	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		25)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	74.403.252	74.291.190	99.85%
		26)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	443.025.793	316.299.000	71.40%
		27)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik	701.672.240.880	685.693.540.406	97.72%
		28)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	-	-	-
		29)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	5.545.067.399	5.093.255.097	91.85%
		30)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	198.100.813.574	187.439.859.365	94.62%
		31)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	-	-	-
		32)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	226.180.000	223.825.000	98.96%
		33)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	305.435.272.996	132.138.310.967	43.26%
		34)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		35)	Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	-
		36)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan pendidikan Menengah Atas	Orang	-	-	-
		37)	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi TIK untukPendidikan	Orang	-	-	-
		38)	Pengembangan konten digital untukpendidikan	Kontem Digital	-	-	-
		39)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-
		40)	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang pendidikan	Dokumen	-	-	-
		41)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	108.525.000	107.017.500	98.61%
		42)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	830.520.000	793.881.500	95.59%
		43)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		44)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-
		45)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		46)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		47)	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2.859.023.760	2.859.023.760	100.00%
		48)	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		49)	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		50)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		51)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		52)	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		53)	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		54)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	3.548.900.000	3.547.600.000	99.96%
		55)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-
		56)	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		57)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	319.647.718.908	306.352.852.797	95.84%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			1.687.276.376.732	1.660.088.714.672	98.39 %
		1)	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	85.120.890.509	82.588.738.867	97.03%
		2)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	-
		3)	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	-	-	-
		4)	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		5)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		6)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		7)	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		8)	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		9)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		10)	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		11)	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		12)	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	-
		13)	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		14)	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		15)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2.169.091.702	2.021.592.091	93.20%
		16)	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		17)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	301.876.489	287.300.914	95.17%
		18)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-
		19)	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		20)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	61.457.946.958	59.756.967.086	97.23%
		21)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	10.085.992.267	9.825.497.685	97.42%
		22)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMK	Peserta didik	716.485.512.163	713.290.839.918	99.55%
		23)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	-	-	-
		24)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	10.269.324.998	9.661.366.518	94.08%
		25)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	150.017.576.686	147.811.219.336	98.53%
		26)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	909.655.046	856.196.526	94.12%
		27)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	2.471.552.655	2.229.448.140	90.20%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		28)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	365.931.455.671	128.956.870.000	35.24%
		29)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	-	-	-
		30)	Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	-
		31)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	-	-	-
		32)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-
		33)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	-
		34)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-
		35)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		36)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	80.790.000	79.476.000	98.37%
		37)	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		38)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	726.675.000	699.871.000	96.31%
		39)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		40)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-
		41)	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	21.146.295.000	21.095.885.000	99.76%
		42)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	-
		43)	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	Unit	3.927.858.858	3.927.858.858	100.00%
		44)	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	-	-	-
		45)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		46)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		47)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		48)	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		49)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		50)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	-	-	-
		51)	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		52)	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		53)	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan	251.065.738.582	234.945.067.359	93.58%
		54)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	5.108.144.148	5.079.933.703	99.45%
		55)	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		56)	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
	3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus			101.074.089.389	95.020.140.206	94.01 %
		1)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	-
		2)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	-
		3)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		4)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		5)	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		6)	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		7)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		8)	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		9)	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		10)	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		11)	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	-	-	-
		12)	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	-	-	-
		13)	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahit (C)	Ruang	-	-	-
		14)	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	-	-	-
		15)	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	-	-	-
		16)	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		17)	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang	-	-	-
		18)	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	-	-	-
		19)	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		20)	Rehabilitasi Ruar Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	-	-	-
		21)	Rehabilitasi Ruar Bina Diri dan Bin Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	-	-	-
		22)	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	-	-	-
		23)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	-	-	-
		24)	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	-
		25)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	-	-	-
		26)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-
		27)	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		28)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	-	-	-
		29)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		30)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta didik	-	-	-
		31)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	-	-	-
		32)	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.336.705.787	1.235.298.560	92.41%
		33)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	19.493.230.553	18.654.250.348	95.70%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		34)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	-	-	-
		35)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	135.529.779	134.711.250	99.40%
		36)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	31.112.368.868	10.130.260.000	32.56%
		37)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	-	-	-
		38)	Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	-
		39)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daera pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	-	-	-
		40)	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-
		41)	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Konten Digital	-	-	-
		42)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-
		43)	Koordinasi. Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanar dIBidang Pendidikan	Dokumen	1.199.235.360	1.170.241.000	97.58%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		44)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		45)	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Orang	-	-	-
		46)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		47)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-
		48)	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	-	-	-
		49)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-
		50)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		51)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		52)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		53)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		54)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	47.616.569.042	42.532.820.180	89.32%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		55)	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		56)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	180.450.000	180.450.000	100.00%
		57)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		58)	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		59)	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		60)	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		61)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		62)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	-	-	-
		63)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	-
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Anggaran SPM pada Kab/Kota			6.350.620.950.320	5.730.675.821.018	90.24 %

4.7.1.2 Urusan Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota

Table IV-44
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG PENDIDIKAN				9.679.779.777.502	8.985.794.414.537	92.83 %
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				6.350.620.950.320	5.730.675.821.018	90.24 %
	1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			3.889.604.221.926	3.420.738.746.884	87.95 %
		1)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	-
		2)	Pembangunan Ruang Guru/ TU Kepala Sekolah	Ruang	-	-	-
		3)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		4)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		5)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.005.788.674.173	578.788.265.749	57.55%
		6)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/ Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		7)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang	-	-	-
		8)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		9)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		10)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		11)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	-	-	-
		12)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	-
		13)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	-	-	-
		14)	Pemeliharaan Rutin Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		15)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	791.684.699.811	788.750.310.012	99.63%
		16)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	-	-	-
		17)	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	2.468.529.136	2.308.751.989	93.53%
		18)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	642.465.003.475	621.787.118.682	96.78%
		19)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	-	-	-
		20)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	277.760.000	258.530.000	93.08%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		21)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	741.503.780.781	87.583.115.000	11.81%
		22)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	-	-	-
		23)	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	-	-	-
		24)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	-	-	-
		25)	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	28.151.001.989	26.154.281.288	92.91%
		26)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	-	-	-
		27)	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-
		28)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	-
		29)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-
		30)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		31)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	58.320.000	55.590.000	95.32%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		32)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit Komunitas	622.089.915	582.307.150	93.60%
		33)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		34)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-
		35)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-
		36)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	-
		37)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-
		38)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		39)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	21.320.936.812	20.741.692.781	97.28%
		40)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	6.401.740.000	6.339.252.000	99.02%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		41)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	648.861.685.834	633.468.866.452	97.63%
		42)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	-	-	-
	2.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			1.895.477.000.006	1.829.663.863.903	96.53 %
		1)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	-
		2)	Pembangunan Ruang Guru/ TU /Kepala Sekolah	Ruang	-	-	-
		3)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		4)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		5)	Pembangunan Laboratorium	Ruang	-	-	-
		6)	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		7)	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		8)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		9)	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		10)	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		11)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	70.405.301.389	32.366.669.730	45.97%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		12)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	-	-	-
		13)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	-	-
		14)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		15)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	-	-	-
		16)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		17)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	-	-	-
		18)	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	-	-	-
		19)	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	-	-	-
		20)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	577.656.720	577.656.720	100.00%
		21)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	3.679.452.831	3.357.903.972	91.26%
		22)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	-
		23)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		24)	Pemeliharaan Rutin Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		25)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	663.045.450.640	659.096.964.175	99.40%
		26)	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	-	-	-
		27)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	-	-	-
		28)	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	3.348.646.767	3.111.751.577	92.93%
		29)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	365.986.156.491	353.843.644.998	96.68%
		30)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	-	-	-
		31)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	282.860.000	279.147.500	98.69%
		32)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	424.578.000.222	75.022.930.000	17.67%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		33)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	-	-	-
		34)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	-	-	-
		35)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	-	-	-
		36)	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	-	-	-
		37)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	-	-	-
		38)	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-
		39)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	-
		40)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-
		41)	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		42)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	154.025.000	151.467.500	98.34%
		43)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.142.442.355	1.047.745.000	91.71%
		44)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-
		45)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-
		46)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		47)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	357.135.382.591	346.111.287.509	96.91%
		48)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		49)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	5.141.625.000	5.141.625.000	100.00%
		50)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	-
		51)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		52)	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	-	-	-
		53)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	-
	3.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			287.125.316.309	284.006.546.584	98.91 %
		1)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	5.916.551.359	5.916.551.359	100.00%
		2)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	-	-	-
		3)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	-	-	-
		4)	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	3.960.736.238	2.744.009.000	69.28%
		5)	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	-	-	-
		6)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	24.000.000	24.000.000	100.00%
		7)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	2.355.083.536	2.170.448.486	92.16%
		8)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	15.830.090.057	15.618.512.259	98.66%
		9)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	172.081.174.457	170.668.964.610	99.18%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		10)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	-	-	-
		11)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	2.529.553.841	2.462.094.870	97.33%
		12)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	81.631.360.000	41.239.741.972	50.52%
		13)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	-	-	-
		14)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	-	-	-
		15)	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	-	-	-
		16)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	-	-	-
		17)	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-
		18)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	-
		19)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		20)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		21)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		22)	Pembangunan Ruang Guru/TU/ Kepala Sekolah	Ruang	-	-	-
		23)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	28.616.821	27.901.000	97.50%
		24)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		25)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		26)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-
		27)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-
		28)	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	-	-	-
		29)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	-
		30)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		31)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-
		32)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	-	-	-
		33)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	2.768.150.000	2.742.705.000	99.08%
		34)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	-
		35)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-
		36)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
	4.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			278.414.412.079	196.266.663.647	70.49 %
		1)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Unit	114.309.073.858	35.541.814.048	31.09%
		2)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Peserta didik	3.898.717.692	3.893.400.000	99.86%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		3)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	-	-	-
		4)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	105.265.468.245	102.489.080.395	97.36%
		5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	-
		6)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	-	-	-
		7)	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	40.774.640.000	20.208.241.378	49.56%
		8)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Orang	-	-	-
		9)	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		10)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang	-	-	-
		11)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	-
		12)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	-	-	-
		13)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	-	-	-
		14)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		15)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-
		16)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	9.289.557	9.087.000	97.82%
		17)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		18)	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	-	-	-
		19)	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	-	-	-
		20)	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	-	-	-
		21)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	-	-	-
		22)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	-	-	-
		23)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	-	-	-
		24)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	-	-
		25)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	-	-
		26)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	-	-	-
		27)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		28)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.056.000.000	1.019.190.000	96.51%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		29)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		30)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	-	-	-
		31)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	-	-	-
		32)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	12.389.204.142	11.866.289.466	95.78%
		33)	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	-	-	-
		34)	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	712.018.585	673.162.738	94.54%
		35)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	-	-	-
		36)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	-	-	-
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
		Anggaran Pemenuhan Layanan SPM Tingkat Provinsi			3.329.158.827.182	3.255.118.593.519	97.78 %

Sumber: Dinas Pendidikan, tahun 2024

4.7.2 Urusan Kesehatan

4.7.2.1 Urusan Kesehatan Provinsi

Table IV-45
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN				170.005.780.174	147.493.186.584	86.76 %
1.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				6.265.501.783	6.211.160.316	99.13 %
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			-	-	-
		1)	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	3.514.047.438	3.463.900.929	98.57 %
		2)	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisiKejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	2.751.454.345	2.747.259.387	99.85 %
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Anggaran SPM Kabupaten/kota			163.740.278.391	141.282.026.268	86.28 %

Sumber : SPM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.2.2 Urusan Kesehatan Kabupaten/ Kota

Table IV-46
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten / Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN				170.005.780.174	147.493.186.584	86.76 %
1.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				163.740.278.391	141.282.026.268	86.28 %
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			163.740.278.391	141.282.026.268	86.28 %
		1)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	10.630.214.848	9.974.693.719	93.83 %
		2)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	3.128.639.489	3.045.910.881	97.36 %
		3)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	6.854.812.910	6.281.907.835	91.64 %
		4)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	27.679.881.464	25.646.289.711	92.65 %
		5)	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	4.004.339.286	3.865.672.911	96.54 %
		6)	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	16.864.797.118	15.152.755.085	89.85 %
		7)	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	21.668.716.329	17.458.976.945	80.57 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		8)	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	5.635.407.583	5.064.964.320	89.88 %
		9)	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	6.631.400.401	5.894.526.352	88.89 %
		10)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	973.824.300	970.768.688	99.69 %
		11)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	52.133.443.019	41.695.397.850	79.98 %
		12)	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	7.534.801.644	6.230.161.971	82.69 %
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Anggaran SPM Provinsi			6.265.501.783	6.211.160.316	99.13 %

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.7.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Table IV-47
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.071.657.948.256	761.762.283.189	71.08 %
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				22.266.374.312	20.404.747.385	91.64 %
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			22.266.374.312	20.404.747.385	91.64 %
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	-	-	-
		2)	Supervisi pembangunan/peningkatan /perbaikan SPAM	Liter/Detik	-	-	-
		3)	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	-	-	-
		4)	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	-	-	-
		5)	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	-	-	-
		6)	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	-	-	-
		7)	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		8)	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	-	-	-
		9)	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		10)	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		11)	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	-	-	-
		12)	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	-	-	-
		13)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	-	-	-
		14)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		15)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	-	-	-
		16)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPA)	Orang	-	-	-
		17)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	-	-	-
		18)	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	-	-	-
		19)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		20)	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
		21)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				418.660.796.851	339.847.330.095	81.17 %
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Regional			418.660.796.851	339.847.330.095	81.17 %
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	-	-	-
		2)	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen	-	-	-
		3)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	-	-	-
		4)	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga	-	-	-
		5)	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen	-	-	-
		6)	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		7)	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	-	-
		8)	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		9)	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	-	-	-
		10)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		11)	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	-	-	-
		12)	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit	-	-	-
		13)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	-	-	-
		14)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	-	-
		15)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	-	-	-
		16)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		17)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	-	-	-
		18)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	-	-	-
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			41.851.442.065	40.092.961.266	95.80 %
	2.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			134.701.228.300	48.677.991.667	36.14 %
	3.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.148.140.000	629.455.100	54.82 %
	4.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			27.366.824.934	23.706.725.567	86.63 %
	5.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			33.946.953.280	29.155.961.167	85.89 %
	6.	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.658.329.610	1.627.260.272	98.13 %
	7.	CAPEX Perumda PAM Jaya			90.057.858.904	257.619.850.670	66.05 %

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.3.2 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/ Kota

Table IV-48
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.071.657.948.256	761.762.283.189	71.08 %
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				-	-	-
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	-	-	-
		2)	Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM	Dokumen	-	-	-
		3)	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik	-	-	-
		4)	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasanperdesaan	SR	-	-	-
		5)	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	-	-	-
		6)	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	-	-	-
		7)	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	-	-	-
		8)	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	SR	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		9)	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	-	-	-
		10)	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	-	-	-
		11)	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan masyarakat	Kelompok Masyarakat	-	-	-
		12)	Fasilitasipenyiapan kerja sama SPAM	Unit	-	-	-
		13)	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	-	-	-
		14)	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	-	-	-
		15)	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	-	-	-
		16)	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	-	-	-
		17)	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	-	-	-
		18)	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		19)	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	-	-	-
		20)	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	-	-	-
		21)	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit	-	-	-
		22)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	-	-	-
		23)	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	-	-	-
		24)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	-	-	-
		25)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	-	-	-
		26)	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Liter/Detik	-	-	-
		27)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		28)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	-	-	-
		29)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	-	-	-
		30)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
		31)	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Unit	-	-	-
		32)	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	SR	-	-	-
		33)	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	-	-	-
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				240.672.918.189	143.890.355.039	59.79 %
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			240.672.918.189	143.890.355.039	59.79 %
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2)	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	-	-	-
		3)	Pembangunan/ penyediaan Sistem pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	-	-	-
		4)	Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	-	-	-
		5)	Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	-	-	-
		6)	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	-	-	-
		7)	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	-	-
		8)	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	-	-	-
		9)	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	-	-
		10)	Operasi dan pemeliharaan sistempengelolaan air limbah domestik	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		11)	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	-	-	-
		12)	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	-	-	-
		13)	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	-	-	-
		14)	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	-	-	-
		15)	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	-	-	-
		16)	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	-	-	-
		17)	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	-	-	-
		18)	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	-	-	-
		19)	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		20)	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	-	-	-
		21)	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	-	-	-
		22)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	134.701.228.300	48.677.991.667	36.14 %
		23)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	-	-	-
		24)	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	-	-	-
		25)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	-	-	-
		26)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		27)	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	-	-	-
		28)	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	-	-	-
		29)	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	-	-	-
		30)	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M³/Hari	-	-	-
		31)	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	-	-	-
		32)	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	27.366.824.934	23.706.725.567	86.63 %
		33)	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	-	-	-
		34)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		35)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyeleng-gara	-	-	-
		36)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	-	-	-
		37)	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	-	-	-
		38)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	41.851.442.065	40.092.961.266	95.80 %
		39)	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	33.946.953.280	29.155.961.167	85.89 %
		40)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1.148.140.000	629.455.100	54.82 %
		41)	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	1.658.329.610	1.627.260.272	98.13 %
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			404.100.000.000	330.834.284.590	81.87 %
	2.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.000.000.000	812.270.000	81.23 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	3.	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			13.560.796.851	8.200.775.505	60.47 %
	4.	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			399.999.914	198.684.450	49.67 %
	5.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			9.999.999.913	9.038.277.748	90.38 %
	6.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			11.866.374.485	11.167.785.187	94.11 %
	7.	CAPEX Perumda PAM Jaya			390.057.858.904	257.619.850.670	66.05 %

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/ Kota

4.7.4.1 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kabupaten

Table IV-49
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				451.118.442.195	436.738.515.201	96.81 %
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				451.118.442.195	436.738.515.201	96.81 %
	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			-	-	-
		1)	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		2)	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		3)	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	-	-	-
		4)	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	-	-	-
		5)	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		6)	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	-	-	-
		7)	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		8)	Identifikasi Perumahan di lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		9)	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
		10)	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
		11)	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
	2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		1)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		2)	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		3)	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	-	-	-
		4)	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		5)	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah	337.290.709.543	325.226.617.422	96.42 %
		6)	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	110.220.232.652	107.904.397.779	97.90 %
		7)	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga	-	-	-
		8)	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		9)	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		10)	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		11)	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		12)	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
2.	**PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Konsolidasi Tanah Vertical (KTV) Palmerah			1.887.000.000	1.887.000.000	100.00 %
	2.	Konsolidasi Tanah Vertical (KTV) Tanah Tinggi			1.720.500.000	1.720.500.000	100.00 %

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.4.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota

Table IV-50
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				451.118.442.195	436.738.515.201	96.81 %
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				447.510.942.195	433.131.015.201	96.79 %
	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-	-
		1)	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	-
		2)	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		3)	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	-	-	-
		4)	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	-	-	-
		5)	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	-
		6)	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	-	-	-
		7)	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	-
		8)	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	-
		9)	Identifikasi perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	-
		10)	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
	2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			447.510.942.195	433.131.015.201	96.79 %
		1)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2)	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		3)	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	337.290.709.543	325.226.617.422	96.42 %
		4)	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	110.220.232.652	107.904.397.779	97.90 %
		5)	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-	-	-
		6)	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-	-	-
		7)	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	-	-	-
		8)	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	-	-	-
		9)	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Unit Rumah	-	-	-
		10)	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-	-	-
		11)	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kab/Kota	Unit Rumah	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		12)	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	Unit Rumah	-	-	-
2.	**PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Konsolidasi Tanah Vertical (KTV) Palmerah			1.887.000.000	1.887.000.000	100.00 %
	2.	Konsolidasi Tanah Vertical (KTV) Tanah Tinggi			1.720.500.000	1.720.500.000	100.00 %

Sumber : SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.7.5.1 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Table IV-51
Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				280.006.679.170	274.753.990.681	98.12 %
1.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				270.559.296.208	265.489.443.724	98.13 %
	1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			263.641.710.385	258.815.412.110	98.17 %
		1)	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patrol, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2)	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	-	-	-
		3)	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	-	-	-
		4)	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	-	-	-
		5)	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	-	-	-
		6)	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	-	-	-
		7)	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	-	-	-
		8)	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		9)	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-
		10)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	-	-	-
		11)	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	-	-	-
		12)	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	-	-	-
		13)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	-	-	-
		14)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	20.318.193.953	19.839.638.919	97.64 %
		15)	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-
		16)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangkaketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	619.454.614	485.462.500	78.37 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		17)	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	240.512.110.300	236.564.244.538	98.36 %
		18)	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.706.302.772	1.606.485.153	94.15 %
		19)	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa	Laporan	485.648.746	319.581.000	65.80 %
	2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			5.259.737.229	5.125.326.614	97.44 %
		1)	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1.715.677.499	1.622.511.814	94.57 %
		2)	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	2.422.508.480	2.382.704.000	98.36 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		3)	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1.121.551.250	1.120.110.800	99.87 %
		4)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (RuangPemeriksaan Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	-	-	-
		5)	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	-	-	-
		6)	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	-	-	-
		7)	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	-	-	-
		8)	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	-	-	-
		9)	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			1.657.848.594	1.548.705.000	93.42 %
		1)	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1.657.848.594	1.548.705.000	93.42 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2)	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	-	-	-
		3)	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	-	-	-
		4)	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-
		5)	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	-	-	-
		6)	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan	-	-	-
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) di Kabupaten/Kota			9.447.382.962	9.264.546.957	98.06 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.5.2 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota

Table IV-52
Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS				687.694.286.631	663.837.044.354	96.53 %
	ANGGARAN SPM SUB BIDANG TRANTIBUMLINMAS				280.006.679.170	274.753.990.681	98.12 %
1.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				9.447.382.962	9.264.546.957	98.06 %
	1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.883.118.583	3.816.750.407	98.29 %
		1)	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		2)	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	626.722.715	607.154.260	96.88 %
		3)	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		4)	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	-	-	-
		5)	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	515.599.440	491.213.792	95.27 %
		6)	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	-	-	-
		7)	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	-	-	-
		8)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	-	-	-
		9)	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		10)	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatanfungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	-	-	-
		11)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	-	-	-
		12)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melaluiPelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	-	-	-
		13)	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawala	Kasus	-	-	-
		14)	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli. Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.932.532.428	1.911.621.355	98.92 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		15)	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	808.264.000	806.761.000	99.81 %
		16)	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	-	-	-
		17)	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	-	-	-
		18)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	-	-	-
	2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			5.564.264.379	5.447.796.550	97.91 %
		1)	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2)	Pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	-	-	-
		3)	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	-	-	-
		4)	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-
		5)	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen	-	-	-
		6)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	-	-	-
		7)	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-
		8)	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		9)	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-
		10)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-
		11)	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	4.231.854.379	4.121.096.550	97.38 %
		12)	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.332.410.000	1.326.700.000	99.57 %
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			-	-	-
		1)	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	-	-	-
		2)	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-
		3)	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	-	-	-
		4)	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		5)	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	-	-	-
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) Provinsi			270.559.296.208	265.489.443.724	98.13 %
	ANGGARAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS				687.694.286.631	663.837.044.354	96.53 %
	ANGGARAN SPM SUB BIDANG BENCANA				50.701.697.443	49.011.412.782	96.67 %
2.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				50.701.697.443	49.011.412.782	96.67 %
	1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			3.160.708.916	3.070.819.925	97.16 %
		1)	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		2)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	3.160.708.916	3.070.819.925	97.16 %
	2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			40.509.807.181	39.157.280.170	96.66 %
		1)	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		2)	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.388.535.428	1.345.560.470	96.91 %
		3)	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		4)	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadapbencana	Unit	34.097.207.487	32.840.099.500	96.31 %
		5)	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	-	-	-
		6)	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	4.620.129.480	4.611.622.800	99.82 %
		7)	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-
		8)	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-
		9)	Penyusunan rencanakontijensi	Dokumen	17.700.000	17.700.000	100.00 %
		10)	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	386.234.786	342.297.400	88.62 %
		11)	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	-	-	-
		12)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	-	-	-
		13)	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-
		14)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		15)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	-	-	-
		16)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	-	-	-
		17)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-
	3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-	-	-
		1)	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ wabah Zoonosis prioritas	Laporan	-	-	-
		2)	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-
		4)	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		5)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		6)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-
		7)	Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	Dokumen	-	-	-
		8)	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	-	-	-
	4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			7.031.181.346	6.783.312.687	96.47 %
		1)	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		2)	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		3)	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		4)	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	4.663.295.262	4.543.761.574	97.44 %
		5)	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	-	-	-
		6)	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		7)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-
		8)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-
		9)	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		10)	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		11)	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-	-
		12)	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	-	-	-
		13)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	2.367.886.084	2.239.551.113	94.58 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS				687.694.286.631	663.837.044.354	96.53 %
	ANGGARAN SPM SUB BIDANG KEBAKARAN				356.985.910.018	340.071.640.891	95,26 %
3.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				165.948.717.019	159.782.061.005	96.28 %
	1.	Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			147.740.830.047	145.381.726.469	98.40 %
		1)	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		2)	Pemadaman pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	122.885.670.809	121.751.084.618	99.08 %
		3)	Penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran dan non kebakaran	Laporan	-	-	-
		4)	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		5)	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, Alat Pelindung Diri	Unit	2.172.877.307	2.064.645.425	95.02 %
		6)	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	445.439.639	425.851.500	95.60 %
		7)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	684.142.815	621.172.500	90.80 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		8)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	-	-
		9)	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	-	-	-
		10)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	-	-
		11)	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	-	-	-
		12)	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	-	-
		13)	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	-	-	-
		14)	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	21.310.716.751	20.283.828.986	95.18 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		15)	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	241.982.726	235.143.440	97.17 %
		16)	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	-	-	-
	2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			217.362.585	203.825.600	93.77 %
		1)	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen			
		2)	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	217.362.585	203.825.600	93.77 %
	3.	Investigasi Kejadian Kebakaran					
		1)	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	-	-	-
	4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			16.364.543.985	12.629.471.534	77.18 %
		1)	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	2.477.603.377	2.396.681.500	96.73 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2)	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	4.045.985.780	3.931.997.249	97.18 %
		3)	Dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	9.840.954.828	6.300.792.785	64.03 %
	5.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.625.980.402	1.567.037.402	96.37 %
		1)	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	-	-	-
		2)	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	110.490.128	91.876.002	83.15 %
		3)	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan	1.515.490.274	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		4)	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit	1.475.161.400	1.475.161.400	97.34 %
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran			122.100.000	102.000.000	83.54 %
	2.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota			4.780.907.542	4.676.441.980	97.81 %
	3.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan. penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri			132.580.047.609	124.652.900.543	94.02 %
	4.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan. penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri			6.996.683.609	6.583.102.954	94.09 %
	5.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi			3.030.233.400	2.616.050.000	86.33 %
	6.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK:Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi			30.589.988.432	29.647.998.000	96.92 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	7.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Sosialisasi. Komunikasi. Informasi, Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan. penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			859.048.324	731.122.381	85.11 %
	8.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi			11.890.534.083	11.093.084.028	93.29 %
	9.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SK: Pembinaan penyelenggaraan pencegahan. penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			187.650.000	186.880.000	99.59 %
	10.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) Provinsi			270.559.296.208	265.489.443.724	98.13 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.6 Urusan Sosial

4.7.6.1 Urusan Sosial Provinsi

Table IV-53
Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG SOSIAL				320.833.483.158	312.139.326.346	97.29 %
1.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				239.463.718.023	231.271.984.416	96.58 %
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			122.825.125.045	118.665.889.787	96.61 %
		1)	Penyediaan permakanan	Orang	64.138.684.150	62.634.154.298	97.65 %
		2)	Penyediaan sandang	Orang	13.995.151.803	13.858.936.318	99.03 %
		3)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	17.264.565.279	15.824.218.526	91.66 %
		4)	Penyediaan alat bantu	Orang	57.577.921	47.385.000	82.30 %
		5)	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	929.275.609	911.087.563	98.04 %
		6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.606.235.429	2.593.184.789	99.50 %
		7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	23.156.505.145	22.120.549.313	95.53 %
		8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	-	-	-
		9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	-	-
		10)	Pemberian pelayanan penelusuran peluarga	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	-
		12)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	677.129.709	676.373.980	99.89 %
	2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			33.180.142.150	31.718.394.128	95.59 %
		1)	Pengasuhan	Orang	-	-	-
		2)	Penyediaan makanan	Orang	13.973.108.833	13.374.241.185	95.71 %
		3)	Penyediaan sandang	Orang	3.444.949.551	3.299.713.906	95.78 %
		4)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	436.569.946	229.284.988	52.52 %
		5)	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	161.606.599	159.045.342	98.42 %
		6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3.519.036.132	3.481.214.537	98.93 %
		7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	11.503.271.089	11.033.294.170	95.91 %
		8)	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	-	-
		9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	-	-
		10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	-
		12)	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti	Orang	141.600.000	141.600.000	100.00 %
		13)	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	-	-	-
	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			39.850.865.633	38.554.300.277	96.75 %
		1)	Penyediaan permakanan	Orang	21.676.268.477	21.232.877.063	97.95 %
		2)	Penyediaan sandang	Orang	3.304.048.788	3.270.595.575	98.99 %
		3)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	2.631.418.031	2.074.903.262	78.85 %
		4)	Penyediaan alat bantu	Orang	-	-	-
		5)	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	264.929.596	262.123.644	98.94 %
		6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.185.254.560	1.184.604.222	99.95 %
		7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10.788.946.181	10.529.196.511	97.59 %
		8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	-	-	-
		9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	-	-	-
		11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	-
		12)	Pemulasaraan	Orang	-	-	-
		13)	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	-	-	-
	4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			43.607.585.195	42.333.400.224	97.08 %
		1)	Penyediaan permakanan	Orang	24.645.065.852	23.972.182.402	97.27 %
		2)	Penyediaan sandang	Orang	3.398.715.054	3.349.935.448	98.56 %
		3)	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	7.570.632.706	7.056.978.519	93.22 %
		4)	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	179.001.058	176.750.366	98.74 %
		5)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	500.693.255	483.411.302	96.55 %
		6)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	7.313.477.270	7.294.142.187	99.74 %
		7)	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	-	-	-
		8)	Fasilitasipembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran. Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		9)	Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	-	-
		10)	Pemulangan ke daerah asal	Orang	-	-	-
		11)	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	-	-	-
2	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				16.596.767.755	16.094.344.550	96.97 %
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			16.596.767.755	16.094.344.550	96.97 %
		1)	Penyediaan Permakanan	Orang	3.902.487.783	3.607.723.250	92.45 %
		2)	Penyediaan Sandang	Orang	9.939.996.319	9.750.597.500	98.09 %
		3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	2.515.953.095	2.499.470.000	99.34 %
		4)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	-	-	-
		5)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	238.330.558	236.553.800	99.25 %
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	CSR oleh masyarakat dan lembaga			6.590.441.031	6.590.441.031	100.00 %
	2.	Program Rehabilitasi Sosial Kab Kota			58.182.556.349	58.182.556.349	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.7.6.2 Urusan Sosial Kabupaten/ Kota

Table IV-54
Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	ANGGARAN SPM BIDANG SOSIAL				320.833.483.158	308.635.700.934	96.20 %
1.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				58.182.556.349	54.678.930.937	93.98 %
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			44.258.730.063	43.007.241.066	97.17 %
		1)	Penyediaan permakanan	Orang	-	-	-
		2)	Penyediaan sandang	Orang	203.613.705	187.116.800	91.90 %
		3)	Penyediaan alat bantu	Orang	8.988.673.297	8.841.910.000	98.37 %
		4)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	-
		5)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	3.952.352.237	3.866.593.852	97.83 %
		6)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	-	-	-
		7)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		8)	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	-	-
		9)	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	179.775.000	179.775.000	100.00 %
		10)	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	-	-	-
		11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	-	-	-
		12)	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	30.934.315.824	29.931.845.414	96.76 %
	2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			13.923.826.286	11.671.689.871	83.83 %
		1)	Penyediaan makanan	Orang	9.659.698.363	7.762.370.846	80.36 %
		2)	Penyediaan sandang	Orang	4.264.127.923	3.909.319.025	91.68 %
		3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	-	-	-
		4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	-	-	-
		5)	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	-	-	-
2.	**ANGGARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**						
	1.	Program rehabilitasi sosial provinsi			256.060.485.778	247.366.328.966	96.60 %
	2.	CSR oleh masyarakat dan lembaga pada provinsi			6.590.441.031	6.590.441.031	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2024

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan pembaharuan pada sistem tersebut dengan tujuan agar seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.
2. Terkait dengan pengumpulan elemen data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah serta unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
3. Pada panyusunan LPPD tahun 2024 ini fokus penginputan IKK Outcome saja, selain mengakomodir elemen data Asimetris yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejatinya data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih spesifik serta meyeluruh terhadap kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Saran

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2024 ini dalam pengisian nilai capaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* mohon kiranya dapat disesuaikan dengan existing Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat secara kewenangan dan tugas fungsi Perangkat Daerah yang ada berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia.
2. Pembaharuan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang di miliki oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait dengan data Asimetris yang di laporkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semoga dapat memberikan gambaran

secara jelas kondisi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Terkait dengan sumber data yang tertuang dalam LPPD semoga dapat di jadikan basis data oleh Pemerintah Pusat dalam impelementasi kebijakan serta sasaran strategis guna mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 ini dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka menuju Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
GRHA ALI SADIKIN LANTAI 10 BALAI KOTA PROVINSI DKI JAKARTA